TAHUN
2025

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BUPATI KEBUMEN



Kebumenkab.go.id | Pemkab Kebumen | @Pemkabkebumen | @Pemkab_kebumen



BUPATI KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu ‘alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat selesai disusun tepat waktu. Penyusunan LKPJ ini merupakan amanat Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dalam beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagai wujud akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan LKPJ Bupati Kebumen Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026, sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini memuat capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen selama Tahun Anggaran 2025 meliputi urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan fungsi penunjang, unsur pendukung urusan pemerintahan dan unsur pemerintahan umum serta tugas pembantuan yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati sebagai Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas serta berpedoman pada tata cara dan mekanisme yang berlaku, dengan ini kami menyampaikan LKPJ Bupati Kebumen Tahun 2025 kepada DPRD Kabupaten Kebumen untuk dibahas dan ditelaah, guna memperoleh rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Perangkat daerah yang telah berperan aktif dalam penyusunan laporan ini, sehingga LKPJ Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat tersaji gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai capaian kinerja pemerintahan daerah, dan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kebumen pada masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyajian data dan penulisan dalam laporan ini. Besar harapan kami agar laporan ini dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan evaluasi, penyusunan perencanaan dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan kepada masyarakat pada masa yang akan datang.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kebumen, 25 Maret 2026

BUPATI KEBUMEN

LILIS NURYANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Dasar Hukum 2

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah 3

1.2.1 Visi dan Misi 3

1.2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 5

1.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Daerah Tahun 2025 9

1.3 Data Umum Daerah 15

1.3.1 Data Geografis Wilayah 15

1.3.2 Jumlah Penduduk 20

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk 21

1.3.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) 22

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 24

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 26

1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan 28

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **30**

2.1 Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah 31

2.2 Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah 32

2.3 Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah 35

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH **36**

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 36

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 36
1. Urusan Pendidikan 36
2. Urusan Kesehatan 54
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 98
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 120
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 129
6. Urusan Sosial 151
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 170
1. Urusan Tenaga Kerja 170
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 184
3. Urusan Pangan 196
4. Urusan Pertanahan 211
5. Urusan Lingkungan Hidup 216
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .. 236
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 248
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . 262
9. Urusan Perhubungan 274
10. Urusan Komunikasi dan Informatika 287
11. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 298
12. Urusan Penanaman Modal 308
13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 319
14. Urusan Statistik 327
15. Urusan Persandian 331
16. Urusan Kebudayaan 336
17. Urusan Perpustakaan 345
18. Urusan Kearsipan 351

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan 359
1. Urusan Kelautan dan Perikanan 359
2. Urusan Pariwisata 372
3. Urusan Pertanian 385
4. Urusan Energi Sumber Daya Mineral 402
5. Urusan Perdagangan 405
6. Urusan Perindustrian 420
7. Urusan Transmigrasi 427
3.1.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 431
1. Fungsi Perencanaan 431
2. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 449
3. Fungsi Keuangan 464
4. Fungsi Pengawasan 479
3.1.5 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 493
1. Sekretariat DPRD 493
2. Sekretariat Daerah 509
3.1.6 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum 526
1. Kesatuan Bangsa dan Politik 526
3.1.7 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan 545
1. Kecamatan Adimulyo 546
2. Kecamatan Alian 556
3. Kecamatan Ambal 568
4. Kecamatan Ayah 578
5. Kecamatan Bonorowo 589
6. Kecamatan Buayan 600
7. Kecamatan Buluspesantren 612
8. Kecamatan Gombong 622
9. Kecamatan Karanganyar 635
10. Kecamatan Karanggayam 648

11. Kecamatan Karangsambung 661
12. Kecamatan Kebumen 674
13. Kecamatan Klirong 687
14. Kecamatan Kutowinangun 700
15. Kecamatan Kuwarasan 712
16. Kecamatan Mirit 724
17. Kecamatan Padureso 736
18. Kecamatan Pejagoan 747
19. Kecamatan Petanahan 760
20. Kecamatan Poncowarno 773
21. Kecamatan Prembun 785
22. Kecamatan Puring 798
23. Kecamatan Rowokele 811
24. Kecamatan Sadang 822
25. Kecamatan Sempor 834
26. Kecamatan Sruweng 846

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan 859

3.2.1 Arah Kebijakan Kabupaten Kebumen 940

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 940
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025 942

3.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah 942

3.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen 943

3.2.4 Inovasi Daerah 945

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2024 957

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 977

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan 977

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya 978

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat atasnya.....979

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian 980

BAB V PENUTUP 981

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 6

Tabel I.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 8

Tabel I.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2025 12

Tabel I.4 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen Tahun 2025 16

Tabel I.5 Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen (mdpl) 17

Tabel I.6 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 18

Tabel I.7 Persebaran Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen 19

Tabel I.8 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025 20

Tabel I.9 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025 21

Tabel I.10 Jumlah Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 22

Tabel I.11 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025* (*unaudited*) 25

Tabel I.12 Realisasi Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (*unaudited*) 27

Tabel I.13 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (*unaudited*) 29

Tabel II.1 Perubahan Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (*unaudited*) 32

Tabel II.2 Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (*unaudited*) 34

Tabel II.3 Perubahan Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (*unaudited*) 35

Tabel III.1 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 37

Tabel III.2 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 53

Tabel III.3 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 57

Tabel III.4 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 79

Tabel III.5 Target dan Capaian Dari Indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Tahun 2025 79

Tabel III.6 Realisasi Kinerja BLUD RSUD Dr. Soedirman Kebumen Tahun Anggaran 2025 82

Tabel III.7 Realisasi Kinerja BLUD RSUD Prembun Kebumen Tahun Anggaran 2025 90
Tabel III.8 Kinerja Puskesmas BLUD Kebumen Tahun 2025 97
Tabel III.9 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 99
Tabel III.10 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 116
Tabel III.11 Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 117
Tabel III.12 Data Penunjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 118
Tabel III.13 Persentase Pelayanan Air Bersih Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 119
Tabel III.14 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2025 121
Tabel III.15 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 128
Tabel III.16 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 130
Tabel III.17 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 149
Tabel III.18 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2025 152
Tabel III.19 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 170
Tabel III.20 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2025 172
Tabel III.21 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 184
Tabel III.22 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025 186
Tabel III.23 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 196
Tabel III.24 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 198
Tabel III.25 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 211
Tabel III.26 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 212
Tabel III.27 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 213
Tabel III.28 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2025 217

Tabel III.29 Tujuan dan Sasaran Urusan Lingkungan Hidup 233
Tabel III.30 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 234
Tabel III.31 Realisasi IKA, IKU dan IKTL Kabupaten Kebumen 235
Tabel III.32 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2025 237
Tabel III.33 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 247
Tabel III.34 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 249
Tabel III.35 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 261
Tabel III.36 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2025 263
Tabel III.37 Indikator Kinerja Urusan Tahun 2025 273
Tabel III.38 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 275
Tabel III.39 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 286
Tabel III.40 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025 288
Tabel III.41 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 297
Tabel III.42 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 299
Tabel III.43 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 307
Tabel III.44 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 309
Tabel III.45 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 318
Tabel III.46 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Tahun 2025 321
Tabel III.47 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 326
Tabel III.48 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2025 328
Tabel III.49 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 330
Tabel III.50 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 332
Tabel III.51 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Persandian di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 335

Tabel III.52 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 337
Tabel III.53 Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2025 341
Tabel III.54 Capaian Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2021-2025 342
Tabel III.55 Indikator Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2021-2025 342
Tabel III.56 Indikator Persentase Kesenian yang Dikembangkan Tahun 2021-2025 344
Tabel III.57 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 346
Tabel III.58 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 350
Tabel III.59 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan 351
Tabel III.60 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 352
Tabel III.61 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 357
Tabel III.62 Perkembangan Penerapan Arsip Baku Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2025 358
Tabel III.63 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 360
Tabel III.64 Capaian Kinerja Urusan Perikanan Dan Kelautan 371
Tabel III.65 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Urusan Perikanan dan Kelautan 371
Tabel III.66 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2025 373
Tabel III.67 Indikator Kontribusi Pendapatan Pariwisata Terhadap PAD 383
Tabel III.68 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 386
Tabel III.69 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 401
Tabel III.70 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan ESDM Kabupaten Kebumen Tahun 2025 403
Tabel III.71 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 404
Tabel III.72 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 406
Tabel III.73 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 419
Tabel III.74 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 421
Tabel III.75 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 426

Tabel III.76 Capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2025 428
Tabel III.77 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 430
Tabel III.78 Target Transmigran Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 430
Tabel III.79 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Perencanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 432
Tabel III.80 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perencanaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 448
Tabel III.81 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 451
Tabel III.82 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 462
Tabel III.83 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 465
Tabel III.84 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Keuangan) di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 478
Tabel III.85 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 480
Tabel III.86 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Pengawasan) di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 492
Tabel III.87 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 494
Tabel III.88 Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 508
Tabel III.89 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 510
Tabel III.90 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 526
Tabel III.91 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025 528
Tabel III.92 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Unsur Pemerintahan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 544
Tabel III.93 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 547
Tabel III.94 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 557
Tabel III.95 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 569
Tabel III.96 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 579
Tabel III.97 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2025 590

Tabel III.98 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 601

Tabel III.99 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025 613

Tabel III.100 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025 624

Tabel III.101 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2025 636

Tabel III.102 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025..... 649

Tabel III.103 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025..... 662

Tabel III.104 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025..... 675

Tabel III.105 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025 688

Tabel III.106 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2025 701

Tabel III.107 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 713

Tabel III.108 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025 725

Tabel III.109 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025..... 737

Tabel III.110 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2025..... 749

Tabel III.111 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025..... 761

Tabel III.112 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 774

Tabel III.113 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025 786

Tabel III.114 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025..... 800

Tabel III.115 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2025 812

Tabel III.116 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025..... 823

Tabel III.117 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025 835

Tabel III.118 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2025..... 847

Tabel III.119 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan 859

Tabel III.120 Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023 dan Target Tahun 2024-2025.....941
Tabel III.121 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2024 dan Rencana Tindak Lanjut 957
Tabel IV.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya.....978
Tabel IV.2 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2025.....979

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen 15

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah secara berkesinambungan menetapkan dan melaksanakan kebijakan strategis pembangunan daerah yang dirancang untuk memberikan arah dan strategi yang terukur, efektif, serta efisien dalam upaya mencapai tujuan utama pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan pembangunan yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan selanjutnya diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang mencerminkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, capaian kinerja pembangunan tersebut perlu dievaluasi dan dilaporkan secara akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada para pemangku kepentingan.

LKPJ Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya. Penyusunan LKPJ ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026, sehingga capaian kinerja yang dilaporkan merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis.

Keterbukaan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta pencapaian kinerja Kepala Daerah dalam periode tertentu merupakan perwujudan akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Hal tersebut sekaligus menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran daerah yang dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui perangkat daerah disajikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025, yang juga berfungsi sebagai

bahan pengawasan dan evaluasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Daerah.

1.1 Dasar Hukum

Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025; dan
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah **"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat"**.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera : Suatu perwujudan kondisi keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi;

Mandiri : Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, sehingga mandiri diterjemahkan sebagai perekonomian yang berpihak pada masyarakat, ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya sarana

dan prasarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi;

Berakhlak : Pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius, tanpa kehilangan kepribadian budaya, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman, dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter;

Bersama Rakyat : Masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Misi Pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Kabupaten Kebumen terbagi dalam 5 (lima) sasaran yaitu:

a) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi;
b) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

c) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agro bisnis dan ekonomi kerakyatan;
d) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
e) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

1.2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Selanjutnya Rumusan strategi disusun menjadi langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Dan Strategi Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
Misi 1: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi					
1.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik
		1.2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	2	Konsolidasi aparatur dan lembaga pelayanan publik
		1.3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	3	Integrasi aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah dan penertiban administrasi aset daerah
Misi 2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya					
1.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	1	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan kesehatan
		1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	2	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan pendidikan
		1.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	3	Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak
Misi 3: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan					
1.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	1.1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	1	Peningkatan nilai tambah dan kualitas sarana-prasarana pertanian
		1.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder		
		1.3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	2	Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya
		1.4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	3	Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
2.	Meningkatkan pemerataan pembangunan	2.1	Berkurangnya penduduk miskin	1	Penurunan kemiskinan
		2.2	Berkurangnya pengangguran	2	Penurunan pengangguran
Misi 4: Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan					
1.	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan serta infrastruktur prioritas lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi
		1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	2	Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat					
1.	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	1.1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	1	Penjagaan kesatuan bangsa
		1.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	2	Pelestarian cagar budaya
2.	Mewujudkan kondusitivas wilayah	2.1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	1	Penurunan tindakan kriminal masyarakat
		2.2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	2	Peningkatan desa tangguh bencana

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

Tabel I.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan					
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan *opengov* dan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan adaptif bencana	Pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian dan pertanian serta peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas sumber daya manusia	Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia	Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia	Pemantapan sektor pertanian, industri dan jasa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta didukung sumber daya manusia yang berdaya saing

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

1.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Daerah Tahun 2025

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yaitu “Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia” yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah sebagaimana berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif;
3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat.

Penjabaran lebih lanjut dari 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 akan dicapai melalui fokus pada upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan melalui upaya:
    a. peningkatan tata kelola organisasi dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan;
    b. peningkatan pengelolaan data pembangunan penerapan merit sistem dalam rangka peningkatan manajemen sumber daya aparatur pemerintah;
    c. optimalisasi pengendalian pembangunan, pengelolaan dan analisis data serta pengembangan riset dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan;
    d. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah; serta
    e. optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang andal dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif dilakukan melalui upaya:
    a. peningkatan mutu dan layanan kesehatan dan implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
    b. peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat serta kesehatan ibu dan anak;
    c. peningkatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka pencapaian SPM Kesehatan;
    d. peningkatan akses layanan pendidikan inklusif dan penerapan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pendidikan;
    e. dukungan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yaitu Wajib Belajar 13 Tahun pada 1 tahun usia pra sekolah serta pendidikan kesetaraan dengan fokus Pusat Kegiatan Belajar Mengajar sebagai ujung tombak penanganan anak tidak sekolah;
    f. peningkatan kualitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan;
    g. penguatan pendidikan agama, karakter, dan budi pekerti; serta
    h. peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan Kebumen layak anak.

3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dilakukan melalui upaya:
    a. pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;
    b. peningkatan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industri;
    c. pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor jasa;
    d. pengembangan keanekaragaman budaya, hayati, dan geologi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
    e. peningkatan efisiensi perdagangan dalam rangka pengendalian harga;
    f. peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
    g. peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta optimalisasi pemanfaatan lahan pangan lestari dalam rangka penguatan ketahanan pangan;

h. peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan; serta
i. peningkatan perlindungan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal.

4. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
   a. pengembangan sistem dan jaringan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
   b. optimalisasi sistem jaringan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan layanan air bersih;
   c. pengembangan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hunian masyarakat;
   d. peningkatan upaya konservasi dalam rangka pelestarian lingkungan; dan
   e. penataan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan serta limbah dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat dilakukan melalui upaya:
   a. penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini;
   b. peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkades serentak tahun 2025 dalam rangka penguatan demokrasi;
   c. penguatan kapasitas Desa Tangguh Bencana dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan bencana; dan
   d. pengembangan dan pelestarian budaya dalam rangka peningkatan optimalisasi nilai-nilai budaya masyarakat.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 juga telah selaras dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun Nasional Tahun 2025. Secara lengkap keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen. Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel I.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
Prioritas 1 Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	**Prioritas 4** Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	**Prioritas Nasional 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. **Prioritas Nasional 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. **Prioritas Nasional 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas. **Prioritas Nasional 7** Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan penyelundupan
Prioritas 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif.	**Prioritas 2** Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	**Prioritas Nasional 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
		peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
Prioritas 3 Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.	**Prioritas 1** Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas.	**Prioritas Nasional 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. **Prioritas Nasional 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. **Prioritas Nasional 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas. **Prioritas Nasional 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. **Prioritas Nasional 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
		Prioritas Nasional 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan penyelundupan
Prioritas 4 Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.	**Prioritas 1** Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas. **Prioritas 3** Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan.	**Prioritas Nasional 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru **Prioritas Nasional 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Prioritas 5 Peningkatan kondusifitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat.	**Prioritas 2** Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata. **Prioritas 4** Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.	**Prioritas Nasional 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. **Prioritas Nasional 5** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. **Prioritas Nasional 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sumber: Bapperida Kab. Kebumen. Bappeda Prov. Jateng dan Bappenas. 2025

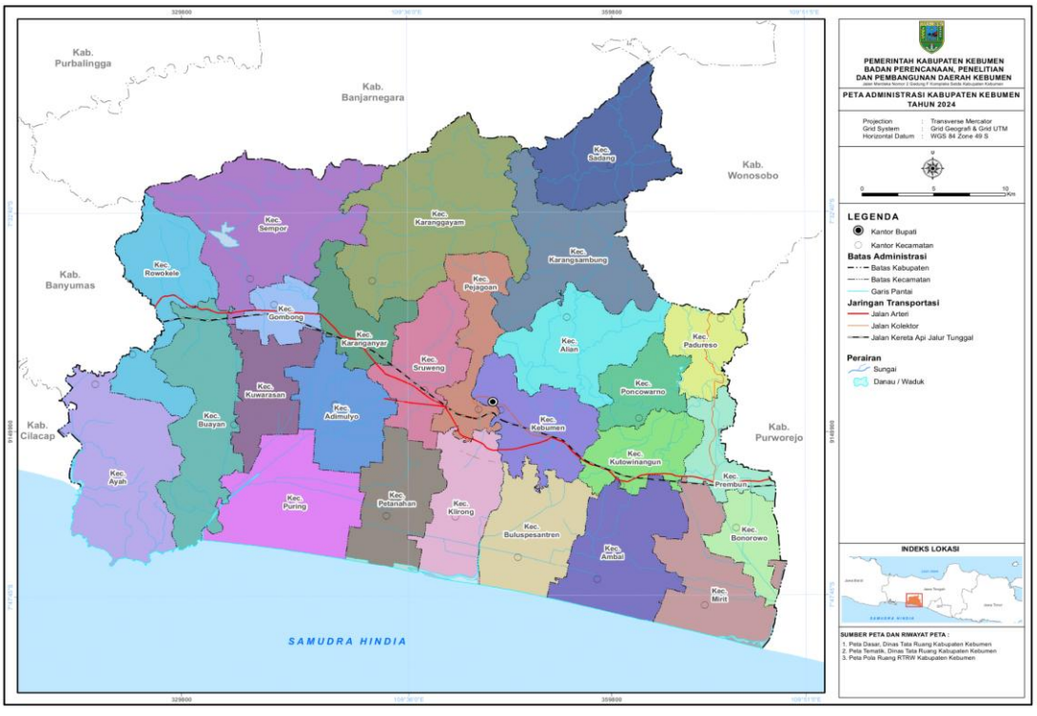
Pelaksanaan dari Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Kebumen.

1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa dengan luas wilayah sekitar 133.409 hektar atau 1.334,09 kilometer persegi. Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di antara 7º27'-7º50' Lintang Selatan dan 109º33'-109º50' Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan (Gambar 1.1):

- Sebelah timur Kabupaten Purworejo dan Wonosobo
- Sebelah selatan Samudra Hindia
- Sebelah barat Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta
- Sebelah utara Kabupaten Banjarnegara



Gambar I.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah, yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.949 dan 6.818 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km2 atau 8,53% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km.

Tabel I.4 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
1	Ayah	18	0	82	416
2	Buayan	20	0	90	346
3	Puring	23	0	99	320
4	Petanahan	21	0	80	269
5	Klirong	24	0	101	305
6	Buluspesantren	21	0	89	290
7	Ambal	32	0	116	313
8	Mirit	22	0	69	266
9	Bonorowo	11	0	42	139
10	Prembun	13	0	40	139
11	Padureso	9	0	23	85
12	Kutowinangun	19	0	80	245
13	Alian	16	0	73	286
14	Poncowarno	11	0	34	99
15	Kebumen	24	5	142	614
16	Pejagoan	13	0	68	266
17	Sruweng	21	0	99	348
18	Adimulyo	23	0	81	231
19	Kuwarasan	22	0	86	248
20	Rowokele	11	0	61	327
21	Sempor	16	0	78	377
22	Gombong	12	2	82	294
23	Karanganyar	7	4	60	243
24	Karanggayam	19	0	76	404
25	Sadang	7	0	37	151
26	Karangsambung	14	0	64	267

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Kebumen cukup bervariasi mulai dari pesisir pantai, dataran rendah, perbukitan, sampai dataran tinggi dengan ketinggian berkisar 0-997,5 mdpl. Ketinggian beberapa wilayah kecamatan dari permukaan laut di Kabupaten Kebumen ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel I.5 Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen (mdpl)

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	TINGGI (meter)
1	Ayah	Demangsari	9,00
2	Buayan	Buayan	14,00
3	Puring	Sitiadi	16,00
4	Petanahan	Petanahan	6,00
5	Klirong	Klirong	18,00
6	Buluspesantren	Setrojenar	17,00
7	Ambal	Ambalresmi	18,00
8	Mirit	Mirit	6,00
9	Bonorowo	Bonorowo	13,00
10	Prembun	Prembun	14,00
11	Padureso	Padureso	220,00
12	Kutowinangun	Kutowinangun	17,00
13	Alian	Krakal	39,00
14	Poncowarno	Poncowarno	21,00
15	Kebumen	Kebumen	27,00
16	Pejagoan	Pejagoan	22,00
17	Sruweng	Sruweng	18,00
18	Adimulyo	Adimulyo	12,00
19	Kuwarasan	Kuwarasan	12,00
20	Rowokele	Rowokele	13,00
21	Sempor	Sempor	29,00
22	Gombong	Gombong	26,00
23	Karanganyar	Karanganyar	20,00
24	Karanggayam	Karanggayam	32,00
25	Sadang	Sadang	97,00
26	Karangsambung	Karangsambung	54,00

Sumber: Kabupaten Kebumen dalam Angka, Tahun 2025

Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 6 tingkatan, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel I.6 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0-7 meter	26.378,15	20,59
2	7-18 meter	22.163,28	17,30
3	18-25 meter	15.360,36	11,69
4	25-100 meter	23.316,29	18,20
5	100-500 meter	40.111,17	31,31
6	500-997,5 meter	781,71	0,61

Sumber: Kabupaten Kebumen dalam Angka, Tahun 2025

Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu:

1. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar 52,26%;
2. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
3. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 hektar atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.

Secara hidrogeologis, sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan, air tanah, dan mata air.

1. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Air permukaan secara umum dipengaruhi oleh kondisi topografi, geomorfologi, curah hujan, geologi dan struktur tanah. Sistem hidrologi air permukaan di Kabupaten Kebumen di kontrol oleh Waduk Wadas Lintang dan beberapa jaringan sungai yang masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Kabupaten Kebumen terdapat Empat DAS utama yaitu:
    a) DAS Ijo (melewati kecamatan Rowokele, Buayan, dan Ayah);

b) DAS Lukulo (melewati kecamatan Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Sruweng, Pejagoan Kebumen, Kutowinangun, Poncowarno, Alian, Karangsambung, Karanggayam, dan Sadang);
c) DAS Telomoyo (melewati kecamatan Karanggayam, Sempor, Rowokele, Buayan, Gombong, Karanganyar, Sruweng, Pejagoan, Adimulyo, Kuwarasan, Petanahan, Puring, dan Ayah); dan
d) DAS Wawar (melewati kecamatan Padureso, Prembun, Bonorowo, Mirit, Ambal, Buluspesantren, Kutowinangun, Poncowarno, dan Alian)

2. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Salah satu jenis air tanah dalam adalah Cekungan Air Tanah. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang meliputi cekungan air tanah Banyumudal, cekungan air tanah Kebumen Purworejo dan cekungan air tanah Kroya.

Tabel I.7 Persebaran Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen

No	Cekungan Air Tanah	Lokasi
1	Cekungan Air Tanah Banyumundal	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.
2	Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo	Sebagian wilayah Kecamatan Gombong, Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.
3	Cekungan Air Tanah Kroya	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.

Sumber: RKPD Kabupaten Kebumen, 2025

3. Mata air adalah sebuah keadaan alami di mana air tanah mengalir keluar dari akuifer menuju permukaan tanah. Mata air merupakan bagian dari hidrosfer. Mata air dapat terjadi karena air permukaan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air tanah kemudian mengalir melalui retakan dan celah di dalam tanah yang dapat berupa celah kecil sampai gua bawah tanah. Air tersebut pada akhirnya akan menyembur keluar dari bawah tanah menuju permukaan dalam bentuk mata air. Keluarnya

air menuju permukaan tanah, dapat merupakan akibat dari akuifer terbatas, dimana permukaan air tanah berada di elevasi yang lebih tinggi dari tempat keluar air.

1.3.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 Semester 2 tercatat sebanyak 1.453.417 jiwa, tumbuh sebesar 0,45% dari tahun 2024 Semester 2. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester 2, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 736.988 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 716.429 jiwa. Adapun secara terperinci jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis kelamin tahun 2025 Semester 2 sebagaimana data berikut ini:

Tabel I.8 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (Jiwa)	%
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Ayah	34.948	50,64	34.062	49,36	69.010	4,75
2	Buayan	36.019	51,03	34.569	48,97	70.588	4,86
3	Puring	34.500	50,71	33.529	49,29	68.029	4,68
4	Petanahan	32.652	50,61	31.865	49,39	64.517	4,44
5	Klirong	34.506	50,69	33.565	49,31	68.071	4,68
6	Buluspesantren	32.032	50,88	30.926	49,12	62.958	4,33
7	Ambal	34.123	50,81	33.029	49,19	67.152	4,62
8	Mirit	29.116	50,71	28.299	49,29	57.415	3,95
9	Prembun	15.333	50,21	15.207	49,79	30.540	2,10
10	Kutowinangun	25.810	50,70	25.100	49,30	50.910	3,50
11	Alian	36.766	50,97	35.361	49,03	72.127	4,96
12	Kebumen	69.643	50,59	68.006	49,41	137.649	9,47
13	Pejagoan	29.748	50,90	28.691	49,10	58.439	4,02
14	Sruweng	32.892	50,47	32.275	49,53	65.167	4,48
15	Adimulyo	19.717	49,98	19.735	50,02	39.452	2,71
16	Kuwarasan	27.509	51,00	26.428	49,00	53.937	3,71
17	Rowokele	27.507	50,51	26.950	49,49	54.457	3,75
18	Sempor	37.520	50,81	36.330	49,19	73.850	5,08
19	Gombong	25.304	49,82	25.483	50,18	50.787	3,49
20	Karanganyar	19.442	50,40	19.133	49,60	38.575	2,65
21	Karanggayam	32.487	51,15	31.030	48,85	63.517	4,37
22	Sadang	12.523	51,40	11.840	48,60	24.363	1,68
23	Bonorowo	11.695	50,87	11.295	49,13	22.990	1,58
24	Padureso	8.968	50,46	8.806	49,54	17.774	1,22
25	Poncowarno	10.159	50,80	9.840	49,20	19.999	1,38

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah (Jiwa)	%
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%		
26	Karangsambung	26.069	50,97	25.075	49,03	51.144	3,52
Jumlah		**736.988**	**50,71**	**716.429**	**49,29**	**1.453.417**	**100,00**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Kecamatan Kebumen merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk yang terbesar dengan jumlah 137.649 jiwa atau 9,47% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Kebumen, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil adalah Kecamatan Padureso dengan jumlah penduduk sebanyak 17.774 jiwa atau 1,22% dari jumlah penduduk Kabupaten Kebumen.

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Angka Pertambahan Penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya, Secara rinci data pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.9 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk Sekarang		Jumlah Penduduk TahunSebelum		Angka Pertumbuhan Penduduk
	Kode	Nama	Jiwa	%	Jiwa	%	
1	33.05.01	Ayah	69,010	4.75	68,627	4.74	0.55
2	33.05.02	Buayan	70,588	4.86	70,184	4.85	0.57
3	33.05.03	Puring	68,029	4.68	67,646	4.68	0.56
4	33.05.04	Petanahan	64,517	4.44	64,133	4.43	0.60
5	33.05.05	Klirong	68,071	4.68	67,837	4.69	0.34
6	33.05.06	Buluspesantren	62,958	4.33	62,523	4.32	0.69
7	33.05.07	Ambal	67,152	4.62	66,910	4.62	0.36
8	33.05.08	Mirit	57,415	3.95	56,981	3.94	0.76
9	33.05.09	Prembun	30,540	2.10	30,427	2.10	0.37
10	33.05.10	Kutowinangun	50,910	3.50	50,629	3.50	0.55
11	33.05.11	Alian	72,127	4.96	71,633	4.95	0.68
12	33.05.12	Kebumen	137,649	9.47	137,292	9.49	0.26
13	33.05.13	Pejagoan	58,439	4.02	58,121	4.02	0.54
14	33.05.14	Sruweng	65,167	4.48	64,953	4.49	0.33
15	33.05.15	Adimulyo	39,452	2.71	39,342	2.72	0.28
16	33.05.16	Kuwarsan	53,937	3.71	53,651	3.71	0.53
17	33.05.17	Rowokele	54,457	3.75	54,249	3.75	0.38
18	33.05.18	Sempor	73,850	5.08	73,595	5.09	0.35
19	33.05.19	Gombong	50,787	3.49	50,869	3.52	-0.16

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk Sekarang		Jumlah Penduduk TahunSebelum		Angka Pertumbuhan Penduduk
	Kode	Nama	Jiwa	%	Jiwa	%	
20	33.05.20	Karanganyar	38,575	2.65	38,690	2.67	-0.30
21	33.05.21	Karanggayam	63,517	4.37	63,190	4.37	0.51
22	33.05.22	Sadang	24,363	1.68	24,199	1.67	0.67
23	33.05.23	Bonorowo	22,990	1.58	22,887	1.58	0.45
24	33.05.24	Padureso	17,774	1.22	17,592	1.22	1.02
25	33.05.25	Poncowarno	19,999	1.38	19,850	1.37	0.75
26	33.05.26	Karangsambung	51,144	3.52	50,823	3.51	0.63
Jumlah			**1,453,417**	**100.00**	**1,446,833**	**100.00**	**0.45**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel 1.9 menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Semester 2 adalah sebesar 0,45%. Data ini merupakan data hasil pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Dengan angka pertumbuhan tersebut di atas perlu diperhatikan adanya kemungkinan terjadinya masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya.

1.3.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Mendasari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen terdiri dari 5 (lima) Badan, 15 (lima belas) Dinas, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DRPRD. Adapun jumlah ASN yang tersebar pada Perangkat Daerah tersebut sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel I.10 Jumlah Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	Perangkat Daerah	Rincian ASN			TOTAL
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	18	22	47
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	14	7	28
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	21	9	37
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	20	18	56	94

NO	Perangkat Daerah	Rincian ASN			TOTAL
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
5.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	7	33	11	51
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5	20	4	29
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	21	13	41
8.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	34	1590	307	1931
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	23	9	38
10.	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	12	33	88	133
11.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7	12	32	51
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18	35	139	192
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	21	10	37
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	15	5	23
15.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	12	7219	497	7728
16.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11	23	75	109
17.	Dinas Pertanian dan Pangan	8	115	81	204
18.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	9	14	59	82
19.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	12	12	31
20.	Dinas Tenaga Kerja	6	30	11	47
21.	Inspektorat Daerah	8	53	10	71
22.	Kecamatan Adimulyo	6	3	8	17
23.	Kecamatan Alian	6	3	7	16
24.	Kecamatan Ambal	4	3	8	15
25.	Kecamatan Ayah	6	3	9	18

NO	Perangkat Daerah	Rincian ASN			TOTAL
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
26.	Kecamatan Bonorowo	6	2	8	16
27.	Kecamatan Buayan	5	3	10	18
28.	Kecamatan Buluspesantren	6	3	6	15
29.	Kecamatan Gombong	14	3	12	29
30.	Kecamatan Karanganyar	23	3	14	40
31.	Kecamatan Karanggayam	5	3	8	16
32.	Kecamatan Karangsambung	8	2	8	18
33.	Kecamatan Kebumen	27	2	19	48
34.	Kecamatan Klirong	6	3	4	13
35.	Kecamatan Kutowinangun	5	2	6	13
36.	Kecamatan Kuwarasan	7	3	6	16
37.	Kecamatan Mirit	6	3	7	16
38.	Kecamatan Padureso	4	3	5	12
39.	Kecamatan Pejagoan	6	3	7	16
40.	Kecamatan Petanahan	6	3	9	18
41.	Kecamatan Poncowarno	6	3	5	14
42.	Kecamatan Prembun	6	3	6	15
43.	Kecamatan Puring	7	3	7	17
44.	Kecamatan Rowokele	8	3	8	19
45.	Kecamatan Sadang	6	3	9	18
46.	Kecamatan Sempor	6	3	8	17
47.	Kecamatan Sruweng	4	3	8	15
48.	Satuan Polisi Pamong Praja	12	44	47	103
49.	Sekretariat Daerah	20	61	75	156
50.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7	4	14	25
	JUMLAH	445	9.523	1.805	11.773

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. 2025

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Perkembangan realisasi pendapatan dapat dilihat melalui perbandingan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2024 (*audited*) dengan 2025 (*unaudited*), dimana mengalami penurunan sebesar 2,25%. Pada tahun 2024 (*audited*) realisasi pendapatan sebesar Rp. 3.137.694279.634,00 dan di tahun 2025 (*unaudited*) realisasi pendapatan sebesar Rp.

3.069.382.617.300,00, penurunan tersebut disebabkan adanya efisiensi Anggaran Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat mendasari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dari sisi capaian realisasi pendapatan tahun 2025 terhadap target di tahun 2025 mencapai 102,17%, hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp.3.004.119.240.372,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.069.382.617.300,00.

Kondisi tersebut ditopang oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 580.484.058.430,00 atau tercapai 102,03% dari target sebesar Rp. 568.903.531.827.00. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp.2.488.898.558.870.00 dari anggaran sebesar Rp. 2.435.215.708.545,00 atau 102,20%.

Untuk rincian target dan realisasi pendapatan tahun 2025 (*unaudited*) dan realisasi tahun 2024 (*audited*) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.11 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025*
(*unaudited*)

NO	URAIAN	TAHUN 2025*			TAHUN 2024 (Audited)
		TARGET (%)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp.)
	PENDAPATAN	**3.004.119.240.372**	**3.069.382.617.300**	**102,17**	**3.137.694.279.634**
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
	Pajak Daerah	232.526.294.000	222.396.578.469	95,64	139.432/389.479
	Retribusi Daerah	303.068.953.000	319.213.411.905	105,32	33.229.154.159
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.427.594.405	24.341.513.937	113,59	21.856.399.056
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.880.690.422	14.532.554.119	122,32	289.773.071.244
	JUMLAH (I)	**568.903.531.827**	**580.484.058.430**	**102,03**	**484.291.013.938**
2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.288.110.093.438	2.331.162.442.341	101,88	2.366.495.205.883
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.105.615.107	157.736.116.529	107,22	268.345.050.813
	JUMLAH (II)	**2.435.215.708.545**	**2.488.898.558.870**	**102,20**	**2.634.840.256.696**
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**				

NO	URAIAN	TAHUN 2025*			TAHUN 2024 (Audited)
		TARGET (%)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	REALISASI (Rp.)
	Pendapatan Hibah	0	0	0,00	18.563.009.000
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0.00	0
	JUMLAH (III)	**0**	**0**	**0,00**	**18.563.009.000**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

Dari tabel diatas secara total, pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang berdampak pada penyesuaian alokasi dan skema pendapatan daerah.

Meskipun demikian, kinerja Pendapatan Asli Daerah, khususnya pajak daerah, menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi target maupun realisasi. Namun demikian, implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang masih memerlukan penyesuaian, baik dari aspek regulasi, sistem, maupun administrasi pemungutan menjadi penyebab utama realisasi pajak daerah belum sepenuhnya mencapai target.

Sementara itu, retribusi daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut didorong oleh perubahan klasifikasi pendapatan, di mana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai dicatat sebagai bagian dari retribusi daerah, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap kinerja retribusi secara keseluruhan.

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Secara umum realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen mencapai 95,10% dari pagu anggaran sebesar Rp3.182.084.932.318,00 mampu terealisasi sebesar Rp3.026.233.409.159,00. Secara umum, belanja daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika situasi, kondisi, serta pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan. Tahun 2025 juga merupakan masa transisi pergantian kepala daerah, sehingga kebijakan belanja daerah, khususnya pada APBD

Perubahan, disesuaikan untuk mendukung arah kebijakan, visi, dan misi kepala daerah terpilih. Penyesuaian tersebut berdampak pada adanya pergeseran, peningkatan, maupun penurunan pada beberapa jenis belanja.

Dari pagu anggaran belanja daerah sebesar Rp3.182.000.000.000,00 realisasi belanja mencapai Rp3.026.000.000.000,00 atau sebesar 95,10%, yang menunjukkan kinerja penyerapan anggaran secara umum tetap terjaga dengan baik di tengah proses transisi pemerintahan. Belanja Operasi sebagai komponen terbesar belanja daerah terealisasi sebesar 95,11%, didukung oleh belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang mencerminkan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Belanja Modal terealisasi sebesar 94,92% dan tetap diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta penyediaan aset daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah ke depan. Sementara itu, capaian belanja tidak terduga yang relatif rendah menunjukkan tidak adanya kebutuhan mendesak akibat keadaan darurat, serta mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, sekaligus melakukan penyesuaian kebijakan belanja secara bertahap guna mendukung implementasi visi dan misi kepala daerah terpilih pada periode pemerintahan berikutnya.

Berikut ini Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2025:

Tabel I.12 Realisasi Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (*unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	**BELANJA OPERASI**	**2.204.343.422.822**	**2.096.558.254.978**	**95,11**
1	Belanja Pegawai	1.323.212.839.150	1.250.895.562.484	94,53
2	Belanja Barang dan Jasa	791.182.457.061	758.424.174.184	95,85
3	Belanja Subsidi	1.261.000.000	1.006.285.500	79,80
4	Belanja Hibah	83.154.555.750	81.622.161.830	98,15
5	Belanja Bantuan Sosial	5.532.570.861	4.610.070.980	83,32
II	**BELANJA MODAL**	**287.770.284.496**	**273.159.208.471**	**94,92**
1	Belanja Modal Tanah	19.693.384.013	13.937.894.872	70,77
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.873.313.130	49.291.706.864	93,22
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.419.291.203	37.305.859.562	97,10
4	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	163.133.015.500	159.025.107.059	97,48
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.651.280.650	13.598.640.114	99,61
III	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**11.800.000.000**	**1.035.914.118**	**8,77**
1	Belanja Tidak Terduga	11.800.000.000	1.035.914.118	8,77

IV	**BELANJA TRANSFER**	**678.171.225.000**	**655.480.031.592**	**96,65**
1	Belanja Bagi Hasil	17.268.094.000	16.855.990.980	97,61
2	Belanja Bantuan Keuangan	660.903.131.000	638.624.040.612	96,62
BELANJA DAERAH		**3.182.084.932.318**	**3.026.233.409.159**	**95,10**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Sejalan dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025, realisasi pembiayaan daerah juga mengalami penyesuaian yang dipengaruhi oleh situasi, kondisi, serta pelaksanaan kebijakan fiskal daerah. Penyesuaian tersebut tercermin dalam adanya pergeseran, peningkatan, maupun penurunan pada beberapa pos pembiayaan.

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp187.970.000.000,00 atau sebesar 99,94% dari anggaran yang ditetapkan. Penerimaan pembiayaan tersebut terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya yang terealisasi sebesar 100%, mencerminkan ketersediaan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembiayaan kegiatan pada tahun berjalan. Selain itu, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah terealisasi sebesar 95,23%, sementara pencairan dana cadangan tidak direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 99,00% dari anggaran. Realisasi tersebut terdiri atas penyertaan modal daerah yang terealisasi penuh sebesar Rp8.000.000.000,00 sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan peran badan usaha milik daerah, serta pemberian pinjaman daerah yang terealisasi sebesar 95,23%. Adapun pembentukan dana cadangan tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Dengan demikian, pembiayaan netto Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp177.970.000.000,00 atau mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan daerah dilaksanakan secara terukur dan akuntabel, serta mendukung keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah dalam rangka menjaga stabilitas fiskal daerah, termasuk dalam masa transisi pemerintahan dan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah.

Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan sebagaimana data berikut ini:

Tabel I.13 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (*unaudited*)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
I	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**188.065.691.946,00**	**187.965.691.946,98**	**99,94**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	185.965.691.946,00	185.965.691.946,98	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2.100.000.000,00	2.000.000.000,00	95,23
II	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**10.100.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**99,00**
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00
3	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.000.000.000,00	95,23
	PEMBIAYAAN NETTO	**177.965.691.946,00**	**177.965.691.946,98**	**100,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2025 merupakan periode yang strategis sekaligus menantang bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen karena berada pada masa transisi pergantian kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah. Kondisi ini menuntut adanya kehati-hatian dan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal, sekaligus mendukung arah kebijakan dan prioritas pembangunan sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih.

Selain faktor transisi kepemimpinan daerah, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang berdampak pada penyesuaian alokasi dan ruang fiskal daerah. Kebijakan tersebut berimplikasi pada penurunan total pendapatan daerah dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga diperlukan langkah-langkah pengendalian dan penyesuaian anggaran secara cermat dan terukur.

Meskipun menghadapi tekanan fiskal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen tetap berkomitmen menjaga kualitas dan kesehatan APBD melalui pengelolaan keuangan daerah yang prudensial, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan tetap memperhatikan kesinambungan program prioritas, efektivitas belanja, dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, kebijakan penganggaran diarahkan untuk merespons dinamika pelaksanaan anggaran sepanjang tahun, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual, serta menjadi instrumen transisi yang mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dengan demikian, APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali fiskal, tetapi juga sebagai fondasi awal bagi pelaksanaan agenda pembangunan daerah pada periode pemerintahan yang baru.

2.1 Perubahan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan Pendapatan Daerah yang harus dilakukan secara optimal dan akuntabel. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu modal dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah adalah dengan peningkatan pendapatan daerah. Kemampuan keuangan daerah akan tercermin dari PAD yang diperoleh, semakin besar persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil.

Berdasarkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, total pendapatan daerah mengalami penurunan dibandingkan APBD murni. Penurunan tersebut terutama bersumber dari berkurangnya pendapatan transfer, khususnya transfer dari Pemerintah Pusat, sebagai konsekuensi dari kebijakan penyesuaian fiskal nasional. Kondisi ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah daerah dalam menyusun asumsi pendapatan agar lebih sesuai dengan potensi riil yang dapat dicapai.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan pada APBD Perubahan. Peningkatan PAD tersebut menunjukkan upaya penguatan kemandirian fiskal daerah di tengah keterbatasan pendapatan transfer. Kenaikan PAD terutama didorong oleh peningkatan target retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, seiring dengan optimalisasi layanan dan penyesuaian kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.

Sementara itu, target pajak daerah pada APBD Perubahan mengalami kenaikan, meskipun relatif terbatas. Penyesuaian ini mempertimbangkan pemberlakuan kebijakan opsen PKB dan BBNKB, yang pada tahun pertama implementasi memerlukan prinsip kehati-hatian agar penetapan target tetap realistis dan dapat dicapai.

Adapun pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terjadi penurunan alokasi pada APBD Perubahan. Penurunan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap proyeksi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kinerja keuangan yang berkembang sepanjang tahun anggaran berjalan.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan perubahan tersebut, kebijakan pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah, meningkatkan peran PAD secara

bertahap, serta menjadi fondasi awal dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala daerah yang baru tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Adapun rincian Perubahan anggaran pendapatan dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel II.1 Perubahan Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (*unaudited*)

NO	URAIAN	APBD 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
A.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**547.413.351.000,00**	**568.903.531.827,00**	**21.490.180.827,00**	**3,93**
1.	Pajak Daerah	231.279.999.000,00	232.526.294.000,00	1.246.295.000,00	0,54
2.	Retribusi Daerah	282.998.137.000,00	303.068.953.000,00	20.070.816.000,00	7,09
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.292.867.000,00	21.427.594.405,00	-3.865.272.595,00	-15,28
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	7.842.348.000,00	11.880.690.422,00	4.038.342.422,00	51,49
B.	**Pendapatan Transfer**	**2.439.923.924.000,00**	**2.426.171.963.545,00**	**-13.751.960.455,00**	**-0,56**
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.329.929.911.000,00	2.287.320.348.438,00	-42.609.562.562,00	,1,83
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.994.013.000,00	138.851.615.107,00	28.857.602.107,00	26,24
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**15.253.822.000,00**	**0,00**	**-15.253.822.000,00**	**-100,00**
1.	Pendapatan Hibah	15.253.822.000,00	0,00	-15.253.822.000,00	-100,00
Pendapatan Daerah		**3.002.591.097.000,00**	**2.995.075.495.372,00**	**-7.515.601.628,0**	**-0.25**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

2.2 Perubahan Pengelolaan Belanja Daerah

Secara keseluruhan, belanja daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBD murni. Kenaikan tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik, mendorong pembangunan infrastruktur prioritas, serta mengantisipasi kebutuhan mendesak yang berpotensi muncul selama tahun anggaran berjalan.

Belanja operasi pada APBD Perubahan mengalami penurunan dibandingkan APBD murni. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian pada belanja

pegawai dan belanja barang dan jasa, sebagai bentuk efisiensi dan pengendalian belanja rutin sejalan dengan kebijakan pengendalian belanja daerah akibat berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam pengalokasian belanja operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, pada belanja operasi terdapat peningkatan pada belanja subsidi dan belanja hibah. Peningkatan belanja subsidi dilakukan untuk mendukung kebijakan tertentu yang berdampak langsung kepada masyarakat, sedangkan peningkatan belanja hibah diarahkan untuk menunjang kegiatan lembaga, organisasi, dan pihak terkait yang memiliki peran strategis dalam mendukung program prioritas daerah. Sementara itu, belanja bantuan sosial mengalami penurunan signifikan sebagai bagian dari penajaman sasaran dan penyesuaian kebijakan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan aktual.

Belanja modal pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan APBD murni. Peningkatan belanja modal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pelayanan publik. Kenaikan terbesar terjadi pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi serta belanja modal tanah, yang diarahkan untuk mendukung konektivitas wilayah, penguatan ketahanan infrastruktur, serta mendukung arah pembangunan jangka menengah daerah.

Sementara itu, belanja tidak terduga mengalami peningkatan yang cukup besar pada APBD Perubahan. Penambahan alokasi belanja tidak terduga dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi risiko dan kejadian luar biasa yang dapat terjadi selama tahun anggaran, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah di tengah dinamika ekonomi dan kebijakan nasional.

Belanja transfer juga mengalami peningkatan pada APBD Perubahan, baik pada belanja bagi hasil maupun belanja bantuan keuangan. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal antar pemerintah daerah serta memastikan dukungan pendanaan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan keseluruhan perubahan tersebut, kebijakan belanja daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif, serta menjadi instrumen transisi yang mendukung pelaksanaan visi dan misi kepala

daerah terpilih, tanpa mengabaikan kebijakan pengendalian belanja sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Perubahan anggaran belanja selama tahun 2025 dapat dilihat pada kelompok-kelompok sebagai berikut:

Tabel II.2 Perubahan Anggaran Belanja Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (*unaudited*)

NO	URAIAN	APBD 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
I.	**Belanja Operasi**	**2.253.331.199.181,00**	**2.200.793.735.431,00**	**-52.537.463.750,00**	**-2,33**
1.	Belanja Pegawai	1.364.260.450.000,00	1.322.423.094.150,00	-41.837.355.850,00	-3,07
2.	Belanja Barang dan Jasa	792.730.683.265,00	788.422.514.670,00	-4.308.168.595,00	-0,54
3.	Belanja Subsidi	700.000.000,00	1.261.000.000,00	561.000.000,00	80,14
4.	Belanja Hibah	71.062.169.416,00	83.154.555.750,00	12.092.386.334,00	17,02
5.	Belanja Bantuan Sosial	24.577.896.500,00	5.532.570.861,00	-19.045.325.639,00	-77,49
II.	**Belanja Modal**	**177.908.722.399,00**	**282.276.226.887,00**	**104.367.504.488,00**	**58,66**
1.	Belanja Modal Tanah	5.297.788.000,00	19.783.384.013,00	14.485.596.013,00	273,43
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.050.547.599,00	54.079.233.371,00	1.028.685.772,00	1,94
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.874.687.000,00	38.329.291.203,00	-5.545.395.797,00	-12,64
4.	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	67.137.827.000,00	155.109.495.500,00	87.971.668.500,00	131,03
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.547.872.800,00	14.974.822.800,00	6.426.950.000,00	75,19
6.	Belanja Modal Aset Lainnya				
III.	**Belanja Tak Terduga**	**2.000.000.000,00**	**12.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**500,00**
1.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	12.000.000.000,00	10.000.000.000,00	500,00
IV.	**Belanja Transfer**	**656.120.073.400,00**	**677.971.225.000,00**	**21.851.151.600,00**	**3,33**
1.	Belanja Bagi Hasil	17.139.844.000,00	17.268.094.000,00	128.250.000,00	0,75
2.	Belanja Bantuan Keuangan	638.980.229.400,00	660.703.131.000,00	21.722.901.600,00	3,40
Jumlah Belanja		**3.089.359.994.980,00**	**3.173.041.187.318,00**	**83.681.192.338,00**	**2,71**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

2.3 Perubahan Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika pelaksanaan anggaran dan kebutuhan fiskal daerah pada masa transisi pemerintahan. Penerimaan pembiayaan daerah mengalami peningkatan yang bersumber utama dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, yang digunakan secara terukur untuk menjaga kesinambungan pendanaan program dan kegiatan prioritas.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan penyesuaian terutama pada penyertaan modal daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip kehati-hatian. Secara keseluruhan, pembiayaan netto pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 meningkat dan diarahkan untuk menjaga stabilitas APBD serta mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Tabel II.3 Perubahan Pembiayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (*unaudited*)

NO	URAIAN	APBD 2025		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)		
I.	**Penerimaan Pembiayaan**	**98.868.897.980,00**	**188.065.691.946,00**	**89.196.793.966,00**	**90,22**
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	96.768.897.980,00	185.965.691.946,00	89.196.793.966,00	92,18
2.	Pencairan Dana Cadangan				
3.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00
II.	**Pengeluaran pembiayaan**	**12.100.000.000,00**	**10.100.000.000,00**	**-2.000.000.000,00**	**-16,53**
1.	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-2.000.000.000,00	-20,00
2.	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00
3.	Pembentukan Dana Cadangan				
Pembiayaan Netto		**86.768.897.980,00**	**177.965.691.946,00**	**91.196.793.966,00**	**105,10**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tugas dan fungsi dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Pengelolaan Pendidikan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.1 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Pendidikan**	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Dokumen	12	12	100		
						a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100		
						b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100		
					2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	7717	7692	99,68	- Asumsi TPG Ke 13 dan THR menunggu perintah salur dari pusat - Pensiun per bulan rata-rata 30 orang atau asumsi sekitar 360 orang/tahun - Meninggal 25 orang - Asumsi gaji CPNS dan PPPK semula dihitung full 1 tahun, namun terima SK bulan Juni 2025	
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100		
				3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun**	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100		
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	25	25	100		
				a Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	12	100		
				b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	13	100		
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit	236	236	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit	234	234	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya						
						b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Kasar**	Persen	85,65	87,74	102,44		
					1		**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A**	Persen	100	100,88	100,88		
						a	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	9	9	100		
						b	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	19	19	100		
						c	Sub Kegiatan Pembinaan Minat,	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	Peserta Didik	747	747	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bakat dan Kreativitas Siswa	Akademik dan Non Akademik						
				d Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	834	834	100		
				e Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	194	194	100		
				f Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	720	720	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				g Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	747	747	100		
				h Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	838	838	100		
				i Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	68	68	100		
				j Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	366	366	100		
				k Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	2500	2487	99,48	Terdapat 13 siswa tidak mencairkan BKM karena 12 siswa mutasi ke luar daerah, 1 siswa meninggal dunia	Kembali ke Kas Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**APK SMP/MTs/Paket B**	Persen	97,74	103,3	105,69		
				a Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	11	11	100		
				b Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	25	25	100		
				c Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	3	3	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1533	1530	99,80	Terdapat 3 siswa mutasi ke luar daerah	Kembali ke Kas Daerah.
				e Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	Peserta Didik	180	180	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Akademik dan Non Akademik						
						f	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1318	1318	100		
						g	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	660	660	100		
						h	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	112	112	100		
						i	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang	Satuan Pendidikan	112	112	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				BOS Sekolah Menengah Pertama	Mengelola Dana BOS						
				j Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	56	56	100		
				k Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	112	112	100		
				l Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	12	12	100		
				3 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**	Persen	41,7	46,76	112,13		
				a Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	45	45	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	2455	2350	96	Terdapat 124 guru PAUD yang sudah tidak berhak mendapatkan jasa tenaga pendidikan karena 118 sudah mendapatkan sertifikasi dan 6 menjadi PPPK Paruh Waktu.	Kembali ke Kas Daerah.
				c Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	55	55	100		
				d Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1131	1131	100		
				e Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	32	32	100		
				g Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Siswa	37471	37471	100		
				4 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	**Persentase Pendidikan Non Formal yang terkelola**	Persen	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	150	150	100		
				b Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	Orang	41	41	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Kompetensi dan Kualifikasi						
						c	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	50	50	100		
						d	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	25	25	100		
						e	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	100		
						f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	50	50	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				g Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	1	1	100		
				h Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	4	4	100		

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga antara lain:

a) Kurangnya kompetensi guru untuk menindaklanjuti program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam (*Deep Learning*), pelajaran *coding* dan Kecerdasan Buatan memperkenalkan pelajaran *coding* dan AI dalam mempersiapkan siswa menghadapi tantangan teknologi di masa depan serta banyaknya ASN yang pensiun rata-rata per bulan 30 orang.
b) Terdapat 33 % ruang kelas SD, 27% ruang kelas SMP, 14% ruang kelas PAUD, dan 21% ruang kelas Kesetaraan yang mengalami rusak sedang atau berat yang membutuhkan penanganan segera.
c) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) capaian kurang dari target karena belum optimalnya efektivitas program perluasan akses pendidikan, perencanaan kebijakan pendidikan dan masih terdapat angka putus sekolah serta lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Terutama karena faktor ekonomi keluarga, kebutuhan bekerja di usia sekolah dan rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan. Harapan Lama Sekolah (HLS) capaian kurang dari target dikarenakan keterbatasan ekonomi keluarga, putus sekolah, kualitas pendidikan kurang, persepsi biaya pendidikan lanjutan yang masih tinggi dan rendahnya minat melanjutkan sekolah.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Mengadakan workshop, bimbingan teknis dan diklat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen maupun oleh Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan maupun Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan. Pada Tahun 2025 mengajukan formasi untuk guru maupun tenaga teknis melalui BKPSDM dan mendapatkan tambahan ASN baik guru maupun tenaga teknis sebanyak 631 orang.
b) Melaksanakan rehabilitasi dan revitalisasi baik dari APBD Kabupaten Kebumen maupun mengajukan usulan kepada

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

c) Meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan gerakan kembali bersekolah bagi anak putus sekolah dan anak tidak sekolah, memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu dan memberi kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pendidikan dengan memastikan bantuan pendidikan seperti beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar tepat sasaran agar tidak ada anak yang putus sekolah karena kendala ekonomi. Selain itu, peningkatan akses pendidikan harus terus dilakukan, pengembangan pendidikan nonformal bagi anak yang tidak dapat mengikuti jalur sekolah formal. Edukasi kepada orang tua mengenai dampak jangka panjang putus sekolah perlu ditingkatkan, termasuk upaya pencegahan pernikahan dini dan pekerja anak.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan pendidikan diketahui rata-rata capaian program adalah 101,22% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 101,70%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pendidikan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.2 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,94	8,04	7,89	98,13	8,14

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
2. Harapan lama Sekolah	Tahun	13,74	13,84	13,42	96,97	13,94
3. Persentase Capaian SPM Pendidikan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2025

Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kebumen tahun 2025 sebesar 7,89 tahun lebih rendah dibanding dengan target 2025 sebesar 8,04 tahun. Melihat tren 2 tahun kebelakang realisasi Rata-rata Lama Sekolah belum dapat memenuhi target, namun realisasinya telah mengalami tren kenaikan. Hingga 2025 realisasi Rata-rata Lama Sekolah belum dapat memenuhi target RPJMD sebesar 8,14 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kebumen tahun 2025 adalah sebesar 7,89 tahun. Angka tersebut merepresentasikan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,89 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP). Nilai tersebut masih lebih rendah dari nilai Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 8,15 tahun dan Nasional yang mencapai sebesar 9,07 tahun.

Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen tahun 2025 sebesar 13,42 tahun lebih rendah dibanding dengan target 2025 sebesar 13,84 tahun. Melihat tren 3 tahun kebelakang realisasi Harapan Lama Sekolah belum dapat memenuhi target, namun realisasinya telah mengalami tren kenaikan. Hingga 2025 realisasi Harapan Lama Sekolah belum dapat memenuhi target RPJMD sebesar 13,94 tahun.

2. Urusan Kesehatan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan rencana dan program di bidang sumber daya kesehatan, pelayanan dan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b) Perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan, pelayanan dan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c) Pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya kesehatan, pelayanan dan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d) Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan, pelayanan dan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan, pelayanan dan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD, UOBK dan UOBF pada Dinas;
g) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
h) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada perencanaan strategis yang akan dicapai maka perlu didukung oleh

program kegiatan. Adapun pelaksanaan urusan kesehatan dilaksanakan melalui 5 (lima) program antara lain :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Setiap program terdiri dari kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi satu kesatuan dalam nomenklatur kegiatan sesuai indikator sasaran dan capaian program kegiatan. Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.3 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Kesehatan**	**Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	Persen	100	100	100		
					1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	17	17	100		
						a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	100		
						b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	7	100		
					2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1886	1886	100		
						b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	13	13	100		
					3		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah SDM yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi**	Orang	80	80	100		
						a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	100	100		
					4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				f Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	11	34	309,09	Kesalahan penentuan target	
						a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	14	466,6700		
						b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20	1000		
					6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100		
						b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit	55	42	76,36		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	50	32	64	Satuan harga pajak kendaraan melebihi dari pagu anggaran, sehingga hanya bisa mencukupi 18 kendaraan dan pemerliharaan kendaraan hanya bisa mencukup 14 kendaraan	
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	6	600	Kesalahan penentuan target	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3	300		
					8		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah Kegiatan pelayanan BLUD**	Kegiatan	4	4	100		
						a	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	37	37	100		
				B			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Capaian SPM Kesehatan**	persen	100	100	100		
					1		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah paket penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara**	Paket	37	37	100		
						a	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						b	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	1	100		
						c	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	29	29	100		
						d	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	128	128	100		
						e	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang	Unit	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit						
						f	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	2	100		
						g	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	1	1	100		
					2		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase capaian layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kab/kota**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	12712	12712	100		
						b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	12712	12712	100		
						c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	12666	12666	100		
						d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	65024	65024	100		
						e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	184580	184580	100		
						f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan	Orang	593999	593999	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						
						g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	177217	177217	100		
						h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	64873	64873	100		
						i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11592	11592	100		
						j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	4781	4781	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						k	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	18571	18571	100		
						l	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	15745	15745	100		
						m	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	1	100		
						n	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	2	100		
						o	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Kesehatan Kerja dan Olahraga						
						p	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	100		
						q	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	100		
						r	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	1	100		
						s	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	100		
						t	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						u	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	100		
						v	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	1	100		
						w	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	1	100		
						x	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1	100		
						y	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	100		
						z	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	35	35	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				aa Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1	100		
				bb Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2678	3249	121,32		
				cc Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	800	890	111,25		
				dd Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	10	23	230	Status Kabupaten Kebumen sudah eliminasi malaria, sedangkan kejadian kasus malaria merupakan kasus impor	Melakukan pemetaan kasus

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						ee	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	100		
						ff	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	36	36	100		
					3		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Persentase Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi**	Persen	100	100	100		
						a	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	100		
					4		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rumah sakit yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	Unit	11	11	100		
						a	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	37	37	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				C			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi**	Persen	100	92	92	Tahun 2025 sistem uji kompetensi sudah melalui CAT oleh kemenkes, nilai tidak lulus di sebabkan karena nilai peserta di bawah 70, bisa di bawah 70 karena beberapa faktor, internet yang tidak stabil, murni hasil ujiannya.	Melakukan sosialisasi persiapan ujian kompetensi.
					1		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK**	Dokumen	2	2	100		
						a	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						b	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	100		
					2		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SDM Yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK Tingkat Daerah Kab / Kota**	Orang	250	590	236		
						a	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	484	590	121,90		
				D			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi**	Persentase	100	100	100		
					1		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,**	**Jumlah pemberian Ijin dan pengawasan apotik, toko obat, toko**	Dokumen	100	162	162		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**alat kesehatan dan optikal (UMOT)**						
						a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	1	100		
					2		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Jumlah penerbitan sertifikat PIRT sbagai izin Produksi untuk makanan minuman tertentu yg dapat diproduksi oleh RT dan pengawasan produk PIRT**	Dokumen	315	315	100		
						a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu						
				3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Jumlah kegiatan dalam rangka pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan**	Kegiatan	3	3	100		
				a Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				E			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten**	Persen	80	98,9	123,62		
					1		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persen	100	100	100		
						a	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1	100		
					2		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1	100		
				3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persen	100	100	100		
				a Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	1	100		

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

a) Terdapat beberapa fasilitas kesehatan di Kecamatan yang pelayanannya belum optimal karena kondisi bangunan mengalami kerusakan sedang hingga berat, yaitu di Puskesmas Padureso, Mirit, dan Karangsambung. Selain itu,terdapat fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi syarat pada Puskesmas Kebumen II dan Puskesmas Prembun.
b) Sistem rujukan belum terintegrasi secara optimal.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Prioritas alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur kesehatan pada Puskesmas yang rusak sedang berat dan Puskesmas yang tidak memenuhi syarat.
b) Penguatan sistem rujukan terintegrasi.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kesehatan diketahui jumlah program 5 (lima) dengan rata-rata capaian program adalah 103,12% dan jumlah kegiatan adalah 20 dengan rata-rata capaian kegiatan adalah 108,72%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen selalu menjaga dan berkomitmen untuk terus membangun bidang kesehatan secara berkelanjutan.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kesehatan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu:

a) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.

b) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan.

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.4 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Angka Harapan Hidup	Tahun	75,22	73,90	75,56	102,24	74
Persentase Capaian SPM Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel Tabel di atas menunjukkan indikator kinerja utama urusan kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup mencapai 75,56 tahun, dari target 73,90 tahun pada tahun 2025. hal ini menunjukkan peluang meningkatnya usia penduduk berumur panjang semakin baik. Presentasi capaian SPM kesehatan pada tahun 2025 mencapai 100% sesuai dengan target yang diharapkan. Capaian SPM merupakan upaya kesehatan memberikan pelayanan dasar secara minimal yang wajib diberikan kepada masyarakat melalui berbagai upaya kesehatan. Berikut adalah target dan capaian dari indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan tahun 2025.

Tabel III.5 Target dan Capaian Dari Indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12712	12712	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12712	12712	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12666	12666	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	65024	65024	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	184580	184580	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	593999	593999	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	177217	177217	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	64873	64873	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	11592	11592	100
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	4781	4781	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	18571	18571	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	15745	15745	100

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Dari Dari tabel di atas menunjukkan bahwa SPM telah mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Harapan selanjutnya adalah terus meningkatkan pelayanan dan mempertahankan upaya-upaya yang mendukung keberhasilan capaian program-program kesehatan agar tetap dapat menjangkau semua lapisan masyarakat di Kabupaten Kebumen.

6) Kinerja BLUD

Laporan Kinerja BLUD dimulai dari perjanjian kinerja BLUD yang disusun setelah DPA SKPD disahkan termasuk di dalamnya program kegiatan, sub kegiatan yang bersumber dari dana pendapatan BLUD non APBD. Selain DPA SKPD diperlukan juga Dokumen Bisnis Anggaran (DBA) BLUD sebagai lampiran dari perjanjian kinerja tersebut. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memiliki Badan Layanan Umum (BLUD) bidang kesehatan, yaitu BLUD RSUD Soedirman, BLUD RSUD Prembun dan BLUD Puskesmas yang terdiri dari 35 Puskesmas. Berikut capaian kinerja BLUD pada tahun 2025 :

1. RSUD dr. Soedirman

Capaian Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soedirman Kebumen tahun 2025 mendapatkan hasil 90,85 dengan Kategori AA, MEMUASKAN terbagi dalam skor kinerja non keuangan sebesar 74,35 dan skor kinerja keuangan sebesar 15,90. Target tahun 2025 adalah sebesar 84,85 sehingga tingkat capaian evaluasi Kinerja BLUD adalah 104,84%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BLUD telah dilaksanakan secara optimal, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kinerja, serta telah sesuai dengan prinsip tata 81ndica yang baik.

Indikator yang belum mencapai target di tahun 2025 adalah Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium, Waktu Tunggu Di Rawat Jalan dan Periode Penagihan Piutang *(Collection Period*). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan waktu tunggu di rawat jalan, antara lain dengan mengoptimalkan jadwal dokter, mengimplementasikan sistem pendaftaran online untuk mempermudah pasien dalam melakukan pendaftaran tanpa perlu antri di loket dan menyederhanakan alur pemeriksaan pasien. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan pemeriksaan laboratorium antara lain dengan melakukan evaluasi kebutuhan dan permintaan layanan Laboratorium, menganalisis data untuk melihat tren jumlah permintaan laboratorium dan menambah jenis pelayanan di Instalasi Laboratorium. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan 81ndicator periode penagihan piutang (*Collection Period*), dapat dilakukan dengan optimalisasi pengelolaan piutang dan penghapusan hutang pasien yang sudah lama dan tidak terbayar.

Berikut adalah tabel target, realisasi dan capaian kinerja BLUD RSUD Soedirman :

Tabel III.6 Realisasi Kinerja BLUD RSUD Dr. Soedirman Kebumen Tahun Anggaran 2025

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
1.	KINERJA PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN				
1.1.	KINERJA ASPEK PELAYANAN				
1.1.1	Sub Aspek Pertumbuhan dan Pembelajaran		Skor	15,2	18.45
		1. Kecukupan Sumber Daya Manusia	Skor	1.2	1.2
		2. Rata-rata jam pelatihan SDM BLUD	Skor	3	3
		3. Pelatihan 20 Jam Per Pegawai	Skor	0.5	2
		4. Petugas Layanan Gawat Darurat Bersertifikat (PGD)	Skor	0.75	0.75
		5. Program Reward and Punishment	Skor	1.5	1.5
		6. Kecukupan Sarana Medis	Skor	1	2
		7. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Skor		
		a. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	Skor	1	1
		b. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	Skor	0.5	0.5
		c. Peralatan lab dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	Skor	0.5	0.5
		8. Pengembangan SIM RS	Skor	0.75	1

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
		9. Pelayanan Administrasi Manajemen	Skor		
		a. Tindak lanjut penyesuaian hasil pertemuan direksi	Skor	0.5	0.5
		b. Kelengkapan laporan kinerja BLUD	Skor	0.5	0.5
		c. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	Skor	0.5	0.5
		d. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	Skor	0.5	0.5
		e. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	Skor	0.5	0.5
		f. Ketepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap	Skor	0.5	0.5
		g. Ketepatan waktu pemberian insentif karyawan sesuai ketentuan	Skor	0.5	0.5
		10. Kenaikan Pendapatan RSD per Pegawai	Skor	1	1.5
2.	KINERJA PERSPEKTIF PROSES LAYANAN INTERNAL				
2.1.	KINERJA ASPEK PELAYANAN				
2.1.1	Kinerja Sub Aspek Pertumbuhan Produktivitas		Skor	8.5	9.6
		1. Pertumbuhan Kunjungan Rawat Jalan	Skor	2.5	3
		2. Pertumbuhan Rata-Rata	Skor	1.6	1.6

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
		Kunjungan Gawat Darurat			
		3. Pertumbuhan Kunjungan Rawat Inap	Skor	1.6	1.6
		4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi	Skor	0.2	1
		5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium	Skor	1.2	0.8
		6. Pertumbuhan Operasi	Skor	0.6	0.8
		7. Pertumbuhan Rehab Medik	Skor	0.8	0.8
2.1.2	Kinerja Sub Aspek Efektivitas Pelayanan		Skor	16.25	17.35
		. Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	Skor	1.2	1.6
		. Pengembalian Rekam Medik	Skor	2	2
		. Angka Pembatalan Operasi	Skor	2	2
		. Angka Kegagalan Hasil Radiologi	Skor	2	2
		. Penulisan Resep Sesuai Formularium/ Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	Skor	2	2
		. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	Skor	2	2
		. Bed Occupancy Rate (BOR)	Skor	1.5	2
		. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Kritis/ Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	Skor	0.75	0.75
		. Waktu Tunggu Rawat Jalan	Skor	0.8	1
		0. Waktu Tanggap Darurat di IGD	Skor	1	1
		1. Net Death Rate	Skor	1	1

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
3.	KINERJA PERSPEKTIF PELANGGAN				
3.1.	KINERJA ASPEK MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT				
3.1.1	Sub Aspek Mutu Layanan		Skor	15.2	14,95
		1. Emergency Response Time Rate	Skor	1	1
		2. Waktu Tunggu di Rawat Jalan	Skor	1	0,75
		3. Length of Stay	Skor	1	1
		4. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	Skor	0.4	0.4
		5. Waktu Tunggu Sebelum Operasi/ Penundaan Operasi Elektif	Skor	1	1
		6. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	Skor	1	1
		7. Waktu Tunggu Hasil Radiologi	Skor	1	1
		8. Rujukan Keluar Rawat Inap	Skor	1	1
		9. Retensi Pelanggan Rawat Jalan	Skor	1	1
		10. Pasien Pulang Paksa (Pulang Atas Permintaan Sendiri)	Skor	1	1
		11. Kepatuhan Kebersihan Tangan	Skor	1	1
		12. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	Skor	0.8	0.8
		13. Kepatuhan identifikasi pasien	Skor	1	1
		14. Waktu tanggap operasi seksio caesaria emergensi	Skor	1	1
		15. Kepatuhan waktu visite dokter	Skor	1	1

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
		6. Kepatuhan terhadap alur klinis (clinical pathway)	Skor	1	1
3.1.2	Sub Aspek Mutu Klinik			6	6
		. Angka Kematian di Gawat Darurat	Skor	1	1
		. Angka Kematian/ Kebutaan > 48 Jam	Skor	1	1
		. Post Operative Death Rate	Skor	1	1
		. Angka Infeksi Nosokomial Dekubitus	Skor	0.5	0.5
		. Angka Infeksi Nosokomial Phlebitis	Skor	0.5	0.5
		. Angka Infeksi Nosokomial Saluran Kemih	Skor	0.5	0.5
		. Angka Infeksi Nosokomial Luka Operasi	Skor	0.5	0.5
		. Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit	Skor	1	1
3.1.3	Sub Aspek Kepedulian pada Masyarakat dan Pelanggan		Skor	5.8	6
		. Rasio Tempat Tidur Kelas III (RTT)	Skor	1	1
		. Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	Skor	1	1
		. Kepuasan Pasien	Skor		
		a. Kepuasan pasien dihitung dengan rumus persepsi responding	Skor	0.5	0.5
		b. Kepuasan pasien diukur dengan menggunakan indeks kepuasan masyarakat	Skor	0.5	0.5

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
		. Pembinaan Kepada Rumah Sakit Daerah dan Sarana Kesehatan Lain	Skor	1	1
		. Penyuluhan Kesehatan	Skor	1	1
		. Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	Skor	0.8	1
3.1.4	Sub Aspek Kepedulian terhadap Lingkungan		Skor	1	1
		. Pengelolaan Baku Mutu Limbah Cair	Skor		
		a. BOD	Skor	0.25	0.25
		b. COD	Skor	0.25	0.25
		c. TSS	Skor	0.25	0.25
		d. PH	Skor	0.25	0.25
3.1.5	Sub Aspek Akreditasi		Skor	1	1
	SKOR KINERJA NON KEUANGAN		Skor	68.95	74.35
4.	KINERJA DARI PERSPEKTIF KEUANGAN				
4.1	KINERJA ASPEK KEUANGAN				
4.1.1	Kinerja Sub Aspek Perolehan hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan		Skor	5.9	5.5
		. Periode Penagihan Piutang (Collection Period)	Skor	1.6	1.2
		. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	Skor	2	2
		. Perputaran Persediaan (Inventory)	Skor	0.5	0.5

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
		. Imbalan Atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)	Skor	0.8	0.8
		. Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	Skor	1	1
4.1.2	Kinerja Sub Aspek Pemenuhan kewajiban jangka pendeknya		Skor	2	3
		. Rasio Kas (Cash Ratio)	Skor	1.5	2
		. Rasio Lancar (Current Ratio)	Skor	0.5	1
			Skor		
4.1.3	Kinerja Sub Aspek Pemenuhan seluruh kewajibannya		Skor	4	4
		. Rasio Kewajiban Terhadap Aset	Skor	2	2
		. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	Skor	2	2
			Skor		
4.1.4	Kinerja Sub Aspek Kemampuan Penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran		Skor	4	4
		. Rasio Pendapatan BLUD non APBD-LO terhadap Biaya Operasional / Cost Recovery Rate	Skor	2	2
		. Porsi Pendapatan APBD- LO dibandingkan Pendapatan non APBD – LO	Skor	2	2
	SKOR KINERJA KEUANGAN		Skor	15.9	16.5

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
	TOTAL SKOR KINERJA NON KEUANGAN DAN KEUANGAN		Skor	84.85	90,85

Sumber: RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen. 2025

2. RSUD Prembun

Pada tahun 2025 RSUD Prembun menetapkan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran rumah sakit yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021- 2026 dan Renja Tahun 2025. Pada tahun 2025 RSUD Prembun mempunyai 8 (delapan) sasaran strategis. Dari 8 (delapan) sasaran strategis tersebut ditetapkan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama. Dari ketiga belas indikator kinerja utama ada 2 (dua) indikator yang belum dapat dilakukan penghitungan capaiannya karena penilaian dilakukan oleh pihak eksternal yakni Opini Laporan Keuangan dan Kinerja BLUD. (Konsultan Akuntan Publik) akan menilai Opini Laporan Keuangan, sedangkan Kinerja BLUD yang akan dinilai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen/BPKP, namun untuk Kinerja BLUD RSUD Prembun juga melakukan penilaian mandiri pada awal bulan Januari 2026.

Hasil penilaian mandiri berdasarkan Modul Penyusunan dan Penilaian Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tahun 2023 diperoleh total skor Kinerja BLUD Tahun 2025 adalah 82,95% atau masuk kategori A (sangat baik). Berikut adalah tabel penilaian kinerja BLUD RSUD Prembun.

Tabel III.7 Realisasi Kinerja BLUD RSUD Prembun Kebumen Tahun Anggaran 2025

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
1.	KINERJA PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN				
1.1.	KINERJA ASPEK PELAYANAN				
1.1.1	Sub Aspek Pertumbuhan dan Pembelajaran		skor	20	16,25
		1. Kecukupan Sumber Daya Manusia	skor	2	2
		2. Rata-rata jam pelatihan SDM BLUD	skor	3	3
		3. Pelatihan 20 Jam Per Pegawai	skor	2,5	0,75
		4. Petugas Layanan Gawat Darurat Bersertifikat (PGD)	skor	1	0,75
		5. Program *Reward and Punishment*	skor	1,5	1,5
		6. Kecukupan Sarana Medis	skor	2	1,5
		7. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	skor	2	1,90
		8. Pengembangan SIM RS	skor	1	1
		9. Pelayanan Administrasi Manajemen	skor	3,5	2,85
		10. Kenaikan Pendapatan RSD per Pegawai	skor	1,5	1
2.	KINERJA PERSPEKTIF PROSES LAYANAN INTERNAL				

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
2.1.	KINERJA ASPEK PELAYANAN				
2.1.1	Kinerja Sub Aspek Pertumbuhan Produktivitas		skor	12	8,60
		1. Pertumbuhan Kunjungan Rawat Jalan	skor	3	3
		2. Pertumbuhan Rata-Rata Kunjungan Gawat Darurat	skor	2	2
		3. Pertumbuhan Kunjungan Rawat Inap	skor	2	0,8
		4. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi	skor	1	0,4
		5. Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium	skor	2	0,8
		6. Pertumbuhan Operasi	skor	1	0,6
		7. Pertumbuhan Rehab Medik	skor	1	1
2.1.2	Kinerja Sub Aspek Efektivitas Pelayanan		skor	18	17,5
		1. Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	Skor	2	2
		2. Pengembalian Rekam Medik	Skor	2	2
		3. Angka Pembatalan Operasi	Skor	2	2
		4. Angka Kegagalan Hasil Radiologi	Skor	2	2

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
		5. Penulisan Resep Sesuai Formularium/ Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	Skor	2	2
		6. Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	Skor	2	2
		7. *Bed Occupancy Rate* (BOR)	Skor	2	1,5
		8. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium Kritis/ Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	Skor	1	1
		9. Waktu Tunggu Rawat Jalan	Skor	1	1
		10. Waktu Tanggap Darurat di IGD	Skor	1	1
		11. *Net Death Rate*	Skor	1	1
3.	KINERJA PERSPEKTIF PELANGGAN				
3.1.	KINERJA ASPEK MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT				
3.1.1	Sub Aspek Mutu Layanan		Skor	16	15,35
		1. *Emergency Response Time Rate*	Skor	1	1
		2. Waktu Tunggu di Rawat Jalan	Skor	1	0,75
		3. *Length of Stay*	Skor	1	1
		4. Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	Skor	1	0,6
		5. Waktu Tunggu Sebelum Operasi/	Skor	1	1

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
		Penundaan Operasi Elektif			
		6. Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	Skor	1	1
		7. Waktu Tunggu Hasil Radiologi	Skor	1	1
		8. Rujukan Keluar Rawat Inap	Skor	1	1
		9. Retensi Pelanggan Rawat Jalan	Skor	1	1
		10. Pasien Pulang Paksa (Pulang Atas Permintaan Sendiri)	Skor	1	1
		11.Kepatuhan Kebersihan Tangan	Skor	1	1
		12. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	Skor	1	1
		13. Kepatuhan identifikasi pasien	Skor	1	1
		14. Waktu tanggap operasi seksio caesaria emergensi	Skor	1	1
		15. Kepatuhan waktu visite dokter	Skor	1	1
		16. Kepatuhan terhadap alur klinis (*clinical pathway*)	Skor	1	1
3.1.2	Sub Aspek Mutu Klinik		Skor	6	6
		1. Angka Kematian di Gawat Darurat	Skor	1	1
		2. Angka Kematian/ Kebutaan > 48 Jam	Skor	1	1

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
		3. *Post Operative Death Rate*	Skor	1	1
		4. Angka Infeksi Nosokomial Dekubitus	Skor	0,5	0,5
		5. Angka Infeksi Nosokomial Phlebitis	Skor	0,5	0,5
		6. Angka Infeksi Nosokomial Saluran Kemih	Skor	0,5	0,5
		7. Angka Infeksi Nosokomial Luka Operasi	Skor	0,5	0,5
		8. Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit	Skor	1	1
3.1.3	Sub Aspek Kepedulian pada Masyarakat dan Pelanggan		Skor	6	5,5
		1. Rasio Tempat Tidur Kelas III (RTT)	Skor	1	1
		2. Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	Skor	1	1
		3. Kepuasan Pasien	Skor	1	1
		4. Pembinaan Kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain	Skor	1	0,75
		5. Penyuluhan Kesehatan	Skor	1	0,75
		6. Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	Skor	1	1
3.1.4	Sub Aspek Kepedulian terhadap Lingkungan		Skor	1	0,25

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
		1. Pengelolaan Baku Mutu Limbah Cair	Skor	1	0,25
3.1.5	Sub Aspek Akreditasi		Skor	1	1
	SKOR KINERJA NON KEUANGAN			80	70,45
4.	KINERJA DARI PERSPEKTIF KEUANGAN				
4.1	KINERJA ASPEK KEUANGAN				
4.1.1	Kinerja Sub Aspek Perolehan hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan		Skor	8	4,4
		1. Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*)	Skor	2	1,2
		2. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover)*	Skor	2	2
		3. Perputaran Persediaan (*Inventory)*	Skor	2	1
		4. Imbalan Atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*)	Skor	1	0
		5. Imbalan Ekuitas *(Return on Equity)*	Skor	1	0,30
4.1.2	Kinerja Sub Aspek Pemenuhan kewajiban jangka pendeknya		skor	4	1,5
		1. Rasio Kas (*Cash Ratio*)	skor	2	0
		2. Rasio Lancar *(Current Ratio)*	skor	2	0,5
4.1.3	Kinerja Sub Aspek Pemenuhan seluruh kewajibannya		Skor	4	3,5
		1. Rasio Kewajiban Terhadap Aset	skor	2	1,5

NO	PERSPEKTIF/ ASPEK/ SUB ASPEK/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ AKTIFITAS LAIN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI 2025
		2. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	Skor	2	2
4.1.4	Kinerja Sub Aspek Kemampuan Penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran		Skor	4	4
		1. Rasio Pendapatan BLUD non APBD-LO terhadap Biaya Operasional / *Cost Recovery Rate*	Skor	2	2
		2. Porsi Pendapatan APBD- LO dibandingkan Pendapatan non APBD - LO	Skor	2	2
	SKOR KINERJA KEUANGAN		Skor	20	12,50
	TOTAL SKOR KINERJA NON KEUANGAN DAN KEUANGAN		Skor	100	82,95

Sumber: RSUD Prembun Kabupaten Kebumen. 2025

2. Puskesmas

Penilaian Kinerja BLUD Puskesmas menggunakan pedoman modul penyusunan dan penilaian laporan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Kesehatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Pada dasarnya pelaporan kinerja menjelaskan realisasi pencapaian target indikator kinerja yang diterjemahkan kedalam skor pada level-level realisasi pencapaian target indikator kinerja yang sudah ditentukan. Berikut adalah daftar capain kinerja dari 35 Puskesmas BLUD di Kabupaten Kebumen yang

ditampilkan dalam bentuk tabel dengan memuat skor dan kategori pencapaian.

Tabel III.8 Kinerja Puskesmas BLUD Kebumen Tahun 2025

No	BLUD	Capaian Kinerja			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	04507-Puskesmas Ayah I	100	91.13	91.13%	Baik
2	04508-Puskesmas Ayah II	100	92,40	92.40%	Baik
3	04509-Puskesmas Buayan	100	90.75	90.75%	Baik
4	04510-Puskesmas Puring	100	94.7	94,7%	Baik
5	04511-Puskesmas Petanahan	100	95.8	95.80%	Baik
6	02512-Puskesmas Klirong I	100	96.2	96.20%	Baik
7	04513-Puskesmas Klirong II	100	94.7	94.70%	Baik
8	04514-Puskesmas Buluspesantren I	100	92.7	92.70%	Baik
9	04515-Puskesmas Buluspesantren II	100	93.05	93.05%	Baik
10	04516-Puskesmas Ambal I	100	92.15	92.15%	Baik
11	04517-Puskesmas Ambal II	100	91,10	91,10%	Baik
12	04518-Puskesmas Mirit	100	91,30	91,30%	Baik
13	04519-Puskesmas Bonorowo	100	93.05	93.05%	Baik
14	04520-Puskesmas Prembun	100	94.1	94.10%	Baik
15	04523-Puskesmas Alian	100	87,45	87,45%	Baik
16	04521-Puskesmas Padureso	100	91	91%	Baik
17	04522-Puskesmas Kutowinangun	100	98.5	98.5%	Baik
18	04524-Puskesmas Poncowarno	100	92.6	92.60%	Baik
19	04525-Puskesmas Kebumen I	100	92,15	92,15%	Baik
20	04526-Puskesmas Kebumen II	100	91,10	91,10%	Baik
21	04527-Puskesmas Kebumen III	100	93.9	93.90%	Baik
22	04528-Puskesmas Pejagoan	100	94,20	94,10%	Baik
23	0459-Puskesmas Sruweng	100	86	86%	Baik
24	04530-Puskesmas Adimulyo	100	94.6	94.60%	Baik
25	04531-Puskesmas Kuwarasan	100	99.8	99.80%	Baik
26	04532-Puskesmas Rowokele	100	96.3	96.30%	Baik
27	04533-Puskesmas Sempor I	100	95.5	97.50%	Baik
28	04534-Puskesmas Sempor II	100	93.3	93.30%	Baik
29	04535-Puskesmas Gombong I	100	94.6	94.60%	Baik
30	04536-Puskesmas Gombong II	100	90.75	90.75%	Baik
31	04537-Puskesmas Karanganyar	100	93.05	93.05%	Baik
32	04538-Puseksmas Karanggayam II	100	97.2	97.20%	Baik
33	04539-Puskesmas Karanggayam I	100	97,20	97,20	Baik

No	BLUD	Capaian Kinerja			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
34	04540-Puskesmas Sadang	100	92.65	92.65%	Baik
35	04541-Puskesmas Karangsambung	100	94.33	94.33%	Baik

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program. Adapun capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Pengembangan Sumber Daya Air (SDA).
c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
e) Program Penataan Bangunan Gedung.
f) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
g) Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
h) Program Penyelenggaraan Jalan.
i) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.9 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah**	Persen	100	105,35	105,35		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	Dokumen	31	31	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14	14	100		
				b Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17	17	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	180	180	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	30	30	100		
				3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**	Bulan	12	12	100		
				a Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100		
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				g Terpenuhinya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100		
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	160	220	137,50		
				a Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	27	33	122,22	Kendala pada sistem SIPD yang tidak bisa diubah targetnya	
				b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	133	187	155,64	Kendala pada sistem SIPD yang tidak bisa diubah targetnya	
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemeintah daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	25	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	206	206	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	69	86	124,64		
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100		
				B PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik**	Persen	85	78,85	92,76	Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak turun	Pekerjaan diprioritaskan di lokasi yang terjadi permasalahan/keru

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										untuk Bidang Irigasi TA 2025	sakan sesuai urgensitas kebutuhan penanganan
				1 **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara**	Persen	6	6	100		
				a Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	2	2	100		
				b Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1	100		
				2 **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah areal irigasi yang terlayani**	Sub Kegiatan	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	6	6	100		
				b Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	0,35	0,35	100		
				c Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	2	2	100		
				d Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	DI	30	30	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan**	Persen	23,75	25,79	108,59		
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani**	SR	76.332	93.617	122,64	Kendala pada sistem SIPD yang tidak bisa diubah targetnya sementara ada penambahan anggaran sebesar 3 milyar yang	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										menyebabkan output SR	
				a Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	184	184	100		
				b Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/ Detik	1	1	100		
				c Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/ Detik	5	5	100		
				D PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik**	Persen	19,98	16,43	82,23	Efisiensi Anggaran sehingga tidak bisa dicukupi sesuai target	Pekerjaan diprioritaskan di lokasi yang baru saja terjadi permasalahan/kerusakan sesuai urgensitas kebutuhan penanganan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah saluran drainase yang dipelihara /direhabilitasi/dibangun**	Lokasi	10	10	100		
				a Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Meter	650	678	104,31	Panjang Drainase bertambah tetapi hanya mempertahankan kondisi sehingga tidak menambah presentase drainase dalam kondisi baik	
				b Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	5	5	100		
				E PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Prosentase Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik**	Persen	83,84	85,52	102		
				1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian	**Prosentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik**	Persen	83,84	85,52	102		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							
				a Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	3	3	100		
				b Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	100	100	100		
				c Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	9	9	100		
				d Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Orang	125	200	160		
				e Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat	Dokumen	500	500	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						
				F PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani**	Persen	15	15	100		
				1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun**	Dokumen	6	9	150	Kendala pada sistem SIPD yang tidak bisa diubah targetnya	
				a Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	10	10	100		
				b Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6	9	150	Kendala pada sistem SIPD yang tidak bisa diubah targetnya	
				G PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap**	Persen	85,18	74,27	87,19	Penurunan kondisi jalan dari sedang menjadi rusak ringan yang	Dilakukan Penangan Sesuai dengan Program Prioritas kerusakan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										diakibatkan dari beberapa faktor seperti peningkatan Volume Lalu lintas, cuaca, drainase dan umur perkerasan	
				1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Panjang Jalan yang Tertangani**	Km	62	78,51	126,63	Panjang Jalan yang tertangani lebih panjang tapi sebagian besar hanya mempertahankan kondisi permukaan jalan sehingga tidak menambah prosentase jalan kondisi baik	
				a Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	22	22	100		
				b Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	0	0	0	Tukar menukar tanah wakaf untuk jembatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										klopogodo belum selesai karena belum turunnya rekomendasi tukar menukar tanah wakaf dari kanwil kemenag prov jateng sehingga anggaran dikembalikan ke kas daerah	
				c Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	38,5	44,25	114,94	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala lebih panjang tapi sebagian besar hanya mempertahankan kondisi permukaan jalan sehingga tidak menambah prosentase jalan kondisi baik	
				d Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Km	62	78,51	126,63	Monev pemeliharaan dan pembangunan jalan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Km	10	10,41	104,10		
				f Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	1	1	100		
				g Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	1	1	100		
				h Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Jembatan	6	6	100		
				i Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	1017,15	1017,15	100		
				j Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	13,5	19,43	143,93	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin lebih panjang tapi sebagian besar hanya mempertahankan kondisi permukaan jalan sehingga tidak menambah prosentase jalan kondisi baik	
				k Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	Jembatan	1	1	100		
				H PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik**	Persen	15	15	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi**	Kegiatan	2	2	100		
				a Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	50	50	100		
				b Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	20	20	100		
				2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota**	Kegiatan	62	62	100		
				a Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	1	100		
				I PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW**	Persen	91,45	91,45	100		
				1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen rekomendasi RRRW dan RRTR Kabupaten/Kota**	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	100		
				2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan RTRW dan RRTR yang dilaksanakan**	Kegiatan	12	12	100		
				a Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100		
				b Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan	2	2	100		
				3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun**	Dokumen	2	2	100		
				a Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	1	100		
				b Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	1	1	100		
				4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota**	Kegiatan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	12	12	100		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di dalam Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

a) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap memiliki target pada Tahun 2025 yaitu 85,18% dan realisasinya masih dibawah target yaitu 74,27% hal ini disebabkan karena penurunan kondisi jalan dari sedang menjadi rusak ringan atau rusak berat yang diakibatkan dari beberapa faktor seperti peningkatan beban lalu lintas, cuaca, drainase dan umur perkerasan sehingga target kemantapan jalan tidak naik signifikan.

b) Persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik memiliki target pada tahun 2025 yaitu 85% dan realisasi baru mencapai 78,55% atau belum memenuhi target, hal ini disebabkan karena adanya Efisiensi anggaran untuk pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi TA 2025.

c) Persentase drainase dalam kondisi baik memiliki target 19,98% pada tahun 2025, sedangkan realisasi 16,43% atau dengan capaian 82,23% hal tersebut disebabkan karena adanya Efisiensi Anggaran sehingga tidak bisa dicukupi sesuai target.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Memperkuat pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

b) Meningkatkan kualitas kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

c) Mengoptimalkan kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Pekerjaan Umum diketahui rata-rata capaian program adalah 97,57% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 106,94%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pekerjaan umum dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Adapun Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut :

Tabel III.10 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	73,48	85,18	74,27	87,19	85,18
Persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	78,75	85	78,85	92,76	87,5
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	16,21	19,98	16,43	82,23	20,04
Persentase pelayanan air bersih	Persen	24,76	23,75	25,79	108,58	25
Persentase Bangunan Gedung pemerintah dalam Kondisi Baik	Persen	82,49	83,84	85,52	102	83,84
Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	Persen	15,00	15,00	15,00	100	15
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	91,35	91,45	91,45	100	91,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kebumen, 2025

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 7 (tujuh) indikator Kinerja Urusan Perangkat Daerah dengan penjelasan pencapaian target dan realisasi sebagai berikut :

a) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah 1.017.150 kilometer. Dimana proporsi jalan Kabupaten Kebumen yang rusak berat masih terdapat 122,73 Km atau sebesar 12,07% yang lokasinya tersebar di 19 wilayah yaitu kecamatan Buayan, Gombong, Adimulyo, Ayah, Puring, Kuwarasan, Karanggayam, Karangsambung, Sadang, Alian, Pejagoan, Petanahan, Klirong, Kutowinangun, Prembun, Ambal, Bonorowo, Mirit dan Padureso. Adapun data panjang dan proporsi jalan berdasarkan kondisi tahun 2021-2025 sebagai berikut :

Tabel III.11 Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	KONDISI AWAL	PANJANG JALAN (KM)	PANJANG JALAN (KM)	PANJANG JALAN (KM)
		2021	2023	2024	2025
1	Kondisi Baik	365,191	470,62	411,814	470,96
2	Kondisi Sedang	337,4	281,665	335,543	284,43
3	Kondisi Rusak Ringan	124,364	145,045	166,827	139,03
4	Kondisi Rusak Berat	133,403	119,82	102,966	122,73
5	Jalan Secara Keseluruhan	960,358	1.017,15	1.017,15	1017,15
Proporsi Kondisi Baik (%)		38,027	46,27	40,49	46,30
Proporsi Kondisi Sedang (%)		35,133	27,69	32,99	27,96
Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)		12,95	14,26	16,4	13,67
Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)		13,891	11,78	10,12	12,07

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. 2025

b) Persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik

Panjang saluran irigasi sekunder yang menjadi kewenangan kabupaten Kebumen yaitu 186.105 m dengan luas sasaran daerah

irigasi 12.260 Ha. Adapun data panjang saluran irigasi sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel III.12 Data Penunjang Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Irigasi Teknis Sekunder	Meter	184.418	186.105	186,11	186,11	186,11
2	Irigasi Kondisi Baik	Persen	75,17	76,31	78,71	78,75	78,85
3	Irigasi Kondisi Sedang	Persen	1,55	1,51	1,44	1,4	1,4
4	Irigasi Kondisi Rusak Ringan	Persen	1,23	1,23	1,17	1,17	1,13
5	Irigasi Kondisi Rusak Berat	Persen	22,04	20,95	18,67	18,67	18,62

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. 2025

Adapun realisasi kinerja DPUPR terkait capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2025 yaitu 78,85% dengan target RPJMD pada tahun 2025 sebesar 85%. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2024 yaitu 78,75%. Sedangkan untuk kinerja DPUPR dalam pemenuhan target RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 87,50%. Untuk mencapai target yang telah ditentukan dibutuhkan kinerja yang optimal dari semua pihak serta dukungan anggaran dari pemerintah. Adapun kendala tidak tercapainya target pada tahun 2025 disebabkan adanya sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak turun untuk Bidang Irigasi TA 2025.

a. Persentase Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

   Panjang drainase keseluruhan sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 yaitu 1.0171,50 km. Panjang tersebut meliputi panjang drainase jalan kewenangan kabupaten sesuai SK jalan, drainase sekunder, drainase perkotaan dan panjang drainase kewenangan kabupaten sesuai SK Bupati Kebumen Nomor 611/216/Kep./2016 tentang Daerah Irigasi Dan Saluran Drainase yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Realisasi drainase dalam kondisi baik 16,43% atau memiliki capaian 82,23% dari target pada tahun 2025, hal tersebut

mengalami peningkatan dari tahun 2024 yang hanya 16,21%. Beberapa penyebab tidak tercapainya target yaitu Efisiensi Anggaran sehingga tidak bisa dicukupi sesuai target.

b. Persentase Pelayanan Air Bersih

Pelayanan air bersih di kabupaten Kebumen oleh PDAM SPAM Perdesaan dan Sumber Air lainnya. Namun dalam penghitungan capaian pelayanan air bersih untuk rumah tangga hanya memperhitungkan saluran perpipaan, dimana capaian tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel III.13 Persentase Pelayanan Air Bersih Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Indikator Program	Total Jumlah Penduduk Seluruhnya	Tahun 2025				
		Sambungan Rumah TA 2025	Jumlah Orang yang Terlayani			Capaian (6):(2) x 100%
			PDAM	SPAM Perdesaan	Jumlah (4)+(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan Tahun 2025	1.451.748	93.617	158.273	216.195	374.468	25,79

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. 2025

a) Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik

Menurut data RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kebumen data gedung pemerintah Kabupaten Kebumen sebanyak 297 unit. Pada tahun 2025 memiliki target 247 unit atau sekitar 83,16% dari keseluruhan, dengan realisasi pada tahun 2025 hanya 85,52% dengan capaian 102%.

b) Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertangani

Persentase bangunan dan lingkunganya memiliki rumus perhitungan yaitu jumlah bangunan dan lingkungan yang ditangani dengan DED/jumlah bangunan dan lingkungan yang membutuhkan DED x 100%. Capaian dari indikator tersebut yaitu 100% sesuai dengan target, DED tersebut meliputi DED bangunan Gedung dan Bangunan SPAM. indikator tersebut juga mengakomodir usulan aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran DPRD tentang hibah semen.

c) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Realisasi pada tahun 2025 memenuhi target yaitu 91,45% atau dengan capaian 100%. Tetapi kondisi ini belum menggambarkan kondisi riil 2021 dikarenakan untuk update kesesuaian penataan ruang masih menunggu update data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan melalui 4 (empat) program. Adapun capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

a) Program Pengembangan Perumahan
b) Program Kawasan Permukiman
c) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.14 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukinan dan Perhubungan**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia**	**A PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi**	Lokasi/Kec.	26	26	100		
				a Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi**	Unit Paket	10	10	100		
				a Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	10	10	100		
				B PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha**	Persen	1,28	1,28	100		
				1 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha	**Jumlah permukiman kumuh yang ditangani**	Ha	1,2	1,2	100		
				a Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibin	Kelompok Masyarakat	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Jumlah permukiman kumuh yang ditangani**	Ha	1,2	1,2	100		
				a Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	100		
				C PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani**	Persen	88,16	66,14	75,02	Mendasari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan	Mengoptimalkan pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni ke sumber dana lain yaitu Baznas, CSR dan melalui Komunitas Sedulur Kebumen.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat penyesuaian anggaran pada belanaja Bansos RTLH sehingga capaian akumulasi tahunan tidak bisa tercapai. Target dan realisasi diambil dari RPJMD yang merupakan target dan realisasi berjalan selama 5 tahun.	Sedangkan Target penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada RPJMD masih tetap (tidak menyesuaikan ketersediaan anggaran)
				1	**Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni**	Unit	20	20	100		
					a	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan	Unit Rumah	20	20	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki						
				D PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAAS UMUM (PSU)	**Persentase Peningkatan akses air limbah aman**	Persen	1,17	1,17	100		
				1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah pelayanan pengolahan air limbah domestik**	Paket	3	3	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	3	3	100		
				b Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana,	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a) Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani Tahun 2025 ditargetkan sebesar 88,16%. namun hanya terealisasi sebesar 66,14% atau dengan tingkat capaiannya adalah 75,02%, disebabkan karena target penanganan RTLH pada RPJMD 150 unit. Rumah Tidak Layak Huni Tertangani Tahun 2025 dialokasikan dari APBD sebanyak 20 unit dan terealisasi 20 unit atau dengan tingkat capaian 100%. Target tersebut adalah akumulasi dari penanganan RTLH tahun 2021-2026 yang tercantum dalam RPJMD dan pada tahun 2021-2025 ditargetkan sebanyak 1.117 unit sedangkan realisasi dari tahun 2021 – 2025 total 838 unit.
b) Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh secara keseluruhan disebabkan karena masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman serta belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan perangkat daerah (Pokja PKP) terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh.
c) Proses Pendataan Sanitasi masyarakat belum maksimal, kurangnya kompetensi SDM dalam menginput data sanitasi, sarana dan prasarana air limbah domestik beserta operasional pengelolaannya belum sepenuhnya memenuhi standar teknis, serta pemanfaatan sarana yang belum maksimal.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Mengoptimalkan pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni ke sumber dana lain yaitu APBN, APBD Provinsi, APBDes, Baznas, CSR dan melalui dana lain.
b) Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta pelaksanaan program antar perangkat daerah (pokja PKP) dan pemerintah desa, mendorong peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat melalui

penguatan kelembagaan dan pendampingan kelompok swadaya masyarakat (KSM), serta memastikan keberlanjutan hasil kegiatan melalui penguatan mekanisme pemeliharaan dan pengawasan pasca pelaksanaan kegiatan

c) Upaya yang dilakukan meliputi penguatan pendataan dan validasi data sanitasi, peningkatan kompetensi SDM pengelola data, peningkatan kompetensi SDM pengelola sarana air limbah domestik, pemenuhan standar teknis dan operasional sarana air limbah domestik, optimalisasi pemanfaatan PSU melalui pengawasan berkala, serta penertiban penyerahan aset PSU dari pengembang perumahan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diketahui rata-rata capaian program adalah 93,76% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.15 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persen	71,16	57,23	48,72	85,13	65,75

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. 2025

Indikator ini memiliki target sebesar 57,23% dengan realisasi sebesar 48,72% atau tingkat capaian sebesar 85,13% dan termasuk dalam kategori Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman telah berjalan, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian ini antara lain masih terbatasnya anggaran penanganan RTLH dan kawasan kumuh. Realisasi Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 karena adanya pembaharuan Surat Keputusan Bupati Kebumen nomor 600.2.1/872 Tahun 2024 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen. Pembaruan SK tersebut menyebabkan perubahan data dasar (baseline) luasan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha, sehingga perhitungan persentase kawasan kumuh tertangani pada Tahun 2025 dimulai kembali dari kondisi awal. Kondisi ini berpengaruh terhadap nilai persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha sebagai salah satu komponen pembentuk indeks, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan nilai Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Tahun 2025.

.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan melalui program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b) Program Penanggulangan Bencana
c) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
d) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.16 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	13	13	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/ Bulan	62	61	98,39		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100		
				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur**	Persen	100	100	100		
				a Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	345	344	99,71		
				b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	345	344	99,71		
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase terlaksananya kegiatan administrasi umum**	Persen	100	100	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	137	137	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1064	1064	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2390	2390	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	203	203	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	6	100		
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**	Persen	100	100	100		
				a Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	Persen	100	100	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	207	207	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	48	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	11	11	100		
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	Persen	100	100	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	52	52	100		
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	32	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	100		
				B PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penegakan Perda**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Kegiatan	4	4	100		
				a Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	124	124	100		
				d Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	1	1	100		
				2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal**	Kegiatan	3	3	100		
				a Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	24	24	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan	Laporan	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	1	100		
				3 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Kegiatan	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah kegiatan PPNS yang dibina kapasitas dan karir	Kegiatan	1	1	100		
				C PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Persentase Kesiapsiagaan Damkar**	Persen	73,08	73,08	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 **Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persen	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	12	12	100		
				2 **Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase terlaksananya inspeksi Peralatan proteksi kebakaran**	Persen	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan	Dokumen	26	26	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran						
					3		**Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Presentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	100	100	100		
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	4	4	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35	35	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	79	104	131,6	Terdapat perubahan anggaran tetapi target kinerjanya tidak disesuaikan	Melakukan Sinkronisasi Ulang antara realisasi fisik dengan realisasi keuangan
				a Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	77	154	Terdapat perubahan anggaran tetapi target kinerjanya tidak disesuaikan	Melakukan Sinkronisasi Ulang antara realisasi fisik dengan realisasi keuangan
				b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	29	27	93,10	Terdapat perubahan anggaran tetapi	Melakukan Sinkronisasi Ulang antara realisasi fisik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										target kinerjanya tidak disesuaikan	dengan realisasi keuangan
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	Rincian Belanja dalam subkegiatan ini berisi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Melakukan Sinkronisasi Ulang antara realisasi fisik dengan realisasi keuangan
				d Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	41	41	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	47	47	100		
				c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	3	100		
				B PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Desa Tangguh Bencana**	Persen	100	100	100		
				1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Cakupan pelayanan informasi rawan bencana**	Persen	100	100	100		
				a Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	9000	9000	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	Persen	100	100	100		
				a Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	180	180	100		
				b Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	400	400	100		
				c Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	80	80	100		
				e Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	100		
				f Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	100		
				g Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				h Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	5	5	100		
				3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persen	100	100	100		
				a Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	4	4	100		
				b Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	100	285	285		
				c Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1000	2919	291,9		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan bencana**	Persen	100	100	100		
				a Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	4	4	100		
				b Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1	1	100		
				c Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	1	5	500		
				d Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	2	2	100		

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

a) Terbatasnya jumlah personel yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran.
b) Kondisi sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran yang sudah menurun akibat usia pakai.
c) Belum tersusunnya regulasi khusus yang mengatur kewajiban penganggaran kegiatan Perlindungan Masyarakat dan Relawan Pemadam Kebakaran di Tingkat desa.

Permasalahan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain:

a) Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia kebencanaan yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi teknis penanggulangan bencana.
b) Masih kurang memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, baik dari sisi jumlah maupun kondisi fisik, dalam mendukung penanganan bencana secara optimal.
c) Belum optimalnya regulasi dan penguatan kebijakan daerah yang mengatur integrasi, pendanaan, dan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu lintas sektor.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Mengirimkan anggota Satpol PP untuk mengikuti Diklat serta menyelenggarakan Diklat sendiri. Untuk P3K dan P3K Paruh Waktu dan P2K menunggu regulasi lebih lanjut.
b) Perawatan sarana dan prasarana yang lebih intensif (rekondisi untuk kendaraan lama) dan mengusulkan unit baru.
c) Koordinasi dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mencantumkan bahwa penganggaran untuk kegiatan Perlindungan Masyarakat dan Relawan Pemadam Kebakaran menjadi kewajiban Pemerintah Desa dalam bentuk Surat Edaran. Dalam Perbup

tentang Dana Desa, Perbup penyusunan APBDes serta Surat Edaran Penyusunan RKP Desa/Musrenbangdes.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan bencana sebagai berikut:

a) Meningkatkan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia kebencanaan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi teknis, serta penguatan peran dan kapasitas relawan kebencanaan.
b) Melakukan pemenuhan, peremajaan, dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana secara bertahap sesuai tingkat risiko dan kebutuhan wilayah rawan bencana.
c) Mendorong penyusunan dan penguatan regulasi daerah serta peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan hasil penghitungan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh dari penjumlahan persentase capaian program dan kegiatan yang dibagi dengan jumlah program dan jumlah kegiatan, diketahui bahwa rata-rata capaian program dan kegiatan pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat masing-masing mencapai 100%. Capaian tersebut mencerminkan keselarasan yang kuat antara kegiatan yang dilaksanakan dengan target kinerja program dalam Perjanjian Kinerja, sekaligus menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan efektif dan konsisten dalam mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat direncanakan dan dilaksanakan secara

terintegrasi untuk mencapai sasaran daerah yang telah ditetapkan, yaitu:

a) Sasaran 5.2.1 Meningkatnya Ketertiban Masyarakat; dan
b) Sasaran 5.2.2 Terwujudnya Wilayah Tangguh Bencana.

Kedua sasaran tersebut merupakan bagian yang saling terkait dalam upaya mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan memiliki daya tahan terhadap berbagai potensi gangguan ketenteraman maupun risiko bencana.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Sasaran 5.2.1 difokuskan pada penguatan penegakan peraturan daerah, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta pengendalian potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Sementara itu, program dan kegiatan pada Sasaran 5.2.2 diarahkan pada peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta pemulihan pasca bencana guna mewujudkan wilayah yang tangguh terhadap bencana secara berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Urusan, yang mencerminkan capaian kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung tujuan pembangunan daerah. Indikator tersebut menjadi alat ukur untuk menilai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam menciptakan ketertiban masyarakat serta meningkatkan ketangguhan wilayah terhadap bencana.

Tabel III.17 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Persen	100	100	100	100	100

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
2. Persentase Kesiapsiagaan Damkar	Persen	73,08	73,08	73,08	100	80,76
3. Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Urusan Daerah, capaian Persentase Desa Tangguh Bencana pada tahun 2024 telah mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Kebumen telah memenuhi kriteria sebagai Desa Tangguh Bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut berhasil dipertahankan pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 100%, sejalan dengan target kinerja tahunan dan target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 100%.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang berfokus pada penguatan kapasitas desa, pengembangan kelembagaan kebencanaan di tingkat lokal, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Penilaian Ketangguhan Desa dilaksanakan untuk memetakan potensi, kapasitas, dan kerentanan desa terhadap risiko bencana, yang selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan program penguatan pengurangan risiko bencana yang lebih terarah dan berkelanjutan, sekaligus mendorong terbentuknya budaya sadar bencana di masyarakat agar desa mampu menghadapi bencana secara lebih mandiri.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012, penetapan Desa Tangguh Bencana dilakukan melalui pemenuhan 6 komponen utama dan 20 indikator, yang mencakup aspek kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, pengembangan kapasitas masyarakat, sistem peringatan dini, serta kesiapsiagaan dan respon darurat. Dengan terpenuhinya seluruh komponen dan indikator tersebut oleh seluruh desa, Pemerintah

Daerah memiliki dasar yang kuat untuk mengarahkan kebijakan ke tahap pemeliharaan, peningkatan kualitas, dan keberlanjutan ketangguhan desa, sehingga ketangguhan wilayah terhadap bencana dapat terjaga secara berkelanjutan.

6. Urusan Sosial

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Sosial dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program sebagai berikut ini :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Pemberdayaan Sosial.
c) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
d) Program Rehabilitasi Sosial.
e) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
f) Program Penanganan Bencana.
g) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Adapun capaian kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.18 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Sosial**	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	18	18	100		
						a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	11	11	100		
						b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	7	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	32	31	96,88		
						b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
					3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	25	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	36	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	6	6	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit	97	97	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	53	53	100		
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	41	41	100		
				c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi						
				B PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial**	Persen	72	100	138,88		
				1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota**	Kegiatan	4	4	100		
				a Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100		
				b Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	Orang	26	26	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota						
				c Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	3	3	100		
				d Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) KewenanganKabupaten/Kota	Sertifikat	2	2	100		
				C PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN	**Persentase Penanganan Warga Negara Migran**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				TINDAK KEKERASAN	**Korban Tindak Kekerasan**						
				1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan**	Orang	3	3	100		
				a Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan keDesa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				D **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani**	Persen	100	99,52	99,52	PMKS Terlantar = 1904 PMKS Lainnya = 390 Total = 2294 2294/2305 *100% = 99,52 capaian 99,52	melakukan koordinasi dengan kecamatan untuk data usulan agar lebih valid sesuai kriteria penerima bansos dan menyiapkan usulan data cadangan
				1 **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar**	Orang	1915	1904	99,43	Terdapat 37 penerima manfaat yang tidak bisa tersalurkan karena perubahan data kependudukan/ kemiskinan dan penambahan penanganan PMKS terlantar sebanyak 26 orang	
				a Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	Orang	1363	1326	97,29	Terdapat 37 penerima manfaat yang tidak bisa tersalurkan karena perubahan data	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					kependudukan/ kemiskinan	
						b	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	270	270	100		
						c	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	62	62	100		
						d	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	120	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	51	102		
				f Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	75	150		
				2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosia**	Kegiatan	5	5	100		
				a Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	50	50	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Kewenangan Kabupaten/Kota						
						b	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	140	140	100		
						c	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100		
						d	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100		
						e	Kerja Sama antar Lembaga dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						
				E PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Cakupan perlindungan jaminan sosial**	Persen	80,27	101,39	126,31		
				1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah sosialisasi bantuan sosial**	Kecamatan	26	26	100		
				a Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	100000	128197	128,20		
				b Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Keluarga	4280	4280	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						
				F			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	Persen	100	100	100		
					1		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan perlindunan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota**	Kegiatan	5	5	100		
						a	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Orang	440	440	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Kewenangan Kabupaten/Kota						
						b	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca BencanaKewenangan Kabupaten/Kota	Orang	115	115	100		
						c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1	1	100		
						d	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	115	115	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	456	456	100		
				2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana**	Kegiatan	2	2	100		
				a Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	6	6	100		
				b Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan	Orang	60	60	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Taruna Siaga Bencana	Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						
				G PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase TMP yang Dikelola**	Persen	100	100	100		
				1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Persentase TMP yang Dikelola**	Persen	100	100	100		
				a Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100		

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Sosial adalah:

a) Jumlah relawan sosial yan terbatas dan cenderung menurun, antara lain karena terjadi transisi SDM dan alih fungsi yang menyebabkan belum optimalnya dukungan rehabilitasi sosial dasar pasca bencana.
b) Masih kurangnya SDM dan sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelayanan di Rumah Singgah.
c) Terjadinya proses transisi data kemiskinan di level nasional dari DTKS, Regsosek dan P3KE menjadi DTSEN.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kementrian Sosial untuk mencari solusi terkait hal tersebut.
b) Optimalisasi koordinasi dan Kerjasama dengan berbagai Panti yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
c) Melakukan pemutakhiran data secara berkala dan koordinasi dengan pihak terkait.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Sosial diketahui rata-rata capaian program adalah 109,24% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 99,96%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Sosial dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu:

a) Berkurangnya penduduk miskin

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.19 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase capaian SPM sosial	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja urusan sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk indikator Persentase Capaian SPM Sosial sebesar 100% dengan kategori penilaian baik sesuai dengan target yang ditetapkan dan mencerminkan pelayanan dasar bidang sosial telah dilaksanakan berkelanjutan sehingga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat terpenuhi. Adapun hambatan dalam penanganan PPKS tersebut antara lain berupa tingginya angka PPKS dan adanya calon penerima manfaat yang meninggal, serta berpindah tempat tinggal.

Adapun rincian capaian SPM Sosial dengan formulasi pengukuran persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sesuai standar ditambah persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota sesuai standar telah mencapai 100% untuk semua indikator SPM urusan Sosial.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui 5 (lima) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Perencanaan Tenaga Kerja.

c) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
d) Program Penempatan Tenaga Kerja.
e) Program Hubungan Industrial.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.20 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
	Tenaga Kerja	**Dinas Tenaga Kerja**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	13	13	100		
						a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	10	10	100		
						b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	100		
					2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	43	43	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verfikasi keuangan SKPD	Dokumen	6	6	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	Laporan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	4	4	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	Paket	4	4	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket	4	4	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket penyediaan bahan/material yang disediakan	Paket	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				g Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD	Dokumen	12	12	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	Unit	3	6	200	Kesalahan dalam penentuan angka target yang berbeda dengan rinciannya pada DPA	Dilakukan penyamaan pemahaman terhadap target kinerja dalam hal kuantitas unit maupun kuantitas jenis dalam pengadaan barang/jasa.
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	3	6	200	Kesalahan dalam penentuan angka target yang berbeda dengan rinciannya pada DPA	Dilakukan penyamaan pemahaman terhadap target kinerja dalam hal kuantitas unit maupun kuantitas jenis dalam pengadaan barang/jasa.
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					daya air dan listrik yang disediakan						
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	Laporan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	39	39	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	50	50	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	18	18	100		
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan**	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					1		**Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja**	**Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro**	Dokumen	1	1	100		
						a	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1	100		
				C			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang dilatih bernilai "A"**	Persen	100	87,5	87,5	Penawaran uji kompetensi dengan berkerjasama Balai Besar Pengembangan Vokasi dan Produktivitas di seluruh Indonesia dan Balai Latihan Kerja di Provinsi dan Kabupaten.	
					1		**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Paket Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n**	Paket	14	14	100		
						a	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	192	192	100		
						b	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi	Lembaga	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	dan Produktivitas pada Tahun n						
				2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina**	Lembaga	30	30	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Lembaga	30	30	100		
				D PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Prosentase penempatan pencari kerja terdaftar (Jumlah Penempatan TK/Jumlah Pencari Kerja x 100)**	Persen	32,39	70,3	217,04	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan jumlah tenaga kerja MBG 4672 orang (126 SPPG).	
				1 Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Tenaga Kerja yang terserap**	Orang	2762	7606	275,38	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan jumlah tenaga kerja MBG 4672 orang (126 SPPG).	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja Jumlah Kegiatan Pelayanan	Jumlah pencari kerja yang terlayani melalui mekanisme antar kerja	Orang	17470	10825	61,96	1. Pembuatan kartu kuning melalui aplikasi E-Makaryo milik provinsi, sehingga tidak tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kebumen 2. Setelah lulus SMA/SMK tidak membuat kartu AK-1 (kartu kuning) 3. Banyak perusahaan sudah tidak lagi mensyaratkan kartu AK-1 untuk melamar	1. Permohonan data ke Disnaker Provinsi 2. Meningkatkan cakupan layanan di kabupaten melalui Layanan PATRIOT (Pelayanan AK1, Karier, Info loker terpadu) untuk mempermudah mencari informasi loker
				b Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	15	15	100		
				c Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang di berdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	30	30	100		
				2 Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah CPMI/ PMI yang terlindungi**	Orang	2130	1634	67,32	Berkurangnya Calon Pekerja Migran yang akan bekerja ke luar negeri karena ada perusahaan negara penempatan (Malaysia)	Diarahkan untuk bekerja ke negara lain sektor non formal

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										yang tutup karena penurunan Produksi	
				a Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI atau PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	150	150	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Migran yang terlayani	Orang	1800	1434	79,67	Berkurangnya Calon Pekerja Migran yang akan bekerja ke luar negeri karena ada perusahaan negara penempatan (Malaysia) yang tutup	Diarahkan untuk bekerja ke negara lain sektor non formal
				c Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang diberdayakan	Orang	50	50	100		
				E PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama**	Persen	100	130	130	Target 10 perkara terealisasi 13 perkara. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan hubungan industrial yang harus ada penyelesaian.	
				1 Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan	**Jumlah perselisihan yang terselesaikan**	Perkara	10	13	130	Target 10 kasus sedangkan kasus yang masuk sampai akhir 2025 sejumlah 13	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penutupan Perusahaan Kabupaten/Kota						kasus yang terselesaikan	
				a Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdam- pak pada kepentingan di 1(satu)daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peselisihan yang dicegah	Kegiatan	6	6	100		

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Dinas Tenaga Kerja antara lain:

a) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya target 3 unit terealisasi 6 unit karena adanya kesalahan dalam penentuan angka target yang berbeda dengan rincian pada RKA.
b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas dengan indikator Prosentase Tenaga Kerja yang dilatih bernilai “A” target 100% dan realisasi 87,5%, hal tersebut dikarenakan ada 2 orang peserta yang tidak mengikuti uji kompetensi dikarenakan sudah berkerja di luar kota dan perusahaan tidak mengizinkan untuk mengikuti uji kompetensi.
c) Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator Prosentase Penempatan Pencari Kerja terdaftar dengan target 32,39 % dengan realisasi 70,3 % atau naik 217,04% dan kegiatan Peayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Tenaga Kerja yang terserap target kinerja 2.762 orang dengan realisasi 7.606 orang (275,38 %). Hal tersebut terjadi karena meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan jumlah tenaga kerja MBG 4672 orang (126 SPPG).
d) Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja dengan indkator jumlah pencari kerja yang terlayani melalui mekanisme antar kerja realisasi kinerja tidak tercapai dari target 17.470 orang dengan realisasi 10.825 orang. Hal ini dikarenakan Pencari kerja banyak yang membuat kartu AK-1 melalui aplikasi E-Makaryo milik provinsi (1.218 orang), sehingga tidak tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kebumen dan banyak lulusan SMA/SMK tidak membuat kartu kartu AK-1 karena banyak perusahaan atau lembaga tidak lagi mensyaratkan kartu AK-1 untuk melamar, termasuk dalam kegiatan penerimaan CPNS (dipersyaratkan Kartu AK-1 setelah dinyatakan lolos seleksi) dan kegiatan penerimaan PPPK.
e) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) jumlah CPMI yang terlindungi target 2130 orang sedangkan realisasi 1.634 dan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu bagi Calon Pekerja Migran dengan indikator Jumlah CPMI yang terlindungi dengan target 1800 orang terealisasi 1.434 orang. Hal ini terjadi karena berkurangnya Calon Pekerja Migran yang akan bekerja ke

luar negeri (Malaysia), sebagai akibat perusahaan melakukan pengurangan produksi.

f) Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Kabupaten/Kota dengan indikator perselisihan yang terselesaikan dengan target 10 perkara terealisasi 13 perkara. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan hubungan industrial yang harus ada penyelesaian.

3) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Dilakukan penyamaan pemahaman terhadap target kinerja dalam hal kuantitas unit maupun kuantitas jenis dalam pengadaan barang/jasa.

b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas dengan indikator Prosentase Tenaga Kerja yang dilatih bernilai “A” hanya terealisasi 87,5% , upaya untuk meningkatkan target melalui penawaran uji kompetensi dengan berkerjasama Balai Besar Pengembangan Vokasi dan Produktivitas di seluruh Indonesia dan Balai Latihan Kerja di Provinsi dan Kabupaten.

c) Terhadap penyerapan tenaga kerja yang melampaui target dari pelaksanaan program MBG tetap perlu dipantau kompetensi maupun produktivitasnya.

d) Dalam meningkatkan capaian target kinerja Pelayanan Kartu AK-1 dengan melakukan advokasi kebijakan dalam hal rekrutmen tenaga kerja tetap mensyaratkan Kartu AK-1 sesuai UU No.6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sosialisasi ke SMA/SMK/MA tentang pembuatan Kartu AK-1 sebagai pendataan pencari kerja dan syarat berkerja. Selain itu upaya lain untuk meningkatkan cakupan layanan kartu AK-1 dengan cara memaksimalkan Fungsi Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK/SMA/MA serta Career Development Center (CDC) yang ada di Perguruan Tinggi agar berupaya agar alumni dapat bekerja.

e) Berkurangnya Penempatan Malaysia karena adanya pengurangan produksi, maka pencari kerja diarahkan untuk berkerja di dalam

negeri atau jika ingin berkerja di luar negeri maka bisa melalui sektor in formal (Caregiver, Housmaid, Caretaker).

f) Pada Program Hubungan Industrial target mencapai 130 % penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, maka perlu adanya peningkatan kompetensi mediator untuk dapat mengidentifikasi potensi kasus dan meredam munculnya kasus baru, meningkatkan komunikasi dengan lembaga Bipartit dan Tripartit perusahaan dan serikat pekerja.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Tenaga kerja diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 126,91%. Adapun rata-rata capaian kegiatan adalah 122,73%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan tenaga kerja dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja. Untuk mengetahui jumlah peningkatan keterserapan tenaga kerja dihitung dengan rumus % (persentase) jumlah penempatan tenaga kerja/ jumlah pencari kerja yang terdata ditambah dengan % (persentase) jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan, kemudian dibagi 2, atau lebih jelasnya sebagai berikut:

$$\text{Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja} = \frac{\text{\% jumlah penempatan tenaga kerja/jumlah pencari kerja yang terdata} + \text{\% jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan}}{2}$$

Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja tahun 2025 sebesar 51,63%. Capaian tersebut berdasarkan persentase jumlah penempatan tenaga kerja/jumlah pencari kerja yang terdata sebesar 70,3% ditambah Persentase jumlah peserta pelatihan yang terserap/jumlah pelatihan 33% dibagi 2. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut :

Tabel III.21 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Keterserapan Tenaga Kerja	%	37,56	27,43	51,63	188,29	28,75

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. 2025

Realisasi Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten 2025 mengalami kenaikan sebesar 14,09 dari tahun sebelumnya. Tahun 2024 Keterserapan Tenaga Kerja sebesar 37,56% naik di tahun 2025 menjadi 51,63 %, kenaikan yang signifikan tersebut dikarenakan adanya penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang berasal dari penyerapan tenaga kerja melalui Program MBG.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui 6 (enam) program sebagai berikut :

a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
b) Program Perlindungan Perempuan
c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

f) Program Perlindungan Khusus Anak

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

:

Tabel III.22 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**DINSOS P3A**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	Persen	18,38	21,57	117,36		
				1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kegiatan	3	3	100		
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Kewenangan Kabupaten/Kota						
					2		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasikemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kegiatan	2	2	100		
						a	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosialdan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	30	30	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Cakupan Perlindungan Perempuan**	Persen	100	100	100		
				1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Kegiatan	2	2	100		
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan KekerasanTerhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100		
				2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yangmemerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan**	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	60	60	100		
				b Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi PerempuanKorban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	6	100		
				C PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	Persen	18,36	79,16	431,15	Adanya perbedaan Definisi Operasional terkait perhitungan target dan realisasi	
				1 Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) Dan Hakanak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak**	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
						a	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100		
				D			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak**	Persen	100	100	100		
					1		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalamkelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Dokumen	1	1	100		
						a	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				E			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)**	Nilai	Madya	Madya	Madya		
					1		**Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kegiatan	3	3	100		
						a	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan PendampinganPemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	52	52	100		
						b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						
				2 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**jumah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kegiatan	3	3	100		
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100		
				b Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia LayananPeningkatan	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						
				c Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100		
				F **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan Perlindungan Anak**	Persen	100	100	100		
				1 **Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus**	Kegiatan	1	1	100		
				a Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	50	140	280	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Khusus TingkatDaerah Kabupaten/Kota						kekerasan pada anak	

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

a) Belum adanya SDM yang definitif pada UPTD PPA.
b) Belum optimalnya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
c) Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kabupaten Kebumen.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Optimalisasi personil yang ada di bidang serta melakukan kerjasama (MOU) dengan berbagai pihak (psikolog dan penasehat hukum).
b) Melakukan kerjasama dengan Polres untuk penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
c) Mendorong optimalisasi Kabupaten Kebumen sebagai Kabupaten Layak Anak melalui berbagai upaya sinergis dengan berbagai stakeholder.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diketahui rata-rata capaian program adalah 141,42% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu:

a) Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.23 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk indikator Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebesar 100%, dengan kategori penilaian Baik. Hal ini mencerminkan bahwa mekanisme penanganan kasus terhadap perempuan dan anak berjalan optimal dan berkelanjutan, dibuktikan dengan seluruh kasus yang terlaporkan dapat ditangani dengan baik serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk yang berani melaporkan kasus yang dialami.

3. Urusan Pangan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Pangan dilaksanakan melalui 5 (lima) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
c) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
d) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
e) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.24 Capaian Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
	Pangan	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia**	**A.**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun**	Dokumen	42	42	100		
						a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	24	100		
						b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	18	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	220	186	84,55	5 orang pegawai PNS pensiun 5 orang PPPK tidak ada penggantinya 1 orang kepala bidang kosong 1 orang pegawai meninggal 1 orang PPPK diterima PNS 19 orang merupakan CPNS 2 orang mutasi	
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	22	22	100		
				3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun**	Dokumen	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	100		
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				f Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	23	192	Jumlah Perjalanan Dinas sejumlah 23 Laporan dalam 12 Bulan	
				h Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	100		
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	62	62	100		
				a Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	31	31	100		
				b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	17	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	14	14	100		
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Unit	75	75	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14	100		
						b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	53	53	100		
						c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	8	100		
				B			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**	Persen	21,74	20,22	93,01	Capaian kurang dari 100% disebabkan karena tidak adanya pembangunan infrastuktur lumbung perencanaan sampai dengan 2025 : 100 desa (lumbung). database 2021 : 79	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										lumbung, sehingga pembangunan lumbung dari tahun 2021 direncanakan sebanyak 21 lumbung. realisasi : 93 desa alasan : adanya pembangunan lumbung yang bersumber dana DAK namun, di tahun 2025 tidak ada	
				1 **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan**	Persen	21,74	20,22	93,01	Karena pada tahun anggaran 2025 tidak ada pembangunan infrastruktur kemandirian pangan	
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	4	4	100		
				C **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN**	**Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan**	Persen	49,02	49,13	100,22		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
				1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Persentase Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan**	Persen	23,25	23,25	100		
				a Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	27	27	100		
				b Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	4	4	100		
				2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Persentase cadangan pangan yang dikelola**	Persen	10	14,19	141,90	Capaian lebih dari 100% karena didukung adanya stok cadangan pangan tahun sebelumnya konversi gabah 52,66 ton	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	20	20	100		
				3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan, bantuan bibit atau benih tanaman, saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal**	Persen	74,78	75	100,29	Capaian lebih dari 100% didukung oleh adanya kegiatan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) yang bersumber dari APBN, P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) bersumberdana ABPD Kabupaten, dan OPP (Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan) berumberdana APBD Provinsi	
				a Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Laporan	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Berbasis Sumber Daya Lokal						
				D PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya**	Persen	57,25	59,54	104	Capaian lebih dari 100% didukung oleh Jumlah desa yang tertangani kerawanan panganya telah terealisasi 78 desa dari target 75 desa sehingga realisasi melebihi 100%	
				1 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen**	Dokumen	4	4	100		
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	4	4	100		
				2 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya**	Desa	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	100		
				E PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase Hasil Pengawasaan dan Pembinaan Keamanan Pangan**	Persen	92,35	93,82	101,59		
				1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan**	Dokumen	4	4	100		
				a Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	4	5	125		
				b Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan	Dokumen	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dan mutu pangan segar asal tumbuhan						

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Urusan Pangan antara lain:

a) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan infrastruktur kemandirian pangan.
b) Tidak ada pembangunan infrastruktur kemandirian pangan di Tahun 2025 yang disebabkan karena tidak adanya ketersediaan anggaran. Berdasarkan data Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026 target pembangunan lumbung direncanakan sejumlah 100 lumbung desa, dengan kondisi baseline data di Tahun 2021 telah terbangun 79 lumbung desa, sehingga diperlukan 21 pembangunan lumbung desa hingga Tahun 2025. Namun kerena keterbatasan anggaran pembangunan lumbung hanya dapat terbangun sejumlah 14 lumbung desa, sehingga total lumbung desa yang dapat terealisasi dari 2021 hingga 2025 hanya dapat terealisasi 93 lumbung desa, dengan rincian 79 merupakan baseline lumbung desa yang telah terbangun dan 14 merupakan lumbung desa yang berhasil terbangun.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Masih perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan infrastruktur kemandirian pangan.
b) Mengusulkan pembangunan infrastruktur kemandirian pangan di Tahun 2026.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Pangan diketahui rata-rata capaian program adalah 99,76% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 102,51%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pangan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu berkurangnya penduduk miskin.

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.25 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan	%	4,5	5	6,03	120,6	6

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. 2025

Indikator kinerja Persentase Kenaikan Ketersediaan Energi Pangan dan Protein Pangan di Kabupaten Kebumen telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan kategori sangat baik. Capaian indikator kinerja 6,03% diperoleh dengan perhitungan : (jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2025 - jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2020) / jumlah angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein tahun 2020 x 100%. Dimana hasil perhitungan tersebut yaitu: (3785,84-3570,55)/3570,55 x 100% = 6,03%.

4. Urusan Pertanahan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan pertanahan dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.26 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Urusan Pertanahan**	**Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia**	**A PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penanganan Sengketa Lahan**	Persen	100	100	100		
				1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penanganan Sengketa Lahan**	Persen	100	100	100		
				a Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2	100		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Urusan Pertanahan antara lain:

a) Persentase Penanganan Sengketa Lahan sudah memenuhi target RPJMD pada tahun 2025 yaitu 100%.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Mengoptimalkan kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Pertanahan diketahui rata-rata capaian program adalah 100% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pertanahan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu Penanganan Sengketa Lahan.

Tabel III.27 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Penanganan Sengketa Lahan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan tabel di atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 1 (satu) indikator kinerja urusan Pertanahan, di mana terdapat 20 laporan sengketa tanah dan sudah tertangani atau dalam proses penanganan, sebagaimana tertuang sebagaimana berikut:

DATA PENERIMAAN DAN PENANGANAN PENGADUAN SENGKETA PERTANAHAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN
BULAN JANUARI – SEPTEMBER 2025

No Urut	Nomor dan Tanggal Surat Pengaduan	Para Pihak a) Pengadu b) Teradu	Data Objek Status	Luas	Letak	Pokok Masalah	Tipologi Kasus	Tanggal Penyelesaian	Status Penanganan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	23/01/2025	a) H. Nur Chudaefah b) -	SHM No. 02210/Kuwayuhan SHM No. 02212/Kuwayuhan	1400 m2	Desa Kuwayuhan Kec. Selang Kab. Kebumen	Adanya penjualan tanah oleh pihak pengembang/ orang lain akan tetapi sampai saat ini pemilik tanah belum mendapatkan uang pengganti tersebut.	Penguasaan dan Pemilikan	-	Proses	Proses Penanganan
2	6/02/2025	a) Takim Al Tasirin b) -	SHM No. 825/Ayah atas nama Takim Al Tasirin	77 m2	Desa Ayah Kec. Ayah Kab. Kebumen	Permasalahan batas dan luas tanah milik pengadu yang belum terselesaikan	Letak dan batas bidang tanah	-	Proses	Proses Penanganan
3	11/02/2025	a) Kadiman b) Sutardjo	Belum Sertipikat	-	Desa Kedaleman Wetan Kec. Puring Kab. Kebumen	Pengajuan permohonan pendaftaran tanah untuk sertipikat yang dihalang-halangi oleh pemerintah desa dan Sutardjo	Tanah adat/tanah ulayat	12/06/2025	Selesai	Surat Pemberitahuan Bukan Kewenangan No.B/MP.01.02/160-33.05.600/VI/2025 Tgl 12 Juni 2025
4	11/02/2025	a) Ambarita, SH. selaku kuasa dari P. Susilo Wahyuntoro b) -	1) SHM No.232/Adikarto 2) SHM No.234/Adikarto 3) SHM No.258/Adikarto 4) SHM No.289/Adikarto 5) SHM No.210/Adikarto 6) SHM No.255/Adikarto 7) SHM No.256/Adikarto 8) SHM No.257/Adikarto 9) SHM No.319/Adikarto 10) SHM No.211/Adikarto 11) SHM No.260/Adikarto 12) SHM No.209/Adikarto 13) SHM No.259/Adikarto 14) SHM No.290/Adikarto	-	Desa Adikarto Kec. Adimulyo Kab. Kebumen	Pengajuan permohonan untuk tidak melakukan proses peralihan hak karena belum ada pembagian waris terhadap bidang tanah tersebut.	Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah	30/10/2025	Selesai	Surat Jawaban Petunjuk Penyelesaian No.B/MP.01.02/364-33.05/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025
5	13/02/2025	a) Suhendri selaku kuasa dari Misrun b) Sumardjo	SHM No. 188/Ungaran	549 m2	Desa Ungaran Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen	Permohonan ganti rugi terkait biaya dalam mensersipikatkan tanah milik pengadu	Penguasaan dan Pemilikan	-	Proses	Proses Penanganan

No Urut	Nomor dan Tanggal Surat Pengaduan	Para Pihak a) Pengadu b) Teradu	Data Objek Status	Luas	Letak	Pokok Masalah	Tipologi Kasus	Tanggal Penyelesaian	Status Penanganan	Keterangan
6	29/05/2025	a) Jayen Satmoko b) Tuning Asih	SHM No.1347/Giritirto	1663 m2	Desa Giritirto Kec. Karanggayam Kab. Kebumen	Pengadu keberatan atas diterbitkannya SHM No.1347/Giritirto NIB: 02839 atas nama pemegang hak Tuning Asih	Penguasaan dan Pemilikan	03/10/2025	Selesai	Mediasi tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan Surat Jawaban Petunjuk Penyelesaian No.B/MP.01.02/326-33.05/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025

5. Urusan Lingkungan Hidup

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
b) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
c) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
d) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
e) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
f) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
g) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
h) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
i) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
j) Program Pengelolaan Persampahan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.28 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**	**DLHKP**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	26	26	100		
						a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	100		
						b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17	17	100		
					2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	104	110	105,77	Adanya penambahan PPPK sebanyak 6 orang	
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
				3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	100		
				4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan						
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	100		
				f Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				h Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
				5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	Unit	13	13	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	13	100		
				6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	**Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Urusan Pemerintahan Daerah	**pemerintahan daerah**						
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Unit	114	114	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	71	71	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	26	26	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	14	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	3	100		
				B PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	Persen	87,50	87,50	100		
				1 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun**	Dokumen	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								arahan RPPLH Provinsi						
				C			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	Persen	74,36	75,31	101,28	Peningkatan Kualitas air dan tutupan lahan	
					1		**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	Kegiatan	3	3	100		
						a	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2	2	100		
						b	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	600	600	100		
				2 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	Kegiatan	6	6	100		
				a Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	5	5	100		
				3 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	Kegiatan	19	19	100		
				a Sub Kegiatan Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan						
						b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	18	18	100		
				D			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Penanganan Keanekaragaman Hayati Daerah**	Persen	43,33	43,33	100		
					1		**Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan Kehati	Dokumen	1	1	100		
						a	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	839,15	839,15	100		
				c Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	100	100	100		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	1	1	100		
				E PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3**	Persen	50	50	100		
				1 Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	**Jumlah fasilitasi dan verifikasi limbah B3**	Kali	30	30	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan	Dokumen	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
				b Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	26	26	100		
				F PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan**	Persen	9,99	11,21	112,29	Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan melebihi target pada tahun 2025 sebesar 9,99% dapat terealisasai sebesar 11,21 % atau capaian sebesar 112,29%. Hal tersebut dikarenakan realisasi merupakan akumulasi selama 5 tahun (tahun 2021 s/d 2025), yaitu sebanyak 449 kegiatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										pengawasan dan ijin lingkungan dari 400 pengawasan dan ijin Lingkungan yang Ditargetkan.	
				1 **Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah unit usaha yang mendapatkan rekomendasi ijin lingkungan, ijin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha**	Unit	50	50	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	10	10	100		
				b Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang	Jumlah Laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	40	40	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
				G			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup**	Persen	21,30	22,39	105,11		
					1		**Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata**	Lokasi	46	76	165,22		
						a	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	25	50	200	Banyak permintaan pendampingan dari sekolah dengan biaya mandiri	
						b	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang	Lembaga	21	26	123,81	Adanya SE Bupati tentang penggunaan Dana Desa untuk pengelolaan sampah	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH						
				H PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase Fasilitasi Penghargaan Lingkungan Hidup**	Persen	83,33	88,24	105,88		
				1 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup**	Lokasi	16	16	100		
				a Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	16	16	100		
				I PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan	**Jumlah kasus yang terfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH**	Kasus	10	13	130		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							
				a Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	10	13	130		
				J PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R**	Persen	52	56	107,69		
				1 Kegiatan Pengelolaan Sampah	**Jumlah kegiatan pengelolaan sampah**	Kegiatan	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan,	Unit	22	22	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir						
				c Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	2	2	100		
				d Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	90000	95984,77	106,65		
				e Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	39000	38018,40	97,48	Karena adanya pemilahan sampah di tingkat hulu/RT, bank sampah dan TPS3R dengan didukung penutupan Tempat Penampungan Sampah di beberapa lokasi mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA	Peningkatan layanan penanganan sampah di TPA perlu didukung dengan penambahan armada dan biaya operasional lainnya

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada pada Urusan Lingkungan Hidup antara lain:

a) Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, pengelolaan sampah, serta pencegahan pencemaran lingkungan masih belum optimal.
b) Sarana pengelolaan persampahan, seperti tempat pengolahan sampah terpadu, armada pengangkut, dan fasilitas daur ulang, belum mampu melayani seluruh wilayah secara optimal. Di samping itu, keterbatasan peralatan pemantauan kualitas lingkungan, seperti alat uji kualitas air, udara, dan tanah, menghambat upaya deteksi dini serta penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
c) Implementasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup belum berjalan secara optimal, serta keterbatasan dukungan anggaran dan program berkelanjutan, turut mempengaruhi efektivitas upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Dilakukan Peningkatan Kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, serta bimbingan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat didorong melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, pelestarian lingkungan, serta pengendalian pencemaran.
b) Dilakukan peningkatan dan pengembangan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup, antara lain pembangunan dan rehabilitasi sarana persampahan, peningkatan armada pengangkut sampah, serta pengembangan fasilitas pengolahan dan daur ulang sampah. Di samping itu, pengadaan peralatan pemantauan kualitas lingkungan, seperti alat uji kualitas air, udara, dan tanah, dilakukan untuk mendukung upaya pemantauan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.

c) Penegakan hukum lingkungan ditingkatkan secara konsisten, disertai penguatan sistem pengawasan dan pengendalian. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan alokasi anggaran, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta pengembangan program berkelanjutan guna memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel capaian program, jumlah program sebanyak 10 program sehingga dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 103,23% dan rata-rata capaian kegiatan sebesar 105,29%. Capaian Program dan Kegiatan memiliki situasi yang linear dimana keduanya saling mendukung dan mempengaruhi.

5) Capaian Kinerja Urusan

Urusan Lingkungan hidup diarahkan untuk mencapai misi keempat RPJMD yaitu “peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan sasaran 4.2 yaitu “meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat”. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan 2025 sebagai berikut:

Tabel III.29 Tujuan dan Sasaran Urusan Lingkungan Hidup

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	2025			Sumber Data
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Sasaran: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,36	75,31	101,28	*Laporan IKLH DLHKP Kab. Kebumen 2025* *Ekspose IKLH DLHK Provinsi Jateng* *Ekspose IKLH Kementerian KLHK*

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel III.30 Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2024	2025			TARGET AKHIR RPJMD 2026
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,86	74,36	75,31	101,28	74,45

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja utama urusan Lingkungan Hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Tujuan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Urusan Lingkungan Hidup:

a) Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
c) Sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Realisasi IKLH pada tahun 2025 mencapai 75,31 Indeks dengan prosentase capaian sebesar 101,28%. Faktor pendorong tercapainya target IKLH antara lain:

a) Adanya kerjasama lintas sektor dalam peningkatan IKLH di Kabupaten Kebumen;
b) Sosialisasi terus menerus terkait pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemasangan Papan Informasi;
c) Penanganan pengaduan yang cepat terhadap pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;

d) Pengurangan Emisi dengan memperbanyak penanaman pohon dan pelaksanaan Care Free Day;
e) Penyusunan Perdes tentang LH, terutama pada daerah yang terdapat lahan kritis dan rawan bencana;
f) Update Luasan data RTH se-Kabupaten Kebumen;
g) Peningkatan pengelolaan sampah (peningkatan pembentukan bank sampah/TPS3R, pemanfaatan sampah plastik menjadi RDF, Konversi gas metan di TPA menjadi bahan bakar)

Ketiga variabel yang digunakan yaitu;

1. Indeks Kualitas Air;
2. Indeks Kualitas Udara; dan
3. Indek Tutupan Lahan.

Dengan rentang predikat IKLH sebagai berikut:

IKLH <40 = waspada
IKLH 40-50 = sangat kurang baik
IKLH 50-60 = kurang baik
IKLH 60-70 = cukup baik
IKLH 70-80 = baik
IKLH > 80 = sangat baik

Pada tahun 2025 realisasi IKLH Kabupaten Kebumen sebesar 75,31 atau masuk kategori “BAIK”.

Tabel III.31 Realisasi IKA, IKU dan IKTL Kabupaten Kebumen

No	Variabel	Capaian Tahun		Predikat
		2024	2025	
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,42	81,49	Sangat Baik
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,11	75,53	Baik
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	58,73	63,50	Cukup Baik
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,86	75,31	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. 2025

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui 4 (empat) program sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b) Program Pendaftaran Penduduk;
c) Program Pencatatan Sipil;
d) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.32 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	Persen	100	100	100		
					1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	20	20	100		
						a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14	14	100		
						b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100		
					2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	31	32	103,23		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	10	10	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dan Konsultasi SKPD						
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	13	13	100		
				a Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	100		
				c Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit	75	75	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	Unit	21	21	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	28	28	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	25	100		
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dipelihara/Direhabilitasi						
				B PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk**	persen	100	100	100		
				1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk**	Layanan	7	7	100		
				a Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	110.000	137.249	124,77		
				b Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Layanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	4	4	100		
				c Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	27	27	100		
				2 Penataan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk**	Kegiatan	1	1	100		
				a Pengadaan Dokumen Kependudukan selain	Jumlah Dokumen Pengadaan	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan						
				3 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Kegiatan	1	1	100		
				a Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	100		
				C PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Cakupan Layanan Pencatatan Sipil**	Persen	100	100	100		
				1 Pelayanan Pencatatan Sipil	**Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kegiatan	2	2	100		
				a Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	1	1	100		
				b Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Kegiatan	1	1	100		
				a Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan	2	2	100		
				D **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan**	Persen	100	100	100		
				1 **Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah Buku Data Kependudukan**	Buku	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	3	3	100		
				2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kegiatan	3	3	100		
				a Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	100		
				b Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	2	2	100		
				c Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	1	1	100		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen antara lain:

a) Ketersediaan sumber daya manusia masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan jumlah petugas layanan yang sebanding dengan tingginya volume permohonan dokumen administrasi kependudukan dari masyarakat. Selain itu, peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM perlu terus dilakukan, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan adaptasi terhadap dinamika regulasi kependudukan yang terus berkembang. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelayanan apabila tidak diantisipasi secara berkelanjutan.

   Di samping aspek kompetensi teknis, masih diperlukan penguatan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan, terutama dalam hal keramahan, empati, komunikasi yang baik, serta konsistensi penerapan budaya pelayanan prima. Perbedaan beban kerja dan tingkat tekanan pelayanan pada jam-jam tertentu berpotensi mempengaruhi sikap petugas, sehingga perlu pembinaan dan pengawasan berkelanjutan agar kualitas pelayanan tetap terjaga.

b) Dari sisi sarana dan prasarana, masih terdapat keterbatasan pada perangkat pendukung layanan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, yang memerlukan pembaruan secara berkala. Selain itu, kondisi jaringan dan sistem layanan berbasis teknologi informasi terkadang mengalami kendala teknis, terutama pada jam layanan padat, sehingga berpotensi menghambat kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat.

c) Pada aspek kebijakan, masih diperlukan penyesuaian dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Perubahan regulasi yang relatif cepat menuntut adanya sosialisasi yang intensif serta penyesuaian prosedur pelayanan, baik kepada aparatur pelaksana maupun kepada masyarakat, agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelayanan

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Untuk mengatasi keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, dilakukan optimalisasi penataan dan pemanfaatan aparatur sesuai dengan kebutuhan layanan, termasuk pengaturan jadwal dan pembagian tugas pada jam layanan padat. Selain itu, dilakukan peningkatan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan secara berkelanjutan, khususnya terkait pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman regulasi terbaru. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dilakukan pembinaan sikap dan perilaku petugas layanan melalui penguatan budaya pelayanan prima, penerapan standar pelayanan, serta pembiasaan sikap ramah, sopan, dan komunikatif. Pengawasan dan evaluasi kinerja petugas layanan juga terus dilakukan, termasuk melalui penanganan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.
b) Untuk mendukung kelancaran pelayanan, dilakukan pemeliharaan dan pembaruan sarana dan prasarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran. Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan keandalan sistem dan jaringan layanan guna meminimalkan gangguan teknis, khususnya pada jam pelayanan dengan tingkat kunjungan tinggi. Koordinasi dengan Tim Teknis Ditjen dukcapil kemendagri sebagai penyedia SIAK terpusat dan perangkat daerah terkait sebagai penyedia layanan teknologi juga terus dilakukan untuk memastikan sistem pelayanan berjalan dengan optimal.
c) Dalam menghadapi dinamika kebijakan dan regulasi, dilakukan penyesuaian dan harmonisasi kebijakan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi kebijakan dan prosedur pelayanan terus ditingkatkan, baik kepada aparatur pelaksana maupun kepada masyarakat, melalui berbagai media informasi. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan implementasi kebijakan berjalan seragam, efektif, dan tidak menimbulkan

kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diketahui rata-rata capaian program adalah 100% dan rata-rata capaian kegiatan juga 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja yaitu Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.33 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	99,77	99,00	99,50	100,51	95,45

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan Tabel III.32 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2025, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah terlaksana dengan sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan.

Indikator Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 99,00%. Adapun realisasi kinerja yang berhasil dicapai adalah sebesar 99,50%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,51%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja tahunan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 99,77%, capaian tahun 2025 tetap menunjukkan konsistensi kinerja pelayanan yang tinggi yaitu tetap berada di atas target yang ditetapkan.

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 tersebut juga telah melampaui Target Akhir RPJMD, yaitu sebesar 95,45%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kebumen telah berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Capaian Kinerja Program. Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dilaksanakan melalui 5 (lima) program yang meliputi :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
b) Program Penataan Desa.
c) Program Peningkatan Kerjasama Desa.
d) Program Administrasi Pemerintahan Desa.
e) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

:

Tabel III.34 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	9	9	100		
						a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100		
						b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	100		
					2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Dokumen	12	12	100		
						a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	30	35	117	Kesalahan penentuan target Rincian : PNS 32, P3K 3	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										(penambahan p3k, cpns, dikurangi purna tugas)	
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	8	12	150		
				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	51	51	100		
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kantor yang Disediakan						
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	74	6	8,11	Refokusing anggaran	
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang utusan pemerintah daerah**	Dokumen	2	2	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	Unit	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Mesin Lainnya yang Disediakan							
				b Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	14	233	Kesalahan Penentuan target	
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor**	Dokumen	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	26	100		
						b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	44	88		
						c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100		
						d	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	25	100		
				B			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa Tertata**	Persen	6,9	6,9	100		
					1		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades Desa**	Kegiatan	2	2	100		
						a	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan,	desa	1	152	15200	Kesalahan Penentuan Target	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Perubahan Status Desa							
				C PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa**	Persen	100	100	100		
				1 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	**Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	Kegiatan	3	3	100		
				a Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	7	7	100		
				b Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	11	11	100		
				c Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	22	21	95	Pada Tahun 2025 belum terealisasi Perbup Tentang Kawasan Perdesaan komoditi buah-buahan.	
				D PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Jumlah BUM Desa yang Meningkat Klasifikasinya**	Bumdes	78	N/A	N/A	Tahun 2025 tidak ada pemeringkatan dari Kementerian Desa, tidak ada edaran untuk pemeringkatan	
				1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi**	Kegiatan	13	13	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pemerintahan Desa						
						a	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pengembangan Potensi	Dokumen	449	449	100		
						b	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	400	400	100		
						c	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	30	30	100		
						d	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	449	449	100		
						e	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	449	449	100		
						f	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	26	26	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				g Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	10	1	10	Kesalahan penentuan target	
				h Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	449	449	100		
				i Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	400	14	3,50	Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun maka pelaksanaan Pilkades ditunda tahun 2027.	Anggaran dialihkan untuk Workshop tata kelola pemerintahan dengan peserta Kasi PM, TA, PD/PLD, Sekcam, Sekdes perangkat desa, BPD, dan Kasi Tapem
				j Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	1	100		
				k Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	449	449	100		
				l Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan	Orang	400	449	112	Workshop Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Desa di Lingkungan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Peningkatan Kapasitas					Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Anggota BPD (Kepala Desa untuk menugaskan hadir Ketua/Anggota BPD sejumlah 1 (satu) orang.	
				m Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	449	449	100		
				E **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi**	Persen	21,52	25	116		
				1 **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat**	**Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat**	Kegiatan	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi**						
				a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,LPM,dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya)Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Lembaga	50	50	100		
				b Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Dokumen	20	48	240	44 SK pengelola pasar desa 1 data pasar 1 laporan kegiatan 2 laporan bimtek	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						
						c	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	2	2	100		
						d	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	449	449	100		
						e	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	487	487	100		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya berkaitan dengan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa. Hal ini salah satunya karena sebagian besar tingkat pendidikan aparatur pemerintahan desa adalah Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Kedua, kurang tertibnya administrasi desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga tahapan dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa, masih mengalami kendala, misalnya terjadi keterlambatan pertanggungjawaban keuangan, baik secara pelaporan keuangan maupun administrasi pertanggungjawaban keuangannya. Hal tersebut juga berpengaruh pada pemanfaatan teknologi informasi yang hanya bertumpu pada satu aparatur atau beberapa aparatur pemdes saja. Ketiga, masih belum optimalnya keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di desa, seperti BUM Desa, Karang Taruna, PKK, serta lembaga lainnya sehingga peran dalam mensejahterakan masyarakat desa hanya bertumpu pada aparatur pemerintah desa, tetapi keterlibatan lembaga tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam turut bertanggungjawab dalam mensejahterakan masyarakat desanya.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya yang terstruktur dan berkelanjutan. Pertama, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas, seperti pelatihan pengelolaan keuangan, perencanaan, dan pengambilan keputusan, serta pengembangan keterampilan digital dan komunikasi. Selain itu, juga bekerjasama dengan Universitas Terbuka Purwokerto dalam Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi Aparatur Pemerintahan Desa. Kedua, meningkatkan disiplin dan kualitas pelaporan keuangan dengan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang lebih baik, seperti penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan dan sistem informasi desa, serta meningkatkan frekuensi dan transparansi pelaporan keuangan. Ketiga, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam

pemerintahan desa, seperti pengembangan sistem informasi desa, aplikasi pengelolaan keuangan, dan platform komunikasi digital, serta meningkatkan akses internet di desa dan penggunaan perangkat digital dalam pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan desa dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih baik, efektif, dan efisien, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 104%. Rata-rata capaian kegiatan sebesar 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Tabel III.35 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	88,64	38,08	93,54	245,64	42,09

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, maka Renstra Dinas PMD Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD 2021-2026 sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Renstra Dinas PMD Kabupaten Kebumen tahun 2025 merupakan renstra tahun 5 Renstra Dinas PMD dengan target IDM yaitu 38,08%

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun

2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa Formula Indek Desa Membangun yaitu Jumlah Desa dengan Indek Desa Membangun kategori maju dan mandiri dibagi jumlah desa total dikalikan 100%. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, keluaran IDM menjadi Indeks Desa. Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tahun 2025 sebesar 93,54%. Hal ini didasarkan pada jumlah desa maju dan mandiri sebanyak 420 terdiri dari 198 desa mandiri dan 222 desa maju.

Pada tahun 2025 yang merupakan tahun kelima RPJMD/ Renstra 2021-2026, pendirian Bumdes sejumlah 449 desa yang telah tercapai, dilakukan pembinaan atau pada akhir periode Renstra ditargetkan sebanyak 100% atau sebanyak 449 Bumdes dan telah terealisasi sebanyak 449 Bumdes atau seluruh desa yang ada di Kabupaten Kebumen. Bumdes yang sudah berbadan hukum sejumlah 435, sedangkan yang belum berbadan hukum sejumlah 14 Bumdes. Adapun tujuan pendirian Bumdes yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan asli desa, meningkatkan, pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang meliputi:

a) Program Pengendalian Penduduk;
b) Program Pembinaan Keluarga Berencana;
c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.36 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk**	Persen	50	76	152		
				1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Jumlah lembaga pendidikan formal dan nonformal yang mengimplementasikan pendidikan kependudukan**	Lembaga	5	5	100		
				a Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100		
				b Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur	Kegiatan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendidikan Formal dan Nonformal	Pendidikan Formal dan Nonformal						
				2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten**	Dokumen	2	2	100		
				a Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	1	1	100		
				b Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	1	100		
				c Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	1	100		
				d Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	1	100		
				e Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Cakupan Peserta KB Aktif**	Persentase	65	68,26	105,02		
				1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Kegiatan	4	4	100		
				a Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	1	100		
				b Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	1	100		
				c Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						
				d Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	1	100		
				e Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	5	5	100		
				2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan**	Orang	2707	2707	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kader IMP yang diberdayakan						
				a Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2400	2400	100		
				b Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	1	1	100		
				3 **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di**	Kegiatan	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Daerah Kabupaten/Kota						
				a Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	100		
				b Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1200	1200	100		
				c Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	100		
				4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan**	Kegiatan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Pembinaan Kesertaan Ber-KB**						
						a	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	20	20	100		
				C			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera**	Persen	70,42	82,71	117,45		
					1		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan**	Kegiatan	3	3	100		
						a	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	1	1	100		
						b	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						
				c Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	15	15	100		
				d Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	1	1	100		
				2 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan	**Jumlah mitra kerja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga**	Anggota	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
				a Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	1	1	100		
				b Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	1	1	100		
				c Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	1	1	100		

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

a) Sumber Daya Manusia pada urusan Pengendalian Penduduk meliputi, Penata Kependudukan dan KB yang ada di OPD dan Penyuluh KB yang ada di Balai KB di tiap Kecamatan. dalam hal ini Penyuluh KB di tiap Kecamatan makin lama makin berkurang karena pensiun dan belum ada penambahan Penyuluh KB baru. Idealnya satu Penyuluh KB memiliki wilayah binaan 5 Desa. Sedangkan kondisi saat ini satu Penyuluh KB memiliki wilayah binaan 1 kecamatan dengan minimal 7 desa (Sadang) dan maksimal 32 desa (Ambal)
b) Sarana Urusan Pengendalian Penduduk diantaranya adalah Kantor Balai Penyuluh KB yang tiap kecamatan ada satu Balai. Keadaan saat ini Balai Penyuluh KB masih dapat berfungsi baik meski ada sebagian besar balai yang memerlukan perawatan atau rehab.
c) Kebijakan yang masih diperlukan antara lain kebijakan mengenai KB Pasca Salin.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Sumber Daya Manusia yang masih banyak kekurangan saat ini masih bisa teratasi oleh bantuan dari Kader KB. Kader KB saat ini ada 460 orang di setiap desa, dan kader KB di tingkat RW. Kader atau petugas sukarela di tingkat desa/kelurahan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah (Penyuluh KB) untuk membantu mensukseskan program Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dengan tugas utama penyuluhan, pendataan, konseling hingga pelayanan ulang kontrasepsi dasar (Pil dan Kondom) serta membina ketahanan keluarga.
b) Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Balai Penyuluh KB sebanyak 26 Balai KB di 26 Kecamatan diusulkan melalui anggaran DAK BOKB Tahun 2027.

c) Kebijakan tentang KB Pascasalin yang dibutuhkan di tahun 2026 sedang diusulkan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diketahui rata-rata capaian program adalah 124,82% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu:

a) Cakupan peserta KB aktif

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.37 Indikator Kinerja Urusan Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Cakupan peserta KB aktif	%	67,11	65	68,26	105,02	65

Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian peserta KB Aktif (CPR) tahun 2025 adalah 68,26% sehingga capaian kinerja adalah 105,02%. Peningkatan ini dikarenakan kesadaran ber-KB saat ini menunjukkan tren positif dengan peningkatan partisipasi, terutama karena pemahaman masyarakat akan pentingnya untuk kesejahteraan keluarga, kesehatan ibu dan anak (pencegahan stunting), serta kualitas hidup yang lebih baik, didorong oleh edukasi masif dan akses layanan yang lebih mudah, meskipun masih ada tantangan seperti stigma dan misinformasi yang perlu terus diatasi melalui pendekatan berbasis hak dan edukasi menyeluruh.

9. Urusan Perhubungan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan perhubungan dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.38 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**URUSAN PERHUBUNGAN**	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	9	9	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	55	47	85	Terdapat 4 PNS Pensiun, Penambahan Gaji 12	SILPA ke KASDA

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										CPNS, kekosongan jabatan (3 Eselon IV), meninggal dunia 1	
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	11	11	100		
				3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	Dokumen	10	10	100		
				a Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	55	55	100		
				4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan						
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	36	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	Paket	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100		
				6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	52	52	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	30	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dipelihara/ Direhabilitasi						
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Indeks Infrastruktur Perhubungan**	Persen	79,78	76,78	96,24	Bahwa penghitungan Indeks Infrastruktur Perhubungan berdasarkan persentase ketersediaan perlengkapan jalan + persentase ketersediaan terminal tipe-C + persentase alat uji KIR dalam keadaan baik.	Dilakukan pergantian komposit indikator indeks infrastruktur perhubungan pada renstra berikutnya supaya indikator lebih relevan sebagai alat ukur pencapaian kinerja dari program
				1 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Peresentase ketersediaan perlengkapan jalan**	Persen	56	63,67	113,70		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	450	680	151,11	Adanya perubahan rencana LPJU dari Solar Cell menjadi Konvensional	
				b Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	355	355	100		
				2 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						
				3 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik**	Persen	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	4391	5880	133,91	Kesadaran masyarakat meningkat akan keselamatan transportasi	
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9	9	100		
				4 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah bulan pengamanan dan koordinasi lintas sektoral**	Bulan	12	12	100		
				a Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						
				5 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah rakor penilaian andalalin**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	12	12	100		
				6 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Rasio cakupan kebijakan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dan Pengawasan Pengendalian Terhadap Sarpras Keselatan Transportasi**	Persen	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7	**Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum**	Bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	48	48	100		
				8	**Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalanm tarayek lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah Kab/Kota**	Dokumen	80	80	100		
				a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Unit	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di urusan perhubungan antara lain:

a) Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bidang perhubungan, khususnya Penguji Kendaraan Bermotor serta Penyidik Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ/PPNS), menjadi salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan layanan transportasi. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan penegakan hukum di sektor lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga berpotensi menurunkan tingkat keselamatan, ketertiban, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b) Keterbatasan sarana dan prasarana kelengkapan jalan umum, seperti traffic light, warning lamp, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), rambu lalu lintas, marka jalan, serta guardrail, masih menjadi permasalahan di bidang perhubungan. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengaturan, peringatan, dan pengamanan lalu lintas belum berjalan optimal, sehingga berkontribusi terhadap masih tingginya potensi dan kejadian kecelakaan lalu lintas.

   Selain itu, masih terbatasnya sarana dan prasarana pengamanan pada perlintasan sebidang kereta api menjadi permasalahan di bidang perhubungan. Kondisi ini menyebabkan tingkat keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api belum optimal, terutama pada perlintasan yang memiliki volume lalu lintas tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan dan gangguan kelancaran transportasi.

c) Masih banyaknya kendaraan angkutan barang yang beroperasi melebihi batas tonase serta tidak memenuhi ketentuan tata cara pemuatan dan standar dimensi kendaraan (Over Dimension Over Load/ODOL) menjadi permasalahan serius dalam kebijakan sektor perhubungan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya penerapan dan pengawasan kebijakan pengendalian angkutan barang, yang berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan, meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, serta menurunnya tingkat keselamatan dan ketertiban transportasi.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Sebagai upaya mengatasi permasalahan di bidang perhubungan, perlu dilakukan pengusulan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan formasi Penguji Kendaraan Bermotor guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, diperlukan pengusulan anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Penyidik Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ/PPNS) agar kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pengawasan serta penegakan hukum dapat terus ditingkatkan.

b) Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana kelengkapan jalan umum melalui pengusulan anggaran yang memadai serta penentuan prioritas pada lokasi rawan kecelakaan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan pemutakhiran fasilitas lalu lintas secara berkala guna meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna jalan. Selain peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana kelengkapan jalan umum, upaya peningkatan keselamatan transportasi juga perlu difokuskan pada pengamanan perlintasan sebidang kereta api. Hal ini dapat dilakukan melalui pengadaan dan pemasangan sarana pengamanan yang memadai, seperti palang pintu dan rambu peringatan disertai koordinasi dengan PT KAI dan dukungan pengusulan anggaran yang berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, diharapkan risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api dapat diminimalkan dan keselamatan pengguna jalan semakin meningkat.

c) Sebagai upaya mengatasi permasalahan kendaraan angkutan barang Over Dimension Over Load (ODOL), perlu dilakukan penguatan pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan ramp check dan operasi laik jalan secara rutin dan terintegrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kendaraan angkutan barang memenuhi persyaratan teknis, dimensi, dan muatan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menekan tingkat pelanggaran

ODOL serta meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi jalan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan perhubungan diketahui rata-rata capaian program adalah 98,12% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100,91%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan perhubungan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu:

a) Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.39 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	75,78	79,78	76,78	96,24	80,44

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja Indikator Kinerja Urusan Daerah Indeks Infrastruktur Perhubungan, diketahui bahwa pada tahun 2024 realisasi indeks mencapai 75,78. Pada tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan sebesar 79,78, sedangkan realisasi kinerja hingga periode pelaporan mencapai 76,78. Dengan capaian tersebut, tingkat pencapaian kinerja mencapai 96,24%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan telah berjalan dengan cukup efektif dan mendekati target yang ditetapkan.

Meskipun capaian kinerja tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi target tahunan, nilai realisasi tersebut telah menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perhubungan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi.
c) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.40 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Komunikasi dan Informatika**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	10	10	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	28	26	92,86	Terdapat Kekosongan 1 Jabatan Struktural dan 1 ASN pensiun sehingga gaji	Mengusulkan ke BKPSDM untuk segera

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dan tunjangan tidak terbayarkan	mengisi kekosongan jabatan.
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100		
				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	50	100		
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	9	225	Undangan rapat koordinasi melebihi target	Menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang dihadiri
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit	35	35	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	35	100		
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya	Unit	31	31	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	34	34	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	80	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100		
				B PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE**	Nilai	3,86	NA	NA	Pada tahun 2025 penilaian SPBE ditiadakan oleh KemenPANRB. Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah Tahun 2025 dalam rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital, Kab. Kebumen tidak termasuk obyek pemantauan. Untuk tahun 2026 penilaian SPBE akan dikembangkan dalam bentuk penilaian Pemerintah Digital	Arahan dari KemenPANRB untuk dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan evaluasi pemerintahan digital yang baru yaitu yang semula peniaian SPBE menjadi penilaian pemerintahan digital
				1 Pengelolaan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah aplikasi pendukung SPBE**	Aplikasi	100	105	105	Adanya permintaan pengembangan aplikasi baru dari perangkat daerah	Selektif dalam memenuhi pengembangan aplikasi
				a Pembangunan dan/atau	Jumlah aplikasi khusus yang	Aplikasi	100	105	105		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan petarencana SPBE pemerintah daerah						
				b Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	50	50	100		
				C PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Indeks PPID**	Persen	38,82	52,75	135,86	Ditargetkan 198 realisasi menjadi 269 (24 OPD dan 245 Desa). Hal ini karena meningkatnya animo dari OPD dan Pemerintah Desa.	
				1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik**	PD dan desa	198	269	135,86		
				a Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	11	11	100		
				b Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik	Permohonan	25	34	136	Animo masyarakat untuk mengakses informasi	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan					publik semakin bertambah, hal ini karena adanya kemudahan dalam mengakses informasi melalui media sosial dan web.	
				c Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	6	6	100		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di urusan komunikasi dan informatika antara lain:

a) Terkait infrastruktur / sarana prasarana:

- Tower penyiaran TV dan radio daerah dalam beberapa waktu terakhir mengalami gangguan berulang akibat sambaran petir sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat pemancar dan terhentinya siaran sementara.
- Kondisi instalasi kelistrikan eksisting sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan operasional saat ini karena adanya peningkatan dan perubahan beban peralatan, sehingga diperlukan penataan ulang dan perbaikan sistem kelistrikan guna menjamin keamanan, keandalan, dan keberlangsungan layanan siaran.
- Pemancar radio FM yang saat ini digunakan telah mengalami penurunan performa akibat usia pakai dan telah terjadi beberapa kerusakan akibat terkena petir. Untuk jangka panjang perlu penyesuaian teknologi yang lebih update dari aspek kualitas dan jangkauan penyiaran.
- Terjadinya kebocoran baterai UPS data center karena usia pakai yang telah melampaui standar ideal. Hal ini berdampak pada terganggunya layanan aplikasi.
- AC presisi data center yang digunakan sejak tahun 2016 telah mencapai batas maksimal penggunaan, sehingga perlu segera dilakukan penggantian AC dimaksud.
- Banyaknya keluhan masyarakat terkait infrastruktur telekomunikasi seperti ketidakteraturan fiber optic, tiang jaringan internet yang miring/roboh, pemasangan tiang yang tidak sesuai ketentuan, putusnya kabel internet, dll. Hal ini berdampak pada terganggunya keindahan, keamanan, dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

b) Kebijakan

- Masih kurang aktifnya beberapa perangkat daerah dalam pengelolaan media sosial dan kanal aduan seperti akun media sosial resmi tidak diperbarui secara berkala atau hanya aktif saat ada kegiatan seremonial, informasi layanan publik (jadwal,

persyaratan, perubahan kebijakan) tidak dipublikasikan secara konsisten, kurang cepatnya respon terhadap komentar atau pertanyaan masyarakat, serta pengaduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! atau kanal aduan daerah belum ditindaklanjuti dan dipublikasikan status penyelesaiannya, sehingga fungsi diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik belum berjalan optimal.

- Untuk pencegahan dan antisipasi pelanggaran-pelanggaran dalam pemasangan infrastruktur telekomunikasi perlu diusulkan Perda tentang Pengelolaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Sarana dan Prasarana

- Mengusulkan pada anggaran tahun 2026 untuk pemasangan sistem proteksi petir yang lebih kuat. Adapun untuk penataan instalasi jaringan listrik yang sesuai kondisi terkini, dan pengadaan pemancar radio dengan teknologi mutakhir dengan jangkauan siar yang lebih luas diusulkan di APBD-P TA 2026 atau APBD TA 2027.
- Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan baterai UPS dan AC presisi data center adalah melalui perencanaan pemeliharaan dan peremajaan infrastruktur secara berkala dan terjadwal. Baterai UPS diganti secara rutin setiap dua tahun, serta direncanakan peremajaan AC presisi sesuai umur teknis perangkat melalui penganggaran yang terencana pada APBD-P TA 2026 atau APBD TA 2027. Langkah ini bertujuan menjaga keandalan sistem kelistrikan dan pendinginan data center guna memastikan kontinuitas layanan sistem informasi pemerintah daerah.

b) Kebijakan

- Penyusunan SOP dan juknis pengelolaan informasi publik dan pendekatan ke OPD untuk meningkatkan awareness pada tim bakohumas, PPID dan pengelola medsos serta aduan.

- Penguatan kapasitas tim Bakohumas, PPID, pengelola medsos dan aduan melalui bimtek dan mentoring.
- Mengusulkan Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan pada tahun 2025 telah diusulkan Perda Inisiatif oleh DPRD.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika diketahui rata-rata capaian program adalah 117,93% tanpa mencantumkan capaian program Pengelolaan aplikasi informatika dikarenakan tidak dilaksanakannya evaluasi SPBE tahun 2025 oleh Kementerian PANRB. Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah Tahun 2025 dalam rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital, Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mengikuti Pemantauan SPBE Tahun 2025, karena hanya ditujukan bagi instansi yang menjadi target lokus pembinaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat tersebut. Selanjutnya untuk rata-rata capaian kegiatan adalah 104,54%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu: terwujudnya birokrasi yang kapabel.

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.41 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks SPBE	Indeks	4,07	3,55	NA	NA	3,60

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan capaian Indeks SPBE tahun 2024, target sasaran jangka menengah telah terlampaui, tetap diperlukan upaya kerja keras dan konsistensi pelaksanaan agar kinerja yang telah dicapai tetap terjaga dan tidak menurun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan tata kelola SPBE, integrasi sistem elektronik, dan peningkatan kapasitas perangkat daerah telah berjalan efektif. Walaupun pada tahun 2025 evaluasi resmi Indeks SPBE tidak dilakukan oleh KemenPAN-RB karena pada tahun 2026 Indeks SPBE akan mengalami pengembangan menjadi Indeks Pemerintah Digital, yang mencakup penilaian lebih komprehensif terhadap transformasi digital pemerintah. Oleh karena itu, mempertahankan dan meningkatkan kinerja SPBE saat ini tetap menjadi prioritas strategis untuk memastikan kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi perubahan indikator dan untuk mendukung tercapainya tujuan transformasi digital yang lebih luas.

11. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui 5 (lima) program yang meliputi:

a) Program Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
b) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
c) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); serta
e) Program Pengembangan UMKM.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.42 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	Persen	53,33	80	150,01	Keterangan: Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan ada 30 koperasi dengan hasil 24 koperasi berkriteria "sehat" dan 6 koperasi berkriteria "cukup sehat". Kriteria penilaian: Sehat nilai diatas 80 Cukup sehat nilai 60-79 Dalam pengawasan kurang dari 60	
				1 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Koperasi Akuntabel**	Koperasi	90	90	100	Kriteria Koperasi Akuntabel melaksanakan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan pada RAT sesuai SAK EP dan transparan, pengelolaan yang demokratis dan mandiri, pengukuran kinerja keuangan, pembagian SHU, Koperasi memenuhi kewajiban administrasi dan hukum.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dan 90 Koperasi adalah Koperasi yang melaporkan laporan keuangan pada RAT sesuai SAK EP dan transparan	
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	25	30	120	Keterangan: Target 25 Unit Usaha kemudian ada permohonan dari 5 koperasi	
				B PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase SDM Koperasi yang Kompeten**	Persen	22,03	22,93	104,09	Keterangan: Jumlah SDM Koperasi yang kompeten (505) dibagi Jumah seluruh SDM Koperasi (2202) dikali 100 persen Peserta Pelatihan KDMP 449 SDM dan KKMP 11 SDM Peserta Pelatihan SAK EP 25 SDM Tambahan 20 SDM Pelatihan KDMP terdiri dari : 1. KKMP Kecamatan Kebumen : 5 Kelurahan @ 2 SDM	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										2. KKMP Kecamatan Karanganyar : 4 Kelurahan @ 2 SDM 3. KKMP Kecamatan Gombong : 2 Kelurahan @ 1 SDM	
				1 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan**	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	485	505	104,12	Keterangan: Peserta Pelatihan KDMP 449 SDM dan KKMP 11 SDM Peserta Pelatihan SAK EP 25 SDM Tambahan 20 SDM Pelatihan KDMP terdiri dari : 1. KKMP Kecamatan Kebumen : 5 Kelurahan @ 2 SDM 2. KKMP Kecamatan Karanganyar : 4 Kelurahan @ 2 SDM 3. KKMP Kecamatan Gombong : 2 Kelurahan @ 1 SDM	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Advokasi kepada Koperasi**	Persen	25,34	52,81	208,42	Keterangan: Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pendirian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kebumen ada 449 Desa dan 11 Kelurahan yang di advokasi. Note: Jumlah koperasi yang diadvokasi (460) dibagi jumlah koperasi aktif (871) dikali 100%	
				1 **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi**	Koperasi	20	20	100		
				a Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	40	40	100		
				D **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN**	**Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas**	Persen	11,74	12,50	106,47		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				USAHA MIKRO (UMKM)							
				1 **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah usaha mikro yang terbina**	Unit Usaha	194	194	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	180	180	100		
				b Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	14	14	100		
				E **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya**	Unit Usaha	50	50	100		
				1 **Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan**	**jml UKM yang meningkat skala usahanya**	UMKM	20	20	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							
				a Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	1130	1207	106,81	Keterangan: 40 Unit Usaha yang mengikuti Inkubasi Bisnis 62 Unit Usaha yang mendapatkan Bantuan Alat Usaha 30 Unit Usaha yang mengikuti Pelatihan Pemasaran Digital 30 Unit Usaha yang mengikuti Pelatihan Pembukuan dan Manajemen Keuangan 30 Unit Usaha yang mengikuti Pelatihan Fotografi by Smartphone 1.015 Unit Usaha yang mendapatkan fasilitas Subsidi Bunga *) Note : Tambahan 77 UMKM dari Target berdasarkan UMKM Yang mendapatkan fasilitasi subsidi bunga	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

a) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, khususnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengembangan kewirausahaan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pembinaan, pendampingan usaha, dan pengelolaan program khususnya UMKM belum dapat berjalan secara optimal. Beban kerja yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada, sehingga intensitas pendampingan kepada pelaku UMKM belum dapat dilakukan secara maksimal, menyeluruh dan berkelanjutan.
b) Terbatasnya ketersediaan sarana pendukung produksi bagi pelaku UMKM. Hal ini menyebabkan terhambatnya pertumbuhan usaha pelaku UMKM. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung produksi menyebabkan pelaku UMKM kesulitan bersaing dengan produk UMKM lainnya baik mutu maupun pemasaran digital.
c) Dari aspek kebijakan, masih terdapat keterbatasan dukungan anggaran operasional, khususnya untuk pengelolaan Gedung PLUT KUMKM serta pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana pendukung, termasuk fasilitas penginapan. Keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan kondisi sarana dan prasarana belum dapat dipenuhi secara optimal, sehingga berpengaruh terhadap kualitas layanan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi usaha bagi koperasi dan UMKM serta dapat menyebabkan tidak tercapainya atas target PAD atas pemakaian kekayaan daerah tersebut.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan SDM antara lain melalui pengajuan penambahan tenaga pengembang kewirausahaan sebanyak 4 (empat) orang, akan tetapi baru terakomodasi 1 orang SDM pengembang kewirausahaan. Penambahan SDM tersebut diharapkan dapat meningkatkan

kapasitas pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM secara lebih intensif, terstruktur, dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan pembagian tugas dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis juga perlu dilakukan guna mendukung kinerja yang lebih optimal.

b) Melakukan fasilitasi bantuan alat produksi sesuai prioritas ketersediaan anggaran, sehingga pertumbuhan pelaku UMKM meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas produk UMKM maka mampu bersaing ditingkat regional, nasional dan internasional.

c) Dari sisi kebijakan, diperlukan peningkatan dukungan anggaran APBD maupun dari kemitraan, khususnya untuk perawatan Gedung PLUT KUMKM serta fasilitasi sarana dan prasarana pendukung, termasuk fasilitas penginapan. Penambahan dan penguatan anggaran operasional ini menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlangsungan layanan, meningkatkan kenyamanan fasilitas, serta mendukung optimalisasi fungsi PLUT sebagai pusat layanan terpadu bagi koperasi dan UMKM dan tercapainya target PAD.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diketahui rata-rata capaian program adalah 133,80% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%. Ini menunjukan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.43 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Koperasi Sehat	%	77,36	53,33	80,00	171,42	63,33
Prosentase Usaha Kecil menengah yang berkualitas	%	11,82	11,74	12,50	106,47	13,22

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. 2025

Dalam pelaksanaan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di tahun 2025 mempunyai target penilaian kesehatan terhadap koperasi sebanyak 30 koperasi. Dengan hasil penilaian dalam satu tahun dari 30 koperasi yang menjadi sampel terdapat 24 koperasi sehat, 6 koperasi cukup sehat, dan tidak terdapat koperasi dalam pengawasan maupun pengawasan khusus. Indikator kinerja persentase koperasi sehat di Kabupaten Kebumen telah tercapai sebesar 80,00% dengan capaian kinerja sebesar 171,42% sehingga melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 53,33% pada tahun 2025 dan 63,33% pada akhir RPJMD, dengan kategori sangat baik.

Perkoperasian di Kabupaten Kebumen yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian meningkatkan SDM perkoperasian tidak lepas dari pematuhan prinsip Koperasi, pengelolaan keuangan yang baik, diversifikasi usaha, pengembangan produk dan layanan, peningkatan keanggotaan, partisipasi anggota.

Dalam pelaksanaan kinerja di tahun 2025 target UKM yang tersertifikasi sebanyak 2056 UKM, dengan UKM tersertifikasi sebanyak 2070 UKM yang difasilitasi oleh dinas maupun sertifikasi secara mandiri yang dilakukan oleh UKM. Nilai realisasi target persentase usaha kecil menengah yang berkualitas sebesar 12,50% dengan target 11,74% maka diperoleh capaian kinerja sasaran meningkatnya persentase usaha kecil menengah yang berkualitas sebesar 106,47% lebih rendah dari capaian tahun 2024.

12. Urusan Penanaman Modal

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui 6 (enam) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
c) Program Promosi Penanaman Modal.
d) Program Pelayanan Penanaman Modal.
e) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
f) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.44 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Penanaman Modal**	**DPMPTSP**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	10	10	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	6	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	4	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	25	23	92	2 orang ASN pensiun	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	1	1	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	25	25	100		
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	6	6	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	6	6	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	2	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit	36	36	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	15	15	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	10	10	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Unit	36	36	100		
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	100		
				B PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA**	Milyar Rupiah	409,00	754,87	184,56		
				1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**	Dokumen	2	2	100		
				a Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen	1	1	100		
				2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Potensi Investasi**	Dokumen	2	1	50		
				a Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun	Dokumen	1	0	0	Menunggu RUPM Provinsi Jateng tahun 2025-2045 disahkan sebagai salah satu acuan penyusunan RUPM Kabupaten/Kota.	1. Berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sebagai Leading Sektor penyusunan RUPM Provinsi Jawa Tengah. 2. Menyusun RUPM Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2045
				b Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah	1	1	100		
				C PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah**	Dokumen	5	5	100		
				1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal**	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Dokumen	2	2	100		
				b Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	1	100		
				D PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik**	Persen	100	100	100		
				1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Layanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik**	Dokumen	100	100	100		
				a Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	11	110		
				b Penyediaan dan pengelolaan Layanan	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh	Pelaku Usaha	5000	5674	113,48		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	layanan konsultasi perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik						
				c Pemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dan pelaku usaha	Kegiatan Usaha	100	100	100		
				E PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku**	Persen	100	105,56	105,56		
				1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	Kali	108	114	105,56		
				a Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan Usaha	13	13	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku, dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kegiatan Usaha	108	114	106		
				F PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi**	Persen	100	100	100		
				1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik**	Dokumen	2	2	100		
				a Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	Dokumen	4	4	100		

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Kebumen antara lain:

a) Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur.Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan ASN DPMPTSP Kabupaten Kebumen adalah 71 orang, sedangkan jumlah ASN yang tersedia baru 23 orang. Kekurangan terbanyak pada Jabatan Fungsional yaitu Penata Perizinan 6 orang dari kebutuhan 23 orang (26%) dan Penanaman Modal (PKPM) 5 orang dari kebutuhan 12 orang (42%).
b) Pelayanan publik belum optimal karena kapasitas SDM yang belum memadai serta masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
c) RUPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 belum disahkan sebagai salah satu acuan penyusunan RUPM Kabupaten/kota.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Mengusulkan penambahan pegawai sesuai dengan analisis jabatan secara bertahap dan mengoptimalkan pegawai yang ada melalui penugasan rangkap (double job) dan pengaturan kerja berbasis Tim Kerja (Katim).
b) Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM ASN, khususnya bagi JF PKPM dan JF Perizinan serta menambah sarana prasarana prasarana pendukung pelayanan publik.
c) Berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sebagai Leading Sektor penyusunan RUPM Provinsi Jawa Tengah.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Penanaman Modal diketahui rata-rata capaian program adalah 115,02% dan rata-rata capaian kegiatan 96,30%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Penanaman Modal dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah, yaitu meningkatnya daya saing ekonomi daerah. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut dilakukan dengan memperkuat iklim investasi daerah, menyelenggarakan promosi investasi yang terarah, pengembangan kawasan investasi serta melaksanakan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.45 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen (%)	9,32	5,24	9,92	189,31	6,27

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. 2025

Target nilai investasi Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 409.000.000.000, dengan realisasi mencapai Rp. 754.865.606.686 atau 184,56%. Realisasi investasi tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi investasi Tahun 2024 yang sebesar Rp. 686.760.779.257.

Target persentase peningkatan investasi pada Tahun 2025 sebesar 5,24%, dengan realisasi mencapai 9,92%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 189,31%. Persentase peningkatan investasi Tahun 2025 sebesar 9,92% tersebut tidak hanya melampaui target, tetapi juga meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2024 yang sebesar 9,32%.

Persentase peningkatan investasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Peningkatan Investasi (%) = (Realisasi Investasi Tahun n dikurangi Realisasi Investasi Tahun n−1) dibagi Realisasi Investasi Tahun n−1 dikali 100.

Berdasarkan realisasi investasi Tahun 2025 sebesar Rp. 754.865.606.686 dan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 686.760.760.779, maka diperoleh persentase peningkatan investasi sebesar 9,92%, yang berada di atas target Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan penanaman modal yang ditetapkan sebesar 5,24%.

Adapun capaian persentase peningkatan investasi sebesar 189,31%, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Capaian (%) = (Realisasi Persentase Peningkatan Investasi dibagi Target Persentase Peningkatan Investasi dikali 100%

Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kebumen, seperti: digitalisasi promosi investasi melalui media sosial secara rutin, identifikasi potensi investasi yang ada, mengikuti event promosi tingkat nasional, memberikan fasilitasi jemput bola langsung ke pelaku usaha, dan meningkatkan sarana prasarana di Mal Pelayanan Publik.

Nilai investasi di Kabupaten Kebumen terklasifikasi kedalam penanaman modal asing, dan penanam modal dalam negeri yang terdiri dari tiga sektor yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Nilai investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 102.100.000.000 dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 652.765.606.686. Investasi tersebut tersebar pada sektor primer sebesar Rp. 54.931.433.750, sektor sekunder sebesar Rp17.399.630.002, dan sektor tersier sebesar Rp. 59.940.247.289, serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 48.010 orang.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melalui 3 (tiga) program sebagai berikut :

a) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan.

b) Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.
c) Program pengembangan kapasitas kepramukaan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.46 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kepemudaan dan Olahraga**	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**	Persen	4,43	34,96	789,12	Capaian 786% bukan capaian prestasi, tetapi pada perhitungannya ada pengurangan database jumlah Organisasi Pemuda sebanyak 485 dari 608 menjadi 123 organisasi. Sedangkan organisasi pemuda yang aktif sebanyak 43 organisasi.	
				1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Jumlah organisasi Pemuda yang aktif**	Organisasi	26	43	165,4		
				a Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Persentase prestasi Olahraga**	Persen	67,67	104,32	154,20	Jumlah cabor yang dikirim mengikuti envent dan mendapatkan medali / jumlah seluruh cabor yang mengikuti event x 100	
				1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik**	Unit	7	7	100		
				a Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	7	7	100		
				2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten**	Kegiatan	3	3	100		
				a Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan	Orang	207	231	111,6		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pekan dan kejuaraan olahraga	Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota						
				3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah prestasi olahraga**	Cabor	23	24	104,35		
				a Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan Olahraga	Orang	60	85	141,7		
				b Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan *(Sport Science)*	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	5	5	100		
				4 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga**	Kegiatan	1	1	100		
				a Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Cakupan Prestasi Kepramukaan**	Persen	66,67	66,67	100	Jumlah kegiatan yang diikuti yang mendapatkan prestasi / jumlah seluruh lomba kegiatan yang di ikuti * 100	
				1 **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Kegiatan	13	13	100		
				a Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	1	1	100		

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga antara lain:

a) Kurangnya SDM kepemudaan dan olahraga yang berprestasi ditingkat provinsi dan nasional.
b) Keterbatasan sarana prasarana pendukung olahraga prestasi.
c) Kurangnya pembinaan terhadap organisasi dan cabang olahraga, serta belum optimalnya pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi di Kabupaten Kebumen.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Dilaksanakan pembinaan terhadap atlet dimasing-masing cabang olahraga yang dilakukan melalui organisasi olahraga KONI, NPC, SOINAH.
b) Melakukan peningkatan mutu sarana prasarana olahraga.
c) Membangun pembinaan terhadap organisasi dan cabang olahraga dan penghargaan bagi atlet berprestasi di Kabupaten Kebumen sejak usia dini

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga diketahui rata-rata capaian program adalah 347,77% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 111,63%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.47 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Angka Harapan Hidup	Persen	73,8	73,9	75,56	102,24	74
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	3,92	4,43	34,96	789,16	4,60
Persentase Prestasi Olahraga	Persen	63,33	67,67	76,92	113,67	70,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. 2025

Tujuan jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selanjutnya adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup. Target Angka Harapan Hidup tahun 2025 sebesar 73,90 tahun dan target tahun 2026 yang merupakan tahun akhir Renstra sebesar 74 tahun.

Selanjutnya, sasarannya adalah meningkatnya peran organisasi pemuda dan prestasi olahraga dan persentase prestasi olahraga dengan indikator persentase organisasi pemuda yang aktif dan persentase prestasi olahraga. Target Tahun sebesar 4,43% dan target Tahun 2026 yang merupakan tahun akhir Renstra targetnya sebesar 4,60%. Adapun target persentase prestasi olahraga di Tahun 2025 sebesar 67,67% dan target Tahun 2026 yang merupakan tahun akhir Renstra targetnya sebesar 70%.

Selanjutnya ada 2 (dua) indikator yang terkait dengan bidang kepemudaan. Kedua indikator tersebut meliputi persentase organisasi pemuda yang aktif dan dan persentase prestasi olahraga. Untuk indikator persentase organisasi pemuda yang aktif targetnya terus meningkat dari tahun 2021 sebesar 2,56% dan diakhir periode Renstra pada tahun 2026 sebesar 4,60%. Indikator persentase prestasi olahraga targetnya terus meningkat dari tahun 2021 sebesar 50% dan di akhir periode Renstra pada tahun 2026 sebesar 70%.

14. Urusan Statistik

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan statistik dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.48 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Statistik**	**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	Persen	100	100	100		
					1		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kegiatan	1	1	100		
						a	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	1	1	100		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di urusan statistik antara lain:

a) Ketersediaan SDM bidang geospasial/surveyor pemetaan di Walidata dan produsen data belum tersedia sesuai rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG), sehingga pengelolaan data spasial belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pemenuhan SDM dimaksud dan peningkatan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan.
b) Portal Satu Data Daerah telah berjalan baik, namun masih terdapat keterbatasan dalam variasi format data terbuka (open data) dan penguatan manajemen akses data (terbuka, terbatas, tertutup). Begitu juga dengan data spasial yang membutuhkan aplikasi pendukung pembuatan peta spasial yang belum sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing Perangkat Daerah produsen data.
c) Belum tersedia regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan informasi geospasial di Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Sebagai tindak lanjut atas permasalahan ketersediaan SDM bidang geospasial/surveyor pemetaan, melalui pengusulan pemenuhan SDM sesuai jabatan bidang geospasial/surveyor pemetaan atau peningkatan kompetensi pegawai eksisting pada tim pengelola Satu Data agar mampu mengelola data spasial secara optimal.
b) Upaya penguatan sarana dan prasarana dilakukan dengan optimalisasi Portal Satu Data Daerah melalui penyediaan data dalam format terbuka dan dapat terintegrasi misalnya JavaScript Object Notation (JSON), serta penerapan manajemen akses data. JSON adalah format data teks yang terstruktur dan mudah dibaca mesin maupun manusia. Selain itu, juga dilakukan optimalisasi aplikasi pembuatan peta spasial berbasis Geographic Information System (GIS).

c) Mengusulkan regulasi daerah tentang penyelenggaraan informasi geospasial di Kabupaten Kebumen yang mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021, guna memperkuat tata kelola, peran kelembagaan, dan pemanfaatan informasi geospasial secara terpadu.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan statistik diketahui capaian program adalah 100% dan capaian kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan statistik dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut::

Tabel III.49 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase OPD yang Mengisi *Website* Satu Data Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan tabel tersebut, Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang optimal, yaitu terealisasi sebesar 100%, sesuai dengan target tahun berjalan maupun target akhir RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia telah dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan

selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah. Capaian ini disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan OPD dalam mengunggah dan memperbarui data sesuai dengan standar, metadata, dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, didukung juga oleh peran aktif Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata dalam melakukan pembinaan, koordinasi, serta pendampingan teknis kepada OPD sebagai produsen data.

15. Urusan Persandian

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan persandian dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan untuk Pengamanan Informasi.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.50 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Persandian Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Persandian**	**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan**	Persen	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengamanan Informasi	**Jumlah Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan**	Desa dan Kelurahan	460	460	100		
				a Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	100		
				b Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Derah	50	50	100		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di urusan persandian antara lain:

a) Permasalahan urusan persandian pada tahun 2025 masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang persandian dan keamanan informasi. Saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki pejabat fungsional Manggala Informatika yang secara khusus memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam pengelolaan persandian dan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagian besar pelaksanaan fungsi persandian masih dilaksanakan oleh SDM dengan latar belakang umum teknologi informasi, yang belum seluruhnya memiliki sertifikasi atau kompetensi spesifik di bidang persandian, kriptografi, manajemen risiko keamanan informasi, serta penerapan standar keamanan informasi seperti ISO/IEC 27001. Keterbatasan SDM tersebut juga berdampak pada tingginya ketergantungan terhadap pendampingan pihak eksternal, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun evaluasi pengamanan informasi.

b) Terkait dengan keamanan informasi, dukungan perangkat pengamanan informasi seperti sistem pengelolaan persandian, perangkat keamanan jaringan, serta sistem pemantauan dan deteksi ancaman siber masih terbatas dan belum terintegrasi secara optimal. Data center yang dikelola Diskominfo menggunakan firewall server sebagai pengamanan utama server, belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur pengamanan aplikasi dan layanan publik berbasis web, seperti Web Application Firewall (WAF), yang berfungsi untuk melindungi sistem informasi dari berbagai ancaman siber, antara lain serangan injeksi, cross-site scripting, dan eksploitasi kerentanan aplikasi. Keterbatasan ini meningkatkan risiko gangguan layanan serta kebocoran data pada sistem pemerintahan berbasis elektronik.

c) Pada aspek kebijakan, pelaksanaan urusan persandian masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya regulasi dan pedoman teknis di tingkat daerah yang mengatur secara rinci tata kelola persandian dan keamanan informasi. Belum seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap pentingnya penerapan persandian dalam mendukung

perlindungan informasi pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan persandian belum berjalan seragam dan memerlukan penguatan kebijakan daerah serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Upaya peningkatan urusan persandian dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan mendorong peningkatan kompetensi aparatur, baik melalui pendidikan dan pelatihan teknis persandian, sertifikasi keamanan informasi, maupun bimbingan teknis secara berkelanjutan. Selain itu, dilakukan optimalisasi penugasan pegawai yang menangani persandian serta peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait guna memastikan ketersediaan SDM yang kompeten dan mampu mendukung layanan pengamanan informasi pemerintahan daerah.
b) Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, dilakukan pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pendukung persandian secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Upaya ini meliputi pengadaan dan penguatan sistem pengelolaan persandian, perangkat pengamanan informasi, serta peningkatan integrasi sarana pendukung dengan sistem elektronik pemerintahan. Selain itu, dilakukan pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia agar dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan.
c) Pada aspek kebijakan, dilakukan penguatan regulasi daerah dan penyusunan pedoman teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar pelaksanaan urusan persandian yang terintegrasi dan seragam di seluruh perangkat daerah. Upaya ini disertai dengan peningkatan sosialisasi dan koordinasi lintas perangkat daerah guna menumbuhkan pemahaman dan komitmen terhadap pentingnya persandian dan keamanan informasi. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terimplementasi secara konsisten, diharapkan tata kelola persandian dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung perlindungan informasi pemerintahan daerah.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan persandian diketahui capaian program adalah 100% dan capaian kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan persandian dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu: Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.51 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Persandian di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	%	94,35	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan tabel tersebut, Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang optimal, yaitu terealisasi sebesar 100%, sesuai dengan target tahun berjalan maupun target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh desa dan kelurahan telah mengimplementasikan tanda tangan elektronik secara efektif dalam mendukung layanan administrasi pemerintahan. Penerapan tanda tangan elektronik tersebut tidak hanya meningkatkan aspek keamanan

dan keabsahan dokumen administrasi, tetapi juga mendorong percepatan layanan, efisiensi proses birokrasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang berbasis digital.

16. Urusan Kebudayaan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui 2 (dua) program yang meliputi:

a) Program Pengembangan Kebudayaan.
b) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.52 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kebudayaan**	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Kesenian yang Dikembangkan**	Persen	46,88	52,38	111,73		
				1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen**	Persen	65	62,72	96,49	- Pelestarian budaya belum merata pada seluruh objek pemajuan kebudayaan - Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun SDM kebudayaan - Dokumentasi dan pemanfaatan data kebudayaan belumm optimal - jumlah pelaku budaya yang didata 716, jumlah pelaku budaya yang dibina 449	- Memprioritaskan objek pemajuan kebudayaan yang belum tersentuh program pelestarian - Memperkuat kolaborasi dengan komunitas budaya, lembaga pendidikan, dan tokoh adat - Peningkatan Kualitas Data dan Dokumentasi Budaya
				a Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	Objek	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pemanfaatan (objek)						
				b Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (orang)	Orang	100	170	170		
				2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional**	Persen	100	100	100		
				a Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (objek)	Objek	4	4	100		
				b Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	Laporan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pranata Tradisional (laporan)							
				B **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**	Persen	30,77	74,44	241,92	- Kesalahan penentuan target	
				1 **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Prosentase cagar budaya yang dilestarikan**	Persen	34	74,44	218,94	- Kesalahan penentuan target	
				a Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (obyek)	Objek	10	10	100		
				b Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (objek)	Objek	1	1	100		

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Capaian indikator Persentase budaya yang dilestarikan menunjukkan kinerja yang baik. Pada Tahun 2025, realisasi mencapai 63,41% dari target sebesar 38,82%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 163,34%. Meskipun demikian pencapaian yang signifikan ini mungkin juga memberikan beberapa permasalahan/kendala yang perlu diperhatikan. Berikut adalah analisis mengenai permasalahan/kendala :

a) Jangkauan pelestarian budaya belum merata pada seluruh objek pemajuan kebudayaan, terutama pada budaya yang berada di wilayah terpencil.
b) Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun SDM kebudayaan, masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelestarian budaya.
c) Dokumentasi dan pemanfaatan data kebudayaan belum sepenuhnya optimal sebagai dasar perencanaan program ke depan.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja di masa mendatang, beberapa strategi yang akan diimplementasikan:

a) Memprioritaskan objek pemajuan kebudayaan yang belum tersentuh program pelestarian secara optimal.
b) Memperkuat kolaborasi dengan komunitas budaya, lembaga pendidikan, dan tokoh adat dalam upaya pelestarian budaya.
c) Mengoptimalkan pendataan dan dokumentasi objek pemajuan kebudayaan sebagai basis perencanaan dan evaluasi.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan data capaian program dan kegiatan urusan Kebudayaan, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja program sebesar 176,83%, sedangkan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 138,48%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan urusan kebudayaan telah berjalan

baik, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan penguatan, khususnya pada aspek pemutakhiran data, pemerataan pelestarian, serta peningkatan dukungan sumber daya.

5) Capaian Kinerja Urusan

Di wilayah Kabupaten Kebumen banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi. Sebagian benda tersebut sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Benda peninggalan sejarah (objek diduga cagar budaya/ODCB) Kab Kebumen yang terdata sebanyak 133 objek dengan jumlah yang sudah dilakukan pelestarian sebanyak 99 objek.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan, khususnya yang merupakan kesenian dan kebudayaan asli Kebumen, adalah dengan menyelenggarakan festival seni dan budaya serta pelestarian objek diduga cagar budaya/ ODBC dan Cagar Budaya/CB. Penyelenggaraan festival seni dan budaya selain memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda, melestarikan seni budaya asli Kebumen dan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tabel III.53 Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2025

INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TAHUN 2025			TARGET AKHIR 2026	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase budaya yang dilestarikan	%	58,71	38,82	63,41	163,34	43,05	147,29

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. 2025

Capaian Persentase Budaya yang Dilestarikan pada Tahun 2025 mencapai 163,34% hal ini didukung oleh pelaksanaan program pelestarian budaya yang berjalan secara konsisten, meningkatnya keterlibatan pelaku dan komunitas budaya, serta adanya pembinaan dan fasilitasi terhadap objek dan pelaku budaya. Selain itu, dukungan pemerintah desa dan pihak terkait turut membantu menjaga

keberlanjutan upaya pelestarian budaya sehingga capaian indikator melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD.

Adapun Indikator Persentase budaya yang dilestarikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.54 Capaian Indikator Persentase Budaya yang Dilestarikan Tahun 2021-2025

TAHUN	PERSENTASE KESENIAN YANG DIKEMBANGKAN	PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	%	%	%	%	%
2021	0	60,66	20,82	30,33	145,67
2022	26,92	42,62	25,05	34,77	138,81
2023	76,15	44,44	29,82	60,30	202,21
2024	76,15	41,27	34,05	58,71	172,43
2025	74,44	52,38	38,82	63,41	163,34

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. 2025

Sebagai upaya untuk menilai kinerja pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya, digunakan indikator Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan. Indikator ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya daerah. Adapun capaian indikator tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.55 Indikator Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2021-2025

TAHUN	JUMLAH BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN	TOTAL BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG TERDATA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			%	%	%
2021	0	91	19,78	0	0
2022	35	130	21,98	26,92	122,47
2023	99	130	25,27	76,15	301,36
2024	99	130	27,47	76,15	277,23
2025	99	133	30,77	74,44	241,92

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. 2025

Perhitungan indikator Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan dilakukan dengan membandingkan

jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan terhadap total benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terdata, kemudian dikalikan 100 persen.

- Pada tahun 2021, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan belum tercatat, sehingga dari total 91 objek cagar budaya yang terdata, tidak terdapat objek yang dilestarikan. Dengan target sebesar 19,78%, realisasi indikator pada tahun tersebut adalah 0%, sehingga capaian kinerja juga 0%.
- Pada tahun 2022, terdapat peningkatan upaya pelestarian dengan 35 objek cagar budaya yang dilestarikan dari total 130 objek yang terdata. Realisasi persentase pelestarian mencapai 26,92%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 21,98%, sehingga capaian kinerja mencapai 122,47%.
- Selanjutnya pada tahun 2023, jumlah objek yang dilestarikan meningkat signifikan menjadi 99 objek dari total 130 objek cagar budaya yang terdata. Realisasi persentase pelestarian mencapai 76,15%, jauh melampaui target sebesar 25,27%, sehingga capaian kinerja mencapai 301,36%.
- Pada tahun 2024, jumlah objek cagar budaya yang dilestarikan masih tetap 99 objek dari total 130 objek yang terdata, sehingga realisasi persentase tetap sebesar 76,15%. Dengan target sebesar 27,47%, capaian kinerja pada tahun tersebut tercatat 277,23%, yang menunjukkan bahwa realisasi masih jauh melampaui target yang ditetapkan.
- Pada tahun 2025, jumlah objek cagar budaya yang dilestarikan masih 99 objek, sementara total objek yang terdata meningkat menjadi 133 objek. Kondisi ini menyebabkan realisasi persentase sedikit menurun menjadi 74,44%. Namun demikian, realisasi tersebut masih melampaui target yang ditetapkan sebesar 30,77%, sehingga capaian kinerja mencapai 241,92%.

Secara umum, capaian indikator ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya telah melampaui target yang ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan persentase akibat bertambahnya jumlah objek cagar budaya yang terdata.

Sementara itu, untuk mengukur upaya pengembangan kesenian daerah, digunakan indikator Persentase Kesenian yang Dikembangkan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan kesenian daerah dilaksanakan secara berkelanjutan. Adapun capaian indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.56 Indikator Persentase Kesenian yang Dikembangkan Tahun 2021-2025

TAHUN	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH KEBUDAYAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			%	%	%
2021	37	61	21,88	60,66	277,22
2022	26	61	28,13	42,62	151,52
2023	28	63	34,38	44,44	129,27
2024	26	63	40,63	41,27	101,57
2025	33	63	46,88	52,38	111,73

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. 2025

Perhitungan indikator Persentase Kesenian yang Dikembangkan dilakukan dengan membandingkan jumlah kegiatan pengembangan kesenian terhadap total kebudayaan yang ada, kemudian dikalikan 100 persen. Adapun rumus yang digunakan adalah jumlah kegiatan dibagi jumlah kebudayaan dikalikan 100%.

- Pada tahun 2021, jumlah kesenian yang terdata sebanyak 61 kesenian, dengan 37 kegiatan pengembangan yang dilaksanakan. Dengan target sebesar 21,88%, realisasi persentase mencapai 60,66%, sehingga capaian kinerja mencapai 277,22%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan kesenian jauh melampaui target yang telah ditetapkan.
- Pada tahun 2022, jumlah kesenian yang terdata masih 61 kesenian, namun jumlah kegiatan pengembangan yang dilaksanakan menurun menjadi 26 kegiatan. Realisasi persentase tercatat 42,62%, melampaui target sebesar 28,13%, dengan capaian kinerja 151,52%.
- Pada tahun 2023, jumlah kesenian yang terdata meningkat menjadi 63 kesenian, dengan 28 kegiatan pengembangan yang dilaksanakan. Realisasi indikator mencapai 44,44%, lebih tinggi dari target sebesar 34,38%, sehingga capaian kinerja tercatat 129,27%.

- Selanjutnya pada tahun 2024, jumlah kesenian yang terdata tetap 63 kesenian, sementara kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sebanyak 26 kegiatan. Realisasi persentase tercatat 41,27%, sedikit di atas target sebesar 40,63%, sehingga capaian kinerja mencapai 101,57%.
- Pada tahun 2025, jumlah kesenian yang terdata masih 63 kesenian, dengan 33 kegiatan pengembangan kesenian yang dilaksanakan. Realisasi indikator mencapai 52,38%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 46,88%, sehingga capaian kinerja tercatat 111,73%.

Secara umum, capaian indikator persentase kesenian yang dikembangkan selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang baik, karena realisasi setiap tahun selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun jumlah kegiatan pengembangan mengalami fluktuasi, upaya pengembangan kesenian daerah tetap menunjukkan tren positif dalam mendukung pelestarian dan penguatan kebudayaan daerah.

17. Urusan Perpustakaan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui 2 (dua) program sebagai berikut:

a) Program Pembinaan Perpustakaan.
b) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.57 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Perpustakaan**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A.**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	Persen	13,02	17,46	134,10		
					1		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pegelolaam Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten**	Persen	34,56	40,72	117,82		
						a.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten / kota sesuai standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten / kota sesuai kewenangannya	Perpustakaan	5	5	100		
						b.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten / kota	Orang	80	80	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah bahan perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	Eksemplar	1000	1137	113,7		
				d. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK	Perpustakaan	1	1	100		
				2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase jumlah pengunjung ke perpustakaan**	Persen	19,72	32,21	163,34		
				a. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	65	65	100		
				b. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	172	172	100		
				B. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Persentase Pelestarian koleksi dan Naskah Kuno**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah naskah kuno yang didaftarkan ke Perpustakaan Nasional**	Dokumen	1	1	100		
				a.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	1	1	100		

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Indikator Kinerja Utama, Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah tercapai sesuai target tetapi secara kualitas masih belum optimal karena :

a) Sebagian besar pustakawan sekolah belum mengikuti sertifikasi profesi pustakawan.
b) Semua perpustakaan desa dan kecamatan belum memiliki pustakawan.
c) Terbatasnya ketersediaan koleksi buku yang berkualitas.
d) Belum semua desa dan kecamatan memiliki gedung perpustakaan dan taman bacaan Masyarakat.
e) Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan sekolah, desa dan kecamatan.
f) Belum meratanya infrastruktur perpustakaan digital.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Melaksanakan peningkatan kapasitas pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan.
b) Mengusulkan formasi pustakawan desa dan kecamatan sesuai kebutuhan.
c) Menambah koleksi perpustakaan sekolah dan desa.
d) Mendorong sekolah, desa dan kecamatan untuk menyediakan gedung perpustakaan.
e) Mendorong sekolah, desa dan kecamatan untuk melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan.
f) Memfasilitasi perpustakaan digital untuk sekolah, desa dan kecamatan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan perpustakaan dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 117,05% atau kategori hasil Sangat Tinggi menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan

berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Capaian kinerja kegiatan rata-rata adalah 127,05%.

Keberhasilan pelaksanaan urusan ini dapat pula dibuktikan dengan adanya skor Indeks Peningkatan Literasi masyarakat menempati peringkat pertama di Jawa Tengah Tingkat Kabupaten dan peringkat ke 6 di Jawa Tengah tingkat Kabupaten/Kota. Perpustakaan daerah Kabupaten Kebumen memperoleh akreditasi A dan memperoleh penghargaan keberlanjutan inovasi pelayanan publik GWPC tahun 2024.

5) Capaian Kinerja Urusan

Kinerja urusan perpustakaan secara umum ditunjukkan dengan satu indikator yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2025 ditargetkan 12,96 dan terealisasi 16,91 atau telah tercapai bahkan melebihi target yang direncanakan. Hal ini dikarenakan adanya inovasi layanan perpustakaan, kerjasama dengan penggiat literasi, komunitas, aktif di media sosial, pengukuhan bunda literasi kabupaten dan duta literasi kabupaten. Secara lengkap capaian kinerja Urusan perpustakaan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.58 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	16,91	13,02	17,46	134,10	13,06.

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. 2025

Cara menghitung capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah Jumlah Semua Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dibagi aspek masyarakat x 100. Semakin banyak unsur pembangun Literasi Masyarakat maka semakin baik pula Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dihasilkan. Dari target kinerja tahun 2025 yaitu 13,02 terealisasi menjadi 17,46 sehingga capaian yang didapat 134,10%.

Secara rinci Indikator Kinerja Urusan perpustakaan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.59 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan

NO	URAIAN	TAHUN	
		2024	2025
1.	Jumlah perpustakaan (unit)	1.030	1.042
2.	Jumlah kunjungan perpustakaan (orang)	307.276	315.280
3.	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (Buku)	44.426	45.563
4.	Persentase pengunjung perpustakaan	31,45	32,2

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. 2025

18. Urusan Kearsipan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Kearsipan dilaksanakan melalui 2 (satu) program yaitu:

a) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
b) Program Pengelolaan Arsip.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.60 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kearsipan**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	9	9	100		
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	5	100		
				b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	4	4	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	28	25	89,28	Pensiun 2 orang, dan Mutasi 1 orang	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	8	8	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	8	8	100		
				b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	100		
				c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	100		
				d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	18	18	100		
				e. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	Paket	12	12	100		
				f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD	Laporan	40	40	100		
				g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Unit	4	20	500	Kesalahan penulisan target	
				a. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	6	100		
				b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin laiinya yang disediakan	Unit	14	14	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Bulan	12	12	100		
				a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Unit	129	186	144,19	Kesalahan penulisan target	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	100		
				b. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	71	71	100		
				c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	98	98	100		
				d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku**	Persen	78,24	85,88	109,76		
				1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku**	OPD	50	50	100		
				a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	50	50	100		
				b. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengelola Arsip Statis Daerah Kabupaten**	Kegiatan	2	2	100		
				a. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip statis	Arsip	4	4	100		
				3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Jumlah berkas arsip yang diunggah melalui JIKN**	Berkas	24	40	166,67		
				a. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	5	5	100		

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Seluruh Indikator Kinerja Utama, Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah tercapai sesuai target tetapi secara kualitas masih belum optimal hal ini dikarenakan :

a) Keterbatasan Kapasitas SDM kearsipan.
b) Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan.
c) Tingkat digitalisasi arsip belum optimal.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Pendampingan SDM Kearsipan pada perangkat daerah.
b) Penyediaan sarana prasarana sesuai kebutuhan.
c) Mengembangkan system digitalisasi arsip.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Kearsipan diketahui rata-rata capaian program adalah 104,88% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 156,76%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Kearsipan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah.

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.61 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	84,31	78,24	85,88	109,76	80,20

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. 2025

Capaian kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2023-2024 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2023 persentase unit kerja yang telah menerapkan arsip baku realisasi kinerja 74,51% dan capaian kinerja 100,27%, tahun 2024 realisasi kinerja tercapai 84,31% dan capaian kinerja 110,54%, sedangkan untuk capaian kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2025, menunjukan realisasi kinerja 85,88 % atau 438 perangkat daerah/pencipta arsip, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 78,24% atau 399 perangkat daerah/pencipta arsip dari total 510 perangkat daerah/pencipta arsip. Hal ini menunjukan capaian kinerja mencapai 109,76%.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip pada pencipta arsip dilaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan kearsipan. Hal ini bertujuan untuk tersedianya arsip yang autentik dan terpercaya guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Guna mendukung terwujudnya pencipta arsip yang menerapkan arsip secara baku juga dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga pengelolaan arsip menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.62 Perkembangan Penerapan Arsip Baku Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2025

URAIAN	2024	2025
Jumlah OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku	430	438
Jumlah OPD	510	510
Persentase OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku	84,31	85,88

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen. 2025

Keberhasilan pelaksanaan urusan ini dapat pula dibuktikan dengan diterimanya penghargaan peringkat 1 Pengawasan Kearsipan Tingkat Provinsi dan peringkat 3 Tingkat Nasional Tahun 2025 sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh kategori AA (sangat memuaskan) dengan nilai 96,71.

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.63 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kelautan dan Perikanan	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	Persen	0,37	0,69	185,57		
				1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah produksi perikanan tangkap**	Ton	9102,41	16891,58	185,57	Jumlah produksi perikanan tangkap realisasi melebihi target, dari target sebanyak 9.102,41 dapat terealisasai sebanyak 16.891,58 atau dengan capaian sebesar 185,57 dikarenakan adanya produksi ubur-ubur yang melimpah.	
				a Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Sarana	Jumlah Sarana Usaha Perikanan	Unit	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Usaha Perikanan Tangkap	Tangkap yang Terjamin dan Tersedia						
				2 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan**	Kelompok	31	31	100		
				a Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	130	130	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaanya	Kelompok	18	18	100		
				3 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional**	Unit	8	8	100		
				a Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat	Layanan	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pelelangan Ikan (TPI)						
				4 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kapal perikanan yang berijin**	Persen	41,33	41,80	101,14		
				a Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	615	622	101,14		
				B PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya**	Persen	18,58	19,03	102,41		
				1 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	**jumlah tanda daftar usaha perikanan budidaya yang ditertibkan**	Dokumen	115	116	100,87		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
				a Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi	115	116	100,87		
				2 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah produksi perikanan budidaya**	Ton	3.616,87	3.524,16	97,44	1) Masih adanya hama dan penyakit ikan yang mengganggu proses budidaya ikan, sehingga menurunkan produksi. 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana budidaya ikan bagi pokdakan 3) Biaya produksi tinggi (harga pakan, benih, dan sarpras lainnya) 4) Masih rendahnya manajemen SDM di Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	1) Pembinaan dan Pendampingan serta pemberian obat kepada pembudidaya ikan serta melaksanakan uji kesehatan ikan 2) Dengan minimnya sarana dan prasarana budidaya ikan yang dimiliki pokdakan, dan mahalnya biaya produksi ikan maka diperlukan bantuan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan bagi pokdakan, 3) Sehubungan dengan adanya keterbatasan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											anggaran APBD Kebumen, maka perlu disalurkan ke APBD Provinsi maupun APBN 4) Perlu pembinaan dan pemantauan bagi pokdakan agar mampu meningkatkan produktivitas budidayanya.
				a Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	65	71	109,23		
				c Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Daerah Kabupaten/Kota							
				d Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	130	140	107,69		
				e Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	3	3	100		
				C PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan**	Persen	92,86	92,86	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 **Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Jumlah perairan umum daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan**	Lokasi	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Orang	30	30	100		
				D PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan**	Persen	47,5	62,17	130,88		
				1 **Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah kelompok usaha garam (KUGAR) serta kelompok pengolah dan pemasaran (POKLAHSAR) yang mendapatkan pembinaan**	Kelompok	15	15	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub KegiatanPembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	15	15	100		
				2 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan dan garam**	Ton	916,90	1200,03	130,88		
				a Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu)	Ton	112,48	821,89	730,70	Capaian melebihi 100% disebabkan adanya pengolahan ubur-ubur kering di Ayah yang meningkat	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Daerah Kabupaten/Kota						
				b Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	7	7	100		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Adapun permasalahan pada Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

a) Masih terdapat keterbatasan kapasitas dan kompetensi pembudidaya dalam penerapan teknologi budidaya yang baik dan berkelanjutan. Sebagian pembudidaya belum sepenuhnya memahami manajemen pakan, pengendalian penyakit ikan sehingga produktivitas dan tingkat kelangsungan hidup ikan belum optimal. Hal tersebut menyebabkan rendahnya produksi perikanan. budidaya.
b) Ketersediaan dan kondisi fasilitas pendukung budidaya masih belum memadai. Selain itu, keterbatasan akses terhadap bantuan hibah sarana dan prasarana budidaya ikan turut berdampak pada rendahnya hasil produksi budidaya.
c) Keterbatasan anggaran untuk mendukung peningkatan produktivitas budidaya ikan.

3) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi pembudidaya melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan berkelanjutan.
b) Melakukan seleksi calon penerima hibah sarana dan prasarana budidaya ikan, serta mendorong pokdakan untuk mengakses bantuan melalui aspirasi pokok pikiran anggota dewan baik kabupaten, provinsi maupun pusat.
c) Mengusulkan bantuan sarpras, benih dan calon indukan bagi pembudidaya ikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan Kelautan dan Perikanan terdapat 4 (empat) program, dengan total capaian sebesar 518,86 atau rata-rata capaian kinerja program sebesar 129,72%. hal ini menghasilkan capaian telah memenuhi target

dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Jumlah kegiatan sebanyak 9 (Sembilan) dengan total capaian sebesar 1.015,81 sehingga rata-rata capaian sebesar 112,88%.

Capaian program yang capaiannya sangat tinggi atau lebih dari 125% sesuai dengan ketentuan efisiensi kinerja yaitu:

a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja program Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap yaitu sebesar 185,57% hal tersebut dikarenakan adanya hasil tangkapan ubur-ubur yang melimpah.
b) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator kinerja program Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan yaitu sebesar 130,88% hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pengolahan ubur-ubur kering di Ayah.

Selain itu, juga terdapat kegiatan yang tidak mencapai target atau kurang dari 100% sesuai ketentuan efisiensi kinerja, yaitu:

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan indikator kinerja Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yaitu sebesar 97,44% hal tersebut dikarenakan:

a) Masih adanya hama dan penyakit ikan yang mengganggu proses budidaya ikan, sehingga menurunkan produksi.
b) Masih kurangnya sarana dan prasarana budidaya ikan bagi pokdakan.
c) Biaya produksi tinggi (harga pakan, benih, dan sarpras lainnya).
d) Masih rendahnya manajemen SDM di Kelompok Pembudidaya Ikan.

5) Capaian Kinerja Urusan

Terdapat 1 Indikator Capaian Kinerja Utama Urusan Kelautan dan Perikanan pada RPJMD Tahun 2021-2026. Adapun capaian kinerja urusan kelautan sesuai dengan perjanjian kinerja dapat dijelaskan dengan tabel berikut ini:

Tabel III.64 Capaian Kinerja Urusan Perikanan Dan Kelautan

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan (IKU)	%	7,50	27,17	362,27	9,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. 2025

Tabel III.65 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Urusan Perikanan dan Kelautan

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tujuan: Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	359,02 Milyar Rupiah	424,69 Milyar Rupiah	118,29%
Sasaran : Meningkatnya Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan (IKU)	7,50%	27,17%	362,27%
	Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan (IKU)	Rp. 367.070.000.000,-	Rp. 424.690.000.000,-	115,70%
	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Pendukung IKU)	Rp. 154.950.000.000,-	Rp. 158.680.000.000,-	102,41%
	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Pendukung IKU)	Rp. 182.050.000.000,-	Rp. 219.710.000.000,-	120,69%
	Nilai Produksi Hasil Pengolahan Perikanan dan Garam (Pendukung IKU)	Rp. 30.070.000.000,-	Rp. 46.300.000.000,-	153,95%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. 2025

Data dasar tahun 2020 untuk 3 indikator pendukung IKU memperoleh nilai produksi yaitu;

a) Nilai Produksi perikanan budidaya Rp. 130.669.387.000.-
b) Nilai Produksi perikanan tangkap Rp. 196.258.500.419.-
c) Nilai produksi hasil pengolahan perikanan dan garam Rp. 7.042.821.000.-

Dari ketiga indikator diatas memperoleh nilai produksi sebesar Rp.333.970.708.419.- jika dimasukkan ke dalam rumus peningkatan maka terjadi peningkatan Nilai Produksi sebesar 27,17% dengan Nilai Produksi pada tahun 2025 sebesar Rp.- 424.690.000.000.-

$$\textit{Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan} = \frac{(\text{Rp } 424.690.000.000 - \text{Rp } 333.970.708.419)}{(\text{Rp. } 333.970.708.419)} \times 100\%$$

Dari Tabel diatas jika dimasukkan ke dalam rumus maka diperoleh Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Kelautan dan Perikanan sebesar 27,17% dari tahun dasar 2020. Dari target peningkatan 7,50% maka diperoleh capaian 362,27% dengan predikat “Sangat Baik”.

2. Urusan Pariwisata

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 4 program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b) Program Pemasaran Pariwisata;
c) Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; dan
d) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Adapun capaian kinerja program. kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.66 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Pariwisata**	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	6	6	100		
				a Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	7	175	kesalahan dalam penentuan target	target akan disesuaikan pada Perubahan DPA 2026
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	8	400	kesalahan dalam penentuan target	target akan disesuaikan pada Perubahan DPA 2026
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	4	200	kesalahan dalam penentuan target	target akan disesuaikan pada Perubahan DPA 2026
				b Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	45	44	97,78	1 orang Pensiun	
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	24	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	63	26	100	kesalahan dalam penentuan target	
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	23	23	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	7	7	100		
				b Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	16	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Sumber Daya Air dan Listrik	dan Listrik yang Disediakan						
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
					6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	unit	57	57	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	38	38	100		
						b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	5	5	100		
						c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	13	13	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100		
				B PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata**	Persen	88,39	88,69	100,34		
				1 Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (kegiatan)**	kegiatan	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kab/Kota yang dikembangkan	orang	250	250	100		
				2 Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola**	unit	9	6	66.67	3 obyek wisata dipihakketigakan yaitu Goa Jatijajar, PAP Krakal dan Pantai Karangbolong	
				a Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Destinasi Pariwisata kab/kota	dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupten/kota yang tersedia dan terpelihara	Unit	9	6	66.67	3 obyek wisata dipihakketigakan yaitu Goa Jatijajar, PAP Krakal dan Pantai Karangbolong	
				c Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	laporan	3	3	100		
				3 Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan**	Persen	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kab/Kota	Jumlah Usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	laporan	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Invetasi Pariwisata Kab/Kota	laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan**	Persen	33	30,20	91,51	- Pemanfaatan aset dan destinasi wisata masih terbatas - Sebagian kegiatan pariwisata masih bersifat non-profit dan lebih berorientasi pada pelayanan publik - Keterbatasan infrastruktur pendukung dan fasilitas destinasi - Promosi pariwisata belum optimal - Target peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 33% jika dibandingkan dengan target jumlah kunjungan di tahun dasar sebenarnya sudah tercapai. Namun karena formulasi peningkatan adalah berdasarkan tahun N-1 target tercapai 91,51% (target kunjungan tahun 2020 : 338.700 ;	- Menciptakan atraksi wisata baru atau memperbaiki yang sudah ada agar lebih menarik - Mengembangkan paket wisata premium atau layanan khusus seperti eco-tourism, wisata budaya, dan wisata petualangan - Meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas di destinasi wisata - Peningkatan promosi dan branding destinasi wisata(digital marketing, media sosial, dan influencer pariwisata, mengadakan event skala nasional/internasional di obyek wisata)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
													kunjungan tahun 2025 : 3.884.348)	
					1		**Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara**	orang	1,500,225	3,884,348	258,92	Keterangan: wisman 25 orang, wisnus 3.884.323 orang	
						a	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan/event pemasaran pariwisata yang dilaksanakan (kegiatan)	kegiatan	7	7	100		
				D			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina**	Persen	20	20	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 **Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	kegiatan	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Tingkat Dasar	orang	150	150	100		

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Pada Tahun 2025, kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD terealisasi sebesar 1,02%. Meskipun belum mencapai target tahunan sebesar 2,11%, realisasi tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata tetap memberikan kontribusi terhadap PAD daerah. Namun ada beberapa permasalahan dan kendala dalam sektor pariwisata yang perlu diperhatikan. Berikut adalah mengenai permasalahan/kendala yang terjadi:

a) Pemanfaatan aset dan destinasi wisata masih terbatas
b) Sebagian kegiatan pariwisata masih bersifat non-profit dan lebih berorientasi pada pelayanan publik.
c) Keterbatasan infrastruktur pendukung dan fasilitas destinasi.
d) Promosi pariwisata belum optimal.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Melihat capaian indikator Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar 1,02%, di bawah target 2,11%, sektor pariwisata perlu merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Berikut adalah beberapa strategi yang akan diimplementasikan:

a) Menciptakan atraksi wisata baru atau memperbaiki yang sudah ada agar lebih menarik
b) Mengembangkan paket wisata premium atau layanan khusus seperti eco-tourism, wisata budaya, dan wisata petualangan
c) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas di destinasi wisata
d) Peningkatan promosi dan branding destinasi wisata(digital marketing, media sosial, dan influencer pariwisata, mengadakan event skala nasional/internasional di obyek wisata),

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja program adalah sebesar 97,96%, sedangkan rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah sebesar 111,42%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program urusan pariwisata telah berjalan baik.

Dari data diatas terlihat bahwa rata-rata capaian kegiatan jauh mengungguli rata-rata capaian program sebesar 13,46%. Hal ini dikarenakan pada capaian salah satu kegiatan yakni Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara terealisasi sebanyak 3.884.348 orang dari yang ditargetkan untuk tahun 2025 sebesar 1.500.225 orang di RPJMD 2021-2026. Sehingga capaian pada kegiatan tersebut mencapai 258,92%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pariwisata dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Capaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 diukur melalui indikator Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator ini menggambarkan sejauh mana aktivitas sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Perkembangan capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.67 Indikator Kontribusi Pendapatan Pariwisata Terhadap PAD

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Kontribusi Pendapatan Pariwisata Terhadap PAD	%	1,83	2,11	1,02	48,34	2,24	45,53

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. 2025

Kinerja urusan pariwisata Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 Pada indikator Kontribusi Pendapatan Pariwisata terhadap PAD terealisasi sebesar 1,02% dari target sebesar 2,11%, dengan capaian kinerja sebesar 48,34%, dimana PAD tercatat sebesar Rp

544.364.765.209,00 dengan realisasi pendapatan pariwisata sebesar Rp 5.573.621.300,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya kualitas dan daya saing destinasi pariwisata, yang ditandai dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta pengelolaan destinasi yang belum berstandar. Selain itu, efektivitas promosi dan pemasaran pariwisata, khususnya melalui pemanfaatan media digital dan jejaring kemitraan, masih belum optimal sehingga berdampak pada belum maksimalnya peningkatan kunjungan wisatawan dan kontribusi pendapatan terhadap PAD.

Capaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Kebumen tahun 2025 menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD masih perlu ditingkatkan melalui upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kedepan, peningkatan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata perlu didorong melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan destinasi yang berstandar, serta penguatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis digital dan kemitraan strategis. Dengan langkah tersebut, diharapkan sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PAD sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari capaian tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen berkomitmen untuk terus meningkatkan pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara lebih optimal melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penguatan promosi pariwisata, serta pengembangan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan serta kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Urusan Pertanian

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Pertanian dilaksanakan melalui 6 (enam) program. Adapun capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
e) Program Perizinan Usaha Pertanian.
f) Program Penyuluhan Pertanian.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.68 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
	Pertanian	**Dinas Pertanian dan Pangan**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A.**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	Persen	12,79	13,37	104,53		
					1		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase penyediaan sarana pertanian**	Persen	69	72,54	105,13		
						a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	2	100		
						b	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana	Laporan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Pendukung Pertanian							
					2		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase luas area tanaman pertanian/ perkebunan yang difasilitasi**	Persen	0,79	0,06	7,59		
						a	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	3	3	100		
						b	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	2	100		
						c	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Verietas Unggul Baru (VUB)	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					3		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan pemenuhan pakan ternak**	Persen	124,78	128,96	103,35		
						a.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	1	1	100		
					4		**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**Persentase tingkat pengecer obat hewan yang diawasi**	Persen	10	9,52	95,2		
						a	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1	1	100		
					5		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam**	**Persentase ternak sapi yang mendapatkan kartu ternak dan surat keterangan layak bibit**	Persen	3,23	3,85	119,20		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Daerah Kabupaten/Kota							
						a	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Laporan	1	1	100		
						b	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Laporan	1	1	100		
				B			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak**	Persen	26	23,39	89,96		
					1		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pendukung pertanian lainnya**	Kegiatan	2	2	100		
						a	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						b	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Jumlah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	1	100		
					2		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian**	Unit	16	16	100		
						a	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	4	100		
						b	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	2	100		
						c	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun,	Unit	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Prasarana Pertanian Lainnya	Direhabilitasi dan Dipelihara						
						d	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	4	4	100		
						e	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	2	2	100		
					3		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak**	Kecamatan	26	26	100		
						a	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular**	Persen	2,98	0,31	10,40	Dalam penyusunan RENSTRA 2021-2026 penetapan target hanya ada 8 jenis penyakit hewan menular, namun di Tahun 2022 terdapat kejadian Penyakit Infeksi Baru (Penyakit Mulut dan Kuku/ PMK) dan menjadi endemis sampai Tahun 2025 ini. Gejala klinis BEF (Bovine Empheral Fever) yang mirip dengan PMK membuat penurunan kasus hewan menular hanya 5 kasus (0,31 persen) yang seharusnya turun 46 kasus (2,98 persen) dibandingkan Tahun 2024. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan diperlukan sebanyak 46 penurunan kasus	Dilakukanya vaksinasi lanjutan serta pengendalian PMK dan penyakit hewan menular lainnya yang ditopang oleh anggaran APBD.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										penyakit dari Tahun 2024, sehingga penurunan kasus belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.	
				1 **Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penurunan kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)**	Ekor	1736	1581	91,07	Adanya kejadian kasus penyakit menular PMK yang sudah terkendali, sehingga penurunan kasus penyakit hewan menular rendah.	
				a Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	1	1	100		
				2 **Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemeriksaan hewan dan produk hewan**	Kali	3200	4438	138,69		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	1	1	100		
				b Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	1	1	100		
				3 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia**	Kali	20000	21916	109,58		
				a Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1	1	100		
				4 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan	**Jumlah unit usaha produk hewan yang menerapkan Persyaratan**	Unit	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Masyarakat Veteriner	**Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**						
						a	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1	100		
						b	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	1	100		
					5		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Jumlah unit usaha yang memperoleh pendampingan dalam penerapan kesejahteraan hewan**	Unit	4	4	100		
						a	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				D			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	Persen	2,73	0,59	21,61		
					1		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Luas area pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Ha	2555	555	21,72	2000 ha merupakan target luasan AUTP yang tidak dilaksanakan karena tidak ada subsidi AUTP dari pusat	
						a	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	555	555	100		
						b	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan	2	2	100		
				E			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Rekomendasi**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Izin Usaha Pertanian							
					1		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rekomendasi izin usaha pertanian**	Persen	100	100	100		
						a	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1	1	100		
					2		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**Persentase rekomendasi izin usaha peternakan**	Persen	100	100	100		
						a	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan,	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rumah Potong Hewan	Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan						
				F PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian**	Persen	59	59	100		
				1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Skor rata-rata kategori nilai prestasi kerja penyuluh dan kategori penilaian kelas kelompok tani**	Poin	3	3	100		
				a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	34	34	100		
				b Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	Unit	50	50	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/ UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Ditingkatkan Kapasitasnya						
							c	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	4	4	100		
							d	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	128	128	100		
							e	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	1	1	100		

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Urusan Pertanian antara lain:

a) Belum adanya pengawas obat hewan di Kabupaten Kebumen.
b) Masih kurangnya sumber daya manusia (dokter hewan dan paramedis kesehatan hewan) dalam menangani kasus penyakit hewan menular.
c) Masih kurangnya sarana dan prasarana PIB (Penyakit Infeksi Baru) yaitu PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan penyakit (LSD) Lumpy Skin Disease diluar prediksi.
d) Adanya target pengawasan pelaku usaha pengecer obat hewan, (satu puskeswan, satu pelaku usaha pengecer obat).
e) Tidak ada DAK Non Fisik Tahun 2025 untuk Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Kebumen.
f) Adanya program DAPAT (Dana Afrmasi Pertanian Agribisnis Terpadu) yang sudah tidak teranggarkan di Tahun 2025, sehingga luasan area yang difasilitasi pada kegiatan pengelolaan sumberdaya genetik SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten kebumen tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
g) Premi AUTP merupakan anggaran sharing dari pemerintah provinsi dan kabupaten, sehingga luasan AUTP seluas 2000 HA tidak dapat terealisasi.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Mengajukan permohonan pelatihan POH (Pengawas Obat Hewan).
b) Mengusulkan penambahan formasi dokter hewan dan paramedis kesehatan hewan.
c) Peningkatan alokasi sarana prasarana kesehatan hewan di tahun berikutnya.
d) Penyesuaian target di tahun berikutnya.
e) Pengajuan proposal dari sumber dana lainnya (APBN, APBD Provinsi).
f) Pengajuan anggaran dari sumber dana lainnya (APBN, APBD Provinsi) guna pencapaian target luas area yang difasilitasi.

g) Sosialisasi AUTP secara mandiri.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Pertanian diketahui rata-rata capaian program adalah 71,08% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 93,62%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pertanian dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatkan kegiatan ekonomi sektor primer.

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.69 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pertanian	%	14,33	5	42,59	851,79	6

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. 2025

Indikator kinerja persentase peningkatan nilai produksi pertanian Kabupaten Kebumen telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan kategori sangat baik. Capaian indikator kinerja 42,59% diperoleh dengan formulasi Pengukuran = (nilai produksi pertanian tahun (n) dalam rupiah - nilai produksi pertanian tahun 2020 dalam rupiah) / nilai produksi pertanian tahun 2020 dalam rupiah x 100%. Nilai produksi pertanian tahun 2020 sebesar Rp.4.535.602.068.918,00 dan nilai produksi tahun 2025 sebesar Rp. 6.467.301.540.970,00 yang terdiri dari nilai produksi peternakan (daging dan telur), tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura (buah - buahan, sayur – sayuran, biofarmaka), dan perkebunan.

4. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Energi Baru Terbarukan dilaksanakan melalui program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.70 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan ESDM Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Urusan ESDM**	**Dinas Tenaga Kerja**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Persentase pengelolaan energi baru terbarukan**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah dokumen penatausahaan izin Pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota**	Dokumen	1	1	100		
				a Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Peanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Derah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penatausahaan izin Pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	100		

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Program Energi Baru Terbarukan dengan indikator Pengelolaan energi baru terbarukan sudah mencapai target 100%, namun dalam hal ini sering dijumpai permasalahan terkait keterbatasan teknologi,infrastruktur dan ketergantungan dengan kondisi alam.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Dilaksanakan Sosialisasi potensi panas bumi kepada warga sekitar lokasi sumber panas bumi di Kabupaten Kebumen.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan ESDM diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 100%, sedangkan rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Berdasarkan tabel capaian IKU dan kegiatan urusan ESDM diketahui capaian kinerja program adalah 100%.

Tabel III.71 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan Indikator Kinerja Urusan Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja 100%.

5. Urusan Perdagangan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 6 (enam) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
c) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
d) Program Pengembangan Ekspor.
e) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
f) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.72 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Perdagangan**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	34	34	100		
						a	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	100		
						b	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	12	100		
					2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	111	106	95,50	Jumlah ASN (PNS 87 orang, CPNS 15 orang P3K 4 orang)	
				b Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	51	51	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				b Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	24	200	Rencana 12 paket menjadi 24 paket karena adanya penambahan anggaran yang disebabkan meningkatnya intensitas kegiatan rapat kedinasan sebanyak 3 paket, rapat koordinasi sebanyak 5 paket dan penerimaan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										jamuan tamu sebanyak 16 paket. Namun target tidak dilakukan perubahan.	
				c Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				f Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				g Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	Unit	7	12	171,43		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	12	171,43	Rencana kebutuhan 7 Unit, membutuhkan 12 Unit karena pengadaan diprioritaskan sesuai kebutuhan untuk Studio Live di Pasar Tumenggungan (Merubah rincian obyek sesuai dengan prioritas kebutuhan)	Mengusulkan perubahan uraian pada obyek belanja
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah terpelihara**	Unit	81	81	100		
				a Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	62	77	124,19	Keterangan: 1. Mobil 9 unit 2. Amrol 4 Unit 3. Viar 10 unit 4. Motor 54 unit Rencana kebutuhan 62 Unit, membutuhkan 77 Unit karena pemeliharaan diprioritaskan sesuai kebutuhan	Akan diperbaiki untuk DPA tahun selanjutnya
				b Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	4	100		
				B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Nilai Pendapatan Retribusi Pasar**	Rupiah	6.279.720.000	6.806.319.669	108,39	Keterangan: Capaian Retribusi Pasar: 1. UPTD I = 100,21%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										2. UPTD II = 117,24% 3. UPTD III = 98,19% 4. UPTD IV = 111,16%	
				1 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola**	Unit	4	4	100		
				a Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Unit	5	5	100		
				b Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Unit	4	4	100		
				2 Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Jumlah hasil pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan**	Dokumen	4	4	100		
				a Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Dokumen	4	4	100		
				b Subkegiatan Pemberdayaan	Jumlah dokumen hasil pembinaan	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan						
				C PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar**	persen	±1,50	0,02	100	Keterangan: Target inflasi ±1,5% Realisasi 100% karena Stabilisasi harga masih terkendali karena masih dalam rentang ±1,5% Rumus: (rata-rata harga barang kebutuhan pokok* tahun (n) - rata-rata harga barang kebutuhan pokok* tahun (n-1)) / rata-rata harga barang kebutuhan pokok* tahun (n-1) x 100% *)pada pasar yang tercover aplikasi SIMBOK	
				1 Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	**Jumlah kegiatan pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting**	Kali	381	387	101,57		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							
				a Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	381	387	101,57		
				2 Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Jumlah hari pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting**	Hari	365	365	100		
				a Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	365	365	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				D PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Nilai Ekspor Perdagangan**	Rupiah	2.200 Juta	48.238 Juta	2.192,64		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pembinaan pengembangan usaha produk ekspor**	Kegiatan	1	1	100	Kegiatan Pelatihan Ekspor yang dilanjutkan dengan pengiriman 3 pelaku usaha untuk mengikuti Trade Expo Indonesia (Temu Bisnis)	
				a Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	Pelaku Usaha	3	3	100	3 Pelaku usaha mengikuti Trade Expo Indonesia (CV. Fauzi Anugerah Sejahtera, PT. Hury Rudraksha Indonesia, PT. Mutiara Berkah Insani)	
				E PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase UTTP yang Tertera**	persen	44,16	52,74	119,43	Keterangan: Jumlah UTTP yang bertanda tera sah (7.744) dibagi potensi UTTP (14.683) dikali 100 persen	
				1 Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,	**Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal**	Unit	2250	7744	344,18	Keterangan: Target 2.250 hanya timbangan Realisasi 7.744 : penambahan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tera Ulang, dan Pengawasan						sasaran anak timbangan yang wajib dilakukan tera tera ulang secara bersamaan, dengan rincian sebagai berikut: Alat Ukur : 2 Alat Takar : 434 Alat Timbangan : 2.591 Alat Perlengkapan (Anak Timbangan) : 4.717	
				a Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	2250	7744	344,18	Keterangan: Target 2.250 hanya timbangan Realisasi 7.744 : penambahan sasaran anak timbangan yang wajib dilakukan tera tera ulang secara bersamaan, dengan rincian sebagai berikut: Alat Ukur : 2 Alat Takar : 434 Alat Timbangan : 2.591 Alat Perlengkapan (Anak Timbangan) : 4.717	
				F PROGRAM PENGGUNAAN DAN	**Capaian pemasaran produk UMKM**	Persen	73,27	73,92	100,89		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
				1 Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Jumlah kegiatan fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota**	Kegiatan	6	6	100		
				a Subkegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	UMKM	50	256	512	Perubahan Konsep yang pada awalnya yang dianggarkan dalam 1 (satu) stand diisi 1 (satu) ukm tapi pada realisasinya dapat diisi oleh produk beberapa UKM 1. Temu Bisnis Pelaku UKM dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan : 52 UMKM 2. Promosi Bazar produk unggulan UMKM di TMII : 9 UMKM 3. Pameran Jogja Fashion Week : 5 UMKM 4. Kebumen Fest : 93 UMKM	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										5. Pameran Inacraft : 6 UMKM 6. Pameran Kebumen Wastra dan Kriya Festival : 91 UMKM	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di urusan Perdagangan antara lain:

a) Jumlah SDM pengelola pasar masih terbatas sehingga beban kerja tidak seimbang dengan kebutuhan operasional 41 pasar rakyat yang tersebar pada 4 UPTD Pasar. Dari sisi kualitas, kemampuan SDM berada pada level menengah sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi standar pelayanan kebersihan pasar dan penataan pendapatan retribusi secara optimal.
b) Ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan maupun pendukung pelayanan retribusi masih tergolong sangat kurang. Banyak pasar belum memiliki fasilitas kebersihan memadai seperti armada pengangkut sampah, tempat penampungan sementara, maupun peralatan operasional harian. Sistem penarikan retribusi telah menggunakan e-retribusi, namun pelaksanaannya masih terkendala pada mesin/perangkat yang sudah lama sehingga tidak sepenuhnya responsif dan memerlukan pengaturan waktu penggunaan agar tetap optimal. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pelayanan dan pencatatan retribusi di lapangan.
c) Pengelolaan pemeliharaan pasar rakyat masih terhambat oleh keterbatasan dukungan anggaran. Ketersediaan anggaran operasional yang rendah menyebabkan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar rakyat tidak dapat dipenuhi secara memadai.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Melakukan optimalisasi dan penataan SDM sesuai kebutuhan lapangan, disertai peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis terkait pelayanan pasar, kebersihan, dan pengelolaan retribusi. Penegasan uraian tugas dan supervisi lapangan juga diperlukan agar kinerja lebih terukur dan konsisten.
b) Melakukan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana secara terstruktur berbasis jumlah pasar dan volume aktivitas. Mendorong pengadaan bertahap melalui APBD maupun kemitraan agar fasilitasi kebersihan, armada angkut, peralatan operasional, serta sistem pencatatan retribusi dapat terpenuhi. Selain itu, diperlukan

sosialisasi pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai bagian dari operasional pasar.

c) Memperkuat dukungan regulasi dan penganggaran pemeliharaan pasar rakyat sejumlah 41 pasar rakyat melalui APBD maupun kemitraan sehingga menjadi langkah strategis peningkatan pelayanan secara berkelanjutan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan perdagangan diketahui rata-rata capaian program adalah 453,56% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 124,40%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan perdagangan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.73 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	9,21	4,16	5,49	131,97	4,45

Sumber: Data diolah oleh BPS Kebumen, 2025

Sesuai data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen untuk PDRB ADHB pada Perdagangan dari target 4,16% telah terealisasi 5,49% dengan capaian kinerja mencapai 131,97%. Capaian PDRB yang menurun dari tahun 2024, adapun penurunan capaian tersebut diidentifikasikan sebagai berikut:

a) Kategori tetap tinggi – meskipun terjadi penurunan capaian kinerja, namun kinerja Disperindagkukm masih berada pada kategori Sangat Baik, sehingga tidak mengindikasikan penurunan kualitas kinerja secara substansial.
b) Variasi capaian antar program – adanya perbedaan capaian pada beberapa program/kegiatan prioritas mempengaruhi perhitungan rata-rata, walaupun secara agregat pelayanan dan output tetap berjalan dengan baik.
c) Upaya konsolidasi dan efisiensi – sebagian capaian program tahun 2025 lebih diarahkan pada konsolidasi, penguatan kualitas, dan efisiensi, bukan sekadar peningkatan kuantitatif, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya tercermin dalam angka evaluasi.

Dengan demikian, penurunan capaian bukan berarti melemahnya kinerja, melainkan penyesuaian target indikator yang lebih realistis, fokus pada kualitas, dan tetap konsisten berada di level Sangat Baik. Ke depan, Disperindagkukm akan terus memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kegiatan agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal serta berkelanjutan.

6. Urusan Perindustrian

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yang meliputi:

a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.74 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Perindustrian**	**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai**	Persen	20,43	32,98	161,43	Harga produk gula semut dan gula cetak tahun 2025 naik dari harga tahun sebelumnya (Th 2024 harga gula semut = Rp 19.500,-; gula cetak = Rp 16.000,- Sedangkan pada Th 2025 harga gula semut = Rp 20.000,-; gula cetak = Rp 18.000,-)	
				1 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Jumlah Industri yang terbina**	Orang	60	60	100		
				a Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Perwilayahan Industri	Perwilayahan Industri						
						b	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	2	2	100		
						c	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	100		
						d	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	2	100		
				B			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha**	**Jumlah dokumen perijinan industri yang terfasilitasi**	Dokumen	89	89	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								
						a	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri kecil dan industri menengah yang berlokasi di satu kab./kota sepanjang merupakan Penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	89	89	100		
				C			**PROGRAM PENGELOLAAN**	**Jumlah Dokumen**	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Informasi Industri**						
				1 Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Informasi Data Industri**	Dokumen	1	1	100		
				a Subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	100		

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Urusan Perindustrian antara lain:

a) Masih adanya perbedaan pemahaman Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap kebijakan perindustrian, perencanaan pembangunan industri, standar mutu produk, legalitas usaha, serta kewajiban pelaporan data industri.
b) Terbatasnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan industri, antara lain alat produksi yang dapat difasilitasi, perlunya pemeliharaan fasilitas pendukung industri (SIHT), perangkat pendukung komunikasi pelayanan, serta perlunya pemeliharaan sistem dan aplikasi pendataan industri.
c) Masih rendahnya keterlibatan dan kepatuhan pelaku industri dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perindustrian, perizinan usaha, serta pelaporan data industri sehingga perlu ditingkatkan.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, sosialisasi, serta pendampingan kepada IKM terkait kebijakan perencanaan pembangunan industri, standar mutu, legalitas usaha, perizinan industri, dan pelaporan data industri.
b) Melakukan fasilitasi bantuan alat produksi sesuai prioritas ketersediaan anggaran, pemeliharaan dan peningkatan fasilitasi pendukung industri (termasuk SIHT), serta pemanfaatan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi pendukung kegiatan perindustrian.
c) Mendorong keterlibatan aktif IKM dalam pelaksanaan kebijakan perindustrian, peningkatan kepatuhan data industri secara rutin sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Perindustrian diketahui rata-rata capaian program adalah 120,48% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%. Ini menunjukan

pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Perindustrian dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.75 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Prosentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	12,00	5,19	10,11	194,80	4,93

Sumber: Diolah oleh BPS Kebumen. 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dinilai atas dasar harga pada tahun berjalan. PDRB tahun 2024 tercapai 12,00%, untuk target tahun 2025 adalah 5,19% dan tercapai sebesar 10,11%. Capaian PDRB yang menurun dari tahun 2024, adapun penurunan capaian tersebut diidentifikasikan sebagai berikut:

a) Kategori tetap tinggi – meskipun terjadi penurunan capaian kinerja, namun kinerja Disperindagkukm masih berada pada kategori Sangat Baik, sehingga tidak mengindikasikan penurunan kualitas kinerja secara substansial.
b) Variasi capaian antar program – adanya perbedaan capaian pada beberapa program/kegiatan prioritas mempengaruhi perhitungan rata-rata, walaupun secara agregat pelayanan dan output tetap berjalan dengan baik.
c) Upaya konsolidasi dan efisiensi – sebagian capaian program tahun 2025 lebih diarahkan pada konsolidasi, penguatan kualitas, dan

efisiensi, bukan sekadar peningkatan kuantitatif, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya tercermin dalam angka evaluasi.

Dengan demikian, penurunan capaian bukan berarti melemahnya kinerja, melainkan penyesuaian target indikator yang lebih realistis, fokus pada kualitas, dan tetap konsisten berada di level Sangat Baik. Ke depan, Disperindagkukm akan terus memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kegiatan agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal serta berkelanjutan.

7. Urusan Transmigrasi

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan transmigrasi dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Adapun capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.76 Capaian Program, Kegiatan sub Kegiatan Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
	Transmigrasi	**Dinas Tenaga Kerja**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Transmigran yang Ditempatkan**	Persen	20	10	50	Terbatasnya jumlah kuota yang diterima dari Provinsi Jawa Tengah (1 tahun 1 KK)	Mengusulkan penambahan kuota ke Kementerian Transmigrasi
					1		**Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Calon Transmigran yang dtempatkan**	KK	2	1	50	Terbatasnya jumlah kuota yang diterima dari Provinsi Jawa Tengah (1 tahun 1 KK)	Mengusulkan penambahan kuota ke Kementerian Transmigrasi
						a	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	KK	2	1	50	Terbatasnya jumlah kuota yang diterima dari Provinsi Jawa Tengah (1 tahun 1 KK)	Mengusulkan penambahan kuota ke Kementerian Transmigrasi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di urusan transmigrasi antara lain:

a) Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada, terbatasnya jumlah dan kompetensi aparatur (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat) yang menangani urusan transmigrasi.

b) Kegiatan Fasilitasi Transmigrasi sangat tergantung pada kuota dari pusat sehingga belum bisa memenuhi harapan masyarakat untuk dapat ikut serta transmigrasi. Terbatasnya kuota alokasi penempatan transmigrasi pada tahun 2025 Kebumen mendapat alokasi sebanyak 1 Kepala Keluarga yaitu ke Dusun I Lagading Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga tidak dapat memenuhi target transmigrasi yang ditempatkan. Transmigrasi merupakan program given dari Provinsi Jateng sehingga Kabupaten Kebumen hanya dapat melaksanakan penempatan transmigrasi sesuai alokasi kuota transmigrasi tersebut.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Untuk mendukung pencapaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan urusan Transmigrasi, diperlukan penguatan sumber daya manusia. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pemenuhan kebutuhan aparatur yang menangani urusan transmigrasi seperti Penggerak Swadaya Masyarakat melalui penambahan dan penataan personel, baik ASN maupun tenaga pendukung, serta peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis bidang transmigrasi. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pendampingan, dan pemantauan program transmigrasi, serta optimalisasi pembagian tugas dan beban kerja sesuai kompetensi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan urusan transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.

b) Aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia dan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terkait kuota transmigrasi dengan mempertimbangkan tingginya animo masyarakat yang mendaftar program transmigrasi.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan transmigrasi diketahui rata-rata capaian kinerja Program adalah 50% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 50%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Pada tahun 2025 dilaksanakan program dan kegiatan transmigrasi, capaian kinerja Urusan Transmigrasi ditunjukkan dengan jumlah fasilitasi transmigrasi penduduk Kabupaten Kebumen. Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.77 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Transmigran yang Ditempatkan	%	10	20	10	50	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. 2025

Dari tabel diatas diketahui pada tahun 2025 target transmigran adalah 2 KK, tetapi hanya dapat diberangkatkan 1 KK. Untuk jumlah KK yang ditargetkan dari tahun 2025 sampai 2026 setiap tahunnya sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel III.78 Target Transmigran Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target Jumlah KK yang difasilitasi untuk bertransmigrasi	10 KK	10 KK	4 KK	4 KK	2 KK	1 KK
Realisasi Jumlah KK yang difasilitasi untuk bertransmigrasi	0 KK	0 KK	3 KK	2 KK	1 KK	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. 2025

3.1.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Fungsi Perencanaan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan) dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
c) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
d) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.79 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Perencanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	%	100	100	100		
				1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Unit	49	49	100		
				a Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	100		
				b Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100		
				c Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	33	33	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								dibayarkan Pajaknya						
					2		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan Diklat dalam satu tahun**	Kegiatan	1	1	100		
						a	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	100		
					3		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	4	4	100		
						a	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100		
						b	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	58	58	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8	8	100		
				b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	100		
				5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						a	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
						b	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	3	3	100		
						c	Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	3	100		
						d	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	100		
						e	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100		
						f	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	250	100		
				6 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	11	11	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	100		
				7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	55	49	89.09	Terdapat ASN 1 pensiun, 1 meninggal dunia, 5 mutasi keluar, dan 1 mutasi masuk	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
1	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**	**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**B**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**	Persen	90	100	111.11		
					1		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen perencanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan**	Dokumen	3	3	100		
						a	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	4	4	100		
						b	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)						
				2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah dokumen analisis perencanaan pembangunan daerah**	Dokumen	2	2	100		
				a Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	2	200	Ketidaksinkronan antara target dengan rincian yang tertuang di program dan kegiatan	Akan dilakukan perbaikan di dokumen perencanaan berikutnya
				3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah**	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						a	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	1	100		
				C			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Urusan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Urusan	21	21	100		
						a	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	100		
				2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumah urusan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Urusan	13	13	100		
				a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100		
				b Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
				3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun**	Urusan	4	7	175	Ketidaksinkronan antara target dengan rincian yang tertuang di program dan kegiatan	Akan dilakukan perbaikan di dokumen perencanaan berikutnya
				a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	100		
				D PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan**	Persen	83.33	87.12	104.55		
				1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**	Dokumen	10	15	150	Pada tahun 2025, dilaksanakan kegiatan yang menghasilkan output 5 (lima) Policy Paper dengan Perguruan Tinggi di	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dan Pengkajian Peraturan yang disusun					Kabupaten Kebumen. Adanya Dokumen Lokakarya Indepth Study Kemiskinan, Booklet Snapshot Kemiskinan, Booklet Pameran Wetan Prau, dan Pengumuman Pemenang Lomba Artikel Tahun 2025. Selain itu, pada tahun 2025 diselenggarakan program Risnov yang menghasilkan output awalnya 1 dokumen menjadi 4 dokumen laporan akhir serta adanya penambahan dokumen Kajian Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen 2025 dan Dokumen Kajian Analisis Prioritas Desa dan Penanganan Mitigasi Kekeringan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	1	100		
				2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah produk pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah**	Produk	6	10	166.67		
				a Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	6	10	166.67	Lomba Krenova tahun 2025 memiliki kategori baru, menjadi kategori umum dan pelajar, sehingga jumlah produk inovasi pada tahun 2025 bertambah awalnya 3 menjadi 6 produk inovasi. Sedangkan untuk Jurnal, Pemerintah Daerah memiliki 2 Jurnal yaitu Jurnal	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Semarak Kabumian dan Jurnal Krisakti. Selain itu, pada Tahun 2025 juga dilakukan fasilitasi pencatatan HKI dan juga dilaksanakan Lomba Apresiasi Inovasi Daerah (AIDA) Kabupaten Kebumen yang baru mulai diselenggarakan tahun ini.	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di urusan perencanaan antara lain:

a) Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mendukung kinerja dan pencapaian tujuan organisasi di Bapperida Kabupaten Kebumen. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi aparatur. Keterbatasan kesempatan diklat berdampak pada belum meratanya peningkatan kompetensi, khususnya dalam menghadapi tuntutan perencanaan pembangunan yang semakin kompleks dan adaptif. Selain itu, Bapperida Kabupaten Kebumen juga menghadapi kondisi kekosongan pada beberapa posisi SDM sesuai struktur organisasi dan kebutuhan jabatan. Kekosongan tersebut menyebabkan terjadinya beban kerja yang tidak seimbang, di mana sebagian pegawai harus merangkap tugas dan tanggung jawab di luar tupoksi utamanya. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program, kualitas koordinasi antar bidang, serta ketepatan waktu penyelesaian tugas.
b) Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Kebumen, khususnya dalam kegiatan perencanaan, koordinasi, pengolahan data, serta penyusunan dokumen pembangunan daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang memengaruhi efektivitas kerja organisasi. Salah satu permasalahan utama adalah kualitas jaringan internet yang belum stabil, sehingga berdampak pada terganggunya akses terhadap aplikasi perencanaan dan pelaporan berbasis daring, keterlambatan penginputan dan sinkronisasi data, serta kurang optimalnya pelaksanaan rapat dan koordinasi secara virtual. Selain itu, sarana pendukung rapat yang belum sepenuhnya memadai, seperti keterbatasan atau gangguan pada perangkat audio visual, proyektor, dan fasilitas konferensi daring, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan rapat koordinasi, baik internal maupun lintas perangkat daerah. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan fasilitas penyimpanan arsip, baik arsip fisik maupun digital, yang menyebabkan penataan dokumen belum

optimal dan berpotensi menyulitkan proses pencarian data serta pengamanan arsip. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat tingginya kebutuhan pengelolaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang bersifat strategis. Secara keseluruhan, keterbatasan sarana dan prasarana tersebut berdampak pada efisiensi kerja, kualitas layanan internal, serta optimalisasi kinerja Bapperida Kabupaten Kebumen.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bapperida Kabupaten Kebumen perlu melakukan perencanaan pengembangan SDM secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mendorong peningkatan partisipasi pegawai dalam pendidikan dan pelatihan, baik melalui diklat teknis, diklat fungsional, maupun pelatihan berbasis kompetensi yang relevan dengan tugas perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penataan dan penempatan pegawai secara proporsional diharapkan dapat mengurangi kekosongan jabatan serta menyeimbangkan beban kerja antar bidang. Sebagai langkah pendukung, optimalisasi SDM yang ada dapat dilakukan melalui penugasan internal yang terencana, peningkatan kerja sama tim, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas kerja. Dengan upaya tersebut, diharapkan kapasitas SDM Bapperida Kabupaten Kebumen dapat meningkat dan mampu mendukung kinerja organisasi secara lebih optimal dan berkelanjutan.
b) Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Bapperida Kabupaten Kebumen perlu melakukan peningkatan kualitas dan keandalan jaringan internet, antara lain melalui koordinasi dengan penyedia layanan, penyesuaian kapasitas bandwidth sesuai kebutuhan, serta penyediaan jaringan cadangan guna mengantisipasi gangguan teknis. Selanjutnya, diperlukan

peningkatan dan pemeliharaan sarana pendukung rapat secara bertahap, meliputi pengadaan atau pembaruan perangkat audio visual, fasilitas konferensi daring, serta pengaturan jadwal pemeliharaan rutin agar seluruh sarana dapat berfungsi secara optimal. Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas penyimpanan arsip, perlu dilakukan penataan dan penguatan sistem pengelolaan arsip, baik melalui penyediaan ruang dan peralatan arsip yang memadai maupun optimalisasi arsip digital berbasis teknologi informasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kerapian, keamanan, dan kemudahan akses terhadap dokumen. Sebagai langkah pendukung, diperlukan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang terintegrasi dengan kebutuhan organisasi serta peningkatan kesadaran pegawai dalam pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas kantor. Dengan upaya tersebut, sarana dan prasarana di Bapperida Kabupaten Kebumen diharapkan mampu mendukung kinerja organisasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan perencanaan diketahui rata-rata capaian program adalah 103,92% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 112,78%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan perencanaan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu:

a) Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut.

Tabel III.80 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perencanaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	100	100	100	100	100
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	%	85,71	83,33	87,12	104,55	91,67

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan tabel tersebut, Indeks Kualitas Perencanaan pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang optimal, yaitu terealisasi sebesar 100%, sesuai dengan target tahun berjalan maupun target akhir RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah. Capaian ini disebabkan oleh semakin baiknya koordinasi lintas perangkat daerah, penerapan regulasi perencanaan yang konsisten, serta peningkatan kapasitas perencana dalam menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas.

Sementara itu, Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2025 menunjukkan capaian 104,55%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 83,33% dan meningkat dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar 85,71%. Capaian yang melampaui target ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran perangkat daerah dalam memanfaatkan hasil kajian dan penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan, serta adanya dorongan integrasi hasil litbang ke dalam dokumen perencanaan dan program pembangunan daerah.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 91,67%, capaian ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja tahun berjalan sangat baik, masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan dan konsistensi pemanfaatan hasil penelitian di seluruh perangkat daerah secara merata. Tantangan tersebut antara lain masih terbatasnya diseminasi hasil penelitian, perbedaan tingkat

pemahaman antar perangkat daerah, serta belum optimalnya mekanisme monitoring pemanfaatan hasil penelitian.

Sebagai solusi atas kondisi tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

a) Penguatan koordinasi dan sinergi antara BAPPERIDA dengan perangkat daerah agar hasil penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan.
b) Peningkatan diseminasi hasil penelitian, baik melalui forum perencanaan, publikasi digital, maupun kegiatan sosialisasi, sehingga hasil kajian dapat diakses dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.
c) Integrasi hasil litbang ke dalam sistem perencanaan daerah, sehingga pemanfaatannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RKPD, Renstra, dan dokumen perencanaan lainnya.
d) Penguatan monitoring dan evaluasi, khususnya terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, agar capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan hingga akhir periode RPJMD.

Dengan pelaksanaan upaya tersebut, diharapkan kinerja urusan perencanaan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mampu mempertahankan capaian yang sudah optimal, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan kajian ilmiah

2. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
b) Program Kepegawaian Daerah.

c) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.81 Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**KEPEGAWAIAN**	**BKPSDM**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	8	8	100		
						a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	6	100		
						b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Laporan	2	2	100		
					2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	855	850	99,42	PPPK Penuh Waktu dari total 805 orang terbayar 803 (2 orang meninggal dunia).	Dibayarkan sesuai dengan jumlah pegawai yang ada
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	2	2	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	100		
						e	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	12	12	100		
						f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
						g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
					4		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan**	Unit	4	4	100		
						a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	4	4	100		
					5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Pemerintahan Daerah							
						a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	100		
						b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100		
						c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100		
					6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Unit	45	45	100		
						a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	23	23	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	22	22	100		
						c	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Julah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direh abilitasi	Unit	2	2	100		
				B			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase penempatan PNS dalam jabatan**	Persen	93	99,98	107,5		
					1		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN**	Kegiatan	3	3	100		
						a	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatanuntuk pelaksanaan pengadaan ASN	Dokumen	3	3	100		
						b	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan	Dokumen	630	702	111,43		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								administrasi pemberhentian						
						c	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Dokumen	12	12	100		
					2		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah kegiatan mutasi dan promosi yang dilaksanakan**	Dokumen	7	7	100		
						a	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Dokumen	3	3	100		
						b	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Dokumen	4	4	100		
					3		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya**	Orang	350	498	142,29		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	Orang	150	333	222	Adanya Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 yang mendukung kemudahan untuk pengakuan gelar pendidikan.	
				b Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	Orang	200	165	82,50	Jumlah ASN yang mendaftarkan kenaikan dan perpindahan jabatan fungsional 314 orang, yang tidak memenuhi syarat ada 149 orang.	Penerbitan SE Kepala BKPSDM Nomor 800/1046 Tahun 2025 Tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen agar dapat memenuhi syarat yang diamanatkan perundang-undangan.
				4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur**	Dokumen	10	10	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						a	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Dokumen	6	6	100		
						b	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Laporan	4	4	100		
				C			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya**	Persen	75,09	56,86	75,72	1. Adanya refocusing anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 sehingga tidak tercukupinya biaya pengiriman peserta ke lembaga penyelenggaran diklat. 2. Perubahan rincian objek belum disertai perubahan target.	1. Mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pemanfaatan metode pembelajaran daring dan blended learning sebagai langkah penyesuaian dalam rangka efisiensi anggaran. 2. Melakukan reviu dan penyesuaian target kinerja melalui mekanisme perubahan perjanjian kinerja atau dokumen perencanaan kinerja.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Pengembangan Kompetensi Teknis	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi**	Orang	220	194	88		
				a Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	220	194	88	1. Adanya refocusing anggaran sehingga tidak tercukupinya biaya pengiriman peserta ke lembaga penyelenggaran diklat. 2. Perubahan rincian objek belum disertai perubahan target.	1. Mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pemanfaatan metode pembelajaran daring dan blended learning sebagai langkah penyesuaian dalam rangka efisiensi anggaran. 2. Melakukan reviu dan penyesuaian target kinerja melalui mekanisme perubahan perjanjian kinerja atau dokumen perencanaan kinerja.
				2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi	**Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan**	Laporan	10	10	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Manajerial dan Fungsional	**kompetensi bagi pimpinan daerah, pimpinan tinggi jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan**						
				a Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan tinggi jabatan fungsional kepemimpinan dan prajabatan	Laporan	10	10	100		

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

a) Realisasi pembayaran gaji ASN tidak mencapai target karena pegawai berkurang akibat meninggal dunia. Ketika ada PPPK Penuh Waktu meninggal tidak ada gaji terusan sehingga anggaran tidak dapat terserap, apabila PNS meninggal dunia masih mendapatkan gaji terusan selama 3 bulan.
b) Jumlah ASN yang mendaftarkan kenaikan jabatan fungsional sebanyak 314 orang, yang tidak memenuhi syarat 149 orang dan yang diterima 165 orang dari target 200 orang sehingga target tidak dapat tercapai.
c) Tidak tercukupinya biaya pengiriman peserta ke lembaga penyelenggara diklat karena adanya refocusing anggaran.
d) Perubahan rincian objek kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum diikuti dengan penyesuaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Pembayaran gaji ASN disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada.
b) Diterbitkan Surat Edaran Kepala BKPSDM tentang pengusulan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional untuk meningkatkan ketertiban administrasi.
c) Mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pemanfaatan metode pembelajaran daring dan blended learning sebagai langkah penyesuaian dalam rangka efisiensi anggaran.
d) Melakukan reviu dan penyesuaian target kinerja melalui mekanisme perubahan perjanjian kinerja atau dokumen perencanaan kinerja.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kepegawaian diketahui rata-rata capaian program adalah 94,40% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 102,52%.

a) Rata-rata capaian program => Capaian Program Penunjang + Capaian Program Kepegawaian + Capaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia / 3
   => 100% + 107,5% + 75,72% / 3 = 94,40%
b) Rata-rata capaian kegiatan => Jumlah capaian kegiatan / 12
   => 100% + 100% + 100% + 100% + 100% + 100% + 100% + 100% + 142,29% + 100% + 88% + 100% / 12
   => 1.230,29% / 12 = 102,52%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kepegawaian dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu:

a) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public
b) Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi
c) Meningkatnya kompetensi ASN

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.82 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,78	85,50	91,65	107,19	86,00
Persentase Penempatan ASN dalam Jabatan sesuai Kompetensi	Persen	99,92	93	99,98	107,5	93,99
Persentase Pejabat Struktural ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	67,26	75,09	56,86	75,72	77,21

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan Tabel III.81 tentang Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Kebumen Tahun 2025, secara umum kinerja urusan kepegawaian menunjukkan capaian yang baik. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 terealisasi sebesar 91,65, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 88,78. Capaian tersebut melampaui target tahun 2025 sebesar 85,50 dengan tingkat capaian 107,19%, serta telah melebihi target akhir RPJMD yaitu 86,00. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian kepada masyarakat.

Indikator Persentase Penempatan ASN dalam Jabatan sesuai Kompetensi pada tahun 2025 terealisasi sebesar 99,98%, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 99,92%. Capaian tersebut melampaui target tahun 2025 sebesar 93% dengan tingkat capaian 107,5%, serta telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 93,99%. Hal ini mencerminkan bahwa proses penempatan ASN telah semakin sesuai dengan prinsip sistem merit.

Sementara itu, indikator Persentase Pejabat Struktural ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 56,86%, mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 67,26% dan belum mencapai target tahun 2025 sebesar 75,09%, dengan tingkat capaian sebesar 75,72%. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kuota peserta diklat serta penyesuaian kebijakan dan anggaran pengembangan kompetensi ASN. Namun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja urusan kepegawaian tahun 2025 menunjukkan tren positif pada aspek pelayanan publik dan penataan ASN berbasis kompetensi, meskipun masih diperlukan penguatan pada program pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan agar target RPJMD dapat tercapai secara optimal.

3. Fungsi Keuangan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Keuangan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui 4 (empat) program yaitu:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
d) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.83 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persen	95,86	95,1	99,2	Serapan Belanja Daerah sedikit dibawah target dikarenakan terdapat Desa terlambat mengajukan Dana Desa Tahap 3	
				1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Tersedianya Dokumen Anggaran dan Regulasi**	Dokumen	10	15	150		
				a. Kordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen	2	2	100		
				b. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	4	200	Terdapat penambahan Perbup Perubahan Penjabaran APBD	
				c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Dokumen	2	5	250	Terdapat penambahan Perbup Penjabaran APBD Perubahan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penjabaran Perubahan APBD						
				d. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	3	150	Terdapat penambahan realisasi dokumen analisis standar belanja fisik	
				e. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	2	2	100		
				2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Kegiatan	4	4	100		
				a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	10	10	100		
				b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil	Laporan	50	50	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						
				c. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	12	100		
				d. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu**	Dokumen	618	618	100		
				a.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	615	615	100		
				b.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	3	3	100		
				c.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	APBD Kabupaten/Kota						
				d. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	50	50	100		
				e. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	37	37	100		
				4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Kegiatan	2	2	100		
				a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	449	449	100		
				b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	2	2	100		
				c. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	Laporan	449	449	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						
				B. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persen	89,62	89,62	100		
				1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Dokumen	63	63	100		
				a. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	100		
				b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	100		
				c. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	100		
				d. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	100		
				e. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	2	100		
				g. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2	2	100		
				h. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	50	50	100		
				C. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase Capaian Pendapatan Daerah**	Persen	100	102,17	102,17	Pendapatan dana transfer bertambah 53,6 M; PAD bertambah 11,5 M	
				1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Jumlah jenis pengelolaan pendapatan daerah**	Jenis	8	8	100		
				a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	2	2	100		
				b. Penyuluhan dan Penyebarluasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan	Laporan	26	26	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kebijakan Pajak Daerah	Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						
				c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	8	8	100		
				d. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	80	80	100		
				e. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1,360,897	1,360,897	100		
				f. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1,360,897	1,360,897	100		
				D. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100		
				b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	80	92	115	terdapat penambahan jumlah CPNS dan PPPK	akan dibenahi dalam DPA tahun selanjutnya
				b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100		
				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop /Seminar**	Paket	1	1	100		
				a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	76	92	121,05	Penyesuaian kebutuhan pelaksanaan bimtek karena adanya penambahan SDM	
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah unit Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	Unit	47	47	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	3	100		
				b. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	12	100		
				c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	32	32	100		
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Bulan	12	12	100		
				a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah**	Unit	118	118	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Urusan Pemerintahan Daerah	**penunjang urusan pemerintahan daerah**						
						a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	59	59	100		
						b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	57	57	100		
						c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100		

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah antara lain:

a) Dinamika kebijakan, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk adanya penyesuaian kebijakan pada masa transisi kepemimpinan daerah, menuntut kemampuan adaptasi yang cepat dan tepat. Kondisi tersebut berimplikasi pada perlunya sinkronisasi kebijakan agar pengelolaan keuangan daerah tetap selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Serapan Belanja Daerah belum sepenuhnya mencapai target, antara lain disebabkan adanya keterlambatan pengajuan pencairan Dana Desa Tahap III oleh beberapa desa.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat serta perangkat daerah terkait guna memastikan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada masa transisi kepemimpinan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mendukung penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.
b) Melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam rangka pembinaan kepada pemerintah desa, untuk mendorong percepatan pengajuan pencairan Dana Desa agar tahun selanjutnya bisa lebih baik lagi.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Keuangan) diketahui rata-rata capaian program adalah 100,34% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 103,85%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu:

a) Nilai SAKIP.
b) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
c) Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut.

Tabel III.84 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Keuangan) di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Nilai SAKIP	Nilai	67,54	74,00	68,92	93,14	77,00
Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	100	WTP
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	%	15,65	15,74	18,91	120,14	15,63

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

Perkembangan indikator kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Keuangan) di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang secara umum terjaga dengan baik, meskipun dilaksanakan dalam konteks masa transisi kepemimpinan daerah. Hal ini mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam menjaga kesinambungan tata kelola keuangan sekaligus menyiapkan landasan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 74,00 dan terealisasi sebesar 67,54, sehingga capaian kinerja mencapai 91,27 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja masih memerlukan penguatan lebih lanjut, khususnya dalam peningkatan

keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan hasil kinerja, guna mencapai target akhir RPJMD sebesar 77,00.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini menunjukkan konsistensi Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sementara itu, indikator kemandirian keuangan daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dengan target sebesar 15,74%, realisasi kemandirian keuangan daerah mencapai 18,91% atau sebesar 120,14% dari target. Capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, yang mencerminkan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah di tengah dinamika kebijakan dan penyesuaian fiskal pada tahun berjalan.

4. Fungsi Pengawasan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Pengawasan) dilaksanakan melalui 3 (tiga) program sebagaimana berikut ini:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
c) Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.85 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Fungsi Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**Inspektorat Daerah**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	10	10	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100		
				2 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah							
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	73	73	100		
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	5	100		
				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Orang	4	4	100		
				a Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	4	100		
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	3	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	20	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	100		
				5 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	38	38	100		
				a Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	20	100		
				b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	17	100		
				c Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100		
				6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintahan Daerah							
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				7 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	Unit	59	59	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	24	100		
				b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	34	100		
				c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Level Kapabilitas APIP**	Level	3	2	66,67	1) Adanya perubahan terkait penilaian kapabilitas APIP sebagaimana Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementrian/ Lembaga/Pemerintahan Daerah yang diterbitkan pada 28	1. Pada tahun 2026 akan melaksanakan Bimtek Kapabilitas APIP sesuai pedoman peniaian yang baru. 2. Menginternalisasikan Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP yang baru kepada seluruh APIP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										November 2025 dan penilaian dilakukan di Bulan Desember 2025. 2) Perubahan sistematika penilaian yang tadinya hanya sampai BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Tahun 2025 di panelkan sampai BPKP Pusat	
				1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Laporan	149	168	112,75		
				a Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	8	8	100		
				b Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keungan Daerah	Laporan	24	30	125		
				c Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	5	7	140		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	37	44	118,92		
				e Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	70	72	102,86		
				f Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100		
				g Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	6	150		
				2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Laporan/ Obrik	33	33	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	3	3	100		
				b Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	30	30	100		
				C PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Nilai Persepsi Korupsi**	Nilai	3,50	3,798	108,5		
				1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Dokumen	5	5	100		
				a Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	3	3	100		
				2 Pendampingan dan Asistensi	**Jumlah Pendampingan dan Asistensi**	OPD	24	24	100		
				a Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	24	24	100		
				b Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	13	21	162		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	8	8	100		
				d Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	7	7	100		

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Inspektorat Daerah antara lain:

a) Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, kebutuhan ASN Inspektorat Daerah adalah 168 orang, namun baru tersedia 71 orang. Kekurangan terutama di jabatan fungsional Auditor dan PPUPD. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Inspektorat Jenderal kebutuhan jabatan fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen 46 sudah terisi 13 yaitu 4 PPUPD ahli madya dan 9 PPUPD Ahli Pertama, sehingga masih kurang 33 PPUPD. Sedangkan untuk jabatan auditor, berdasarkan rekomendasi dari BPKP kebutuhan auditor sebanyak 80 auditor dan saat ini sudah ada 37 auditor sehingga masih kurang 44 auditor. Kompetensi sumber daya APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi baru 13 orang dan 2 orang Penyuluh Antikorupsi bersertifikat.
b) Kondisi kendaraan operasional yang kurang memadai. Sarana Laptop masih belum mencukupi dan banyak pegawai yang menggunakan perangkat laptop pribadi.
c) Adanya perubahan kebijakan penilaian dari pusat di pertengahan tahun, misalnya penilaian Kapabilitas APIP, penilaian maturitas SPIP dan penilaian MCSP.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Melaksanakan kegiatan penugasan sesuai kebutuhan Tim Kerja, Pengiriman peserta diklat, dan membentuk Tim Penyuluh Antikorupsi dari unsur pendidik.
b) Mengadakan pembelian mobil operasional pada Tahun 2025 dan melakukan pemeliharaan, serta mengadakan pembelian Laptop pada Tahun 2026.
c) Koordinasi intensif dengan BPKP terkait penilaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dan KPK terkait penilaian MCSP.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Pengawasan) diketahui rata-rata capaian program adalah 91,72% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 101,16%.

5) Capaian Kinerja Urusan (IKU)

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Pengawasan) dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.86 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Pengawasan) di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Maturitas SPIP	Nilai	3,301	3,40	2,695	79,26	3,50

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tentang Penyelenggaraan Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah 2,695 atau lebih rendah dari Tahun 2024 yaitu 3,301. Penyebab nilai Maturitas SPIP turun adalah:

a) Perubahan sistematika penilaian yang tadinya hanya sampai BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Tahun 2025 di panelkan sampai BPKP Pusat.
b) Perubahan indikator pada komponen IEPK.
c) Temuan BPK yang meningkat di Tahun 2025.

3.1.5 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat DPRD

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat DPRD dilaksanakan melalui 2 (dua) program sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah program utama yang mendukung tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas dan dan fungsi DPRD.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.87 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**Sekretariat DPRD**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	8	8	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	31	31	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	10	100		
				b Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	31	31	100		
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Surat Menyurat yang disediakan						
				b Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Unit	390	390	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	34	34	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	25	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	230	230	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100		
				7 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Anggota DPRD**	Bulan	12	12	100		
				a Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan	50	50	100		
				b Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				c Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	50	28	56	Hanya 28 anggota DPRD yang mengikuti pemeriksaan kesehatan	Karena 22 orang memang tidak menginginkan pemeriksaan kesehatan, maka anggaran yang ada tidak digunakan
				8 Layanan Administrasi DPRD	**Jumlah Bulan Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	1	1	100		
				b Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1	1	100		
				9 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	Unit	26	26	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	26	26	100		
				B PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	Persen	100	100	100		
				1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk**	Dokumen	25	23	92		
				a Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	2	3	150	Tahun 2025, Dokumen Propemperda yang ditargetkan adalah propemperda murni dan 1 kali	Dokumen Propemperda merupakan dokumen yang dinamis mengikuti perkembangan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										perubahan, namun terjadi perubahan propemperda sebanyak dua kali untuk menampung pembahasan 3 Raperda yaitu terkait Apotik Lukolo, Aneka Usaha dan Penyertaan Modal yang urgensiny adalah harus ditetapkan sebelum pengesahan APBD. Namun ketiga Raperda tersebut sampai saat ini belum ditetapkan.	politik dan pemerintahan. penambahan jumlah propemperda yang telah ditargetkan dapat difasilitasi dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada
				b Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	16	11	80	Dari Target 16 Raperda yang dibahas pada tahun 2025, hanya 11 Raperda yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sedangkan 5 Raperda tidak selesai yaitu 1). Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha	4 Raperda yang tidak selesai dibahas pada tahun 2025 dilanjutkan pembahasannnya pada tahun 2026 yaitu Raperda 1). Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen;

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Milik Daerah Kabupaten Kebumen; 2). Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya; 3). Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma; 4). Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang	2). Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya; 3). Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma; dan 4). Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Kawasan Taman Bumi [Geopark] Kebumen. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan 5). Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Kawasan Taman Bumi [Geopark] Kebumen	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak dibahas.
				c Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	4	4	100		
				d Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	4	4	100		
				2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas**	Dokumen	6	6	100		
				a Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	100		
				b Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	100		
				d Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1	100		
				e Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1	1	100		
				f Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	100		
				3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian yang tersusun**	Dokumen	7	7	100		
				a Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	1	1	100		
				b Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	100		
				c Pengawasan Urusan	Jumlah Laporan Pengawasan	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						
				d Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	100		
				e Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	1	100		
				4 Peningkatan Kapasitas DPRD	**Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD**	Kegiatan	6	6	100		
				a Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	6	100		
				b Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	21	21	100		
				c Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	7	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1	1	100		
				e Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	1	100		
				f Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	1	1	100		
				5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Kegiatan	3	3	100		
				a Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	100		
				b Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	3	100		
				6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Dokumen	1	1	100		
				a Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	1	100		
				7 Fasilitasi Tugas DPRD	**Jumlah kegiatan Pemenuhan**	Kegiatan	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD						
				a Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	1	1	100		
				b Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi. Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	1	100		
				c Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	1	1	100		

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 antara lain:

a) Secara umum, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD memang belum ideal, terutama untuk jabatan fungsional tertentu yang diperlukan untuk mendukung kinerja Sekretariat DPRD. Pada Tahun 2025, formasi pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat masih kosong, padahal ada fungsi publikasi dan kehumasan yang penting untuk difasilitasi. Ke depan, jabatan ini perlu segera diisi untuk optimalisasi pelayanan. Selain fungsional pranata humas, Sekretariat DPRD juga memerlukan pejabat fungsional yang mengampu analisis anggaran dan analisis pemerintahan untuk mendukung fasilitasi fungsi pengawasan dan penganggaran serta fungsional perancang perundangan-undangan untuk memfasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah.

b) Sarana dan prasarana Sekretariat DPRD saat ini sudah cukup memadai. Pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD telah melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan rapat paripurna dan rapat-rapat yang dilaksanakan di ruang rapat pimpinan DPRD. Ke depan perlu penambahan sarana prasarana untuk melengkapi ruang rapat komisi berupa sound system (perlengkapan audio).

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Sekretariat DPRD telah menyusun peta jabatan yang ideal dalam rangka memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Ke depan diperlukan tambahan pegawai yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan melalui pengusulan kepada pihak-pihak terkait.
b) Sekretariat DPRD akan mengusulkan tambahan anggaran untuk melengkapi sarana prasarana ruang rapat komisi.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat DPRD) diketahui rata-rata capaian program adalah 100% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 99,50%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam Unsur Pendukung Unsur Pemerintahan pada Sekretariat DPRD dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut

Tabel III.88 Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Capaian Pemenuhan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen. 2025

Secara umum, Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 telah melaksanakan tugas dan fungsi utamanya yaitu memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Hal ini dilakukan melalui dukungan melalui berbagai kegiatan fasilitasi antara lain dalam proses pembentukan dan pembahasan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran dan pengawasan urusan pemerintahan. selain itu, Sekretariat DPRD juga memfasilitasi DPRD terkait dengan pengawasan pelaksanaan kode etik DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat dan fungsi lain seperti kehumasan, peningkatan kapasitas DPRD melalui bimbingan teknis, publikasi dan protokoler. Dalam menjalankan fungsi fasilitasi, Sekretariat DPRD berpegang pada Rencana Kerja dan agenda DPRD yang telah ditetapkan.

2. Sekretariat Daerah

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan untuk Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) program sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
c) Program Perekonomian dan Pembangunan.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel III.89 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**Sekretariat Daerah**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai IKM Setda**	Nilai	86	89.41	103.97		
				1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	161	157	97.51	3 Pensiun, 1 Mutasi	
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
				2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	7	7	100		
				b Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	300	300	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Undangan yang Disediakan						
						e	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	4	100		
						f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	380	380	100		
					4		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	Unit	733	733	100		
						a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	378	378	100		
						b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	112	112	100		
						c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	243	243	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5 Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				d Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Unit	127	252	198.43	Karena menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	109	109	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	25	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	110	110	100		
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhbilitasi	Unit	8	8	100		
				7 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	2	2	100		
				c Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	8	8	100		
				d Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	7	7	100		
				8 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Paket	12	12	100		
				a Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				9 Penataan Organisasi	**Jumlah dokumen kegiatan Penataan Organisasi**	Dokumen	4	4	100		
				a Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengeleolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	2	100		
				b Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1	1	100		
				c Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	100		
				10 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Jumlah layanan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Layanan	8	8	100		
				a Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	2	2	100		
				c Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	3	3	100		
				B PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)**	Nilai	3.29	3.5	106.38		
				1 Administrasi Tata Pemerintahan	**Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	Kegiatan	3	3	100		
				a Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	1	100		
				b Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	2	3	150		
				c Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	2	2	100		
				2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Jumlah kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan**	Kegiatan	15	16	106,66	ketidaksinkronan antara target dalam DPA dengan rincian	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kesejahteraan Rakyat						
				a Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	5	5	100		
				b Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	7	7	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	4	4	100		
				3 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Kegiatan	3	3	100		
				a Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	550	558	101.45		
				b Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	12	13	108.33		
				c Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	626	664	106.07		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4 Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Jumlah dokumen kerjasama daerah**	Dokumen	5	5	100		
				a Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	5	5	100		
				C PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan**	Persen	91	96.39	105.92		
				1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan kebijakan perekonomian**	Dokumen	3	3	100		
				a Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2	2	100		
				b Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	1	100		
				2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Jumlah dokumen pengendalian pembangunan**	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								dan laporan pelaksanaan pembangunan						
						a	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	12	12	100		
						b	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	12	100		
					3		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Pengadaan melalui SPSE**	Dokumen	10	10	100		
						a	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	2	2	100		
						b	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	4	4	100		
						c	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi	Orang	1300	1304	100.31		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pengadaan Barang dan Jasa						
					4		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam**	Dokumen	3	3	100		
						a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	100		
						b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian						
				c Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	1	100		

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. antara lain:

a) Pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat pegawai yang mengalami mutasi dan pensiun (3 orang pensiun dan 1 orang mutasi), sehingga mengakibatkan sebagian alokasi gaji dan tunjangan tidak terbayarkan.
b) Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Namun demikian, kondisi sarana dan prasarana yang tersedia saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa barang dan fasilitas penunjang kerja diketahui telah mengalami kerusakan, penurunan fungsi, serta usia pakai yang relatif lama sehingga tidak lagi optimal digunakan dalam mendukung aktivitas kerja aparatur. Selain itu, sebagian sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya memadai baik dari segi jumlah, kualitas, maupun kesesuaian dengan kebutuhan kerja saat ini. Keterbatasan tersebut berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan administrasi pemerintahan, koordinasi antarbagian, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah. Kondisi ini juga berpotensi menurunkan kenyamanan dan produktivitas aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari. Permasalahan sarana dan prasarana tersebut perlu mendapatkan perhatian serius melalui perencanaan pengadaan, pemeliharaan, dan penggantian secara bertahap dan terukur, agar dapat mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintahan yang optimal di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Dalam mengatasi permasalahan pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melakukan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan jumlah pegawai yang tersedia.

b) Dalam rangka mengatasi permasalahan sarana dan prasarana, Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melakukan upaya optimalisasi terhadap sarana dan prasarana yang telah tersedia agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas secara efektif dan efisien, penataan ulang penggunaan sarana sesuai kebutuhan unit kerja, serta pelaksanaan pemeliharaan rutin guna menjaga kondisi dan fungsi sarana dan prasarana agar tetap layak digunakan. Selain itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen juga melakukan pengusulan pengadaan sarana dan prasarana baru secara bertahap dan terencana sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Usulan pengadaan tersebut disusun berdasarkan hasil inventarisasi dan analisis kondisi sarana dan prasarana yang ada, sehingga pengadaan yang dilakukan benar-benar mendukung peningkatan kinerja aparatur dan kelancaran penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Melalui optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia serta pengusulan pengadaan yang tepat sasaran, diharapkan permasalahan keterbatasan dan kerusakan sarana dan prasarana dapat diatasi secara bertahap, sehingga dapat menunjang peningkatan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Sekretariat Daerah diketahui rata-rata capaian program adalah 105,42% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 106,18%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Sekretariat Daerah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.90 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA URUSAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,40	90,91	91,71	100,88	86
Tingkat Kemiskinan	%	15,71	13,90 - 14,71	13,58	102,30	13,00 - 13,50
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30	5,00 - 5,5	5,30	106	5,00 - 5,5
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP*	100	WTP

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

Berdasarkan Tabel III.89 capaian indikator kinerja urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan tiap tahunnya. Hal ini menandakan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen berjalan baik dan berhasil meningkatkan upaya transparansi dan efisiensi kinerja Perangkat Daerah. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan nilai IKM dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah berhasil mempertahankan WTP capaian kinerja tahun 2025.

3.1.6 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 6 (enam) program sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

b) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
c) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
d) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
e) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
f) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.91 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Pemerintahan Umum**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia.**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	7	7	100		
						a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
						b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100		
					2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	23	28	122	Terdapat kesalahan penulisan target	
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	7	7	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	7	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit	35	35	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	12	100		
				c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	100		
				d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah Per 100.000 Penduduk	87,79	468,37	533,51		
				1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	Kegiatan	23	23	100		
				a Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	23	23	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				C			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum**	Persen	69,38	75,85	109,33		
					1		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Kegiatan	4	4	100		
						a	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di	Orang	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan SituasiPolitik di Daerah						
				D PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Persen	100	100	100		
				1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	150	150	100		
				b Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	36	36	100		
				E PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan**	Jumlah Per 100.000 Penduduk	99,14	635,20	641		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	Lokasi	5	5	100		
				a Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	200	1020	510		
				b Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Orang	175	175	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						
				F PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi**	Persen	75	100	133,33		
				1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Jumlah Dokumen kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan KonflikSosial**	Dokumen	5	5	100		
				a Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	Dokumen	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun						
				b Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
										TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Konflik di Daerah yang Disusun						
						c	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TenagaKerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	540	540	100		
						d	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Orang	390	1260	323,08		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
				e Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1	1	100		
				f Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi	Dokumen	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
							TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. 2025

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten kebumen antara lain:

a) Permasalahan utama Badan Kesbangpol Kabupaten Kebumen dari aspek sumber daya manusia masih berkaitan dengan keterbatasan jumlah dan kualitas aparatur yang dimiliki. Jumlah pegawai yang ada belum sepenuhnya sebanding dengan luasnya cakupan tugas dan fungsi Kesbangpol, terutama dalam pelaksanaan deteksi dini konflik sosial, pembinaan organisasi kemasyarakatan, fasilitasi pendidikan politik, serta penguatan wawasan kebangsaan. Kompetensi teknis sebagian aparatur masih perlu ditingkatkan agar mampu mengikuti dinamika isu ideologi, politik, sosial, dan keamanan yang semakin kompleks dan berkembang cepat.
b) Dari aspek sarana dan prasarana, Badan Kesbangpol Kabupaten Kebumen masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung kerja yang memadai. Ketersediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti perangkat komputer dan kelengkapannya, belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan tugas secara cepat. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung operasional lapangan, seperti kendaraan dinas dan fasilitas penunjang kegiatan monitoring serta deteksi dini di masyarakat, turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya jangkauan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, partai politik, serta potensi konflik sosial yang tersebar di wilayah Kabupaten Kebumen.
c) Dari Aspek kebijakan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum tersedianya pengaturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah dimaksud, sehingga pelaksanaan fasilitasi P4GN belum memiliki pedoman yang jelas terkait mekanisme pelaksanaan, pembagian peran antar perangkat daerah, serta pola koordinasi di daerah. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penerapan Peraturan Daerah dalam pelaksanaannya.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, Badan Kesbangpol Kabupaten Kebumen melakukan penguatan peran dan fungsi jejaring kerja melalui pemberdayaan forum-forum yang telah dibentuk dan dibina. Forum-forum tersebut, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta menjalin koordinasi yang intensif dengan instansi vertikal dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tengah keterbatasan aparatur.
b) Dalam rangka mendukung kinerja organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen melakukan peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kerja secara bertahap dan berkelanjutan. Prioritas diarahkan pada penguatan sarana dan prasarana kantor seperti pengadaan dan pemeliharaan komputer serta prasarana pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan pemeliharaan sarana operasional lapangan, seperti kendaraan dinas guna menunjang kegiatan pemantauan kondisi sosial politik, deteksi dini potensi konflik, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen.
c) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kebijakan adalah penyusunan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika. Peraturan Bupati ini disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah, yang mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan fasilitasi P4GN, termasuk pembagian wewenang, mekanisme koordinasi dan bentuk fasilitasi yang dilaksanakan, sehingga implementasi Peraturan Daerah dapat berjalan efektif dan terarah.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan Pemerintahan Umum diketahui rata-rata capaian program adalah 269,53% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

5) Capaian Kinerja Urusan

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran daerah yaitu Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan.

Keberhasilan pelaksanaan keseluruhan program tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja urusan sebagai berikut:

Tabel III.92 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Unsur Pemerintahan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2024	KINERJA 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	75	100	133,33	78,57

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. 2025

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen antara lain:

a) Keberadaan dan peran aktif Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang menjadi mitra strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial. FKDM berfungsi sebagai jejaring informasi berbasis masyarakat yang mampu menyampaikan perkembangan situasi sosial politik secara cepat dan akurat, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipatif dan responsif dalam menjaga kondusifitas wilayah.

b) Dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi kewaspadaan dini daerah yang melibatkan berbagai unsur intelijen guna mengumpulkan data-data dan informasi yang berguna untuk melakukan pencegahan dini dan deteksi dini.
c) Dilaksanakannya komunikasi sosial antar tokoh masyarakat sehingga meningkatkan hubungan sosial di masyarakat dalam rangka mencegah potensi konflik.
d) Melaksanakan pendidikan politik masyarakat secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi politik masyarakat secara bertanggung jawab.
e) Adanya peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam memfasilitasi solidaritas antar umat beragama, moderasi beragama dan toleransi serta memperkuat kerukunan diantara elemen masyarakat, sehingga hal ini memiliki peran penting dalam upaya pencegahan terjadinya konflik sosial.
f) Pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) juga menjadi faktor pendukung pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, komunikasi, serta pengawasan yang terkoordinasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mendorong ormas agar berperan aktif dalam pembangunan daerah, sekaligus menghimbau agar kegiatan ormas berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.1.7 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan

Pelaksanaan urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 11 (sebelas) Kelurahan di Kabupaten Kebumen melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
c) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan
d) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Adapun capaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan urusan kewilayahan sebagai berikut:

1. **Kecamatan Adimulyo**

   1) **Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja**

      Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Adimulyo dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi :

      a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
      b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
      c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
      d) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

      Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.93 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Adimulyo**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun**	Dokumen	11	11	100		
						a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
						b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100		
					2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	17	16	94,11	Terdapat 2 kekosongan jabatan pada kasi pemberdayaan masyarakata dan	Mengusulkan pengisian kekosongan jabatan ke BKPSDM.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
													kasi tata pemerintahan beserta stafnya, namun terdapat penambahan CPNS.	
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
					3		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
						e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip Dinamis	Dokumen	12	12	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Laporan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah**	Unit	28	28	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	Persen	92,0	91,78	99,76	Nilai pada unsur sarana prasarana masih rendah yaitu 85,13. Hal ini sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana pelayanan Kecamatan Adimulyo yang masih kurang memadai.	
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	**Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Adimulyo**	Persen	92,0	91,78	99,76		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada	Laporan	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Terkait Dengan Nonperizinan	Urusan Pemerintahan						
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Orang	50	50	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				D			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri**	Persen	46,01	91,30	198,4		
					1		**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**	Kegiatan	34	34	100		
						a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Dokumen	23	23	100		
						b	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	4	4	100		
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Adimulyo antara lain:

a) Masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di pelayanan yaitu hanya 1 (satu) orang sehingga pelayanan menjadi belum optimal. Selain itu, adanya 2 (dua) orang pejabat struktural yang pensiun, menyebabkan terjadinya kekosongan pejabat. Hal ini menyebabkan beberapa pejabat struktural harus mendapatkan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) atas jabatan struktural yang kosong.
b) Bangunan gedung Kecamatan Adimulyo yang dalam kondisi rusak, tidak mempunyai pendopo atau gedung pertemuan, dan jika diperbaiki, perlu pemeliharaan yang membutuhkan biaya besar, sedangkan anggaran pemeliharaan yang ada sangat terbatas. Peralatan kantor seperti komputer dan printer jumlahnya kurang memadai dan peralatan yang dipakai operasional pegawai saat ini, beberapa dalam kondisi rusak ringan sampai sedang, sehingga menyebabkan terganggunya kinerja karyawan. Kondisi LCD Proyektor yang sudah tidak baik juga menjadi permasalahan karena mengganggu jalannya pemaparan materi pada pelaksanaan pertemuan dan rapat di Kecamatan Adimulyo. Selain itu jaringan internet yang sering down dan terjadi trouble sangat menghambat pelayanan dan operasional kantor yang mayoritas membutuhkan jaringan internet yang stabil.
c) Kondisi geografis Kecamatan Adimulyo yang berupa dataran rendah yang terdiri dari 8 (delapan) sungai dan sawah, sering mengalami bencana banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang terutama pada saat musim hujan.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Melakukan usulan penambahan personel petugas pelayanan pada saat desk kebutuhan sumber daya manusia di BKPSDM Kabupaten Kebumen demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Adimulyo. Demi kelancaran pelaksanaan pelayanan Kecamatan Adimulyo tetap berusaha mengoptimalkan personil

yang ada dan menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah supaya mengirimkan siswanya untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kecamatan Adimulyo, sehingga dapat membantu kelancaran pelayanan. Terkait Jabatan Struktural, dalam hal kekosongan pejabat adalah wewenang dari Bupati untuk mengisi kekosongan tersebut baik melalui mutasi ataupun promosi jabatan.

b) Mengusulkan pembangunan gedung Kecamatan Adimulyo melalui Surat Permohonan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Adimulyo kepada Bupati Kebumen. Progres tindak lanjut dari permohonan tersebut baru sampai tahap peninjauan lokasi oleh DPUPR Kabupaten Kebumen. Pemeliharaan gedung juga tetap dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai kemampuan anggaran yang ada. Dalam hal peralatan kantor seperti komputer, printer, dan LCD diupayakan untuk merencanakan pengadaan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran. Pemeliharaan atas peralatan kantor juga selalu dilaksanakan demi kelancaran operasional kantor.

c) Melakukan mitigasi pada lokasi rawan banjir dengan menanami vegetasi vetiver di area sekitar sungai dengan berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan BPBD Kabupaten Kebumen. Pihak Kecamatan melaksanakan pembinaan terhadap pembentukan Kelompok Masyarakat Tangguh Bencana. Hal ini mencakup sosialisasi berkelanjutan mengenai manajemen limbah rumah tangga guna mencegah pendangkalan saluran air serta pengaktifan kembali sistem gotong royong dalam pemeliharaan lingkungan secara periodik.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 124,54% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 99,97%.

2. Kecamatan Alian

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Alian dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
d) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.94 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Alian**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	11	11	100		
						a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
						b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100		
					2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								keuangan perangkat daerah						
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	16	88,88	Terdapat 2 (dua) kekosongan pada kasi tapem dan kasubag umpeg	Mengajukan permohonan pengisian kekosongan ke BKPSDM
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
					3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang Cetakan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Cetakan dan Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan						
						d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
						e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
						g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
					4		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	11	11	100		
						a	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	10	100		
						b	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	Unit	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Mesin Lainnya yang Disediakan						
					5		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	Laporan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
					6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	29	29	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	13	13	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
						b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	100		
						c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Persen	88,50	93	105,08		
					1		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan**	Laporan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	6	6	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Alian)**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan**	Orang	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
							a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	100	100		
				D				**PROGRAM PEMBINAAN DAN**	Persentase Desa Dengan Indeks	Persen	67,33	93,75	139,24		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri						
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa**	Kegiatan	8	8	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	16	16	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	13	16	123,07	Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun maka pelaksanaan Pilkades di 13 desa ditunda, sehingga	Anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan sosialisasi pengisian perangkat desa pada 16 desa di Kecamatan Alian sebanyak 3 (tiga) kali.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
													anggaran persiapan Pilkades tidak dapat digunakan sesuai rencana.	
						c	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	3	3	100		
						d	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
						e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	2	100		
						f	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan Partisipatif	Perencanaan Pembangunan Partisipatif						
				g Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	8	8	100		
				h Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	3	3	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Alian antara lain:

a) Terkait dengan Sumber Daya Manusia terdapat kekosongan jabatan struktural yaitu sekcam, kasi tapem, kasubag umpeg, sehingga berpengaruh pada pelayanan publik.
b) Dalam hal sarana dan prasarana di Kecamatan Alian, bangunan Mushola Kecamatan saat ini dalam kondisi kurang layak sehingga perlu dilakukan renovasi
c) Kondisi geografis Kecamatan Alian berupa dataran rendah sehingga sering mengalami bencana banjir terutama pada saat musim hujan di wilayah Desa Kalirancang, Sawangan, Seliling, dan Surotrunan.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Melakukan usulan penambahan jabatan struktural pada saat desk kebutuhan sumber daya manusia di BKPSDM Kabupaten Kebumen demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan.
b) Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung pada tahun 2026.
c) Melakukan mitigasi pada lokasi rawan banjir dengan menanami vegetasi vetiver di area sekitar sungai dengan berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan BPBD Kabupaten Kebumen. Pihak Kecamatan melaksanakan pembinaan terhadap pembentukan Kelompok Masyarakat Tangguh Bencana.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 111,08% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

3. Kecamatan Ambal

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Ambal dilaksanakan melalui 4 (Empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
d) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.95 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Ambal**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KBUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	15	83,33	ASN 3 orang Purna Tugas	Bersurat ke BKPSDM untuk mengisi kekurangan SDM
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
				f Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
				4 Pengadaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	14	14	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	2	2	100		
				b Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	12	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit	42	27	64,28	Kesalahan dalam penentuan target	
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	0	0	Pada akhir tahun 2024 sudah ada pemeliharaan mebel	Dialihkan ke Sub Kegiatan pengadaan mebel
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung dan Kantor Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap**	Persen	87	95,66	109,95		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Pelayanan Publik Kecamatan**						
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persen	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Laporan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Presentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	Kegiatan	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensaia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika dan Serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	120	120	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun kategori maju dan mandiri**	Persen	70,04	84,37	120,45		
				1 Sub Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	32	0	0	Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun maka pelaksanaan Pilkades di 32 desa ditunda, sehingga anggaran persiapan Pilkades tidak dapat digunakan sesuai rencana.	Anggaran tersebut dialihkan untuk Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa AC dan Printer untuk Ruang Pelayanan pada saat Perubahan Anggaran
				c Sub Kegiatan Failitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Failitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dengan Pembangunan Desa	dengan Pembangunan Desa						
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdyaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdyaan Masyarakat Desa	Dokumen	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	12	12	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Ambal antara lain:

a) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia sebagai Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di ruang pelayanan Kecamatan Ambal dan terdapat kekosongan Jabatan ASN pada beberapa posisi yaitu Camat, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, dan Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.
b) Belum meratanya pembagian beban kerja pegawai, yang menyebabkan terjadinya penumpukan tugas pada pegawai tertentu dan berpotensi menurunkan efektivitas serta efisiensi kinerja organisasi.
c) Peralatan komputer dan sarana pendukung lainnya yang lama, perlu diganti / dilakukan peremajaan.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Melakukan Usulan penambahan Personil Operator SIAK pada saat Desk kebutuhan SDM di BPKSDM Kabupaten Kebumen dan terkait kekosongan Jabatan Struktural adalah wewenang Bupati untuk mengisi kekosongan tersebut baik melalui mutasi atau promosi Jabatan.
b) Melakukan penataan dan optimalisasi pembagian tugas pada ASN yang ada agar pelayanan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Ambal tetap berjalan dengan efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.
c) Menginventarisasi peralatan komputer dan sarana pendukung lainnya yang ada, melakukan pemeliharaan secara rutin pada peralatan yang masih bisa digunakan dan mengajukan usulan pengadaan peralatan baru melalui mekanisme perencanaan daerah atau perubahan Anggaran

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 107,6% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 96,03%.

4. Kecamatan Ayah

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Ayah dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
d) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.96 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Ayah**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	100		
				2 Kegiatan Administrasi	**Jumlah Bulan Penyediaan Adminstrasi**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Keuangan Perangkat Daerah	**Keuangan Perangkat Daerah**						
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	19	17	89,47	Terdapat 2 kekosongan jabatan pada Kasubbag Umpeg dan Kasi PM	Sudah berkoordinasi dan bersurat ke BKPSDM
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
						e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	3	100		
						f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6	100		
						g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	3	100		
					4		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit	3	3	100		
						a	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100		
					5		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Pemerintahan Daerah	**Penunjang Pemerintahan Daerah**						
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
					6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah**	Unit	39	39	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	25	100		
						c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik**	Persen	92	91,13	99,05	masih perlu adanya perbaikan sarana prasarana.	melakukan inventarisasi kondisi sarana yang rusak atau tidak layak, serta penentuan prioritas kebutuhan perbaikan dan pengadaan, mengajukan surat permohonan kepada Dinas yang terkait/mengampu yaitu Dukcapil untuk mengganti alat yang baru
					1		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	9	9	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ayah)**	Indeks	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	70	70	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri**	Persen	22,77	22,77	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemerintahan Desa	**Pengawasan Pemeritahan Desa**						
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	18	18	100		
				b Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1	100		
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	2	2	100		
				g Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	3	3	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Ayah antara lain:

a) Pada aspek sumber daya manusia masih terdapat kekosongan jabatan ASN pada beberapa posisi strategis, yaitu Jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian, Jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, serta berkurangnya tenaga staf akibat pegawai yang memasuki masa purna tugas. Kondisi ini menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang, sehingga berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat kecamatan, meskipun secara umum kinerja penyelenggaraan pemerintahan masih dapat tercapai dengan baik.
b) Pada aspek sarana dan prasarana masih terdapat fasilitas pelayanan yang sudah lama dan mengalami kerusakan, jaringan internet yang belum optimal dan sering mengalami gangguan, serta AC pada ruang pelayanan yang kurang berfungsi optimal dan belum tersedianya AC pada ruang arsip. Kondisi tersebut mempengaruhi kenyamanan dan kecepatan pelayanan.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Melakukan pengusulan pengisian kekosongan jabatan melalui mekanisme kepegawaian kepada BKPSDM Kabupaten Kabupaten, melakukan penataan beban kerja, serta optimalisasi pembagian tugas bagi pegawai yang ada. Melalui langkah tersebut, pelaksanaan pelayanan pemerintahan tetap dapat berjalan efektif sehingga target kinerja Kecamatan Ayah tetap tercapai dengan baik.
b) Pada pada aspek sarana dan prasarana dilakukan dengan inventarisasi kondisi sarana prasarana pelayanan, pengusulan perbaikan dan/atau pengadaan melalui mekanisme perencanaan daerah, koordinasi peningkatan kualitas jaringan internet, serta pemeliharaan rutin peralatan yang masih dapat digunakan. Untuk kebutuhan AC pada ruang pelayanan dan ruang arsip dilakukan pengusulan pada periode perencanaan berikutnya karena keterbatasan anggaran. Upaya ini mendukung terjaganya

kelancaran pelayanan sehingga capaian kinerja Kecamatan Ayah tetap berada pada kategori baik.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 99,76% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

5. Kecamatan Bonorowo

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Bonorowo dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
d) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.97 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Bonorowo**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	11	11	100		
						a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
						b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinejra Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100		
					2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	16	16	100		
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikassi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanngan SKPD	Dokumen	4	4	100		
					3		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	100		
						f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
						g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
					4		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit	39	39	100		
						a	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	31	31	100		
						b	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100		
						c	Pengadaan sarana dan pra sarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnnya	Unit	7	7	100		
					5		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Unit	35	35	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	11	11	100		
				b Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Pemeliharaan Mebel	Unit	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**	Persen	89,50	95,62	106,83		
					1		**Kegiatan Pelaksaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan (KK,KTP,Kartu Kelahiran,Surat Kematian,Pindah Datang,Rekom SKCK,Ijin Keramaian,KIA, Legalisasi Umum	Laporan	9	9	100		
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		
						a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegaraKesatuanRepublik Indonesia	Orang	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				D			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri Kecamatan Bonorowo**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan**	**Presentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persen	100	100	100		
						a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa da Pendayahguna Aset Desa	Dokumen	10	10	100		
						b.	Sub Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	10	10	100	Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun maka pelaksanaan Pilkades di 10 desa ditunda, sehingga	Anggaran Dialihkan untuk Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Antar Waktu Kepala Desa yang di hadiri 10 desa di Wilayah Kecamatan Bonorowo

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
													anggaran persiapan Pilkades tidak dapat digunakan sesuai rencana.	
						c.	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	3	3	100		
						d.	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
						e.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitisasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
						f.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitisasi dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pembangunan Partisipatif						
						g	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	Dokumen	4	4	100		
						h.	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di WIlayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Bonorowo antara lain:

a) Terkait dengan Sumber Daya Manusia terdapat kekosongan jabatan struktural (Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban) dan Keterbatasan Staff, sehingga berpengaruh pada pelayanan publik.
b) Sarana dan prasarana pelayanan belum sepenuhnya memadai, khususnya fasilitas pendukung teknologi informasi. Gangguan jaringan internet dan aplikasi pelayanan masih sering terjadi seperti Perekaman E-KTP, Penerbitan Akta Kelahiran, Penerbitan Akte Kematian, dll. Selain itu, belum tersedianya sarana CCTV pada ruang pengamanan arsip dan lingkungan kantor kecamatan menjadi kendala dalam aspek keamanan dan pengawasan.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada:

a) Melakukan usulan penambahan jabatan struktural pada saat desk kebutuhan sumber daya manusia di BKPSDM Kabupaten Kebumen demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan.
b) Dalam rangka mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana, dilakukan pengusulan pemenuhan dan peningkatan fasilitas pendukung pelayanan, khususnya sarana teknologi informasi. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalisir gangguan jaringan dan aplikasi pelayanan administrasi kependudukan, serta pengusulan penyediaan sarana pengamanan berupa CCTV pada ruang arsip dan lingkungan kantor kecamatan guna meningkatkan aspek keamanan dan pengawasan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan, pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Bonorowo pada periode pelaporan dapat dilaksanakan seluruhnya, dengan rata-rata capaian program sebesar 101,7% dan realisasi

kegiatan mencapai 100% sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

6. Kecamatan Buayan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Buayan dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
d) Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.98 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Buayan**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	98,96	98,96	Pada Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat kekosongan jabatan struktural 3 formasi yaitu Kasi Tapem, Kasi Trantib, dan Kasubbag Umpeg	Melaporkan ke BKPSDM Kabupaten Kebumen agar segera dilakukan pengisian pejabat melalui Bezeeting
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	9	75	Terdapat kekosongan jabatan struktural sebanyak 3 formasi yaitu Kasi Tapem, Kasi Trantib, dan Kasubbag Umpeg	Melaporkan ke BKPSDM Kabupaten Kebumen agar segera dilakukan pengisian pejabat melalui Bezeeting
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	9	9	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	10	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah**	Unit	26	26	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit	16	16	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik**	Indeks	87	94,34	108,43		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Persen	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Indeks	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Orang	55	55	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Negara Kesatuan Republik Indonesia	Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				D			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri**	Persen	34,04	60	176,26		
					1		**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	10	10	100		
						b	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	17	0	0	Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun maka pelaksanaan Pilkades di 17 desa ditunda, sehingga anggaran persiapan Pilkades tidak dapat digunakan sesuai rencana.	Anggaran tersebut dialihkan untuk menambah anggaran kegiatan Pra Musrenbangcam dan Musrenbangcam dalam memfasilitasi transport bagi Non ASN
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	4	4	100		
				g Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	1	1	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Buayan antara lain:

a) Kurangnya Pegawai atau kekosongan pegawai yang menduduki Jabatan Struktural eselon IV sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Kasi Tapem, Kasi Trantib, dan Kasubag Umpeg. Hal ini menyebabkan beberapa pejabat struktural harus mendapatkan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) atas jabatan struktural yang kosong.
b) Masih terbatasnya kompetensi sebagian pegawai Kecamatan Buayan, baik dalam aspek pengetahuan teknis, keterampilan administrasi pemerintahan, maupun pemanfaatan teknologi informasi, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
c) Belum meratanya pembagian beban kerja pegawai, yang menyebabkan terjadinya penumpukan tugas pada pegawai tertentu dan berpotensi menurunkan efektivitas serta efisiensi kinerja organisasi.
d) Terbatasnya ruang di pelayanan umum khususnya bagi pemohon KTP maupun KK.
e) Gedung ruang kantor Kecamatan Buayan mengalami kerusakan di beberapa titik. Sedangkan, anggaran pemeliharaan yang ada terbatas.
f) Jaringan internet kantor masih sering terjadinya down sehingga dapat menghambat penerbitan dokumen kependudukan yang dikarenakan cuaca ekstrim sehingga terjadinya gangguan pada jaringan internet. Beberapa kali Listrik padam karena gangguan pemeliharaan jaringan Listrik di area Kecamatan Buayan.
g) Masih kurangnya mebel di kecamatan seperti kurangnya kursi rapat dan lemari arsip yang permanen, karena beberapa sudah rusak dan besi berkarat.
h) Kecamatan belum memiliki Mushola tersendiri.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Melaporkan dan mengusulkan ke BKPSDM agar segera terisi melalui Bezetting.
b) Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan secara berkala, baik terkait administrasi pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pegawai memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.
c) Penataan dan pemerataan pembagian beban kerja pegawai melalui evaluasi uraian tugas dan fungsi (tupoksi), penyesuaian penugasan sesuai dengan kompetensi pegawai, serta penguatan koordinasi internal agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lebih efektif dan efisien.
d) Memindahkan ruangan pelayanan KTP/KK yang tadinya berada di sebelah selatan dipindahkan ke bagian Utara bekas ruang PLKB.
e) Melakukan pengusulan permohonan tambahan anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan gedung kantor Kecamatan Buayan di tahun 2026.
f) Melaporkan ke PT Telkom Indonesia dan PLN mengenai gangguan pada jaringan internet dan jaringan listrik di Kecamatan Buayan untuk ditangani secepatnya.
g) Melakukan peminjaman kursi ke balai desa terdekat dan lemari yang ada masih digunakan sampai menunggu adanya dana anggaran pengadaan barang meubelair.
h) Memanfaatkan ruangan di rumah dinas Camat untuk tempat ibadah dan mengusulkan untuk Pembangunan Mushola di area Kecamatan Buayan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 120,91% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

7. Kecamatan Buluspesantren

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Buluspesantren dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
d) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.99 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Unsur Kewilayahan**	**Kecamatan Buluspesantren**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun**	Dokumen	11	11	100		
						a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan perangkat Daerah yang tersusun(Renja,RKA, DPA,RKAP,DPPA, Renstra 2026)	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, Profil, Dalev, Sakip)	Dokumen	6	6	100		
					2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan**	Bulan	12	12	100		
						a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	15	14	93,33	Terdapat kekosongan jabatan struktural 2 (orang) yaitu PM dan Kesos	Permohonan pengisian Pejabat Struktural
						b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu,tu,up,ls)	Dokumen	4	4	100		
					3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						g	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	100		
					4		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	1	6	600	kesalahan dalam penentuan target	
						a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3	3	100		
						b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya perlengkapan gedung kantor	Unit	3	3	100		
					5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan	4	4	100		
						a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	2	2	100		
						c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyedia jasa kebersihan kantor	Laporan	1	1	100		
					6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Unit	20	20	100		
						a	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Unit	4	4	100		
						b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	12	12	100		
						c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan banguinan lainnya	Unit	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				B **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik**	Persen	100	100	100		
				1 **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	Persen	10	10	100		
				a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	9	9	100		
				b Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	100		
				C **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan terselelnggaranya urusan pemerintahan umum**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI**	Kegiatan	2	2	100		
				a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	200	200	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				D			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Presentase Desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri**	Persen	100	100	100		
					1		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa**	Persen	100	100	100		
						a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	3	3	100		
						b	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen	4	4	100		
				d Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	2	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
				f Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	5	5	100		
				g Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Buluspesantren antara lain:

a) Jumlah ASN di Kecamatan Buluspesantren tidak proporsional sesuai SOTK, dari Bulan Oktober 2024 posisi Sekcam definitif kosong (22 Oktober 2025 baru selesai), posisi Kasi Pemberdayaan Masyarakat definitif kosong mulai April 2024. Selain itu posisi Kasi Trantib definitif per Bulan April 2025 juga kosong (baru terisi 22 Oktober), sedangkan posisi Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial kosong per 22 Oktober 2026. Ada tambahan 3 (tiga) ASN baru, namun hanya di posisi staf.
b) Tata ruang tidak efektif dan kondisi sebagian ruangan kurang memadai (hanya beralaskan lantai plesteran).

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Mengajukan proses pengisian jabatan definitif yang kosong ke BKPSDM Kabupaten Kebumen sesuai peraturan perundang-undangan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kerja.
b) Optimalisasi penggunaan anggaran sesuai peruntukkan dan skala prioritas salah satunya diperuntukkan untuk merenovasi ruangan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 100% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 155,55%.

8. Kecamatan Gombong

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Gombong dilaksanakan melalui 5 (lima) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
d) Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa
e) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.100 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Gombong**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	8	11	137,5	Kesalahan dalam penentuan target	
						a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP, Renstra)	Dokumen	4	6	150		
						b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinejra Perangkat Daerah (LKjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev)	Laporan	4	5	125		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	28	23	82,14	Terdapat beberapa Jabatan Struktural yang kosong di Kecamatan Gombong dan Kelurahan Wonokriyo kasi Pelum Kesos, Kasi Pemerintahan dan Trantib Kosong, Kecamatan Gombong camat Gomong, Sekcam dan Kasubag Perencanaan Keuangan Kosong dari mulai bulan Januari s/d oktober 2025	Melaporkan ke BKPSDM agar segera dilakukan pengisian jabatan kosong dan BPKPD
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikassi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanngan SKPD	Dokumen	13	13	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					3		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100		
						d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
						e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100		
						f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Unit	27	27	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	100		
						b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	11	100		
						c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gombong**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Pelaksaan Urusan Pemerintahan**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Camat pada Kecamatan Gombong**						
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	9	75	kesalahan dalam penentuan target	
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	80	80	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa di Kecamatan Gombong yang melaksanakan APBDes sesui ketentuan**	persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan Pemerintah Desa	**Presentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan**	persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengawasan Pemerintahan Desa						
				a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayahguna Aset Desa	Dokumen	12	12	100		
				b. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pembrhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	12	6	50	kesalahan dalam penentuan target	
				c. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	Dokumen	5	12	240	kesalahan dalam penentuan target	
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitisasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Fasilitisasi dalam	Dokumen	3	2	66,67	kesalahan dalam penentuan target	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Perencanaan Pembangunan Partisipatif	rangka Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						
						f	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa	Dokumen	12	12	100		
						g	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.	Laporan	12	12	100		
				E			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan**	persen	87	92,08	105,84		
					1		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan**	persen	87	92,08	105,84		
						a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Lembaga Kemasyarakatan	14	14	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan						
				b Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6	6	100		
				c Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	24	24	100		
				d Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	4	4	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Gombong antara lain:

a) Permasalahan pada aspek sumber daya manusia di Kecamatan Gombong meliputi masih terdapat beberapa kekosongan pejabat definit seperti Camat, Sekretaris Camat, Kasubag Perencanaan dan Keuangan serta beberapa staff pada masing-masing kepala seksi yang belum terisi. Hal tersebut kemudian berpengaruh pada optimalisasi kinerja pelayanan kepada masyarakat.
b) Pada aspek sarana dan prasarana, sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Gombong belum sepenuhnya memadai. Beberapa fasilitas teknologi informasi kantor seperti Laptop dan PC belum memenuhi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selain itu, beberapa fasilitas sarana prasarana pada ruang pelayanan seperti TV untuk menampilkan informasi pelayanan, serta AC belum dimanfaatkan secara optimal. Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut dapat menjadi kendala dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan maksimal.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan berkaitan dengan kekosongan pejabat definitif yakni dengan mengusulkan pengisian atas kekosongan jabatan kepada BKPSDM. Kemudian sebagai upaya mengatasi permasalahan terdapat beberapa posisi staf yang belum terisi yakni dengan mengusulkan formasi jabatan staf sesuai dengan Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penyusunan instrumen Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Formulir Jabatan (FJAB).
b) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sarana dan prasarana antara lain melalui pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada, serta mengusulkan pengadaan dan peningkatan sarana prasarana pendukung kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 101,16% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 104,33%.

9. Kecamatan Karanganyar

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Karanganyar dilaksanakan melalui 5 program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
d) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
e) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.101 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Karanganyar**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP, Renstra)	Dokumen	6	6	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinejra Perangkat Daerah	Laporan	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								(LKjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev)						
					2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	42	34	80,95	Terjadi deviasi karena kekosongan pegawai baik struktural dan staf di kecamatan dan 4 kelurahan	Menyampaikan usulan kepada BKPSDM Kabupaten Kebumen untuk segera menindaklanjuti pengisian jabatan yang kosong
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikassi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanngan SKPD (TU,GU, LS, UP)	Dokumen	4	4	100		
					3		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan						
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	1	1	100		
						d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
						e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100		
						f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100		
						g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit	1	1	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Unit	9	15	166,66	kesalahan penentuan target	
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	100		
						b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	100		
						c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	Persen	88	89,7	102,23		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**terhadap Pelayanan Publik**						
					1		**Kegiatan Pelaksaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	2	100		
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan	2	2	100		
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Penyelenggaraan**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan**	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	55	55	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	**Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PEMERINTAHAN DESA	**Kategori Maju dan Mandiri**						
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan Pemerintah Desa	**Presentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persen	100	100	100		
				a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa da Pendayahguna Aset Desa	Desa	7	7	100		
				b. Sub Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	7	0	0	Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun	Anggaran yang ada direfokusing sebesar 4.200, sisa 1.800 untuk BBM sosialisasi SE Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
													maka pelaksanaan Pilkades ditunda tahun 2027.	
						c.	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	Dokumen	2	2	100		
						d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitisasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
						e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitisasi dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
						f	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan Pelaksanaan	Dokumen	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Pembedayaan Masyarakat Desa	Pembedayaan Masyarakat Desa						
						g	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.	Laporan	2	2	100		
				E			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan**	Persen	100	100	100		
						a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Orang	140	140	100		
						b	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						c	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Orang	140	140	100		
						d	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Dokumen	4	4	100		
					2		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Karanganyar antara lain:

a) Keterbatasan jumlah aparatur, sehingga beban kerja belum sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas pelayanan masyarakat.
b) Masih terbatasnya motivasi pengembangan kapasitas aparatur, seperti pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional.
c) Distribusi tugas dan fungsi belum optimal, yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik.
d) Tingkat adaptasi terhadap sistem dan aplikasi berbasis digital masih beragam, sehingga belum seluruh layanan dapat dilaksanakan secara optimal.
e) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan masih terbatas.
f) Sebagian sarana dan prasarana sudah tidak memadai atau mengalami penurunan kondisi akibat usia pakai.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Menyampaikan usulan kepada BKPSDM Kabupaten Kebumen untuk segera menindaklanjuti pengisian jabatan yang kosong
b) Melakukan optimalisasi pemanfaatan aparatur yang ada melalui penataan dan penyesuaian pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
c) Mengusulkan penambahan dan/atau pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai dengan kebutuhan Kecamatan.
d) Mendorong partisipasi aparatur dalam pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional melalui penugasan resmi serta pemberian kesempatan yang adil dan merata.
e) Mengusulkan pengadaan, rehabilitasi, dan/atau penggantian sarana dan prasarana yang sudah tidak layak sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.
f) Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana guna memperpanjang usia pakai dan menjaga fungsinya.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 100,64% dan rata-rata capaian kegiatan Adalah 100%.

10. Kecamatan Karanggayam

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Karanggayam dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
d) Program Pembinaan dan Pengawas Pemerintahan Desa

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.102 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Karanggayam**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	18	15	83,33	Terdapat pegawai yang mutasi (Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum) dan pensiun (Kaubbag Perencanaan dan Keuangan dan Sekretaris Camat) pada tahun 2025	Mengajukan usulan penambahan ASN melalui formasi pengadaan ASN dan mutasi dari perangkat daerah lain
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikassi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanngan SKPD	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan						
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3	25	kesalahan penyusunan target	Menyesuaikan target sesuai dengan dokumen yang dibuat.
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Arsip Dinamis pada SKPD						
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit	7	5	71,43	Terjadi kesalahan Penyusunan target, seharusnya realisasinya hanya 5 unit yaitu AC1/2PK 1 UNIT, PC Komputer Core 1 Unit, Kabel HDMI 1 Unit, Layar Electric 1 unit, Printer Scan Copy 1 unit	Menyesuaikan target sesuai dengan dokumen yang dibuat.
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	5	71,43		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Unit	19	19	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	9	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	8	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik**	Persen	90,43	91,81	101,53		
					1		**Kegiatan Pelaksaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	Laporan	9	9	100		
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan	Orang	2	225	11250	kesalahan penyusunan target dikarenakan satuannya adalah orang.	Menyesuaikan target sesuai dengan dokumen yang dibuat.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kesatuan Republik Indonesia	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri**	Persen	42,09	73,68	175	Jumlah Desa Mandiri : 2 Maju : 12 Berkembang : 5	
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan	**Presentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persen	100	100	100		
				a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa da	Dokumen	19	19	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pendayahguna Aset Desa						
				b. Sub Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	0	0	Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun maka pelaksanaan Pilkades ditunda tahun 2027.	Penyesuaian Kebijakan dan harmonisasi regulasi, dengan mengkaji secara cermat peraturan baru terkait perpanjangan atau perubahan masa jabatan kepala desa dan ddamaknya terhadap pelaksanaan Pilkades dan melakukan harmonisasi kebijakan daerah denganr egulasi terbaru agar tidak terjadi kekosingan hukum atau tumpang tindih kebijakan, serta melakukan penyesuaian

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											perencanaan dan penganggaran.
				c. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	19	10	100	Terjadi kesalahan pada target rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, karena hanya terdapat 7 desa yang melakukan rekomendasi penjaringan dan 3 desa yang terdapat rekomendasi mutasi perangkat desa	Menyesuaikan target sesuai dengan dokumen yang dibuat.
				d. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronasi Perencanaan Pembangunan	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dengan Pembangunan Desa	Daerah dengan Pembangunan Desa						
				e. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitisasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitisasi dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
				g. Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa	Dokumen	4	4	100		
				h. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.	Laporan	2	2	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Karanggayam antara lain:

a) Keterbatasan kompetensi dan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan terutama dalam proses penyusunan akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah.
b) Kantor Kecamatan Karanggayam memiliki daftar sarana dan prasarana pekerjaan administrative, tetapi jumlah dan kondisi alat pendukung masih terbatas dibanding kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.
c) Keterbatasan kewenangan kecamatan dalam pengambilan keputusan strategis karena sebagian besar kebijakan ditetapkan di tingkat kabupaten hal ini membuat kecamatan kurang fleksibel dalam merespon permasalahan masyarakat secara cepat. Selain itu, beberapa kebijakan dari pemerintah pusat maupun kabupaten belum sepenuhnya berjalan efektif di tingkat kecamatan. Terdapat kendala sosialisasi dan pemahaman kepada perangkat desa dan masyarakat.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah serta komitmen pimpinan, ASN dan stakeholder/pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
b) Meningkatkan Pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana prasarana kantor secara terencana dengan pihak – pihak terkait agar dapat direalisasikan dan menunjang kegiatan pelayanan publik.
c) Mengoptimalkan kewenangan yang telah didelegasikan melalui Peraturan Bupati dengan pelaksanaan yang konsisten, mendorong kecamatan sebagai koordinator pemerintahan desa dalam

pelaksanaan kebijakan daerah dan melakukan sosialisasi kebijakan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 119,13% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 96,82%.

11. Kecamatan Karangsambung

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Karangsambung dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
d) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.103 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Karangsambung**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	11	11	100		
						a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP, Renstra)	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinejra Perangkat Daerah (LKjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev)	Laporan	5	5	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daera**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	19	18	94,7	Adanya mutasi dan pensiun ASN	Mengajukan usulan penambahan ASN melalui formasi pengadaan ASN dan mutasi dari perangkat daerah lain
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikassi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanngan SKPD (TU,GU, LS, UP)	Dokumen	4	4	100		
				3 Kegiatan Administrasi	**Terlaksananya Administrasi Umum**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Umum Perangkat Daerah	**Perangkat Daerah**						
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100		
						d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100		
						e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Unit	37	37	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan	Unit	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							rutin/berkala mebeleur							
						c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	100		
						d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik**	Persen	91,4	93,27	102,05		
					1		**Kegiatan Pelaksaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	100		
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	50	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	**Persentase Desa Dengan Indeks Desa**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PEMERINTAHAN DESA	**Membangun Kategori Maju dan Mandiri**						
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan	**Presentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persen	100	100	100		
				a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayahgunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	100		
				b. Sub Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	0	0	ket : Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan	ket : Anggaran tersebut dialihkan untuk sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun maka pelaksanaan Pilkades di 13 desa ditunda, sehingga anggaran persiapan Pilkades tidak dapat digunakan sesuai rencana.	Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
				c. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	100		
				d. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100		
				e. Sub Kegiatan Fasilitasi	Jumlah Dokumen Fasilitisasi dalam	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
				f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitisasi dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1	100		
				g. Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1	1	100		
				h. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.	Laporan	1	1	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Karangsambung antara lain:

a) ASN Kecamatan Karangsambung per 31 Desember 2025 sebanyak 20 orang yang mencakup 8 Pejabat Struktural dan 12 Jabatan Fungsional Umum/ Staf. Pada tahun 2026, terdapat 2 orang yang akan memasuki purna tugas.
b) Keterbatasan anggaran khususnya pada belanja modal berdampak pada sarana penunjang kegiatan khususnya komputer dan perlengkapannya yang sudah.
c) Efisiensi dan refocusing anggaran berdampak pada minimnya kemampuan keuangan. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya optimalnya tercapainya target program kegiatan.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Mengatasi kondisi keterbatasan ASN di Kecamatan Karangsambung diatasi melalui optimalisasi ASN yang ada. Optimalisasi ASN adalah upaya meningkatkan kualitas, kinerja, dan efektivitas Aparatur Sipil Negara melalui berbagai program seperti peningkatan kompetensi (literasi digital, public speaking), manajemen talenta, perbaikan kinerja dan administrasi, pemanfaatan teknologi (AI), serta perlindungan hukum agar pelayanan publik lebih baik, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan pengisian formasi CASN terpenuhi secara maksimal.
b) Guna mengatasi kekurangan sarana dan prasarana, langkah yang ditempuh antara lain dengan memaksimalkan sarana yang ada dengan memaksimalkan pengelolaan menyeluruh (perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendayagunaan) agar fasilitas fisik (gedung, alat) dapat mendukung tujuan secara efektif, efisien, dan inovatif.
c) Adanya refocusing anggaran menuntut perlunya optimalisasi program kegiatan yang ada. Hal ini dilakukan untuk menjadikan program dan aktivitas berjalan lebih baik, efisien, efektif, serta mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang ada, dengan

fokus pada penyelarasan tujuan (nasional/daerah/organisasi), peningkatan efisiensi anggaran, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas, seringkali melalui peninjauan, realokasi, dan perbaikan berkelanjutan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 100,51% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

12. Kecamatan Kebumen

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Kebumen dilaksanakan melalui 5 (lima) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
d) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
e) Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.104 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Kebumen**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	9	9	100		
				a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100		
				b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	48	43	89	Terdapat kekosongan jabatan struktural di 5 Kelurahan karena banyak yang pensiun dan beberapa kasi kasubbag belum memiliki staf	Mengusulkan pemenuhan jabatan struktural dan kebutuhan pegawai kepada BKPSDM dan sisa tambahan gaji yang tidak terealisasi dikembalikan ke Kas daerah
						b.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100		
					3		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan						
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	3	100		
				f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	8	80	Sisa uang harian dinas luar karena dibelanjakan sesuai kebutuhan: 1. Sosialisasi Pelaskanaan KKPD Yogyakarta (2 orang), 2. Diklatsar	Sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
													CPNS di Semarang (1 orang), 3. Mentor Diklatsar (1 orang), 4. Pemusnahan arsip di Magelang (4 orang)	
						g.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100		
					4		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	51	51	100		
						a.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	45	45	100		
						b.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	100		
						c.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan lainnya yang Disediakan						
					5		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a.	Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100		
						b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100		
						c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100		
					6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Unit	22	22	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	11	11	100		
						b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	9	100		
						c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B.			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan**	Persen	92,00	94,04	102,21		
					1		**Kegiatan Pelaksaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Yang Dilimpahkan Kepada Camat						
						a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	Laporan	4	4	100		
						b.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	100		
				C.			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	100	100		
				D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri**	Persen	50	100	200		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					1		**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa**	Desa/Kelurahan	29	29	100		
						a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	4	4	100		
						b.	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100		
						c.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah Dokumen Fasilitisasi dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Pembangunan Partisipatif	Pembangunan Partisipatif						
						d.	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa	Dokumen	5	5	100		
						e.	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.	Laporan	1	1	100		
				E.			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Publik Kelurahan**	Indeks	91,06	93,20	102,35		
					1		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan**	Kegiatan	4	4	100		
						a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	Lembaga Kemasyarakatan	10	10	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
				b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	12	12	100		
				c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	10	10	100		
				d. Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	2	2	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Kebumen antara lain:

a) Keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi permasalahan di Kecamatan Kebumen karena belum terpenuhinya beberapa jabatan struktural di tingkat kelurahan. Jabatan Lurah Panjer dan Lurah Kebumen masih kosong, serta beberapa jabatan Kepala Seksi di kelurahan belum terisi, sehingga beban kerja aparatur belum sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas pelayanan masyarakat yang harus dilaksanakan Kecamatan Kebumen.
b) Sarana dan prasarana di Kecamatan Kebumen masih belum memadai, terutama kondisi gedung kantor yang memerlukan pemeliharan serta keterbatasan perangkat pendukung operasional seperti printer, laptop, dan kursi rapat serta sarana pendukung lainnya, sehingga belum sepenuhnya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Mengusulkan pemenuhan formasi jabatan struktural dan kebutuhan pegawai kepada BKPSDM, serta peningkatan kapasitas aparatur guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat.
b) Pemenuhan sarana dan prasarana Kecamatan Kebumen direncanakan pada tahun anggaran berikutnya melalui kegiatan pemeliharaan gedung kantor serta pengadaan belanja modal berupa printer, laptop, dan kursi rapat, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat. Selain itu, juga melakukan inventarisasi peralatan dan sarana pendukung lainnya yang ada, dan melakukan pemeliharaan secara rutin pada peralatan yang masih bisa digunakan.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 120,91% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

13. Kecamatan Klirong

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Klirong dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
c) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan
d) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.105 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Klirong**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	9	9	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja Perubahan,RKA,	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6		8	9	10	11	12
								RKAP, DPA, DPPA)						
						b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinejra Perangkat Daerah (LKjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev)	Laporan	4	4	100		
					2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	15	13	87	Terdapat Kekosongan 2 Kasi yaitu Kasi Tapem dan PM	Melakukan koordinasi dengan BKPSDM untuk mengusulkan pengisian kekosongan jabatan Kasi Trantib dan Kasi Tapem
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6		8	9	10	11	12
							Pengujian/Verifikassi Keuangan SKPD	Keuanngan SKPD (TU,GU, LS, UP)						
					3		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100		
						d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6		8	9	10	11	12
							Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
						e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	3	100		
						f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6	100		
						g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
					4		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit	19	19	100		
						a	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	17	17	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				b Pengadaan sarana dan pra sarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	2	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan**	Unit	33	33	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6		8	9	10	11	12
							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah**						
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14	100		
						b	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	100		
						c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	100		
						d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	Persen	91	93,43	102,67		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6		8	9	10	11	12
							PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Terhadap Pelayanan Publik**						
					1		**Kegiatan Pelaksaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	5	5	100		
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4	100		
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				1	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		
				a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Orang	96	96	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6		8	9	10	11	12
								Pemeliharaan KeutuhanNegaraKesatuanRepublik Indonesia						
				D			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri Kecamatan Klirong**	Persen	38,08	79,16	207,87		
					1		**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan**	**Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**	Kegiatan	8	8	100		
						a.	Sub Keg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka	Dokumen	24	24	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				Pendayagunaan Aset Desa	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						
				b. Sub Keg Fasilitasi Sinkronisasi Perencanan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
				c. Sub Keg Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				d. Sub Keg Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
				e. Sub Keg Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Dokumen	6	6	100		
				f. Sub Keg Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Klirong antara lain:

a) Jumlah dan kompetensi aparatur belum sepenuhnya ideal untuk mendukung beban kerja pelayanan dan kewilayahan yang semakin meningkat. 2 Kasi belum tersedia di Kecamatan Klirong yaitu Kasi Tata Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu masih terdapat keterbatasan kemampuan teknis di bidang pengelolaan data kinerja, serta pelayanan publik berbasis digital, sehingga berdampak pada optimalisasi pencapaian sasaran kinerja kecamatan.
b) Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana penunjang kerja, seperti perangkat teknologi informasi, jaringan internet, serta fasilitas pendukung pelayanan masyarakat, belum sepenuhnya memadai. Hal ini berpengaruh terhadap kelancaran proses pelayanan, pengelolaan administrasi, serta pelaporan kinerja.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pembinaan, pelatihan teknis, serta pendampingan dalam bidang pengelolaan kinerja, dan pelayanan public serta dilakukan pengusulan Kasi yang kosong.Selain itu, dilakukan penguatan disiplin kerja dan pembagian tugas yang lebih proporsional agar kinerja organisasi lebih efektif dan efisien.
b) Dilakukan pengusulan dan pemenuhan bertahap sarana dan prasarana penunjang, khususnya perangkat teknologi informasi dan jaringan komunikasi, untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan administrasi. Pemeliharaan fasilitas yang ada juga terus ditingkatkan agar tetap layak dan fungsional.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 127,63% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

14. Kecamatan Kutowinangun

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Kutowinangun dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
d) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.106 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Kutowinangun**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	13	13	100		
				a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinejra Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100		
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	12	86	Ada tambahan anggaran gaji yang besar sementara banyak Staf dan Kasi yang pensiun belum ada penggantinya	Kasi yang kosong segera di isi dan sisa tambahan gaji yang tidak terealisasi dikembalikan ke Kas daerah
				b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100		
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD						
						g.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
					4		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a.	Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
						b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	100		
						c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Unit	27	27	100		
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	100		
				b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	10	100		
				c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100		
				d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik**	Persen	90,30	93,23	103		
					1		**Kegiatan Pelaksaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Persen	100	100	100		
						a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	Laporan	5	5	100		
						b.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Laporan	2	2	100		
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							PEMERINTAHAN UMUM							
					1		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		
						a.	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta	Orang	60	60	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				D			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri**	Persen	73,68	73,68	100		
					1		**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	19	19	100		
				b. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	2	2	100		
				c. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100		
				d. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitisasi dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						e.	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa	Dokumen	4	4	100		
						f.	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.	Laporan	2	2	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Kutowinangun antara lain:

a) Sumber daya untuk operator pelayanan kurang memadai karena hanya 1 orang
b) Kecamatan Kutowinangun belum tersedia fasilitas Mushola
c) Sarana dan prasarana kursi rapat masih kurang sehingga pada saat mengundang peserta rapat harus mencari pinjaman sedangkan anggaran sewa tidak tersedia.
d) Sarana penunjang pelayanan tempat bermain anak sangat kurang
e) Ruang Pelayanan kurang luas

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Mengusulkan penambahan operator pelayanan atau penugasan petugas cadangan agar pelayanan tetap berjalan optimal saat ada petugas yang sakit atau berhalangan.
b) Mengoptimalkan pembagian tugas.
c) Mengalokasikan anggaran atau memanfaatkan ruang yang tersedia untuk penyediaan mushola sebagai fasilitas dasar bagi pegawai dan masyarakat.
d) Mengusulkan pengadaan kursi rapat secara bertahap melalui anggaran kecamatan atau koordinasi dengan instansi terkait sehingga tidak perlu meminjam.
e) Menyediakan pojok bermain anak sederhana dan aman di ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, khususnya yang membawa anak.
f) Melakukan penataan ulang ruang pelayanan atau mengusulkan perluasan ruang agar pelayanan lebih nyaman, tertib, dan representatif.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 100,75% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

15. Kecamatan Kuwarasan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Kuwarasan dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
c) Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum.
d) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.107 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Kuwarasan**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun**	Dokumen	10	10	100		
						a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
						b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Dareah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	17	16	94.11	Kosongnya jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Kasi PM) di Kecamatan Kuwarasan sehingga pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat belum dapat berjalan optimal.	Telah dilakukan pengusulan tertulis kepada BKPSDM untuk pengisian jabatan Kasi PM, disertai penunjukan Plt agar pelayanan tetap berjalan.
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					3		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Undangan yang Disediakan						
						e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
						g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
					4		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	4	4	100		
						a	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								yang Disediakan						
					5		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100		
					6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Unit	30	30	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Pemerintahan Daerah							
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13	100		
						b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	100		
						c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan**	Persen	89,50	93,12	104		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					1		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan**	Persen	89,50	93,12	104		
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	6	6	100		
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	100		
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	66	66	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN	**Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun**	Persen	59,09	100	169,23	catatan : penentuan target terlalu rendah	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kategori Maju dan Mandiri**						
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri**	Persen	59,09	100	169,23	catatan : penentuan target terlalu rendah	
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	22	22	100		
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	5	5	100		
				f Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Kuwarasan antara lain:

a) Masih kurangnya sumber daya manusia, Kurangnya staf dada bagian umum dan Trantib sehingga menyebabkan beberapa pekerjaan menjadi tidak maksimal, selain adanya 1 (orang) pejabat struktural yang Promosi sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan pejabat. Hal ini menyebabkan 1 pejabat struktural harus mendapatkan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) atas jabatan struktural yang kosong.
b) Bangunan gedung Kecamatan Kuwarasan dalam kondisi yang kurang memadai sehingga memerlukan peremajaan bangunan.
c) Peralatan kantor seperti Laptop dan printer jumlahnya kurang memadai, beberapa dalam kondisi rusak ringan sampai sedang, sehingga menyebabkan terganggunya kinerja karyawan. Kondisi LCD Proyektor yang sudah tidak baik juga menjadi permasalahan karena mengganggu jalannya pemaparan materi pada pelaksanaan pertemuan
d) Masih kurangnya mebel di kecamatan seperti kurangnya kursi rapat, meja kerja dan kursi kerja, karena beberapa sudah kurang layak dan rusak.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Melakukan usulan penambahan personel petugas pelayanan pada saat desk kebutuhan sumber daya manusia di BKPSDM Kabupaten Kebumen, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tetap berusaha mengoptimalkan personil yang ada. Terkait Jabatan Struktural, dalam hal kekosongan pejabat adalah wewenang dari Bupati untuk mengisi kekosongan tersebut baik melalui mutasi ataupun promosi jabatan.
b) Melakukan usulan pembangunan gedung Kecamatan melalui Surat Permohonan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan kepada Bupati Kebumen.

c) Melakukan pemeliharaan peralatan untuk peralatan yang masih bisa untuk dimanfaatkan dan diupayakan untuk merencanakan pengadaan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran.
d) Untuk kursi rapat dengan meminjam pada Puskesmas atau Bumdesma, untuk meja dan kursi kerja tetap dimanfaatkan semaksimal mungkin.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 118,31% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 108,14%.

16. Kecamatan Mirit

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Mirit dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
d) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.108 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Mirit**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	Dokumen	11	11	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	5	5	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah yang Disusun							
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	16	15	93,75	terdapat 2 kekosongan jabatan serta penambahan 1 CPNS	Mengajukan permohonan pengisian SDM di jabatan yang kosong ke BKPSDM
				b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				b Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				g Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
				4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit	4	4	100		
				a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	100		
				5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Unit	28	28	100		
				a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14	100		
				b Pemeliharan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan**	Persen	88,17	91,84	104.162		
					1		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Presentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Persen	100	100	100		
						a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonprizinan	Jumlah Laporan pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	9	9	100		
						b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
				C PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
				1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		
				a Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undan - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah orang yang mengiikuti kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undan - Undang	Orang	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju Mandiri**	Persen	95	100	105,26		
				1 Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kegiatan	8	8	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi	Dokumen	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendayagunaan Aset Desa	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						
				b Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	1	100	"Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun maka pelaksanaan Pilkades di 22 desa ditunda, sehingga anggaran persiapan Pilkades digunakan untuk Sosialisasi Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ.	Anggaran tersebut digunakan untuk Kegiatan Sosialisasi Dalam rangka pengisian kekosongan kepala desa (Desa Sitibentar dan Desa Winong) di kecamatan Mirit

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	2	8	400	kesalahan dalam penentuan target	
				d Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
				e Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				f Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
				g Fasilitasi Penyusunan Program dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN DAERAH	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						
				h Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Mirit antara lain:

a) Kekurangan SDM pada pelayanan PATEN dan kekosongan pejabat struktural.
b) Sarana dan prasarana Kecamatan Mirit masih kurang seperti komputer, laptop dan sarpras PATEN.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Saling bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Mengajukan pengisian kekosongan SDM pelayanan PATEN sejumlah 3 orang, usulan pejabat struktural 2 orang dan saat ini mengajukan Plt untuk Kasi Kesos dan Kasi Trantib.
b) Kegiatan dilaksanakan seefisien mungkin dengan bergantian dalam menggunakan sarpras.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 102,35% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

17. Kecamatan Padureso

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Padureso dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
d) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.109 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Padureso**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	11	11	100		
						a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
						b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	17	12	70,5	Terjadi kekosongan struktural (Camat, Kasi Trantib dari bulan Juli 2025)Kasi Kesos dari Oktober 2024-2025)Kasi Tapem dari 22 Oktober 2025, Kasubag PK per November 2025 dan ada 1 staff yang dipindah per Agustus 2025.	Menunggu adanya pejabat struktural baru
				b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikassi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanngan SKPD	Dokumen	4	4	100		
				3	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Umum Perangkat Daerah						
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Unit	12	12	100		
						d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	2	2	100		
						e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
						g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
					4		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Pelayanan Umum Kantor	Kantor yang Disediakan						
					5		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit	14	14	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	100		
						b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persen	88,00	93,94	106,75		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					1		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	5	7	140	kesalahan dalam penentuan target	
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	100		
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penugasan Kepala Daerah	**Penugasan Kepala Daerah**						
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	70	70	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				D			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Padureso**	Persen	42,09	100	237,5	Sebanyak 5 Desa di Kecamatan Padureso berstatus Maju, dan 4 Desa Berstatus Mandiri yaitu (Pejengkolan, Balingasal, Rahayu, dan Padureso)	
					1		**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Padureso antara lain:

a) Banyaknya kekosongan posisi jabatan struktural dan masih belum maksimalnya kemampuan karyawan yang ada sehingga menghambat kelancaran pelayanan.
b) Terbatasnya sarana dan Prasarana di Kecamatan Padureso.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Sementara sebelum adanya pengisian jabatan maka karyawan bekerja sama untuk saling membantu kelancaran jabatan yang kosong agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal. Serta menambah personel baru dalam pelayanan umum dan peningkatan kapabilitas personil pelayanan.
b) Akan ditingkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik dengan melakukan pengadaan, pemeliharaan, mengoptimal sarana dan prasarana yang ada dengan lebih maksimal, serta mengusulkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ke pemerintah Kabupaten Kebumen.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 136,06% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

18. Kecamatan Pejagoan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Pejagoan. dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
b) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
c) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.110 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Pejagoan**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Bulan Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	Bulan	12	12	100		
				1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	11	11	100		
				a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100		
				b Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	100		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Administrasi**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Keuangan Perangkat Daerah						
							a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	17	11	71,34	Terdapat kekosongan 6 PNS yang memasuki masa purna tugas (5 orang pejabat struktural , 1 orang pelaksana)	Dari 6 kekosongan PNS baru terisi 4 PNS
							b	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
					3			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Terlaksanaya Administrasi Umum Perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
							a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
							b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Kantor yang Disediakan						
						c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
						e	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	8	66,67	1. Sosialisasi Pelaskanaan KKPD Yogyakarta (2 orang) 2. Ujian seleksi P3K Yogyakarta (1 orang) , 3. UPKP di Semarang (1 orang) , 4. Diklatsar CPNS di Semarang (2 orang) , 5. Mentor Diklatsar (1 orang) , 6.	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
													Pendampingan studi tiru Buumdes Kebulusan (2 orang) , 7. Konsultasi pengelolaan Air irigasi ke Purworeho (3 orang) , 8. Permusnahan arsip di magelang (3 orang)	
						g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
					4		**Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	2	2	100		
						a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Bangunan Lainnya yang disediakan						
					5		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
						a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	100		
						b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	100		
						c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	100		
					6		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	Unit	16	16	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Pemerintahan Daerah							
						a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14	100		
						b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	100		
						c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan**	Persen	94	98,27	104,54		
					1		**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang**	**Jumlah Urusan Pemerintahaan**	Laporan	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Dilimpahkan Kepada Camat	**yang Dilimpahkan Kepada Camat**						
						a	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Non Perijinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang Dilaksanakan	Laporan	7	7	100		
						b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	2	100		
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
					1		**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaa Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	2	60	3000	Seharusnya satuan Orang, tertulis satuan Kegiatan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Dengan Indeks Membangun Kategori Maju dan Mandiri**	Persen	62,5	100	160	Kategori Desa Maju dan Mandiri yg ditargetkan sudah tercapai 100 %, yang terdiri dari Desa Maju 7 Desa, sedangkan Desa Mandiri 6 Desa (Desa Peniron, Desa Jemur, Desa Kebulusan, Desa Pejagoan, Desa Kuwayuhan dan Pengaringan)	
				1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan**	Kegiatan	8	8	100		
				a Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	13	13	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
				c Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				d Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
				e Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan	5	5	100		
				f Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				g Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	9	9	100		
				h Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	2	2	100		

2) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan antara lain:

a) Sarana Prasarana untuk monitoring yang ada di Kecamatan Pejagoan masih belum mencukupi mengingat wilayah Kecamatan Pejagoan sebagian besar adalah wilayah pegunungan.
b) Sarana Prasarana untuk pelayanan belum memadai karena masih dengan sarpras lama.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Melakukan koordinasi dengan Bidang Aset agar bisa disediakan kendaraan yang bisa mendukung monitoring.
b) Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk memenuhi sarana dan prasarana pelayanan yang sesuai standar.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 116,13% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

19. Kecamatan Petanahan

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Petanahan dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
d) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.111 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Petanahan**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	11	11	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	20	18	90	Masih ada kekosongan jabatan hingga akhir tahun, yaitu Kasi PM dan Kasubag Umum Kepegawaian	Melaporkan ke BKPSDM Kabupaten Kebumen agar segera dilakukan pengisian pejabat
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit	5	5	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	100		
				b Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							dan Listrik yang Disediakan							
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
					6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Unit	16	16	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	100		
						b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	2	100		
						c	Sub Kegiatan Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Peralatan dan Mesin Lainnya							
						d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan**	Indeks	91,4	91,59	100,2		
					1		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	3	3	100		
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	55	55	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 **Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa**	Persen	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	13	21	162	Kesalahan dalam penentuan target	
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	0	0	Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun diperpanjang menjadi 8 Tahun maka Pelaksanaan	Anggaran menjadi silpa dan dikembalikan ke Kas Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
													Pilkades ditunda Tahun 2027.	
						c	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
						d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
						e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						f	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	4	4	100		
						g	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Petanahan antara lain:

a) Permasalahan pada aspek sumber daya manusia antara lain masih terbatasnya jumlah aparatur kecamatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas dan perkembangan regulasi. Selain itu, masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dalam bidang administrasi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi. Beban kerja yang belum sepenuhnya seimbang dengan jumlah personel juga berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja pelayanan kepada masyarakat. Saat ini pegawai Kantor Kecamatan Petanahan sebanyak 18 orang, sedangkan kebutuhan 20 orang. Pada tahun 2026 akan ada purna tugas sebanyak 4 orang
b) Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Petanahan masih belum sepenuhnya memadai. Salah satu contohnya adalah belum adanya AC pada ruang tunggu pelayanan. Beberapa fasilitas kantor, peralatan kerja, serta sarana pendukung pelayanan administrasi masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selain itu, keterbatasan sarana teknologi informasi dan jaringan pendukung juga menjadi kendala dalam upaya peningkatan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia antara lain melalui peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan. Selain itu, dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab secara proporsional sesuai dengan kompetensi masing-masing aparatur, serta mendorong peningkatan disiplin dan kinerja guna mendukung pelayanan publik yang optimal. Selanjutnya juga dilakukan pengusulan pengisian atas kekosongan jabatan.

b) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana antara lain melalui pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada, serta pengusulan pengadaan dan peningkatan sarana prasarana pendukung kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Selain itu, dilakukan pemanfaatan teknologi informasi secara bertahap guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pada tahun anggaran 2026 sudah dianggarkan untuk pengadaan AC pada ruang pelayanan serta beberapa pengadaan lain yang mendukung. Anggaran pemeliharaan juga telah tersedia.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 100,05% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

20. Kecamatan Poncowarno

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Poncowarno dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
d) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.112 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Poncowarno**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen	6	11	183,33	Kesalahan dalam penentuan target	
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	6	200		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	3	5	166,67		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perangkat Daerah							
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	13	11	84,62	Terdapat kekosongan Jabatan yaitu Camat dan Kasi Trantib	
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
				3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Bulan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	8	800		
				4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	9	9	100		
				a Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	9	100		
				5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
				6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	21	21	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan**	Persen	88	90,68	103,05		
					1		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan**	Laporan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	12	1200		
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	2	200		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		
						a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Orang	50	205	410		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Negara Kesatuan Republik Indonesia	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				D			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri**	Persen	36	72,73	202,03		
					1		**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa**	Kegiatan	7	21	300		
						a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	6	11	183		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendayagunaan Aset Desa	dan Pendayagunaan Aset Desa						
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	2	200		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan	Dokumen	1	4	400		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pemberdayaan Masyarakat Desa						
						f	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	1	1	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Poncowarno antara lain:

a) Sumber daya manusia di Kecamatan Poncowarno masih terbatas baik dari jumlah maupun kompetensinya. Jumlah pegawai yang ada belum sesuai dengan kebutuhan ideal. Pada akhir tahun 2025 terdapat kekosongan jabatan struktural yaitu Camat dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia juga berdampak pada distribusi beban kerja yang tidak proporsional antar pegawai. Beberapa pegawai merangkap jabatan yang kosong, sehingga beban kerjanya lebih besar dari pegawai yang lain.
b) Ruang pelayanan sempit, sehingga arena bermain anak kurang representatif.
c) Bangunan bagian teras depan ruang pelayanan rusak sehingga pelayanan menjadi kurang nyaman.
d) Jaringan internet di Kecamatan Poncowarno tidak stabil, sering terjadi gangguan internet sehingga dapat menghambat pekerjaan kantor dan pelayanan kepada masyarakat.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Melaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Kebumen agar jabatan yang kosong segera terisi, peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam bimbingan teknis, pelatihan dan diklat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing pegawai, dan menyesuaikan pembagian beban kerja sesuai dengan tupoksi dan kompetensi pegawai.
b) Arena bermain anak diatur menyesuaikan dengan ruang yang ada sehingga bisa digunakan untuk bermain tanpa mengganggu pelayanan.
c) Melakukan renovasi bangunan bagian teras depan ruang pelayanan yang rusak agar pelayanan lebih optimal.

d) Segera melaporkan gangguan kepada penyedia apabila terjadi gangguan internet agar segera ditangani sehingga tidak mengganggu pekerjaan kantor dan pelayanan kepada masyarakat.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 126,27% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

21. Kecamatan Prembun

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Prembun dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
d) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel III.113 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Prembun**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	Dokumen	11	11	100		
						a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA, DPA, RKAP, Renstra)	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinejra Perangkat Daerah (LKjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev)	Laporan	6	6	100		
					2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	21	15	71,43	Terdapat Kekosongan Jabatan yaitu 2 Jabatan Struktural (Kasi Tapem dan Kasubbag Umpeg) dan 4 orang staf	Melakukan koordinasi dengan BKPSDM untuk mengusulkan pengisian kekosongan Jabatan Struktural dan staf
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanngan SKPD (TU,GU, LS, UP)	Dokumen	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
					4		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit	24	24	100		
						a	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Unit	8	8	100		
						b	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100		
						c	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnnya yang disediakan	Unit	13	13	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					5		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100		
					6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Unit	23	23	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	11	11	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							DInas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajaknya dan Perzinannya						
						b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	100		
						c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik**	Persen	91,40	95,79	104,8		
					1		**Kegiatan Pelaksaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	6	6	100		
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	100		
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Terselenggaraanya Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	1	110	11000	Kesalahan penyusunan target	Perbaikan pada target kinerja berikutnya
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN	**Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kategori Maju dan Mandiri Kecamatan Prembun**						
					1		**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Presentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	13	13	100		
						b	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	9	9	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitisasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitisasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
				f Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pembedayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES,	Dokumen	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Sosial Masyarakat)						
							g	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.	Laporan	13	13	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Prembun antara lain:

a) Kurangnya Pegawai atau kekosongan pegawai yang menduduki Jabatan Struktural eselon IV sebanyak 2 (dua) orang dan 4 (empat) orang staf.
b) Masih terbatasnya kompetensi sebagian pegawai Kecamatan Prembun, baik dalam aspek pengetahuan teknis, keterampilan administrasi pemerintahan, maupun pemanfaatan teknologi informasi, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
c) Belum meratanya pembagian beban kerja pegawai, yang menyebabkan terjadinya penumpukan tugas pada pegawai tertentu dan berpotensi menurunkan efektivitas serta efisiensi kinerja organisasi.
d) Terdapat kesalahan penentuan target kinerja pada satu subkegiatan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2025 sehingga presentase capaiannya hingga 11.000%.
e) Cat tembok sebagian besar gedung mengalami kerusakan/ mengelupas.
f) Jaringan internet kantor masih sering terjadinya down sehingga dapat menghambat penerbitan dokumen kependudukan yang dikarenakan cuaca ekstrim sehingga terjadinya gangguan pada jaringan internet. Beberapa kali Listrik padam karena gangguan pemeliharaan jaringan Listrik di area Kecamatan Prembun.
g) Masih kurangnya mebel di kecamatan seperti kurangnya kursi rapat dan lemari arsip yang permanen, karena beberapa sudah rusak dan besi berkarat.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Melaporkan ke BKPSDM agar segera terisi melalui Bezeeting.
b) Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan secara berkala, baik terkait administrasi pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pegawai memiliki

kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

c) Penataan dan pemerataan pembagian beban kerja pegawai melalui evaluasi uraian tugas dan fungsi (tupoksi), penyesuaian penugasan sesuai dengan kompetensi pegawai, serta penguatan koordinasi internal agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lebih efektif dan efisien.
d) Penyusunan target kinerja dalam perencanaan kedepannya agar diperhatikan secara detail dan sesuai dengan kebutuhan agar realisasinya dapat terukur secara baik.
e) Menata ulang dan memperbarui ruangan pelayanan agar lebih nyaman dan enak dipandang.
f) Melakukan pemeliharaan gedung dengan pengecatan ulang pada tembok yang susak/mengelupas.
g) Melaporkan ke PT Telkom Indonesia dan PLN mengenai gangguan pada jaringan internet dan jaringan listrik di Kecamatan Prembun untuk ditangani secepatnya.
h) Pinjam kursi ke balai desa terdekat dan lemari yang ada masih digunakan sampai menunggu adanya dana anggaran pengadaan barang mebelair.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 101,2% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

22. Kecamatan Puring

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Puring dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
b) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

c) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan
d) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.114 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Puring**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	Dokumen	15	15	100		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
				b Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	10	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	16	14	87,5	Terdapat Kekosongan Jabatan yaitu 2 Jabatan yaitu Kasi Trantib dan Staf Trantib	Melakukan koordinasi dengan BKPSDM untuk mengusulkan pengisian kekosongan Jabatan Struktural dan staf
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10	3	30	Kesalahan penyusunan target. Seharusnya 3 dokumen yaitu LS, GU, UP.	
					3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	3	100		
				f Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	10	100		
				g Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	3	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					4		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	50	50	100		
						a	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	50	100		
					5		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Unit	19	19	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnya	Unit	10	10	100		
						b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	11	220		
						c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	100		
						d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan**	Persen	90,38	92,42	102,26		
					1		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Jumlah Jenis Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	6	300		
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	6	300		
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Kegiatan	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Terselenggaraanya Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	4	4	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	20	190	950	Kesalahan penyusunan target	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				D			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri**	Persen	82,6	95,65	115,8		
					1		**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Kegiatan Desa Yang Terfasilitasi Mendapat Rekomendasi Dan Terawasi**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	16	23	143,75		
						b	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	0	0	Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun diperpanjang	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
													menjadi 8 tahun maka pelaksanaan Pilkades ditunda tahun 2027.	
						c	Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	100		
						d	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	3	3	100		
						e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	2	100		
						f	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	5	4	80		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				g Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	5	5	100		
				h Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	3	3	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Puring antara lain:

a) Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya aparatur khususnya tidak tersedianya: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Staf Pelayanan Umum sehingga pelaksanaan tugas penegakan ketertiban umum, pengamanan wilayah, dan pelayanan kepada masyarakat belum dapat berjalan secara optimal.
b) Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas seperti perangkat teknologi informasi, kualitas jaringan internet, dan fasilitas pelayanan masyarakat masih belum memenuhi kebutuhan secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pelayanan publik, kelancaran administrasi, serta ketepatan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sudah melakukan pengusulan penambahan dan penataan pegawai sesuai kebutuhan jabatan kepada BPKSDM, baik untuk jabatan kepala seksi ketentraman dan ketertiban, staf seksi ketentraman & ketertiban dan staf pelayanan umum. Selain itu, dilakukan optimalisasi pegawai yang ada melalui pembagian tugas yang proporsional, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui bimbingan teknis dan pelatihan, serta pemanfaatan sistem kerja berbasis digital guna mendukung efektivitas pelayanan.
b) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya perangkat teknologi informasi, kualitas jaringan internet, dan fasilitas pelayanan masyarakat, antara lain melalui pengusulan pengadaan dan pembaruan perangkat teknologi informasi sesuai kebutuhan pelayanan, peningkatan kapasitas dan stabilitas jaringan internet melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan penyedia layanan, serta penataan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan masyarakat agar lebih representatif dan nyaman.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 104,5% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

23. Kecamatan Rowokele

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Rowokele dilaksanakan melalui 4 (Empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
d) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.115 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Rowokele**	**Peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	Dokumen	11	11	100		
						a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100		
					2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	19	19	100		
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
					3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
				b Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				c Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100		
						g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100		
					4		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	3	3	100		
						b	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	100		
					5		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pemerintahan Daerah						
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100		
					6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah**	Unit	23	23	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	100		
				B PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan**	Persen	88,00	92,32	104,90		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Dilimpahkan kepada Camat	**yang Dilimpahkan Kepada Camat**						
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	6	6	100		
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	100		
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Indeks	100	100	100		
					1		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	100	100		
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	**Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun**	Persen	63,36	100	157,82		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							PEMERINTAHAN DESA	**Kategori Maju dan Mandiri**						
					1		**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	11	11	100		
						b	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						c	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
						d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
						e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1	1	100		
						f	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Rowokele antara lain:

a) Kurang SDM pada Pelayanan PATEN dan sekretariat
b) Sarana Prasarana Kecamatan Rowokele Masih Kurang di antaranya Laptop, Komputer dan sarana lain tentang pelayanan ke warga.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Saling bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan.
b) Atur Jadwal penggunaan sarana dan prasarana biar tidak bentrok dan perencanaan pengadaan di tahun berikutnya.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 115,68% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

24. Kecamatan Sadang

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan Kewilayahan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
b) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
c) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun capaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan urusan kewilayahan sebagai berikut

Tabel III.116 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Sadang**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun**	Dokumen	11	11	100		
						a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100		
					2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	13	11	84,61	Terdapat kekosongan jabatan Kasi Trantib dan Kasi Tapem	Melakukan koordinasi dengan BKPSDM untuk mengusulkan pengisian kekosongan jabatan Kasi Trantib dan Kasi Tapem
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
					3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat**	Bulan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Daerah						
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100		
						e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
						g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100		
					4		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	8	8	100		
						a	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	4	100		
						b	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					5		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
					6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit	23	23	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	100		
				b Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	4	100		
				c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	100		
				d Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100		
				e Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Diperlihara/Direhabilitasi						
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Sadang**	Persen	88	91,41	103,88		
					1		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Laporan	5	5	100		
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	5	5	100		
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	3	3	100		
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	**Indeks Kondusivitas**	Persen	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PEMERINTAHAN UMUM	**Kecamatan**						
				1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI**	Kegiatan	2	2	100		
				a Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Orang	13	110	846,15	kesalahan dalam penyusunan target	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				D			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri**	Persen	42,09	100	237,6		
					1		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						b	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100		
						c	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
						d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
						e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

2) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan kewilayahan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagai berikut:

a) Berkurangnya SDM di jabatan struktural, karena 3 jabatan struktural kosong selama tahun 2025.
b) Kurangnya sarana prasarana personal komputer, printer dan pengawasan CCTV.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

a) Koordinasi dengan BKPSDM.
b) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dan mengusulkan pengadaan printer dan CCTV. Adapun untuk pengadaan CCTV, printer sudah dianggarkan pada anggaran tahun 2026.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian kinerja program 135,37% dan rata-rata capaian kegiatan 100%.

25. Kecamatan Sempor

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Sempor dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
d) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.117 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Sempor**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	Dokumen	11	11	100		
						a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
						b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	17	15	88,24	Kekosongan jabatan Kasi Trantib dan Kasubag Umpeg	Mengusulkan penambahan pegawai ke BKPSDM
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	100		
					3		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100		
						e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
						g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
					4		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah**	Unit	2	2	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						a	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100		
						b	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100		
					5		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Kantor yang Disediakan						
					6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Unit	43	43	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	100		
						b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	15	100		
						c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	100		
						d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi						
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	Persen	91,24	92,34	101,21		
					1		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Persen	100	100	100		
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	5	5	100		
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Persen	100	100	100		
					1		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	2	2	100		
						a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Orang	139	139	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kesatuan Republik Indonesia	Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Sempor**	Persen	61	100	163,93		
				1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa**	Persen	100	100	100		
				a Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Dokumen	16	16	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendayagunaan Aset Desa	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						
				b Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100		
				c Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
				e Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				f Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	16	16	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Sempor antara lain:

a) Pada aspek sumber daya manusia masih terdapat kekosongan jabatan ASN pada beberapa posisi strategis, yaitu Jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian, Jabatan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta berkurangnya tenaga staf akibat pegawai yang memasuki masa purna tugas.
b) Pada aspek sarana dan prasarana masih kurang memadai, Dimana gedung kantor sudah berusia 25 tahun dan perlu pemugaran atau modernisasi. Disamping itu peralatan komputer dan pendukungnya masih banyak generasi lawas dan perlu peremajaan.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Melakukan penataan beban kerja, serta optimalisasi pembagian tugas bagi pegawai yang ada. Kemudian bersurat ke BKPSDM agar mengisi jabatan struktural yang kosong. Melalui langkah tersebut, pelaksanaan pelayanan pemerintahan tetap dapat berjalan efektif dan efisien dalam melayani masyarakat Kecamatan Sempor.
b) Pada pada aspek sarana dan prasarana dilakukan dengan inventarisasi kondisi sarana prasarana pelayanan, pengusulan perbaikan dan/atau pengadaan melalui mekanisme perencanaan daerah, koordinasi peningkatan kualitas jaringan internet, serta pemeliharaan rutin peralatan yang masih dapat digunakan. Upaya ini mendukung terjaganya kelancaran pelayanan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilayahan diketahui rata-rata capaian program adalah 116,28% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 100%.

26. Kecamatan Sruweng

1) Capaian Kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kewilayahan Kecamatan Sruweng. dilaksanakan melalui 4 (empat) program yang meliputi:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
d) Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel III.118 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kewilayahan Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
1	**Kewilayahan**	**Kecamatan Sruweng**	**Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**A**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	Dokumen	12	11	91,67	kesalahan penentuan target	
						a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100		
						b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	Bulan	12	12	100		
				a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	20	14	70	Pada Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat kekosongan jabatan struktural 4 formasi yaitu Camat, Sekretaris Camat,Kassubbag Perencanaan dan Keuangan, Kasi Trantib dan 2 orang ASN Purna Tugas	Bersurat Kepada BKPSDM
				b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	14	14	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100		
						d	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100		
						e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100		
						g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100		
					4		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	6	7	116,67		
						a	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	1	50	kebutuhan mebelair 2 unit dan anggaran hanya ckup untuk pembelian 1 unit	
						b	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100		
						c	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	3	4	133,33		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang disediakan						
					5		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Bulan	12	12	100		
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100		
						b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
						c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100		
					6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pemeliharan Barang Milik Daerah**	Unit	13	16	123,08	Kesalahan penentuan Target	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	11	78,57	Jumlah kendaraan dinas ada 14 unit yang bisa terpelihara/dibiayai hanya 11 unit	
						b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	2	66,67	Kebutuhan pemeliharaan mebelair ada 3 unit dan yang terbiayai 2 unit	
						c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	2	25	Jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin ada 8 unit yang terbiayai 2 unit	
						d	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100		
				B			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap**	Persen	91	93,87	103,15		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
							PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Pelayanan Publik Kecamatan**						
					1		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan**	Jenis	4	4	100		
						a	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	9	450	kesalahan dalam penentuan target	
						b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	2	50	dari target 4 laporan hanya 2 yang terealisasi laporan peningkatan Kapasitas BPD dan Aparatur Pemerintah Desa	
				C			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kondusivitas Kecamatan**	Indeks	100	100	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
					1		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kegiatan	2	2	100		
						a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Orang	200	200	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
								Kesatuan Republik Indonesia						
				D			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100	100	100		
					1		**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	Kegiatan	11	11	100		
						a	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	21	21	100		
						b	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka	Dokumen	2	0	0	Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam	Digunakan sebagai sosialisasi rencana Pemilihan Kepala

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
						SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemilihan Kepala Desa	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun maka pelaksanaan Pilkades di 21 desa ditunda, sehingga anggaran persiapan Pilkades tidak dapat digunakan sesuai rencana.	Desa Antar Waktu di 2 Desa.
				c Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	12	15	125		
				d Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	4	100		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD/UNIT KERJA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
									SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12
						c	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	100		
						d	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	100		
						e	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	8	8	100		
						f	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2	100		

2) Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kecamatan Sruweng antara lain:

a) Masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di pelayanan sehingga pelayanan menjadi belum optimal.
b) Selain itu, adanya kekosongan pejabat struktural yang pensiun dan meninggal dunia sehingga menyebabkan beberapa pejabat struktural harus mendapatkan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) atas jabatan struktural yang kosong.
c) Sarana Prasarana Kecamatan Sruweng masih Kurang di antaranya Laptop, Komputer , parkir khusus pengguna layanan dan sarana lain
d) Jaringan internet yang sering down dan terjadi trouble sangat menghambat pelayanan dan operasional kantor yang mayoritas membutuhkan jaringan internet yang stabil.

3) Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah:

a) Saling bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan.
b) Melakukan usulan penambahan personel petugas pelayanan pada saat desk kebutuhan sumber daya manusia di BKPSDM Kabupaten Kebumen
c) Inventarisasi ketersediaan sarana dan prasarana kantor agar dapat terakomodir dalam perencanaan pengadaan di tahun berikutnya.
d) Berkoordinasi dengan dinas terkait perihal internet yang sering down dan terjadi trouble.

4) Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kerja

Berdasarkan tabel Capaian program dan kegiatan urusan kewilaya han diketahui rata-rata capaian program adalah 100,78% dan rata-rata capaian kegiatan adalah 103.49%.

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, maupun keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menangani permasalahan strategis di masyarakat, disusun dan disajikan dalam format sebagai berikut:

Tabel III.119 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
Peraturan Daerah			
1	Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015	Sebagai pedoman dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan
2	Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009	Mengatur tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
3	Perlindungan Anak	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015	Sebagai pedoman dalam Perlindungan Anak
4	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen	Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023	Mengatur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen
5	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
6	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
7	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Sebagai pedoman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029
8	Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	Sebagai pedoman dalam Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
9	Kesejahteraan Lanjut Usia	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004	Sebagai pedoman dalam Kesejahteraan Lanjut Usia
10	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	Mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	APBD Tahun Anggaran 2026
Peraturan Bupati			
1	Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2025
2	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021	Sebagai Pedoman dalam Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen
3	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
4	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025
5	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen
6	Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di	Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023	Mengatur Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kabupaten Kebumen Tahun 2025		
7	Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012	Sebagai Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung
8	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Sadang	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Sadang
9	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Rowokele	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Rowokele
10	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Karanganyar	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Karanganyar
11	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Klirong	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Klirong
12	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Sruweng	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Sruweng
13	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Petanahan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Petanahan
14	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Pejagoan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Pejagoan
15	Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017	Sebagai pedoman dalam Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
16	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
17	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Sebagai pedoman Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
18	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025	Sebagai Pedoman dalam Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
19	Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021	Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026
20	Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021	Mengatur Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan
21	Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	Sebagai pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
22	Kriteria Penduduk Miskin di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022	Mengatur Kriteria Penduduk Miskin di Kabupaten Kebumen
23	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat untuk Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Sebagai pedoman Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat untuk Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen
24	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020	Mengatur Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen
25	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020	Mengatur Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen		Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen
26	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Perubahan Penjabaran APBD TA 2025
27	Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2021	Mengatur Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu
28	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2023	Sebagai petunjuk pelaksanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
29	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020	Mengatur Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
30	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021	Sebagai pedoman perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
31	Pedoman Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022	Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
32	Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
33	Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021	Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2026

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
34	Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026
35	Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
36	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
37	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penjabaran Perubahan APBD TA 2025
38	Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017	Mengatur Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen
39	Pedoman Hari dan Jam Kerja, Cuti dan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015	Mengatur Hari dan Jam Kerja, Cuti dan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa
40	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Perubahan ADD Tahun Anggaran 2025
41	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024	Sebagai pedoman dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
42	Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019	Mengatur Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025
43	Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017	Mengatur Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
44	Perubahan atas Peraturan Bupati kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Sebagai Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
45	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	Mengatur Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
46	Perubahan atas peraturan Bupati kebumen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Sebagai Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen
47	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2025
48	Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021	Mengatur Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
49	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007	Mengatur Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah
50	Perubahan atas Peraturan Bupati kebumen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Sebagai pedoman Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
51	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017	Mengatur Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
52	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
53	Pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024	Mengatur Pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah
54	Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Sebagai Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kebumen
55	Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023	Mengatur Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
56	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2024	Sebagai pedoman pelaksanaan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
57	Sistem Informasi Kearsipan Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020	Mengatur Sistem Informasi Kearsipan Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
58	Pedoman Alih Media Arsip	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020	Sebagai Pedoman Alih Media Arsip
59	Pemberian Bantuan Teknis dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022	Sebagai pedoman Pemberian Bantuan Teknis dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
60	Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030	Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015	Mengatur Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030
61	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020	Sebagai Pedoman Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
62	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
63	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
64	Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Mengatur Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
65	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018	Mengatur Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen
66	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025	Sebagai Pedoman Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
67	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pembebasan Persetujuan	Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025	Sebagai Pedoman Pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
68	Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Analisis Standar Belanja Fisik
69	Pedoman Kode Etik Bagi Aparatur Pemerintah Desa	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Sebagai Pedoman Kode Etik Bagi Aparatur Pemerintah Desa
70	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
71	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
72	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	Sebagai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
73	Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025	Mengatur Pemungutan Retribusi Daerah
74	Detail Rencana Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Detail Rencana Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
75	Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
76	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Ayah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Ayah
77	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Karangsambung	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Karangsambung
78	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Sempor	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016	Mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Sempor
79	Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Sebagai Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
80	Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Umum
81	Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025	Mengatur Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
82	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024	Sebagai pedoman Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045
83	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Mengatur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
84	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2024	Sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
85	Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2025	Mengatur Pemungutan Pajak Daerah
Keputusan Bupati			
1.	Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
2.	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3.	Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025
4.	Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
5.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
6.	Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola di	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025		
7.	Pembentukan Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah
8.	Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
9.	Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Penghapusan Barang Milik Daerah
10.	Penunjukan Pejabat Penjual/ Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Pejabat Penjual/ Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah
11.	Pembentukan Tim Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Penjualan Barang Milik Daerah
12.	Pembentukan Tim Percepatan Legalisasi dan Sertifikasi Tanah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Percepatan Legalisasi dan Sertifikasi Tanah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
13.	Penunjukan Pengguna Barang Milik Daerah, Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2022	Penetapan Pengguna Barang Milik Daerah, Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen Tahun Anggaran 2025		
14.	Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Penyusun Standar Harga Satuan Daerah
15.	Pemberhentian Mubasir dari Jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016	Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen
16.	Pengangkatan Saimun, S.I.P. Jabatan Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016	Penetapan Penjabat Kepala Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen
17.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Sugito Edi Prayitno, S.I.P.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
18.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Punarso	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
19.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/ 23 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019	Terbentuknya Forum Satu Data Kabupaten Kebumen
20.	Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2023	Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Masyarakat di Kabupaten Kebumen		Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
21.	Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Formasi Tahun Anggaran 2024	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019	Penetapan Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
22.	Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Bupati Kebumen Tanpa Melalui Lelang	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024	Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Bupati Kebumen Tanpa Melalui Lelang
23.	Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024	Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025
24.	Pemberian Pengurangan Secara Otomatis Terhadap Pembentukan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2024	Pengurangan Secara Otomatis terhadap Pembentukan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
25.	Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
26.	Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2020	Penetapan Peta Jabatan Perangkat Daerah
27.	Pembentukan Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 103 Tahun 2021	Terbentuknya Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah
28.	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen Tahun Anggaran 2024		Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
29.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 050/ 82 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Pembangunan di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Pengendalian Pembangunan
30.	Daftar Data Prioritas Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024	Penetapan Daftar Data Prioritas Kabupaten Kebumen
31.	Pembentukan Tim Verifikasi Peserta Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Verifikasi Peserta Perjalanan Ibadah Umroh atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
32.	Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2016	Terbentuknya Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Kebumen Tahun 2025
33.	Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 17 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
34.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada PT Perhutani Alam Wisata Risorsis Triwulan IV Tahun 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada PT Perhutani Alam Wisata Risorsis
35.	Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen
36.	Pembentukan Tim Fasilitasi Pembentukan Produk	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kebumen

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Hukum Daerah Kabupaten Kebumen		
37.	Program Pembentukan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2025
38.	Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2023	Tersedianya Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
39.	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2022	Terbentuknya Tim Penyusun Rencana Tata Ruang
40.	Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2021	Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kebumen Tahun 2025
41.	Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024	Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa
42.	Peserta Perjalanan Ibadah Umroh Atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Tahap Pertama	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2023	Penetapan Peserta Perjalanan Ibadah Umroh Atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
43.	Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Kebumen
44.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Perubahan Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025		Kebumen Tahun Anggaran 2025
45.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Warsito	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
46.	Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2024	Penetapan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah
47.	Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Puring
48.	Harga Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Eks Gedung Islamic Center Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Harga Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Eks Gedung Islamic Center
49.	Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen Berupa Peralatan dan Mesin	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah
50.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Annas Nur Affandy, S.Pd.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
51.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
52.	Pembentukan Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015	Terbentuknya Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kebumen
53.	Pembentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022	Terbentuknya Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Kebumen
54.	Besaran Nilai Wajar Sewa/ Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Obyek Wisata sebagai Area Komersil Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Besaran Nilai Wajar Sewa/ Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Obyek Wisata sebagai Area Komersil Pemerintah Daerah
55.	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022	Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya
56.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Wonoyoso
57.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wonoyoso Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wonoyoso
58.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sidomukti Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sidomukti
59.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidomukti Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sidomukti

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
60.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kuwarisan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kuwarisan
61.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kuwarisan Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kuwarisan
62.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pasir
63.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pasir
64.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Klepusanggar Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Klepusanggar
65.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Klepusanggar Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Klepusanggar
66.	Pembentukan Tim Asistensi Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Kegiatan Karya Bakti Manunggal di Kabupaten Kebumen	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Asistensi Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Kegiatan Karya Bakti Manunggal

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
67.	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024	Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa
68.	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Karya Bakti Manunggal di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024	Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Karya Bakti Manunggal
69.	Penunjukan Staf Khusus Bupati Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Penetapan Staf Khusus Bupati Kebumen
70.	Penerima Hibah Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/ Perkotaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 89 Tahun 2020	Penetapan Penerima Hibah Semen untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/ Perkotaan
71.	Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah
72.	Penerima dan Besarnya Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2021	Penetapan Penerima dan Besarnya Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan
73.	Pemberhentian Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2021-2026 dan Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2025-2030	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2025-2030
74.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 411.4/ 169 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020	Terbentuknya Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen		
75.	Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024	Terbentuknya Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kebumen
76.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Uang Duka kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahap Pertama Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Uang Duka kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahap Pertama
77.	Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Perubahan Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
78.	Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2024	Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
79.	Penerima Tambahan Jasa Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Penerima Tambahan Jasa Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
80.	Pembentukan Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
81.	Pembentukan Tim Pelaksana Event Idul Fitri 1446 H pada Obyek Wisata di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Pelaksana Event Idul Fitri 1446 H pada Obyek Wisata
82.	Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2025-2028	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006	Terbentuknya Komisi Irigasi Kabupaten Kebumen
83.	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
84.	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
85.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langse Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Langse
86.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Langse Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Langse
87.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Banjareja
88.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banjareja

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
89.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Banioro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Banioro
90.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Banioro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banioro
91.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Srusuhjurutengah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Srusuhjurutengah
92.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Srusuhjurutengah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Srusuhjurutengah
93.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Somagede Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Somagede
94.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Somagede Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Somagede
95.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bagung Kecamatan Prembun Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bagung

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen Periode Tahun 2019-2027		
96.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bagung Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bagung
97.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tunjungseto
98.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tunjungseto
99.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedalemankulon Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedalemankulon
100.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedalemankulon Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedalemankulon
101.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Nampudadi Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Nampudadi
102.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Nampudadi Kecamatan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Nampudadi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Petanahan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027		
103.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sendangdalem
104.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Penetapan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sendangdalem
105.	Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem
106.	Pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014	Terbentuknya Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem
107.	Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2024	Terbentuknya Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting)
108.	Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Kematian Ibu dan Kematian Bayi di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Terbentuknya Gugus Tugas Penanganan Kematian Ibu dan Kematian Bayi
109.	Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025		
110.	Pembentukan Tim Percepatan Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Percepatan Pencapaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi
111.	Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Menteri Hukum Nomor 23 Tahun 2024	Terbentuknya Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Kebumen
112.	Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
113.	Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008	Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem
114.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jatiluhur
115.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatiluhur

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
116.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bandung
117.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Prembun
118.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Prembun
119.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900.1.1.3.3/ 870 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005	Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat
120.	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2021	Terbentuknya Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma
121.	Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025		
122.	Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2025/ 2026	Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025	Penetapan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
123.	Pembentukan Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	Terbentuknya Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
124.	Pembentukan Tim Penyelenggara Kebumen Fest 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Penyelenggara Kebumen Fest 2025
125.	Pembentukan Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Kebumen
126.	Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2025/ 2026	Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025	Terbentuknya Panitia Penerimaan Murid Baru Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2025/ 2026
127.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pekunden
128.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pekunden

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
129.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Temanggal
130.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Temanggal Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Temanggal
131.	Pemberhentian Ngabdun Najah dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Surorejan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Kepala Desa Surorejan
132.	Pengangkatan Agus Haryanto Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Surorejan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Surorejan
133.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
134.	Wilayah dan Daya Tampung Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2025/ 2026	Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025	Penetapan Wilayah dan Daya Tampung Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Kebumen
135.	Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan,	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025		Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
136.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 Tahap Kedua	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
137.	Pemberhentian Suparno sebagai Penjabat Kepala Desa Candi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Candi Kecamatan Karanganyar
138.	Pengangkatan Indarto, S.Pd. Jabatan Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Candi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Candi Kecamatan Karanganyar
139.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungwinangun Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungwinangun
140.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungwinangun Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungwinangun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
141.	Penunjukan Lembaga Profesional yang Melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Perusahaan Daerah Luk Ulo Farma	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2021	Penetapan Lembaga Profesional yang Melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Perusahaan Daerah Luk Ulo Farma
142.	Penetapan Ibu Hj. Lilis Nuryani sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013	Penetapan Ibu Hj. Lilis Nuryani sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini
143.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada PT Perhutani Alam Wisata Risorsis Triwulan I Tahun 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada PT Perhutani Alam Wisata Risorsis Tahun 2025
144.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas
145.	Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik
146.	Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 859 tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
147.	Pembentukan Tim Percepatan Legalisasi dan Sertifikasi Tanah Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Percepatan Legalisasi dan Sertifikasi Tanah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen Tahun Anggaran 2025		
148.	Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2015	Penetapan Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2025
149.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Pringtutul
150.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Pringtutul
151.	Penerima Pinjaman Daerah kepada Masyarakat untuk Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2025	Penetapan Penerima Pinjaman Daerah kepada Masyarakat untuk Ketahanan Pangan
152.	Penerima Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023	Penetapan Penerima Pemacu Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
153.	Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial
154.	Perubahan Kedua atas keputusan Bupati Kebumen Nomor 900.1.1.3.3./870 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025		
155.	Pemberhentian Imam Gunadi, A.Md. dari Jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Bendogarap
156.	Pengangkatan Yahya Husni Mubarok, S.T. Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen sebagai Penjabat Kepala Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Bendogarap
157.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.9.1/ 78 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024	Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
158.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor
159.	Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900.1.1.3.3/ 870 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025		
160.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 860 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah PRembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Perubahan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah PRembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
161.	Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
162.	Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Komoditi Buah-buahan Kecamatan Mirit	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019	Terbentuknya Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Komoditi Buah-buahan Kecamatan Mirit
163.	Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Komoditi Buah-buahan Kecamatan Mirit	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019	Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Komoditi Buah-buahan Kecamatan Mirit
164.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Klepusanggar	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027		Permusyawaratan Desa Desa Klepusanggar
165.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Klepusanggar Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Klepusanggar
166.	Penerima Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
167.	Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
168.	Perubahan Kesebelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025		
169.	Pembentukan Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	Terbentuknya Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih
170.	Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2023	Terbentuknya tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
171.	Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2025	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Cacat
172.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 000.1.2/ 565 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Panel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan MENPANRB Nomor 88 Tahun 2021	Perubahan Tim Panel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
173.	Pembentukan Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Bumen Tirta Lestari Periode Tahun 2025-2027	Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015	Terbentuknya Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Bumen Tirta Lestari Periode Tahun 2025-2027
174.	Peta Binaan Rumah Sakit Pelaksana Pendampingan Percepatan Program Prioritas di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019	Penetapan Peta Binaan Rumah Sakit Pelaksana Pendampingan Percepatan Program Prioritas
175.	Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Perjanjian Kerja dan Perpanjangan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan MENPANRB Nomor 71 Tahun 2020	Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Perjanjian Kerja dan Perpanjangan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
176.	Jenis dan Jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2024	Penetapan Jenis dan Jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pemerintah Daerah Tahun 2025		Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
177.	Desa Berkinerja Terbaik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2024	Penetapan Desa Berkinerja Terbaik dalam Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting
178.	Penerima Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
179.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Madurejo
180.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Madurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Madurejo
181.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.9.14/ 38 Tahun 2025 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022	Perubahan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
182.	Pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017	Penetapan Pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat
183.	Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/9/2019	Terbentuknya Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Kebumen Tahun 2025
184.	Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900.1.1.3.3/ 870 Tahun 2024 tentang	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005	Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025		Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025
185.	Perubahan Keduabelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
186.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 860 Tahun 2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005	Perubahan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
187.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tunjungseto

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
188.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tunjungseto
189.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kaliputih
190.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliputih
191.	Status Struktur Makam Keluarga Kertanegara Banjak Wide Desa Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen sebagai Struktur Cagar Budaya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024	Penetapan sebagai Struktur Cagar Budaya
192.	Status Struktur Makam Mbah Lancing Desa Mirit Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagai Struktur Cagar Budaya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024	Penetapan sebagai Struktur Cagar Budaya
193.	Status Struktur Jembatan Tembana Desa Kutosari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sebagai Struktur Cagar Budaya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024	Penetapan sebagai Struktur Cagar Budaya
194.	Status Struktur Makam Syech Anom Sidakarsa Desa Grogolbeningsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sebagai Struktur Cagar Budaya	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024	Penetapan sebagai Struktur Cagar Budaya

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
195.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 867 Tahun 2024 tentang Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Cek, Bilyet, Giro dan Surat Berharga Lainnya Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran, Cek, Bilyet, Giro dan Surat Berharga Lainnya
196.	Perubahan Ketigabelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
197.	Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2025	Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
198.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Wonorejo
199.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wonorejo

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
200.	Kepengurusan Forum Anak Tingkat Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2025-2027	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025	Penetapan Kepengurusan Forum Anak Tingkat Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2025-2027
201.	Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
202.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kaligubug Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kaligubug
203.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaligubug Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaligubug
204.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Krandegan
205.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Krandegan Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Krandegan
206.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kretek

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen Periode Tahun 2019-2027		
207.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kretek Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kretek
208.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kambangsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kambangsari
209.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kambangsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kambangsari
210.	Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Formasi Tahun Anggaran 2024	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020	Penetapan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Formasi Tahun Anggaran 2024
211.	Perubahan Keempat Belas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
212.	Pembentukan Tim Pembina Kecamatan Berdaya	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024	Terbentuknya Tim Pembina Kecamatan Berdaya

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
213.	Lokasi Kecamatan Berdaya Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024	Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya
214.	Rekening Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Rekening Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
215.	Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-396 Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Terbentuknya Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-396 Kabupaten Kebumen Tahun 2025
216.	Perubahan Kelimabelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/859 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
217.	Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2025-2030	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024	Pengurus Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2025-2030
218.	Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900.1.1.3.3/ 870 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005	Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Masyarakat Tahun Anggaran 2025		
219.	Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2023	Penetapan Peta Jalan Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026
220.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 201 Tahun 2025 tentang Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Perubahan Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
221.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor
222.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada PT. Perhutani Alam Wisata Risorsis Triwulan II Tahun 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada PT. Perhutani Alam Wisata Risorsis Triwulan II
223.	Penerima Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
224.	Pembentukan Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana di Kabupaten Kebumen	Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
225.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.3.2/ 288 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2023	Pembentukan Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Kebumen
226.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Maduretno Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Maduretno
227.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa MAdurejo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Periode Tahun 20192-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Maduretno
228.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Krakal Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Krakal
229.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Krakal Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Krakal
230.	Penunjukan Komandan Kompi, Pengawal dan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Penetapan Komandan Kompi, Pengawal dan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025
231.	Perubahan Keenambelas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/859 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025		Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
232.	Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 Tahap Ketiga	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
233.	Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah
234.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sikayu
235.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sikayu Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sikayu
236.	Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023	Terbentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
237.	Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Praptono	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
238.	Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024	Penetapan Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat
239.	Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2025/ 2026	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012	Penetapan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2025/ 2026
240.	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Banggunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kebumen Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Kebumen Ke-396	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023	Penetapan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Banggunan Perdesaan dan Perkotaan
241.	Perubahan Ketujuhbelas atas Keputusan Bupati kebumen Nomor 900/859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
242.	Status Tanggap Darurat Bencana Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Sosial
243.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
244.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bandung Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bandung
245.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Kerry Endah Yurisna,S.Kep.,Ners	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
246.	Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan Atas Nama Eko Widiantoro, S.E.,S.ST.,M.Si	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
247.	Pemberhentian Tani Parwanti dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Pemberhentian Kepala Desa Adikarto
248.	Pemberhentian Akhmadi dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Tambaharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Pemberhentian Kepala Desa Tambaharjo
249.	Perubahan Kedelapan belas atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/859 Tahun 2024 tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025		
250.	Pemberhentian Daroji, S.Pd., M.Pd. dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Pemberhentian Kepala Desa Kedawung
251.	Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Kebumen Tahun 2025/2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2022	Penetapan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Kebumen Tahun 2025/2026
252.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Argopeni
253.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan desa Antar Waktu Desa Argopeni Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Argopeni
254.	Pembentukan Tim Evaluasi Pencairan Bantuan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Evaluasi Pencairan Bantuan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
255.	Besaran Nilai Wajar Sewa/Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Lahan Parkir di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024	Penetapan Besaran Nilai Wajar Sewa/Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Lahan Parkir
256.	Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2021	Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah
257.	Pemberhentian Sunaryo dari Jabatannya Sebagai Kepala Desa Jatinegara Kecamatan Sempor	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Pemberhentian Kepala Desa Jatinegara

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kabupaten Kebumen Karena Permintaan Sendiri		
258.	Pengangkatan Edy Hendarno, A.Md Jabatan Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Sebagai Penjabat Kepala Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Kedawung
259.	Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 148 Tahun 2021	Terbentuknya Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
260.	Pembentukan Tim Koordinasi Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Koordinasi Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah
261.	Pemberhentian Mukhamad Khamid dari Jabatannya Sebagai Kepala Desa Karangglonggong Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Karena Meninggal Dunia	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Kepala Desa Karangglonggong
262.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Uang Duka Kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahap Kedua Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Uang Duka Kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Tahap Kedua
263.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Jatijajar
264.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatijajar

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
265.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangduwur Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangduwur
266.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangduwur Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Karangduwur
267.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 450/105 Tahun 2021 tentang Susunan Kepengurusan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2021-2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2011	Perubahan Susunan Kepengurusan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2021-2026
268.	Pembentukan Tim Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Night) di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Night)
269.	Waktu dan Lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Night) di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Penetapan Waktu dan Lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Night)
270.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.9.1/144 Tahun 2025 tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas
271.	Pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Kebumen	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ	Terbentuknya Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
272.	Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
273.	Penerima Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Relokasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Relokasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam
274.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Joho Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Joho
275.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Joho Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Joho
276.	Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900.1.13.3/870 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat
277.	Penerima Insentif Guru Ngaji di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 Tahap Pertama	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2024	Penetapan Penerima Insentif Guru Ngaji

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
278.	Perubahan Kesembilan Belas atas Keputusan Bupati kebumen Nomor 900/859 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
279.	Penerima Penghargaan Apresiasi Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018	Penetapan Penerima Penghargaan Apresiasi Inovasi Daerah
280.	Pembentukan Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Terbentuknya Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen
281.	Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kejaksaaan Negeri Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kejaksaaan Negeri Kebumen
282.	Calon Transmigran Asal Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024	Penetapan Calon Transmigran Asal Kabupaten Kebumen Tahun 2025
283.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tanjungsari
284.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tanjungsari

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
285.	Pengangkatan Yakirun Jabatan Pengadministrasi Kependudukan pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Sebagai Penjabat Kepala Desa Karangglonggong Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Karangglonggong
286.	Pengangkatan Mulud , S.IP Jabatan Kepala seksi Ketentraman dan ketertiban pada Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Sebagai Penjabat Kepala Desa Adikarto Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Adikarto
287.	Pengangkatan Ah Nur Ridwan, S.Pd.I Jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Adimulyo Sebagai Penjabat Kepala Desa Tambaharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Tambaharjo
288.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/873 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah
289.	Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata ruang Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar	Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021	Penetapan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata ruang Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar
290.	Pembentukan Panitia Penyelenggara Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019	Terbentuknya Panitia Penyelenggara Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kebumen
291.	Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019	Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Indonesia Kabupaten Kebumen Tahun 2025		
292.	Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan	Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021	Penetapan Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan
293.	Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Masa Jabatan Tahun 2025-2027	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018	Terbentuknya Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Masa Jabatan Tahun 2025-2027
294.	Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kebumen Masa Jabatan Tahun 2025-2027	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018	Terbentuknya Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kebumen Masa Jabatan Tahun 2025-2027
295.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Mangunharjo
296.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mangunharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Mangunharjo
297.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Untuk Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu Jenjang Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, Kelompok Belajar Paket B dan Kelompok Belajar Paket C Tahap Kesatu di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2025	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Untuk Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu Jenjang Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, Kelompok Belajar Paket B dan Kelompok Belajar Paket C Tahap Kesatu
298.	Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013	Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen		Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen
299.	Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri 1 Purwogondo Kecamatan Kuwarasan dan Sekolah Dasar Negeri 3 Purwogondo Kecamatan Kuwarasan Menjadi Sekolah Dasar Negeri 1 Purwogondo Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014	Penetapan Penggabungan dan Penutupan Sekolah Dasar Negeri
300.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/201 Tahun 2025 tentang Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
301.	Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024	Terbentuknya Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
302.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.9.1/197 Tahun 2025 tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 29 Tahun 2025	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial
303.	Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial Yang

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025		Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
304.	Dokter Hewan Berwenang dan Penanggung Jawab Kesehatan Hewan di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2016	Penetapan Dokter Hewan Berwenang dan Penanggung Jawab Kesehatan Hewan
305.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungweru Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungweru
306.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungweru Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedungweru
307.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Ambalresmi
308.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ambalresmi
309.	Pembentukan Tim Pelaksana Kecamatan Berdaya Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Pelaksana Kecamatan Berdaya
310.	Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kabupaten kebumen dengan Tanah Milik Ervin Setyo Rumekso	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Tukar Menukar Barang Milik Daerah
311.	Perubahan Keduapuluh atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/859 Tahun 2024 tentang	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025		Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
312.	Penerima Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahap Kedua di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahap Kedua
313.	Pengangkatan Adnan Jabatan Pengadministrasi Keuangan pada Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Sebagai Penjabat Kepala Desa Jatinegara Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Jatinegara
314.	Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024	Penetapan Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
315.	Pemberhentian Sementara Eli Sugiono dari Jabatannya Sebagai Kepala Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Pemberhentian Kepala Desa Wotbuwono
316.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bulurejo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bulurejo
317.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bulurejo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bulurejo

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
318.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Banjurpasar
319.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banjurpasar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banjurpasar
320.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Bonjok
321.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bonjok
322.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sadangkulon Kecamatan Sadangkulon Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2017	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sadangkulon
323.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sadangkulon Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sadangkulon
324.	Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2025-2028	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2021	Terbentuknya Dewan Pengupahan Kabupaten Kebumen

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
325.	Perubahan atas Keputusan Bupati kebumen nomor 600.4/166 Tahun 2025 tentang Penerima Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Perubahan Penerima Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
326.	Pembentukan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kebumen Masa Bhakti 2025-2030	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010	Terbentuknya Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kebumen Masa Bhakti 2025-2030
327.	Pengesahan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kebumen Masa Bhakti 2025-2030	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010	Penetapan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kebumen Masa Bhakti 2025-2030
328.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2022	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
329.	Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2024	Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa
330.	Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
331.	Perubahan Keduapuluh Satu atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/859 Tahun 2025 tentang	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Penerimaan, bendahara

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025		Pengeluaran, Bendahara penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan kerja Perangkat Daerah
332.	Status Gereja Kristen Jawa Kebumen Kelurahan Panjer Kabupaten Kebumen Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024	Penetapan Status Gereja Kristen Jawa Kebumen Kelurahan Panjer Kabupaten Kebumen Sebagai Cagar Budaya
333.	Status Rumah Dinas Dokter (Eks Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen) Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024	Penetapan Status Rumah Dinas Dokter (Eks Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen) Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Sebagai Bangunan Cagar Budaya
334.	Perubahan Keduapuluh Dua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan kerja Perangkat Daerah
335.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/865 Tahun 2024 tentang Rekening Satuan Pendidikan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016	Perubahan Rekening Satuan Pendidikan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Operasional Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025		
336.	Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2025/2026		Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem
337.	Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penerima Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
338.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 600.1.1/70 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Semen Untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan/Perkotaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2025	Perubahan Penerima Hibah Semen Untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan/Perkotaan
339.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Untuk Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Kejar Paket A di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2025	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Untuk Beasiswa Bagi Siswa Kurang Mampu Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Kejar Paket A
340.	Pembentukan Pengurus Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2025-2030	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2025	Terbentuknya Pengurus Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2025-2030
341.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kaliputih

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
342.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliputih
343.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Candirenggo
344.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Candirenggo
345.	Tim Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025	Terbentuknya Tim Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
346.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada PT Perhutani Alam Wisata Risorsis Triwulan III Tahun 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada PT Perhutani Alam Wisata Risorsis
347.	Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor Tahun 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2017	Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto Sempor
348.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2025	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Fakir Miskin
349.	Pembentukan Kelompok Kerja Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terintegrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2028	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025	Terbentuknya Kelompok Kerja Solusi Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut Terintegrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2028

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
350.	Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020	Penetapan Penerima Penerima Penghargaan Pengawasan Kearsipan
351.	Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2022	Penetapan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah
352.	Perubahan atas keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.6.1/303 Tahun 2025 tentang Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan perundang-undangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan perundang-undangan
353.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Babadsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Babadsari
354.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Babadsari Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Babadsari
355.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 445/853/Kep/2013 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Kabupaten Kebumen	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023	Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif
356.	Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi	Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan	Terbentuknya Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Nasional Kabupaten Kebumen	Nasional Nomor 7 Tahun 2025	Ekonomi Nasional Kabupaten Kebumen
357.	Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Liquified Petroleum Gas Tabung Ukuran 3 (tiga) Kilogram di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021	Terbentuknya Tim Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Liquified Petroleum Gas Tabung Ukuran 3 (tiga) Kilogram
358.	Penerima Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 Tahap Keempat	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
359.	Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Santri Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 Tahap Pertama	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2025	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Santri Kurang Mampu
360.	Data Penduduk Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024	Penetapan Data Penduduk Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
361.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.9.1/144 Tahun 2025 tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 25 Tahun 2025	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas
362.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.9.1/171 Tahun 2025 tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 25 Tahun 2025	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
363.	Perintah Penyetoran Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2022	Perintah Penyetoran Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah
364.	Perubahan Keduapuluh Tiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan kerja Perangkat Daerah
365.	Pembentukan Pos Komando Penanganan Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2025/2026	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008	Terbentuknya Pos Komando Penanganan Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem
366.	Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008	Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem
367.	Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018	Terbentuknya Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
368.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Balingasal
369.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Balingasal Kecamatan	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Balingasal

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2027		
370.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Candiwulan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Candiwulan
371.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Candiwulan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Candiwulan
372.	Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012	Terbentuknya Tim Teknis Penyelenggaraan Sekolah Rakyat
373.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.3.1/223 Tahun 2025 tentang Penerima Belanja Hibah Kepada Badan , Lembaga , Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Perubahan Penerima Belanja Hibah Kepada Badan , Lembaga , Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia
374.	Penerima Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011	Penerima Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro
375.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.9.1/197 Tahun 2025 tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 29 Tahun 2025	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen Tahun Anggaran 2025		
376.	Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900.1.1.3.3/ 870 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat
377.	Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/201 Tahun 2025 tentang Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Perubahan Penerima Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
378.	Pemberhentian Rumadi, S.E. dari Jabatannya Sebagai Penjabat Kepala Desa Jabres Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Jabres
379.	Pengangkatan Rina Hastuti, A.Md Jabatan kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Sebagai Penjabat Kepala Desa Jabres Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Jabres

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
380.	Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2025-2030	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2014	Terbentuknya Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Daerah
381.	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem
382.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu Jenjang Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, kelompok Belajar Paket B dan Kelompok Belajar Paket C Tahap Kedua di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2025	Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu Jenjang Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, kelompok Belajar Paket B dan Kelompok Belajar Paket C
383.	Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 Tahap Kelima	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
384.	Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Santri Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 Tahap Kedua	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2022	Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Kepada Santri Kurang Mampu
385.	Satuan Tugas Kecamatan dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2025	Satuan Tugas Kecamatan dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
386.	Pembentukan Satuan Tugas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2025	Terbentuknya Satuan Tugas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
387.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/329 Tahun 2025 tentang Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	Perubahan Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa
388.	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018	Terbentuknya Panitia Seleksi Calon Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma
389.	Penunjukan Lembaga Profesional Yang Melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2021	Penetapan Lembaga Profesional Yang Melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma
390.	Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2018 Karena Kadaluarsa dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2018 Karena Kadaluarsa dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
391.	Penghapusan Piutang Pajak Restoran Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2018 Karena Kadaluarsa dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Restoran Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	Penghapusan Piutang Pajak Restoran Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2018 Karena Kadaluarsa dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Restoran
392.	Penghapusan Piutang Pajak Air Tanah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2018 Karena Kadaluarsa dari Daftar Inventaris Piutang	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	Penghapusan Piutang Pajak Air Tanah Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2018 Karena Kadaluarsa dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Air Tanah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pajak Air Tanah Kabupaten Kebumen		
393.	Penghapusan Piutang Pajak Parkir Kabupaten kebumen Tahun 2015 Karena Kadaluarsa dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Parkir Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	Penghapusan Piutang Pajak Parkir Kabupaten kebumen Tahun 2015 Karena Kadaluarsa dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Parkir
394.	Penghapusan Piutang Pajak Reklame Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Karena Kadaluarsa dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Reklame Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	Penghapusan Piutang Pajak Reklame Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Karena Kadaluarsa dari Daftar Inventaris Piutang Pajak Reklame
395.	Pembentukan Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025	Terbentuknya Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
396.	Penerima Insentif Guru Ngaji Di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 Tahap Kedua	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2024	Penetapan Penerima Insentif Guru Ngaji
397.	Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 Tahap Keenam	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021	Penetapan Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
398.	Pembebasan Tanggungjawab atas Kerugian Daerah	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 103 Tahun 2021	Penetapan Pembebasan Tanggungjawab atas Kerugian Daerah
399.	Perubahan Keduapuluh Empat atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025		
400.	Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008	Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah longsor dan Cuaca Ekstrem
401.	Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2022	Penetapan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah
402.	Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2024	Terbentuknya Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara
403.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Selokerto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Selokerto
404.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Selokerto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Selokerto
405.	Pemberhentian Ady Hendarno, A.Md dari Jabatannya Sebagai Penjabat Kepala Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Pemberhentian Kepala Desa Kedawung

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
406.	Pengangkatan Madep Haryadi, S.M.,M.M Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Sebagai Penjabat Kepala Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023	Penetapan Penjabat Kepala Desa Kedawung
407.	Pendelegasian Wewenang Sebagai Pejabat Penilai Kinerja Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Unit Kerja Mandiri pada Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Evaluasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022	Penetapan Pendelegasian Wewenang Sebagai Pejabat Penilai Kinerja Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Unit Kerja Mandiri pada Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Evaluasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
408.	Perubahan Keduapuluh Lima atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 900/ 859 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
409.	Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2023	Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
410.	Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018	Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen Masa Jabatan Tahun 2025-2027		
411.	Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Masa Jabatan Tahun 2025-2028	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018	Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prembun
412.	Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 28 Tahun 2022	Penetapan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Retribusi Daerah
413.	Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2022	Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam
414.	Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Lapangan Manunggal Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Lapangan Manunggal Kecamatan Gombong
415.	Pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Kebumen Masa Bhakti Tahun 2025-2030	Peraturan Pemerintah Nomor 77/HUK/2010	Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Kebumen Masa Bhakti Tahun 2025-2030
416.	Penetapan Perubahan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021	Perubahan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
417.	Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen Tahun 2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020	Penetapan Tarif Air Minum dan Beban Tetap Rekening Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa
418.	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Kebumen	Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2017	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
419.	Pembentukan Tim Penyelenggara Karnaval SCTV 2025 di kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Penyelenggara Karnaval SCTV 2025
420.	Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2025	Terbentuknya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
421.	Keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2025-2030	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2014	Penetapan Keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah
422.	Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2026	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021	Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal
423.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tersobo
424.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tersobo
425.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Adiluhur

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kebumen Periode Tahun 2019-2027		
426.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Adiluhur Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Adiluhur
427.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedunggong Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedunggong
428.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedunggong Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kedunggong
429.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Sawangan
430.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sawangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sawangan
431.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Rahayu Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Rahayu
432.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Rahayu Kecamatan Padureso	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Rahayu

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027		
433.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tambaharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Tambaharjo
434.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tambaharjo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tambaharjo
435.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Winong
436.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Winong
437.	Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2024	Terbentuknya Tim Koordinasi Pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
438.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 100.3/37 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	Perubahan Program Pembentukan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2025
439.	Harga Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Puing Bekas Kebakaran Pasar Wonokriyo Gombong Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024	Penetapan Harga Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Puing Bekas Kebakaran Pasar Wonokriyo Gombong

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
440.	Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Kebumen Tahun 2026	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021	Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara
441.	Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kebumen	Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013	Terbentuknya Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini
442.	Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017	Penetapan Inovasi Daerah
443.	Pembentukan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017	Terbentuknya Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah
444.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko
445.	Pembentukan Satuan Tugas Penuntasan Sampah di Kabupaten Kebumen	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023	Terbentuknya Satuan Tugas Penuntasan Sampah
446.	Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kebumen Tahun 2026	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025	Penetapan Sekolah Adiwiyata
447.	Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Kepolisian Resor Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2023	Penetapan Hibah Barang Milik Daerah
448.	Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2026	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	Terbentuknya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2026
449.	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019	Terbentuknya Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
450.	Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kebumen	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2023	Terbentuknya Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kebumen
451.	Perubahan atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 000.2/255 Tahun 2025 tentang Besaran Nilai Wajar Sewa/Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Lahan Parkir di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024	Perubahan Besaran Nilai Wajar Sewa/Limit Sewa Barang Milik Daerah Berupa Lahan Parkir
452.	Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020	Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
453.	Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
454.	Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
455.	Penunjukan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016	Penetapan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026
456.	Penunjukan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2026	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016	Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan
457.	Penunjukan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012	Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
458.	Penunjukan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen Sebagai Penyimpan Uang Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2026	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Penetapan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen Sebagai Penyimpan Uang Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen
459.	Penunjukan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Kas Daerah dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2026	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Penetapan PT. Bank Jateng Cabang Kebumen sebagai Kas Daerah dan Rekening Kas Umum Daerah
460.	Program Pembentukan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2026	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Kebumen Tahun 2026
461.	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kaibonpetangkuran
462.	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaibonpetangkuran Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2019-2027	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019	Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaibonpetangkuran

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
463.	Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2025-2028	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2024	Terbentuknya Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kabupaten Kebumen
464.	Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 263/1208 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kebumen	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015	Perubahan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kebumen

3.2.1 Arah Kebijakan Kabupaten Kebumen

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan dinamika perekonomian global, nasional serta daerah baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2023 serta tantangan yang mungkin dihadapi pada Tahun 2024 hingga 2025. Perekonomian daerah secara umum dipengaruhi oleh perekonomian Nasional dalam masa saat ini juga masih terdampak kondisi ekonomi dan geopolitik Internasional. Inflasi masih menjadi isu utama yang harus dihadapi berbagai negara di dunia. Pada level daerah, tingkat inflasi yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian daerah utamanya berdampak pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.

Perkembangan inflasi di Jawa Tengah pada Tahun 2024 sesuai yang tercantum pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan dapat terkendali pada level 3±1%. Sedangkan inflasi di Kabupaten Kebumen secara resmi tidak dihitung oleh BPS sehingga berpedoman pada inflasi di 2 Kota terdekat yaitu Cilacap dan Purwokerto. Inflasi di Cilacap pada Tahun 2023 sebesar 2,69% menurun jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 6,81%, begitu juga untuk inflasi di Purwokerto sebesar 2,61% menurun jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 6,49%. Mendasari hal tersebut, walaupun inflasi bukan indikator

makro daerah yang wajib bagi kabupaten/kota karena tidak semua wilayah dihitung oleh BPS, sesuai target TPID perkembangan inflasi pada Tahun 2024 maupun 2025 diharapkan dapat dikendalikan pada kisaran 3±1%.

Arah kebijakan perekonomian daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagai tahapan perwujudan Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Dalam mewujudkan hal tersebut, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, telah diasumsikan target indikator makro Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Penetapan target kinerja Tahun 2025 selain berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 juga telah mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023, target kinerja 2024 serta current issue yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap kinerja di tahun 2025. Selain itu, penetapan target indikator makro daerah juga mempertimbangkan peranan Kabupaten Kebumen terhadap kinerja pemerintahan diatasnya baik provinsi maupun pusat. Sesuai arahan pada Musrenbang Nasional RKP Tahun 2025, beberapa indikator yang menjadi Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 juga telah disesuaikan dengan data baseline tahun 2025. Secara lengkap kondisi makro Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023, dan proyeksi Tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.120 Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023 dan Target Tahun 2024-2025

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (%)	-1,45	3,71	5,79	5,66	5,20- 5,80**	5,40-6,30****
2	Ketimpangan Pendapatan ukuran Bank Dunia (%)	20,02	19,30	19,86	20,38	21,00- 21,50*	20,98-21,48****
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,07	6,03	5,92	5,11	5,05-5,10*	4,55-4,98****
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	17,59	17,83	16,41	16,34	14,00-15,00*	13,90-14,71****
5	Indeks Pembangunan Manusia	70,32	70,56	71,29	71,88	71,90-71,95**	72,45****

Sumber : BPS 2017-2022, Bappeda Kabupaten Kebumen 2023 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2023

Keterangan:

*) Target pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

**) Target Provinsi Jawa Tengah

***) Target telah disesuaikan dengan kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2023

****) Target telah disesuaikan dengan IUP pada Tahun 2025 sebagai data baseline RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari sisi penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Sedangkan dari sisi pengeluaran daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah atau peluang di masa datang. Terdapat hubungan yang erat antara isu strategis dan identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Hasil identifikasi permasalahan pembangunan merupakan salah satu aspek yang menentukan rumusan isu strategis. Tujuan perumusan isu strategis adalah untuk menentukan fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen lima tahun mendatang. Isu strategis pembangunan daerah merupakan permasalahan utama daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta prioritas kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat mandatori. Adapun Isu strategis permasalahan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas
2. Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif
3. Kesejahteraan ekonomi masyarakat
4. Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Kondusifitas wilayah dan kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana
7. Peningkatan nilai budaya masyarakat.

3.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen

Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dilakukan melalui upaya:
   a. Peningkatan tata kelola organisasi dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan;
   b. Peningkatan pengelolaan data pembangunan penerapan merit system dalam rangka peningkatan manajemen sumber daya aparatur pemerintah;
   c. Optimalisasi pengendalian pembangunan, pengelolaan dan analisis data serta pengembangan riset dan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan;
   d. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah; serta
   e. Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang andal dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif, dilakukan melalui upaya:

a. Peningkatan mutu dan layanan kesehatan dan implementasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
b. Peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat serta kesehatan ibu dan anak;
c. Peningkatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka pencapaian SPM Kesehatan;
d. Peningkatan akses layanan pendidikan inklusif dan penerapan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pendidikan;
e. Dukungan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah yaitu Wajib Belajar 13 Tahun pada 1 tahun usia pra sekolah serta pendidikan kesetaraan dengan fokus Pusat Kegiatan Belajar Mengajar sebagai ujung ombak penanganan anak tidak sekolah;
f. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan;
g. Penguatan pendidikan agama, karakter, dan budi pekerti; serta
h. Peningkatan pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan Kebumen layak anak.

3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dilakukan melalui upaya:
   a. Pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;
   b. Peningkatan skala ekonomi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor industry;
   c. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor jasa;
   d. Pengembangan keanekaragaman budaya, hayati, dan geologi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
   e. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam rangka pengendalian harga;
   f. Peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
   g. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta optimalisasi pemanfaatan lahan pangan lestari dalam rangka penguatan ketahanan pangan;

h. Peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan; serta
i. Peningkatan perlindungan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal.

4. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan melalui upaya:
   a. Pengembangan sistem dan jaringan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi;
   b. Optimalisasi sistem jaringan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan layanan air bersih;
   c. Pengembangan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hunian masyarakat;
   d. Peningkatan upaya konservasi dalam rangka pelestarian lingkungan; dan
   e. Penataan Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaan persampahan serta limbah dalam rangka meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat, dilakukan melalui upaya:
   a. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini;
   b. Peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkades serentak tahun 2025 dalam rangka penguatan demokrasi;
   c. Penguatan kapasitas Desa Tangguh Bencana dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan bencana; dan
   d. Pengembangan dan pelestarian budaya dalam rangka peningkatan optimalisasi nilai-nilai budaya masyarakat.

3.2.4 Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa inovasi

daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah antara lain inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah dan jaringan inovasi daerah. Dalam rangka mendukung iklim riset dan inovasi daerah dibentuk jejaring riset dan inovasi daerah melibatkan lembaga penelitian, bisnis, masyarakat dan media sebagai perwujudan sinergi pentahelix. Beberapa inovasi daerah di Kabupaten Kebumen antara lain:

a. Pengembangan Sistem Perlindungan Pekerja Migran. Keluarga dan Masyarakat melalui “SIPEMIKAT”

   Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian. Tingginya angka pengangguran Kabupaten Kebumen sebesar 5,11% pada tahun 2023 dengan total pencari kerja yang tercatat sebesar 10.654 orang dengan persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 53,54%. Kondisi ini menjadikan sebagian tenaga kerja di Kabupaten Kebumen memilih bekerja sebagai pekerja migran atau bekerja di luar negeri. Jumlah pekerja migran yang ditempatkan selama tiga tahun terakhir (2019-2023) terus meningkat menjadi sebesar 9.082 orang. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kantong pekerja migran yaitu tertinggi ke 8 di Jawa Tengah dan 25 di tingkat nasional. Kondisi ini memicu berbagai permasalahan terkait pekerja migran. Setidaknya terdapat 12 kasus pada Tahun 2023 yang ditangani Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dengan aduan mayoritas adalah gagal berangkat/mundur karena tidak ada penempatan.

   Upaya peningkatan perlindungan pada PMI Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen membangun sistem kolaborasi yang terintegrasi atau “SIPEMIKAT” SINERGI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN, KELUARGA DAN MASYARAKAT. Inovasi ini bertujuan agar upaya pelindungan PMI lebih komprehensif merupakan sinergi pentahelix berkomitmen untuk memaksimalkan upaya pelindungan serta pemberdayaan PMI. Dalam pelaksanaanya terdapat pilar SIPEMIKAT sebagai pengembangan Desa Migran Produktif/DESMIGRATIF yang

bertujuan meningkatkan pelayanan dan pelindungan bagi Calon PMI, PMI dan PMI purna penempatan beserta anggota keluarganya secara terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan. Inovasi ini melibatkan stakeholder termasuk perangkat daerah terkait seperti Disdukcapil, Dinas Kesehatan dan melibatkan instansi vertikal seperti imigrasi, kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pengadilan Agama.

SIPEMIKAT, Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Keluarga dan Masyarakat bertujuan agar upaya pelindungan PMI lebih komprehensif, terbit peraturan desa, replikasi Desa Migran Produktif di 26 kecamatan, terbangun database PMI pada semua desa/kelurahan, pelibatan PMI dan keluarganya dalam kegiatan pembangunan dengan anggaran desa, community parenting untuk anak PMI yang ditinggalkan, serta kolaborasi kegiatan antar perangkat daerah.

Hingga saat ini telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Camat dan Kades dan telah tersusun regulasi berupa Peraturan Desa tentang Pelindungan dan Pemberdayaan PMI sebanyak 295 Perdes dan 340 database calon PMI, PMI maupun PMI purna penempatan dari jumlah total 460 desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen, terbentuknya 14 Pokja Bina TKI, terbentuknya Tim Psikososial community parenting, sosialisasi intensif melalui media cetak dan elektronik serta tersedia hotline layanan pengaduan PMI. Melalui Perbup Nomor 5/2023 teralokasi dana desa untuk kegiatan pelindungan PMI serta kolaborasi kegiatan antar perangkat daerah.

Kebaruan inovasi SIPEMIKAT adalah tersedianya layanan luar gedung dalam bentuk mobil keliling yang diberi nama PATRIOT yang dilaksanakan di minggu ke III setiap bulan bertempat di Alun-Alun Pancasila Kebumen atau di event-event insidental jika diperlukan. Atas inovasi tersebut Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapatkan penghargaan Hassan Wirajuda Award (HWPA) yaitu penghargaan kepada perorangan lembaga, instansi pemerintah baik di perwakilan maupun pemerintah daerah yang memberikan upaya perlindungan kepada WNI dengan sungguh-sungguh..

b. Pengembangan Puskesos SLRT “Rumah Harapan”

Kemiskinan merupakan salah satu isu strategis daerah Kabupaten Kebumen yang akan menjadi mainstreaming dalam

penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan. Berbagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan kerentanan telah dilakukan. Pada level penanganan kemiskinan mikro masih terdapat kasus masyarakat miskin yang belum menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif dan banyak yang belum menerima manfaat dari program penanggulangan pemerintah meskipun kondisinya layak menerima. Sebagai langkah tindak lanjut pada September 2015 telah di launching Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPT-P2K) “RUMAH HARAPAN” Kabupaten Kebumen dengan payung hukum Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 tahun 2015. Saat itu UPT P2K memberikan 4 (empat) jenis layanan bagi warga miskin yaitu pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi serta data dan pelaporan.

Sejak Tahun 2017 Rumah Harapan telah berkembang menjadi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) sebagai pusat informasi tentang program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Puskesos dibentuk melalui Surat Keputusan Kadinsos P3A Nomor 460/340 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sekretariat dan Penunjukkan Sumber Daya Manusia Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Rumah Harapan”. Puskesos juga berfungsi untuk membangun wadah aduan masyarakat tentang program bantuan sosial, juga menerima berbagai keluhan mulai dari pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial dan ekonomi, mengetahui kepesertaan dan kebutuhan program melalui penjangkauan oleh fasilitator di lapangan dan menjadi pusat penanganan keluhan dan rujukan, dan menghubungkan masyarakat miskin dengan multi layanan dan lintas sektoral sesuai dengan kebutuhan. Saat ini PUSKESOS memiliki 11 (sebelas) jenis layanan yaitu rekomendasi Kartu Indonesia Sehat PBI dan badan amil zakat nasional, data terpadu: (1) Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), (2) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), (3) Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (4) Rekomendasi bantuan biaya pelayanan kesehatan, (5) Konsultasi bantuan sosial, PKH dan Sembako, (6) Rekomendasi adopsi anak, (7) Rehabilitasi PGOT dan ODGJ, (8) Rekomendasi layanan rujukan bagi ODGJ, disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan Gepeng, (9) Rekomendasi perpanjangan dan pendirian LKS, (10) Layanan Korban

Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KKBGA) dan (11) Dispensasi Kawin.

Puskesos berfungsi sebagai wadah pengaduan persoalan kemiskinan yang akan dirujuk ke berbagai pengelola program yang berwenang dan dipastikan dapat ditangani dengan baik dan terpantau proses penanganannya. Salah satu strategi perluasan dan keberlanjutan Puskesos antara lain dengan advokasi dan sosialisasi pada seluruh stakeholder, menyusun rencana aksi pengembangan Puskesos SLRT dan membangun pentahelix partisipasi sektor non pemerintah seperti yang sudah dilakukan selama ini yaitu berkolaborasi dengan: Perguruan Tinggi, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, BUMN dan perangkat daerah lainnya. Saat ini Puskesos Rumah Harapan telah dikembangkan di 130 puskesos di tingkat desa.

Pada Tahun 2022 Rumah Harapan ditetapkan sebagai program Quick Win Smart City Kabupaten Kebumen. Selain itu Puskesos merupakan salah satu inisiatif dalam penanggulangan kemiskinan. Keberadaan Puskesos diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terintegrasi, saling terkoneksi dengan seluruh pemangku kepentingan, membantu validasi data penerima bansos dan adanya puskesos pada tingkat desa dapat mendekatkan layanan kesejahteraan sosial dengan masyarakat. Puskesos Rumah Harapan berusaha terus mendekatkan layanan bagi masyarakat miskin dalam menyampaikan keluhan atau aduan terkait dengan layanan kebutuhan program dan bantuan jaminan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Rumah Harapan (SIRAMAH).

c. MIE KERITING (Makanan Instan Cegah Kerdil dan Stunting)

Inovasi yang diusung oleh Kabupaten Kebumen melalui UPTD Puskesmas Kebumen 2 sebagai salah satu upaya mewujudkan Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Stunting) di Kabupaten Kebumen. Puskesmas Kebumen II berhasil menciptakan sebuah inovasi yaitu “MIE KERITING” (Makanan Instan Cegah Kerdil dan Stunting). Inovasi Mie Keriting merupakan makanan instan yang dibuat dari bahan utama ganyong dan kelor, serta bahan lain yang dibutuhkan sesuai konsep makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan konsep “ISI PIRINGKU”. Mie Keriting telah

melalui uji laboratorium sebagai salah satu pertimbangan dalam pengembangan dan replikasi inovasi agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Inovasi ini telah mengalami pengembangan sejak diinisiasi pada tahun 2020 yang awalnya berupa makanan tambahan yang diberikan langsung kepada balita berupa kue basah, mie basah, bubur dan lainnya kemudian berkembang menjadi camilan instan yang disukai anak-anak dalam bentuk mie instan. Selanjutnya pada Tahun 2022 MIE KERITING berkembang menjadi camilan sehat yang lebih bervariasi dengan bermacam-macam rasa yang disukai anak-anak. Untuk memperluas penerima manfaat, inovasi ini berkembang menjadi industri rumah tangga serta tengah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), izin edar/ P-IRT. Bentuk perlindungan atas kekayaan intelektual yang diberikan antara lain fasilitasi penerbitan sertifikat hak cipta, SK Gubernur Jateng atas Pemenang Inovasi, hak paten, serta MOU dengan BRIDA Jateng dalam pengembangan produk inovasi. Selain itu inovasi ini telah ditetapkan sebagai Top 45 Nasional Inovasi Pelayanan Publik pada Tahun 2023 dan menjadi Top Inovasi Pelayanan Publik kelompok keberlanjutan Tahun 2024.

Makanan instan dari inovasi mie keriting ini dapat direplikasi di seluruh wilayah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan desa bekerjasama dengan promkes dan program gizi kemudian diolah oleh kader menjadi PMT dan diberikan pada balita pada kegiatan posyandu. Sasaran utama pemberian PMT ini adalah balita yang mempunyai berat dan tinggi badan kurang. Selain itu juga melakukan pembinaan pada kelompok PKK desa yang anggotanya termasuk kader desa untuk mengolah mie keriting ini menjadi sediaan instan yang disukai oleh anak-anak seperti coco crunch dan bit mie kemudian dikemas sedemikian rupa untuk dijual dan menambah pendapatan desa. Pemasaran mie keriting ini akan dilaksanakan melalui koperasi, Bumdes dan toko-toko makanan yang ada di Kebumen. MIE KERITING sebagai peluang baru untuk pengembangan produk yang bermanfaat untuk pencegahan stunting dan untuk menunjang pertumbuhan balita, atau sebagai alternatif Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai pencegahan stunting.

Inovasi ini diharapkan menjadi pionir munculnya inovasi-inovasi baru dalam penanganan stunting di Kabupaten Kebumen.

d. Akta Kematian Diserahkan Cepat (AMAT RAPAT)

AMAT RAPAT merupakan wujud komitmen Kecamatan Karangsambung dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan berkeadilan. Layanan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan mengedepankan penyederhanaan prosedur serta pemanfaatan teknologi informasi.

Melalui inovasi ini, keluarga duka tidak perlu lagi datang ke kantor kecamatan, dari Desa cukup kirim dokumen melalui Whatsapp, Kecamatan langsung memproses dan menyerahkan Akta Kematian kepada keluarga duka secara langsung. Data kematian ini juga terintegrasi ke beberapa layanan masyarakat seperti BPJS, DINSOS, dan sebagainya sehingga hak-hak administratif keluarga yang ditinggalkan dapat segera dipenuhi sekaligus mendukung tertib administrasi dan akurasi data kependudukan daerah.

e. Sistem Informasi Kebutuhan Pokok (SIMBOK)

Sistem Informasi Kebutuhan Pokok (SIMBOK) merupakan inovasi teknologi informasi yang diinisiasi oleh Disperindag Kabupaten Kebumen bersama stakeholder terkait guna memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk memantau harga kebutuhan pokok di pasar-pasar rakyat secara real time setiap pagi. Melalui aplikasi berbasis online ini, data harga komoditas strategis dapat dihimpun langsung dari lapangan dan tersaji secara cepat, akurat, dan terbaru.

SIMBOK dapat menyajikan harga rata-rata kepokmas di Kabupaten Kebumen, harga rata-rata di tiap pasar setiap hari yang disajikan dalam bentuk daftar harga harian, tabel perubahan harga per pasar, per hari, per bulan, per tahun. Perubahan harga komoditi juga dapat dilihat dalam bentuk grafik perubahan harga. Terdapat pula menu perbandingan harga komoditi antar pasar rakyat yang dapat digunakan untuk membandingkan harga di pasar satu dengan pasar lainnya.

Kehadiran SIMBOK memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam melakukan monitoring perkembangan harga harian, sehingga potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi, pelaksanaan operasi pasar, serta upaya menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Dengan demikian, SIMBOK mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berbasis data di Kabupaten Kebumen

f. BALADA PAK-KIS

BALADA PAK-KIS merupakan inovasi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan yang dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pemohon dalam mengurus dokumen kependudukan, khususnya bagi bayi baru lahir. Inovasi ini bertujuan memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum sejak dini melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Inovasi ini memberikan 4 (empat) paket dokumen sekaligus dimana bayi baru lahir mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pelayanan ini mengurangi beban masyarakat dengan meminimalkan tahapan administrasi serta waktu tunggu, sekaligus meningkatkan ketertiban dan akurasi data kependudukan. BALADA PAK-KIS mempermudah pengurusan dokumen kependudukan dan asuransi kesehatan hanya dengan sekali pelaporan di faskes tempat ibu melahirkan, ketika pulang membawa paket dokumen secara gratis dan praktis. Inovasi ini juga sangat diutamakan bagi penduduk rentan dan berkebutuhan khusus (disabilitas).

Pelaksanaan program inovasi ini terkoordinasi antara BPJS, Rumah Sakit/Klinik Bersalin dan Puskesmas se-Kabupaten Banyumas. Dengan demikian, BALADA PAK-KIS mendukung pemenuhan hak sipil anak, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

g. Cegah Stunting dengan Pantau Kilat Calon Manten (CETING PAK CAMAT)

CETING PAK CAMAT merupakan salah satu inovasi di bidang kesehatan yaitu Puskesmas Alian yang membentuk tim lintas program

meliputi dokter, perawat, bidan, analis gizi, promkes, dan sebagainya) terkait pelayanan di dalam gedung dan melibatkan lintas sektor, khususnya KUA untuk memasukkan materi pencegahan stunting bagi calon pengantin pada konseling pranikah, dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat sebagai upaya preventif dalam percepatan penurunan stunting. Inovasi ini berfokus pada pemantauan dan pendampingan kesehatan calon pengantin sejak pra-nikah sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan gizi dan kesehatan sebelum memasuki masa kehamilan.

Data hasil pemantauan menjadi dasar intervensi dini berupa edukasi gizi, pemeriksaan kesehatan, serta rujukan layanan yang diperlukan. Dengan pendekatan ini, inovasi CETING PAK CAMAT diharapkan mampu menekan risiko stunting sejak hulu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung terwujudnya generasi sehat dan berkualitas di Kabupaten Kebumen.

h. Gerakan Pencarian Suspect dan Penderita TBC (GENCAR SAPU TBC)

Gencar Sapu TBC merupakan inovasi daerah di Wilayah Kerja Puskesmas Buayan, Kabupaten Kebumen, yang dikembangkan sebagai upaya percepatan penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC). Inovasi ini bertujuan meningkatkan penemuan kasus secara dini, memastikan pengobatan yang tuntas, serta menekan risiko penularan TBC di lingkungan masyarakat. Kegiatan GENCAR SAPU TBC melalui investigasi kontak pasien TBC yang dilakukan sebulan dua kali, kunjungan rumah orang terduga TBC oleh kader dan petugas.

Melalui pelaksanaan skrining aktif hingga ke tingkat desa, pelibatan kader kesehatan, serta penguatan peran lintas sektor, Gencar Sapu TBC memungkinkan deteksi kasus TBC dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Puskesmas Buayan berperan sebagai pusat koordinasi pelayanan kesehatan, pendampingan pasien, dan pemantauan kepatuhan pengobatan. Dengan pendekatan ini, inovasi Gencar Sapu TBC diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Buayan serta mendukung target eliminasi TBC di Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan. Kegiatan GENCAR SAPU TBC memiliki banyak manfaat diantaranya adalah mempermudah akses pelayanan kesehatan khususnya pemeriksaan

dahak untuk deteksi dini TBC, mencegah pasien putus berobat, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kader dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit, dan menuju eliminasi TBC di wilayah Puskesmas Buayan.

i. Gerakan Sadanis dan IVA Test untuk Mencegah Kanker Leher Rahim dan Payudara (GESIT MERAYU)

GESIT MERAYU (Gerakan Sadanis dan IVA Test untuk Mencegah Kanker Leher Rahim dan Payudara) merupakan salah satu inovasi daerah yang dikembangkan sebagai upaya promotif dan preventif dalam menekan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim dan kanker payudara. Inovasi ini menekankan pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan SADANIS (Pemeriksaan Payudara Klinis) dan IVA Test (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) yang mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi perempuan usia subur untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Inovasi GESIT MERAYU memudahkan akses pelayanan kesehatan, dalam kasus spesifik program deteksi dini untuk kanker leher Rahim dan kanker payudara. Kegiatan dilaksanakan oleh satu tim yang terdiri driver, petugas IVA dan bidan pemangku wilayah. Dengan deteksi dini yang lebih cepat, potensi penanganan dapat dilakukan sejak tahap awal sehingga peluang kesembuhan meningkat dan beban pembiayaan kesehatan dapat ditekan. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan serta mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Kebumen yang sehat dan produktif.

j. HANTARO

HANTARO (Hantar Obat) merupakan inovasi pelayanan kesehatan hasil kolaborasi antara RSUD Sudirman dan PT Pos Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan kesinambungan layanan kepada pasien. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat dalam memperoleh obat secara tepat waktu tanpa harus datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui HANTARO, obat yang telah diresepkan dokter dapat dikirim langsung ke alamat pasien dengan memanfaatkan

jaringan distribusi PT Pos Indonesia. Layanan ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi kepadatan kunjungan pasien di rumah sakit, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan aman. Dengan pendekatan kolaboratif ini, HANTARO mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat kemitraan antar instansi, serta mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

k. Sistem Aplikasi Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pembayaran Secara Online (SIAPPIKE POL)

SIAPPIKE POL (Sistem Aplikasi Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pembayaran Secara Online) merupakan inovasi daerah melalui Disperkimhub yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengujian kendaraan bermotor. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas kebutuhan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan efisien seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan berbasis digital.

Melalui SIAPPIKE POL, proses pendaftaran pengujian kendaraan bermotor hingga pembayaran non tunai dapat dilakukan secara online tanpa harus datang dan mengantri dalam waktu lama, serta hasil pengujian kendaraan bermotor berupa Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) dan smart card pada masing – masing kendaraan bermotor wajib uji. Sistem ini memudahkan pemohon dalam mengatur jadwal pengujian, sekaligus meningkatkan akurasi data dan transparansi pelayanan. Dengan demikian, SIAPPIKE POL diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan uji kendaraan, mendukung keselamatan berlalu lintas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di Kabupaten Kebumen.

l. Kredit SIMIKI

Kredit SIMIKI merupakan salah satu inovasi daerah yang dihadirkan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Inovasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan layanan kredit yang lebih inklusif, cepat, dan terjangkau, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang selama

ini masih menghadapi keterbatasan akses permodalan melalui bank konvensional yang persyaratannya harus didukung dengan agunan.

Inovasi ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan PT BPR Bank Kebumen dalam menyediakan solusi pembiayaan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan implementasi Kredit SIMIKI, diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh dukungan permodalan secara lebih mudah dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha, membuka lapangan kerja, serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Kebumen.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2024

Tabel III.121 Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2024 dan Rencana Tindak Lanjut

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
A. Mekanisme dan Prosedur					
1	Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Penyampaikan ke DPRD selalu disampaikan di akhir batas waktu penyampaian, kedepan untuk lebih dipersiapkan waktu penyusunan dan penjadwalannya sehingga tidak selalu diberikan dibatas akhir waktu penyerahan.	Sekretariat (Bagian Pemerintahan)	1. Penyusunan jadwal penyusunan LKPJ yang lebih awal dan terstruktur mulai dari pengumpulan data dan laporan perangkat daerah hingga proses finalisasi dokumen. 2. Penetapan timeline internal yang lebih ketat. 3. Penjadwalan penyampaian LKPJ kepada DPRD diberikan sebelum batas akhir penyerahan	1. Keterlambatan penyampaian data dari perangkat daerah. 2. Kualitas data dan informasi yang belum optimal 3. Koordinasi lintas perangkat daerah yang belum efektif	1. Penguatan komitmen dan tanggungjawab perangkat daerah. 2. Monitoring dan evaluasi progres secara berkala. 3. Penyediaan waktu verifikasi dan penyempurnaan dokumen
2	Dalam pembahasan yang telah dilakukan, masih terdapat penyajian data yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyajian data kedepan untuk lebih diperhatikan.	Sekretariat (Bagian Pemerintahan)	Kedepan kami akan melakukan perbaikan dengan meningkatan ketelitian, akurasi, dan kelengkapan data yang disajikan, termasuk kesesuaian antara narasi, indikator kinerja serta data dukung	Data yang kami sajikan berdasarkan data yang kami terima dari OPD selaku pengampu	Peningkatan pengendalian kualitas data melalui penguatan proses verifikasi dan validasi secara berjenjang sebelum LKPJ disampaikan
3	Masih terdapat banyak kesalahan penulisan narasi dan perhitungan data, kedepan kualitas penyusunan dokumen perlu ditingkatkan, selain itu peran tim penyusun dokumen LKPJ juga perlu dioptimalkan, tim yang sudah di SK kan harus bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.	Sekretariat (Bagian Pemerintahan)	Penguatan proses review dan verifikasi, serta peningkatan ketelitian dalam penyajian data narasi dengan melibatkan Tim Penyusun LKPJ	Peran tim penyusun LKPJ yang telah ditetapkan belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota belum optimal	Perlu dilakukan verifikasi data serta narasi sebelum dokumen difinalisasi guna meminimalkan kesalahan penulisan dan perhitungan
4	Dalam perumusan permasalan memperhatikan fakta faktual yang ada dimasyarakat, bukan hanya menerima laporan atau hanya berdasarkan data yang disusun diatas meja dan dipertanyakan akuntabilitas datanya.	Sekretariat (Bagian Pemerintahan)	Diperlukan penguatan validasi data melalui pengecekan lapangan, klarifikasi kepada perangkat daerah serta penggunaan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga akuntabilitas data yang disajikan dalam LKPJ dapat terjamin	Masih terdapat kecenderungan penggunaan data yang bersumber dari laporan administratif tanpa didukung verifikasi terhadap fakta faktual yang berkembang dimasyarakat	Penguatan verifikasi dan validasi data berbasis fakta dilapangan melalui pengecekan lapangan dan klarifikasi kepada perangkat daerah terkait.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
B. Kebijakan Pemerintah Daerah					
1	Arah kebijakan Pembangunan daerah tahun 2024 adalah “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Peningkatan Sektor Pertanian” arah kebijakan tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan RKPD tahun 2024. Yang disayangkan adalah tema dan arah kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik, hal ini terlihat dari hasil capaian target kinerja pembangunan infrastruktur hampir semuanya tidak mencapai target, baik target kondisi jalan, irigasi, drainase maupun bangunan gedung semuanya tidak mencapai target.	BAPPERIDA	Hasil capaian target kinerja pembangunan infrastruktur belum mencapai target pada 2024. Hal ini coba ditindaklanjuti melalui penyesuaian kebijakan pada tahun 2025 dengan dilakukan penguatan pembangunan infrastruktur pada Perubahan RKPD/ APBD 2025.	Untuk optimalisasi peningkatan penguatan pembangunan infrastruktur sebagaimana arah kebijakan tahun 2025	Dilakukan pengalihan belanja lain untuk mendukung belanja infrastruktur
2	Begitu juga untuk sektor pertanian, dilihat dari nilai produksi pertanian tahun 2024 di Kabupaten Kebumen hampir semuanya turun dari nilai produksi ditahun 2023. Hal ini terlihat dari Nilai produksi komoditas peternakan, komoditas tanaman pangan, komoditas Perkebunan semuanya turun, hanya komoditas holtikultura yang naik tetapi nilainya tidak signifikan atau hanya mengalami kenaikan sedikit.	DISTAPANG	1. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat guna meningkatkan minat masyarakat untuk berusaha di bidang peternakan 2. Peningkatan perluasan pasar untuk menyerap hasil produksi tanaman pangan terutama gabah dan kacang hijau dengan harga yang lebih kompetitif dan menguntungkan 3. Peningkatan perluasan pasar untuk menyerap hasil produksi dengan harga yang lebih kompetitif dan menguntungkan karena produk tembakau Kebumen selama ini sebagian besar masih dipasarkan di wilayah Kabupaten Kebumen. 4. Perintisan Corporate Farming (CF), melalui konsolidasi lahan pertanian dan dikelola oleh satu manajemen, untuk meningkatkan produktivitas hail pertanian dan efisiensi biaya usaha tani. 5. Pembinaan dan pelatihan petani milenial	1. Permasalahan utama bagi masyarakat untuk melakukan usaha peternakan adalah kekurangan modal 2. Penurunan nilai produksi komoditas tanaman pangan terutama gabah dan kacang hijau dikarenakan turunnya harga dipasaran untuk produk gabah dan kacang hijau. Hal tersebut dikarenakan adanya panen raya sehingga produk melimpah di pasaran dan harga menjadi turun. 3. Penurunan nilai produksi komoditas perkebunan terutama tembakau dikarenakan masa panen tembakau di luar wilayah Kabupaten Kebumen yang juga menjadi sentra tembakau seperti Temanggung, Pati dan Kudus hampir serentak sekitar bulan Agustus-September sehingga produk di pasaran melimpah dan	1. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengatasi permodalan yaitu dengan sosialisasi kemitraan dan cara mengakses perbankan, fasilitasi dari pemerintah berupa bantuan hibah ternak dan pembinaan. 2. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama para kelompok tani dengan para pengepul di tingkat petani, pedagang besar, mitra Bulog dan Bulog agar dapat menyerap produk dalam jumlah besar dengan harga lebih tinggi dibanding harga pasar. 3. Pembinaan kepada para petani tembakau terkait percepatan persiapan dan ketepatan masa tanam tembakau di wilayah sentra tembakau setelah panen padi musim tanam I sekitar Maret – April. Masa tanam tembakau di Kebumen yaitu mulai Juni- juli agar bisa panen Agustus-September sebelum memasuki musim hujan sehingga persiapan lahan bisa dilakukan mulai Mei karena lahan sudah tidak dugunakan

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
			6. Bimtek dan pembinaan perizinan berusaha	harganya menjadi turun dipasaran. 4. Sebagian besar petani masih mengelola lahan secara sendiri-sendiri dengan luas lahan yang sempit, sehingga efisiensi usaha tani tidak maksimal dan produktivitas hasil pertanian kurang optimal karena standar perlakuan agronomis yang bermacam-macam dan tidak standar sesuai kondisi lahan secara spesifik lokasi. 5. Kebanyakan petani di Kabupaten Kebumen usianya lebih dari 39 tahun 6. Belum semua pelaku usaha berizin	untuk tanam padi lagi. Apabila kondisi curah hujan sudah tidak tinggi bisa langsung mulai tanam sehingga akan panen di awal Agustus dimana kondisinya belum memasuki masa panen raya sehingga harga cenderung masih tinggi. 4. Pelaksanaan budidaya pertanian secara Corporate Farming (CF). 5. Pemberdayaan petani muda melalui Petani Millenial. 6. Peningkatan koordinasi perizinan pertanian serta pembinaan dan bimtek perizinan
3	Pendapatan Daerah kedepan untuk lebih dioptimalkan khususnya pendapatan asli daerah, pada dokumen LKPJ tahun 2024 ada dua sektor utama pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target yaitu pendapatan pajak dan pendapatan retribusi daerah. Target Pajak Rp.142.880.000.000,00 sedangkan Realisasinya Rp.139.439.551.572,00 dan Target Retribusi Rp.34.328.188.000,00 sedangkan Realisasinya Rp.33.227.714.159,00.	BPKPD	Untuk mengoptimalkan penerimaan PAD khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menjalankan beberapa langkah strategis diantaranya : 1. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. 2. Esktensifikasi Pajak Daerah 3. Optimalisasi retribusi daerah 4. Penguatan lembaga dan SDM 5. Penyuluhan, sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak maupun wajib retribusi 6. Evaluasi pendapatan secara berkala.	Pencapaian tahun 2025 untuk retribusi daerah secara keseluruhan mampu tercapai 105,32%, sedangkan pajak daerah tercapai 95,64% Kondisi ini dipengaruhi oleh Tahun 2025 sebagai tahun pertama penerapan kebijakan opsen PKB dan BBNKB, sehingga masih terdapat proses penyesuaian regulasi, sistem administrasi, serta mekanisme pemungutan di lapangan. Selain itu, fase transisi kebijakan ini juga memerlukan waktu untuk optimalisasi basis data dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ke depan, melalui evaluasi dan penguatan koordinasi dengan pemerintah	1. Penguatan koordinasi dengan bapenda provinsi terkait dengan Opsen PKB dan BBNKB. 2. Intensifikasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah 3. Ekstensifikasi Pajak daerah dan Retribusi daerah. 4. Pemutakhiran dan perbaikan basis data pajak dan retribusi daerah. 5. Sosialisasi secara berkala melaiui berbagai media

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
				provinsi serta peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, diharapkan target pendapatan dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.	
C. Catatan Strategis					
1	Data merupakan hal yang sangat penting dalam Pembangunan, dengan data yang baik maka pembangunan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. DPRD merekomendasikan dalam perencanaan dan pertanggungjawaban pembangunan harus berdasarkan data yang akurat, terpercaya, valid dan relevan. Adanya permasalahan terkait dengan data tentunya harus segera diperbaiki.	BAPPERIDA	1. Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan langkah perbaikan melalui penguatan tata kelola data pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data sektoral pada seluruh perangkat daerah dengan mengacu pada standar data yang baku serta penguatan koordinasi antar penghasil data, guna menjamin konsistensi dan keselarasan data perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Pembangunan. 2. Secara khusus Bapperida telah menyelenggarakan Forum Satu Data dalam upaya sinkronisasi dan integrasi data sektoral anatara produsen data dan pembinan data	1. Optimalisasi pemutakhiran data secara berkala serta masih adanya penggunaan data lama dalam proses perencanaan dan pelaporan. 2. Sinkronisasi terhadap perbedaan dan inkonsistensi data antar perangkat daerah. 3. Peningkatan Koordinasi antar penghasil dan pengelola data sehingga tidak menimbulkan duplikasi maupun ketidaksesuaian data. 4. Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data.	1. Penetapan jadwal pemutakhiran data secara berkala pada seluruh perangkat daerah serta kewajiban penggunaan data terbaru. 2. Penerapan standar data pembangunan daerah yang seragam, meliputi definisi operasional, metodologi pengumpulan, serta format penyajian data. 3. Optimalisasi peran wali data dan pembina data, serta peningkatan sinergi antar perangkat daerah penghasil data. 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data melalui pendampingan dalam pengelolaan, analisis, dan penyajian data pembangunan.
2	Merumuskan strategi yang tepat dan dapat dilaksanakan untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah khususnya opsen pajak dan pemanfaatan aset daerah.	BPKPD	1. BPKPD melakukan optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan pengelolaan pajak daerah, khususnya implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Implementasi kebijakan opsen PKB dan BBNKB masih memerlukan penyesuaian sistem, data, dan koordinasi lintas instansi. 2. Basis data pajak dan aset daerah belum sepenuhnya mutakhir sehingga berpengaruh terhadap	a. Melakukan penguatan sistem pengelolaan pajak daerah melalui pemutakhiran data secara berkelanjutan dan integrasi data lintas sektor. b. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB secara optimal.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
			2. Melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara bertahap melalui peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta instansi vertikal pendukung. 3. Mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui penataan administrasi, inventarisasi, serta pemanfaatan aset sesuai potensi dan ketentuan yang berlaku. 4. Memperkuat sinergi dengan perangkat daerah pengelola pendapatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.	optimalisasi potensi pendapatan daerah. 3. Pemanfaatan aset daerah belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kesiapan administrasi, regulasi pendukung, dan skema pemanfaatan. 4. Tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak masih perlu ditingkatkan.	c. Melakukan percepatan inventarisasi dan penataan aset daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan pemanfaatan aset. d. Meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pelayanan kepada wajib pajak guna mendorong peningkatan kepatuhan dan kesadaran pajak.
3	Melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa yang terintegrasi.	Inspektorat dan Dinas PMD	1. Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen telah menggunakan aplikasi siswaskuedes dari Kemendagri/BPKP dan menggunakan aplikasi siskuedes yang dioperatorkan oleh Desa dengan koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen 2. Inspektorat Daerah melaksanakan Bimbingan Teknis Tugas dan Fungsi BPD kepada 389 anggota BPD dari masing-masing desa di Kabupaten Kebumen. 3. Inspektorat Daerah menjadi narasumber pada kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Desa di Desa. 4. Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen melakukan inisiasi	1. Beberapa kegiatan di Desa belum bisa di tagging melalui aplikasi Siskuedes. 2. Terdapat beberapa desa terindikasi mengalami permasalahan pengelolaan keuangan desa	1. Koordinasi dengan BPKP untuk menambah tagging dalam aplikasi Siskuedes. 2. Koordinasi dengan Inspektorat, Bank Jateng, KPPN, BPKP, Kejaksaan dan Kepolisian 3. Melaksanakan pemetaan terhadap desa-desa dengan indikasi pengelolaan keuangan dan aset desa yang belum optimal.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
			penyusunan Peraturan Bupati Kebumen tentang Pengawasan Desa Berbasis Masyarakat. 5. Penyuluhan antikorupsi dan gratifikasi kepada ASN di Perangkat Daerah. 6. Pembinaan kepada Desa dengan indikasi permasalahan pengelolaan keuangan dan aset desa oleh Dinas PMD		
4	DPRD mencermati dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama ini masih sebatas output, maka kedepan indikator kinerja harus terukur sampai dengan outcome, benefit dan impactnya. Adanya cascading yang sudah disepakati harus bisa dilaksanakan dan terukur.	BAPPERIDA, Bagian Organisasi	1. Bagian Organisasi Telah Melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencakup juga tentang Penysunan Pohon kinerja dan Penjenjangan Kinerja. 2. Tim yang terdiri dari BAPPERIDA, Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi telah melaksanakan desk kepada Perangkat Daerah untuk penyempurnaan Rumusan dan Definisi Operasional pada masing-masing Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Peningkatan pemahaman terhadap Pohon Kinerja dan Cascading dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah	Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading melalui Aplikasi dalam penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah
5	Dinas Kesehatan untuk berhitung jumlah masyarakat yang merupakan bagian dari karyawan Perusahaan, pemenuhan beban anggaran UHC saat ini mencapai Rp.56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar) dan kedepan akan semakin meningkat, khususnya setelah ada data Tunggal. Maka perlu perhitungan yang jelas terkait dengan jaminan Kesehatan yang diperoleh dari perusahaan maupun yang mandiri.	DINKES PPKB	Koordinasi lintas sektor Disnaker, Disdukcapil, DPMPTSP, dan Disperindag serta pihak BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan untuk sinkronisasi data perusahaan, data karyawan yang ber JKN maupun data peserta mandiri JKN	Belum adanya data akurat dari lintas sektor mengenai data perusahaan dan data karyawan yang sudah menjadi peserta JKN dari segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) serta segmen Mandiri	Koordinasi terkait dengan data perusahaan dan data karyawan yang sudah menjadi kepesertaan dari segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) serta segmen Mandiri
6	Dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan BLUD kepada Masyarakat, Dinas Kesehatan PPKB harus berani mengintervensi BLUD khususnya rumah sakit dan puskesmas. Selain itu juga perlu adanya pemberian rewards dan punishment bagi BLUD yang pelayanan dan kinerjanya rendah/jelek.	DINKES PPKB	Intervensi dalam pemberian reward and punishment bagi BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit (RS) didasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang	Realisasi input data capaian kinerja program yang kadangkala terlambat sehingga penilaian kinerja belum bisa maksimal dikarenakan	1. Mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM. 2. Koordinasi intensif BLUD untuk pemenuhan data capaian program dan kinerja

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
			BLUD, mekanismenya dikaitkan dengan Remunerasi berbasis kinerja (output) dan Penilaian Kinerja yang diatur dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA), antara lain dalam: 1. Penyusunan Pedoman dan Peraturan: Pemda, melalui Kepala Daerah, menyusun peraturan terkait manajemen pegawai dan pengelolaan keuangan BLUD, yang menetapkan standar kinerja dan tata cara pemberian insentif. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), memuat nilai evaluasi manajemen, IKM, target kinerja yang harus dicapai BLUD sebagai dasar penilaian. 3. Evaluasi Kinerja Berkala: Pemda melakukan reviu dan pelaporan kinerja tahunan untuk memantau capaian target, baik audit internal maupun eksternal. 4. Pemberian Reward (Insentif) maupun Penerapan Punishment (Sanksi) mendasari hasil evaluasi, berupa insentif, pemberian penghargaan, kesempatan mengikuti diklat kompetensi bagi berkinerja tinggi. Pusnishmen dapat berupa sanksi administratif, disiplin atau evaluasi ulang bagi manajemen dan pegawai jika capaian kinerja BLUD tidak	kurangnya SDM terutama di Puskesmas	

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
			memenuhi standar yang ditetapkan		
D. Rekomendasi Terhadap Kinerja Pemerintah Berdasarkan Urusan					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) menjadi target yang tidak tercapai di beberapa tahun terakhir, pada tahun 2024 dari target sebanyak 85% realisasinya hanya 83%. DPRD merekomendasikan untuk melakukan strategi peningkatan partisipasi kasar sekolah dan mengurangi angka putus sekolah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan rendahnya angka partisipasi kasar juga harus bisa menyelesaikan akar dari permasalahan bukan hanya sebatas sosialisasi.	DISDIKPORA	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan rendahnya angka partisipasi kasar dengan melakukan gerakan kembali ke sekolah melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan untuk anak berkebutuhan khusus dimasukan ke sekolah inklusi. Untuk anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan beasiswa kurang mampu(BKM) dan bisa dimasukan ke Sekolah Rakyat	APK capainnya masih dibawah 100 %, sebagian masyarakat masih menganggap kurang penting pendidikan anak usia dini.	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan rendahnya angka partisipasi kasar dengan melakukan gerakan kembali ke sekolah melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan untuk anak berkebutuhan khusus dimasukan ke sekolah inklusi. Untuk anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan beasiswa kurang mampu(BKM) dan bisa dimasukan ke Sekolah Rakyat. Untuk meningkatkan APS PAUD perlu meningkatkan fasilitasi Bunda PAUD dan Pokja PAUD
2	Perlu adanya upaya perbaikan data Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM), sehingga bantuan beasiswa tersebut bisa tepat sasaran dan terserap dengan baik. Data penerima bantuan sosial siswa kurang mampu juga harus terintegrasi dengan data kemiskinan daerah sehingga bisa memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.	DISDIKPORA	Pada tahun 2025 telah dilakukan pemadanan data siswa kurang mampu dengan data pensasaran prioritas penangulangan kemiskinan tahun 2025 oleh Dinas Sosial P3A dengan harapan penerima BKM tepat sasaran	Masih ada beberapa penerima yang ditetapkan namun tidak dapat mencairkan sampai batas waktunya.	Mengembalikan anggaran tersebut ke Kas daerah
3	Adanya beasiswa untuk perguruan tinggi / mahasiswa yang ada dalam APBD tahun 2024 belum terlaporkan dalam LKPJ Bupati tahun 2024, perlu ada penjelasan dan kedepan perlu adanya mekanisme yang jelas terkait dengan bea siswa yang diberikan untuk jenjang perguruan tinggi.	DISDIKPORA	Beasiswa untuk perguruan tinggi / mahasiswa yang ada dalam APBD tahun 2024 meliputi beasiswa pendidikan ke Universitas Pertamina dan STAN, hal ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Yayasan Pertamina dan STAN. Jumlah penerimanya 10 orang ke Universitas Pertamina dengan rincian 5 orang dari APBD dan 5 orang dari Yayasan Pertamina.	Untuk beasiswa ke STAN terdapat 1 orang mengundurkan diri karena pindah kuliah. Terdapat perubahan rekening dari belanja bantuan sosial ke belanja kontribusi pendidikan dan pelatihan.	Wali murid dari peserta beasiswa pendidikan STAN mengembalikan biaya pendidikan ke kas daerah. Dilakukan penyesuaian rekening belanja menjadi belanja kontribusi pendidikan dan pelatihan.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
			Sedangkan yang ke STAN sebanyak 15 orang. Mekanisme rekrutmen mahasiswa calon penerima beasiswa Pendidikan diawali dari Sosialisasi kepada SMA/SMK/MA di kabupaten Kebumen, Proses pendaftaran melalui laman perguruan tinggi, proses seleksi oleh panitia perguruan tinggi dan penetapan penerima beasiswa		
4	Pendidikan usia dini merupakan hal yang penting karena menjadi fundamental anak, Pendidikan PAUD bertujuan untuk menyiapkan anak secara holistik, mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik, untuk menghadapi pendidikan formal. Permasalahan ditahun 2024 adalah masih rendahnya partisipasi PAUD selain itu kegiatan dan anggaran Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, capaiannya juga hanya 94,44%. Kedepan DPRD merekomendasikan untuk melakukan optimalisasi seluruh kegiatan untuk peningkatan Pendidikan anak usia dini, termasuk Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD.	DISDIKPORA	Meningkatkan partisipasi sekolah Pendidikan anak usia dini melalui fasilitasi bunda PAUD Desa dan Bunda PAUD Kecamatan untuk melakukan sosialisasi pentingnya Pendidikan Anak usia dini dan menekankan ke depan jenjang PAUD bagian dari Wajib belajar 13 tahun. Terkait dengan Sarana Prasarana PAUD akan dilakukan pendataan kondisi sarpras PAUD mealui survei loctus dan dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi berdasarkan skala prioritas.	Angka Partisipasi Kasar PAUD masih rendah baru mencapai 46.76% sebagian masyarakat masih menganggap PAUD belum penting sehingga anak langsung bersekolah ke jenjang Sekolah Dasar. Sarana, prasarana, dan utilitas PAUD belum optimal.	Meningkatkan partisipasi sekolah pendidikan anak usia dini melalui fasilitasi bunda PAUD Desa dan Bunda PAUD Kecamatan untuk melakukan sosialisasi pentingnya Pendidikan Anak usia dini dan menekankan ke depan jenjang PAUD bagian dari Wajib belajar 13 tahun. Terkait dengan Sarana Prasarana PAUD akan dilakukan pendataan kondisi sarpras PAUD mealui survei loctus dan dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi berdasarkan skala prioritas.
5	Semua program, kegiatan dan sub kegiatan semuanya tercapai 100% termasuk BLUD, bahkan capaian program urusan kesehatan adalah 105,37%. DPRD tidak akan memberikan komentar terkait capaian tersebut, hanya meminta kedepan untuk bisa menyajikan capaian yang sebenarnya dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Capaian yang melebihi dari 100% juga tidak memberikan kontribusi dan dampak terhadap kondisi di masyarakat hal ini terlihat dari indikator angka kematian ibu ditahun 2023 sebanyak 92,96 meningkat ditahun 2024 menjadi 108,96 per 10.000 kelahiran hidup. Balita gizi kurang ditahun 2023 sebanyak 4,2% meningkat ditahun 2024 menjadi 4,8%, angka kesakitan yang beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan, kasus baru HIV ditahun 2023 sebanyak 141 meningkat ditahun 2024 sebanyak 151, angka kesakitan DBD, Malaria, tuberkulosis juga mengalami	DINKES PPKB	data yang disajikan di LKPJ Bupati adalah data cakupan SPM, untuk SPM HIV dan TBC berarti populasi yg beresiko menjadi TBC dan HIV dilakukan skrening targetnya adalah 100%. Sedangkan jumlah kasus adalah angka penemuan kasus TB dan HIV dari tahun ke tahun, untuk TBC dan HIV masih banyak kasus yang belum ditemukan sehingga untuk saat ini idealnya penemuan kasus TB dan HIV harus tinggi supaya semua kasus bisa ditemukan dan ditangani, dengan	Masih tingginya kasus HIV dan TBC salah satu faktor penyebabnya adalah jumlah kasus yang belum ditemukan dan diobati masih banyak, sehingga masih menjadi sumber penularan, sedangkan untuk kasus DBD disebabkan karena perilaku PSN yang masih belum teratur, dan kurangnya pengetahuna masyarakat tentang penyakit DBD dan upaya pencegahannya. peningkatan kasus balita gizi	Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk penuntasan TBC dan HIV adalah menemukan semua kasus TBC dan HIV yang belum ditemukan dengan skrening pada populasi beresiko. untuk DBD dengan melakukan edukasi secara terus menerus akan pentingnya PSN dalam rangka pencegahan DBD. kasus upaya penurunan balita gizi kurang salah satunya dengan menurunkan kasus BBLR, yaitu dengan kegiatan kelas ibu hamil dan Kelas Ibu Balita, pemberian

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
	kenaikan dari tahun 2023. Sayangnya data-data yang semestinya disajikan dalam LKPj Bupati tahun 2024 justru tidak disajikan, yang disajikan adalah capaian kinerja yang sudah melebihi 100% atau sangat baik tetapi dikondisi yang sebenarnya justru tidak baik-baik saja.		demikian potensi sumber penularan dan transimsi penyakit dapat diminimalisir Tindak lanjut penanganan balita gizi kurang yang naik dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita.	kurang karena peningkatan kasus BBLR, Pengetahuan orang tua terkait pola asuh yang kurang khususnya terkait PMBA (Pemberian makanan yang baik untuk bayi dan anak).	makanan tambahan bagi ibu hamil KEK dan balita wasting.
6	Terkait dengan jaminan kesehatan untuk masyarakat di tahun 2024 dianggarkan sebanyak Rp. 37.271.205.767 dengan realisasi mencapai 99%. DPRD merekomendasikan adanya kajian terkait dengan pembiayaan jaminan kesehatan. Kami berharap semua masyarakat khususnya masyarakat miskin bisa terlayani akses pelayanan kesehatan tetapi beban anggaran juga perlu diefisiensikan.	DINKES PPKB	Dilakukan kajian kebutuhan anggaran jaminan kesehatan untuk mempertahankan UHC prioritas dengan memperhitungkan trend kenaikan maupun penurunan segmen lainnya. Untuk masyarakat miskin, pengaktifan PBI APBD melalui PIC FKTP (puskesmas) maupun PIC RS. PIC melakukan skrining dan pengusulan aktivasi PBI APBD.	Adanya kenaikan maupun penurunan kepesertaan BPJS dari berbagai segmen, tidak hanya PBI APBD. Peraturan dari BPJS pengaktifan tidak bisa per kasus/ per personal yang membutuhkan, akan tetapi harus diaktifkan satu keluarga (1 KK)	Kajian kebutuhan anggaran untuk UHC dengan memperhitungkan tren kenaikan maupun penurunan segmen lainnya. Untuk pengaktifan dan usulan baru peserta dari masyarakat miskin diprioritaskan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan Kesehatan
7	Urusan Kesehatan dalam LKPJ hanya satu lembar dan tidak menggambarkan hasil kinerja yang utuh, kedepan untuk bisa diperbaikan penyusunan laporan kinerja kesehatan.	DINKES PPKB	Dilakukan perbaikan sesuai format yang disediakan	sesuai kebutuhan dalam format	Menambah keterangan tentang dasar rencana strategis dinas kesehatan
8	Indikator infrastruktur daerah Sebagian besar tidak tercapai seperti: Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik target 82,5%, realisasinya hanya 78,75%; Persentase drainase dalam kondisi baik target 18,01% realisasinya hanya 16,21%; Persentase jalan kewenangan kabupaten dalam Kondisi mantap, target 79,48% realisasinya hanya 73,48%. Padahal selama lima tahun kebelakang infrastruktur selalu menjadi arah kebijakan dan tema Pembangunan. Kedepan karena arah Pembangunan juga terkait dengan infrastruktur maka DPRD merekomendasikan untuk anggaran infrastruktur untuk bisa ditingkatkan khususnya jalan, karena dari jumlah Panjang jalan di Kabupaten kebumen sepanjang 1017,15 km yang dalam kondisi baik hanya 411,814 km.	DPUPR	1. Program Sumber Daya Air telah melakukan usulan Inpres nomor 2 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan serta Pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK 2025). 2. Program Drainase telah melakukan optimalisasi kegiatan operasi dan pemeliharan drainase untuk meningkatkan realisasi drainase dalam kondisi baik. 3. Pada anggaran murni tahun 2025 anggaran program jalan sebesar Rp. 51.466.169.000	1. Rasionalisasi kegiatan yang bersumber dari DAK, 2. Jaringan Drainase belum terhubung dengan saluran pembuang utama (Sungai). 2. Kemantapan jalan yang rendah dengan panjang total jalan kabupaten sepanjang 1.017,15 km, tentunya membutuhkan anggaran perbaikan yang sangat besar.	1. Program Sumber Daya Air Mengoptimalkan sumber dana yang tersedia sehingga meningkatkan produktifitas pertanian untuk mencapai swasembada pangan, 2. Program drainsae melakukan skala prioritas perbaikan jaringan primer sehingga bisa mengurangi areal genangan banjir, 3. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, perbaikan jalan harus memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan terus mengupayakan perbaikan-perbaikan di lapangan sehingga pekerjaan dapat sesuai dengan kuantitas dan kualitas sesuai

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
			dan pada perubahan tahun 2025 sebesar Rp. 148.498.861.000 serta adanya tambahan banprov sebesar Rp.20.000.000.000 sehingga anggaran keseluruhan pada tahun 2025 sebesar Rp.168.498.861.000 4. Pada tahun 2026 ini, anggaran penyelenggaraan jalan sudah meningkat menjadi 171 Milyar termasuk adanya banprov. Selain menggunakan anggaran APBD, DPUPR juga mengupayakan usulan perbaikan jalan melalui berbagai sumber dana, seperti Banprov dan Inpres Jalan Daerah.		spesifikasi, dan umur rencana pekerjaan dapat tercapai.
9	Permasalahan dan alasan yang disampaikan dalam dokumen LKPJ terkait permasalahan infrastruktur adalah masalah klasik atau berulang setiap tahunnya yaitu disebabkan karena odol (Over Dimension Over Load) dan bencana. DPRD meminta untuk lebih dikaji penyebab permasalahannya.	DPUPR	a. Saat ini Pemkab Kebumen telah mengusulkan draft Kelas Jalan bersama dengan Disperkimhub Kabupaten Kebumen kepada Gubernur Jawa Tengah. Nantinya SK Kelas Jalan Kabupate/Kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah akan diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah. b. Selain permasalahan ODOL dan bencana, ada bebeapa permasalahan lain yang menyebabkan kerusakan jalan. DPUPR terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan agar kualitas pekerjaan dan pemeliharaan jalan dapat lebih baik lagi dari segi kuantitas dan kualitas, dengan melakukan	1. Kondisi Jalan terbagi menjadi konsisi baik dan sedang (Mantap), rusak ringan, dan rusak berat (Tidak Mantap). Penurunan kondisi sedang menjadi rusak ringan mengakibatkan penurunan kemantapan jalan. Selain diperlukan perbaikan-perbaikan pada kondisi jalan yang tidak mantap, kondisi jalan yang sudah mantap (baik dan sedang) tentunya perlu dipertahankan, karena penurunan kondisi dari sedang ke rusak ringan sangat sulit diprediksi. ODOL (Over Dimension Over Load) dan bencana tidak dapat dipungkiri	1. Terkait dengan ODOL (Over Dimension Over Load) kendaraan yang melewati jalan kabupaten, saat ini Pemkab Kebumen melalui DPUPR sudah mengusulkan Kelas Jalan pada seluruh Jalan Kabupaten di Kebumen. Kelas Jalan terbagi dalam 3 (tiga) kelas, yaitu Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Dari 289 ruas jalan kabupaten, hanya 4 ruas jalan yang diusulkan menjadi kelas II, yaitu Selokerto - Buayan, Buayan - Jladri, Purwodeso - Petanahan, dan Petanahan - Pantai. Hal ini dikarenakan kondisi di lapangan yang memang sudah dilalui kendaraan berat dan belum tersambungnya JJLS dari Jladri

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
			evaluasi dan peningkatan kapasitas menyeluruh.	menjadi salah satu faktor kerusakan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan. Beberapa ruas jalan yang umum diketahui dilintasi kendaraan dengan tonase ekstrim yaitu Purwodeso - Petanahan - Pantai, Selokerto - Buayan - Jladri, dan Kambalan - Ambal. Selain ruas tersebut, juga banyak jalan-jalan yang menjadi jalur kendaraan pembawa pasir, genteng, maupun material lainnya. Pada Ruas Jalan Soka - Klirong sebeluum dilakukan perbaikan pada tahun 2024 terdapat kerusakan di lajur kanan/barat yang dikarenakan muatan berat dari arah selatan menuju ke utara. Meskipun begitu, ODOL dan bencana bukan faktor satu-satunya yang mengakibatkan kerusakan jalan. Ada beberapa faktor lainnya seperti kondisi lahan kanan kiri jalan itu sendiri, maupun kesalahan teknis pada saat dilakukan perbaikan. 2. Berdasarkan data tahun 2025, jalan kabupaten di Kebumen masih didominasi menggunakan perkerasan aspal dengan panjang 750,19 km (73,82%) dari total panjang jalan kabupaten 1.017,15 km.	sampai ke Ayah sehingga ruas-ruas tersebut menjadi penghubung utama 2 jalan nasional di Kebumen (Jalan Nasional 3 di tenggah dan JJLS di selatan). Sementara 285 ruas jalan kabupaten lainnya termasuk dalam Kelas III. Dengan adanya usulan ini, apabila nantinya SK Kelas Jalan (yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah) sudah ditetapkan, dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait seperti Disperkimhub. 2. Terkait dengan genangan yang menyebabkan kerusakan jalan, DPUPR terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat pentingnya menjaga saluran agar tidak tersumbat, maupun tidak menggunakan bahu jalan untuk hal-hal yang tidak seharusnya (ditanami pohon, mendirikan bangunan, dll). DPUPR melalui UPTD PBPJJ Wilayah Gombong, Karanganyar, Kebumen, maupun Kutowinangun terus berupaya memelihara badan jalan dengan melakukan pembabatan bahu jalan, pembersihan saluran, maupun sosialisasi melalui Musren dan media lainnya. Perencanaan paket pekerjaan perbaikan jalan juga saat ini tidak hanya fokus perbaikan jalannya, namun juga pembersihan bahu jalan maupun saluran agar dapat

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
				Perkerasan fleksibel/aspal rentan terjadi kerusakan dikarenakan adanya genangan air dalam waktu yang lama dan berulang. Kondisi jalan dengan perkerasan aspal di Kebumen juga belum semua dilengkapi dengan drainase jalan. Meskipun sudah dilengkapi drainase pun, banyak drainase jalan yang mampet maupun tidak mengalir sehingga dapat merusakan badan jalan. Tidak berfungsinya drainase yang sudah ada juga dapat diakibatkan beberapa faktor seperti terjadi sedimentasi, penumpukan sampah, dan tertutupnya saluran oleh bangunan maupun lainnya. 3. Selain faktor-faktor di atas, kerusakan jalan juga dapat terjadi apabila perbaikan jalan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi. Hal ini dapat menyebabkan umur rencana jalan tidak tercapai dan jalan akan cepat rusak kembali.	mencapai umur maksimal jalan yang diharapkan. 3. Selain faktor-faktor di atas, kerusakan jalan juga dapat terjadi apabila perbaikan jalan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi. Saat ini DPUPR terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian dan pengawasan pekerjaan yang sedang berjalan. Unsur-unsur yang terlibat di dalamnya saat ini telah berprogres dilakukan evaluasi dan pembekalan agar dapat lebih baik lagi. Pada Minggu Kedua bulan Januari 2026 ini sudah dilaksanakan evaluasi dan peningkatan kapasitas konsultan perencana dan pada hari selanjutnya dilakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas Tim Teknis Bidang Bina Marga DPUPR. Sebelumnya juga telah dilakukan evaluasi dan pemaparan pengusaha AMP terkait dengan pekerjaan aspal yang masih terdapat beberapa permasalahan. Di bulan Januari ini juga rencananya akan mengadakan evaluasi dan peningkatan kapasitas konsultan pengawas. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, diharapkan semua unsur yang terlibat dan pekerjaan

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
					pemeliharaan jalan dapat lebih baik lagi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pekerjaan.
10	Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Kebumen masih cukup banyak mencapai 22.460 unit, tetapi yang dilaksanakan perbaikan ditahun 2024 hanya 28 unit rumah, hal ini menyebabkan target yang ditetapkan tidak tercapai. DPRD merekomendasikan karena rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat kedepan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni untuk bisa ditingkatkan. selain itu komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga perlu diintensifkan dalam rangka meningkatkan penerimaan bantuan penyediaan rumah dan perbaikan rumah tidak layak huni untuk Kabupaten Kebumen. Selain itu juga diperlukan adanya peningkatan koordinasi antara Disperkimhub dengan pendamping RTLH, berdasarkan temuan dilapangan terdapat kurangnya koordinasi Disperkimhub dengan pendamping RTLH sehingga menyebabkan permasalahan dalam pengusulan bantuan RTLH.	DISPERKIMHUB	A. Melakukan Koordinasi dengan Kementrian Perumahan Kawasan Permukiman serta Pemerintah Provinsi guna tindak lanjut permohonan anggaran perbaikan RTLH bagi Pemkab Kebumen dengan anggaran APBN dan APBD Provinsi. B. Meningkatkan koordinasi dengan Pendamping RTLH dengan melaksanakan : 1. Melakukan Pembekalan bagi Pendamping RTLH setiap awal tahun anggaran guna persiapan pelaksanaan Kegiatan. 2. Rapat Koordinasi pada setiap hari Senin, dan Evaluasi mingguan pada hari Jum'at.	Target tahun 2024 dari 33 unit, realisasi 28 unit tidak tercapai disebabkan karena : 1. 1 orang MD 2. 1 orang mengungundurkan diri (tidak mampu swadaya) 3. 1 orang tertangani dana desa 4. 2 orang tertangani APBD Prov. Tahun 2025 dari: 1. APBD Kabupaten: 20 unit 2. APBD Provinsi Jateng: 347 unit 3. BSPS Pemerintah Pusat : 190 unit 4. CSR dan Baznas : 118 unit Total 675 unit	Mengoptimalkan koordinasi kepada Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Pendamping RTLH, dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan RTLH dengan time scedule
11	Dalam rangka penanggulangan kemiskinan hal fundamental yang harus dilakukan adalah perbaikan data kemiskinan, karena DPRD mencermati data kemiskinan yang ada masih menjadi permasalahan baik dalam hal update datanya maupun akuntablitas datanya. DPRD merekomendasikan untuk perbaikan data kemiskinan dan menyusun Perbup satu data kemiskinan sebagai dasar pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah.	DINSOS P3A	Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, daerah agar mengoptimalkan penggunaan DTSEN sebagai data tunggal pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Sehingga dalam penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kebumen mengacu pada DTSEN	DTSEN tidak dapat diunduh BNBA oleh Daerah	Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dapat dilakukan dengan permohonan BNBA DTSEN kepada Kemensos. Permohonan dapat dilakukan untuk keperluan penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan program kesejahteraan sosial lainnya
12	Kondisi gedung Dinas Sosial P3A yang mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan pegawai dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan pada dinas tersebut. DPRD merekomendasikan untuk ditinjau dan dilaksanakan rehab sehingga tidak membahayakan dan tidak menghambat pelayanan.	DINSOS P3A	Penganggaran rehabilitasi total gedung Dinsos P3A melalui DPUPR pada tahun anggaran 2026	Gedung sementara untuk pelayanan pada saat rehabilitasi gedung	Menggunakan fasilitas (gedung) yang berada di PLUT (Disperindag KUMKM)

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditarget 74 realisasinya 70 dalam LKPJ dijelaskan permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya pelaku usaha dan masyarakat yang menghasilkan limbah dan dibuang ke badan air tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan indeks kualitas air rendah. DPRD merekomendasikan untuk melakukan sosialisasi dan tindakan terhadap pencemaran lingkungan baik air maupun persampahan.	DLHKP	Melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengolahan limbah cair dan pengelolaan persampahan kepada masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan di kab kebumen, melakukan pembinaan terkait pencegahan pencemaran lingkungan serta melakukan pengawasan langsung/tidak langsung terhadap pelaku usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan untuk memastikan pelaku usaha/kegiatan telah menaati seluruh pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dituangkan pada dokumen lingkungan	Adanya peningkatan pelaku UMKM dan Pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi volume limbah cair dan sampah semakin meningkat namun kesadaran terkait pengolahan limbah dan pengelolaan sampah yang masih minim sehingga menyebabkan penurunan kualitas badan air permukaan	1. Adanya demplot atau percontohan instalasi pengolahan air limbah, terutama air limbah pada kegiatan industri kecil yang merupakan “model” pengolahan sederhana, yang bisa cukup efektif mengurangi beban pencemaran. 2. Upaya penegakan hukum maupun pengawasan terhadap jenis usaha atau kegiatan, untuk selalu melaksanakan penetapan terhadap baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan, yang merupakan syarat bisa dikeluarkannya perijinan lingkungan. 3. Memperbanyak Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik Terpusat. 4. Pemasangan papan informasi atau larangan untuk membuang sampah pada tempat-tempat tertentu. 5. Data Capaian IKLH Tahun 2025: Capaian IKLH sebesar 75,31, yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 75,53, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 81,49 dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 63,50.
14	Persentase prestasi Olahraga target 63,33% realisasinya hanya 52,94%. Kedepan perlu adanya peningkatan peran Disdikpora dalam pembinaan atlet. karena banyak keluhan dari cabor terkait peran serta dalam melakukan pembinaan.	DISDIKPORA	Mengoptimalkan peran Cabor dalam pembinaan dan mendorong peningkatan keikutsertaan atlet baik dalam pertandingan berjenjang atau event turnamen terbuka. Tanggung	Pembinaan atlit cabor belum terstruktur berdasarkan prioritas dan belum disusunnya desain besar olahraga besar DBOD. Pada tahun 2024 terjadi	Peningkatan prestasi dengan melibatkan lembaga olahraga prestasi secara terstruktur dan terencana dengan kerangka Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD).

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
			jawab bersama pembinaan sesuai tupoksi pembinaan yaitu : Olahraga prestasi ada di KONI, Olahraga pelajar DISDIKPORA, Olahraga disabilitas di NPC	kesalahan dalam penghitungan karena belum memasukkan hasil prestasi dari Event turnamen terbuka hal ini menjadikan hasil perhitungan dibawah target. Indeks Prestasi Olahraga tahun 2024 yang tertulis 52.94% perhitungan yang benar adalah 62,5 %	Pelaporan dari masing-masing Cabor agar melapor secara berjenjang dengan induk organisasi.
15	Sarana prasarana olah raga yang memadai tentunya akan berpengaruh terhadap prestasi olahraga. DPRD mencermati banyak sarana prasarana olah raga yang mengalami kerusakan salah satunya adalah stadion Candradimuka, DPRD merekomendasikan untuk segera dilakukan perbaikan.	DISDIKPORA	Inventarisasi kerusakan di GOR maupun Stadion lebih dini sehingga kerusakan segera di tangani. Menyusun master plan pengembangan stadion menjadi sport centre	Kondisi stadion candradimuka belum menggunakan standar Nasional sarpras Olahraga.	Untuk stadion dilakukan Pemeliharaan secara bertahap dengan pengantian rumput stadion dan pemeliharaan running track serta menjadikan stadion sebagai area tertutup. Untuk pemeliharaan ke depan telah dibuat master plan pemeliharaan stadion dengan nilai Rp. 164.000.000.000 dengan menambah luas ke arah timur dan barat yang akan dibangun Venue GOR, lapangan voli, lapangan voli pantai, lapangan tenis, dengan dilengkapi roadrace dan food court. Sedangkan untuk fasilitas GOR dievaluasi terkait beberapa fasilitas yg belum optimal dan yang TDK berfungsi untuk ditingkatkan pemanfaatannya.
16	Capaian indikator kontribusi pendapatan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,83% di bawah target yang ditetapkan sebesar 2,03%. DPRD merekomendasikan untuk bisa meningkatkan pendapatan sektor pariwisata karena investasi anggaran yang sudah dialokasikan untuk urusan pariwisata sudah sangat banyak selama ini, selain itu pengelolaan pariwisata yang dipihak ketigakan juga perlu dikaji dan dievaluasi kembali.	DISPARBUD	Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan destinasi pariwisata, termasuk pola kerja sama dengan pihak ketiga, serta menyusun strategi optimalisasi pendapatan pariwisata berbasis potensi riil. Selain itu, melakukan	1. Pemanfaatan aset dan destinasi wisata yang berorientasi pada peningkatan PAD masih terbatas, baik dari sisi pengelolaan maupun skema kerja sama. 2. Sebagian kegiatan pariwisata masih bersifat non-profit dan lebih	1. Menciptakan atraksi wisata baru atau memperbaiki yang sudah ada agar lebih menari. 2. Diversifikasi Sumber Pendapatan (mengembangkan paket wisata premium atau layanan khusus seperti eco-tourism, wisata budaya, dan wisata petualangan)

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
			penguatan koordinasi lintas perangkat daerah,BUMD dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	berorientasi pada pelayanan publik. 3. Keterbatasan infrastruktur pendukung dan fasilitas destinasi 4. Promosi pariwisata belum optimal	3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas di destinasi wisata 4. Peningkatan promosi dan branding destinasi wisata(digital marketing, media sosial, dan influencer pariwisata, mengadakan event skala nasional/internasional di obyek wisata)
17	DPRD merekomendasikan untuk dilakukan optimalisasi kelitbangan (penelitian dan pengembangan), untuk menghasilkan konsep, model, dan kebijakan yang tepat untuk mengarahkan pembangunan daerah.	BAPPERIDA	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait optimalisasi kegiatan riset dan inovasi, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Bapperida telah memperkuat pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain perguruan tinggi dan kelompok masyarakat. Kolaborasi ini diarahkan untuk menghasilkan konsep, model, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan daerah, sebagai landasan dalam mengarahkan pembangunan daerah secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.	Optimalisasi riset dan inovasi melalui integrasi hasil riset dan inovasi dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah, peningkatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi perangkat daerah guna memperkuat sinergitas antar pemangku kepentingan.	Sebagai solusi atas permasalahan dalam optimalisasi riset dan inovasi, yang telah dilakukan untuk memperkuat proses perencanaan pembangunan daerah, melakukan koordinasi dengan perangkat daerah guna meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, serta memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan kelompok masyarakat. Selain itu, dilakukan penajaman tema penelitian, penguatan sistem data, serta pengembangan mekanisme pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.
18	DPRD merekomendasikan dalam penataan dan penempatan SDM birokrasi (ASN) untuk memperhatikan keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimilikinya (kompetensi) untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional efektif dan produktif.	BKPSDM	Pelaksanaan tindak lanjut dilakukan melalui asesmen kompetensi ASN secara bertahap sebagai dasar pemetaan potensi dan kinerja pegawai dalam kerangka manajemen talenta. Dalam hal ini, BKPSDM telah melaksanakan asesmen kompetensi pada tahun 2025 pada sebagian ASN, baik JPT, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Pelaksana untuk mengetahui kompetensi masing-masing ASN	Penataan dan penempatan SDM birokrasi (ASN) agar memperhatikan kesesuaian kompetensi pegawai dengan kebutuhan jabatan dilakukan melalui penguatan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang	Penguatan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN melalui implementasi manajemen talenta sebagai dasar penataan, pengembangan karier, dan penempatan pegawai secara objektif dan berbasis kompetensi.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
			sebagai langkah awal implementasi manajemen talenta. Selanjutnya, pada tahun 2026 hasil asesmen tersebut digunakan untuk menyusun profil dan database talenta ASN, yang dimanfaatkan dalam mendukung penataan pegawai, pengembangan karier, serta sebagai bahan pertimbangan dalam proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan secara lebih objektif, transparan, dan berbasis kompetensi.	Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Implementasi sistem merit tersebut dilaksanakan antara lain melalui pengembangan manajemen talenta, sehingga proses pengisian dan penempatan jabatan dapat dilakukan secara lebih objektif, transparan, dan berbasis pada kualifikasi, kompetensi, serta kinerja pegawai.	
19	DPRD menerima keluhan Masyarakat terkait dengan kurang responnya SDM perhubungan dalam merespon keluhan Masyarakat khususnya terkait dengan kerusakan LPJU, DPRD meminta kepada Dinas Perkimhub untuk bisa merespon keluhan Masyarakat dengan baik dan segera melakukan tindakan perbaikan apabila ada kerusakan.	DISPERKIMHUB	Jumlah aduan: 1.440 titik Jumlah aduan tertangani: 1.262 titik Penyebab penanganan tidak optimal: Terbatasnya SDM dan sarana penanganan aduan gangguan LPJU dengan identifikasi penyebab sebagai berikut: 1. Jumlah SDM Teknisi LPJU terbatas untuk mengatasi gangguan LPJU dalam wilayah Kabuaten Kebumen dengan intensitas setiap hari. Teknisi existing berjumlah 10 orang dibagi menjadi 2 tim (@5 orang) dengan 1 orang pada tiap tim sebagai admin aduan dan pelaporan. 2. Sarana : unit kendaraan sering mengalami kendala teknis. Unit kendaraan aduan gangguan LPJU existing terdapat 2(dua) kendaraan dimana masa pakai >10 tahun. Fakta diterima unit kendaraan seringkali mengalami masalah pada saluran hidrolik sehingga butuh waktu perbaikan, pelayanan aduan gangguan tertunda.	Terbatasnya jumlah SDM dan sarana pendukung	Penjadwalan penanganan/perbaikan kerusakan LPJU

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
			SOP Penanganan : penanganan aduan gangguan LPJU telah sesuai dengan SOP, mulai dari penerimaan aduan, input daftar perbaikan, identifikasi berdasarkan lokasi, penerbitan surat perintah perbaikan, pelaksanaan perbaikan hingga pelaporan. Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat, khususnya terkait kerusakan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Ke depan, akan dilakukan optimalisasi manajemen pengaduan, peningkatan koordinasi internal, serta penyesuaian ketersediaan SDM dan sarana pendukung agar respon penanganan kerusakan LPJU dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran sesuai kemampuan anggaran dan kewenangan daerah.		
20	DPRD merekomendasikan untuk dilakukan penataan parkir dan pemanfaatan lahan parkir, khususnya di Morosoeta. Apabila DISPERKIMHUB tidak bisa menertibkan maka harus ada tindakan bekerjasama dengan perangkat daerah lain sehingga parkir maupun lahan yang dikelola bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Selain itu wilayah parkir tepi jalan yang bukan kewenangan daerah (jalan nasional maupun jalan provinsi) untuk bisa dimanfaatkan dan segera melakukan koordinasi perijinan dengan pemerintah pusat maupun provinsi.	DISPERKIMHUB	1. Telah dilaksanakan Kerjasama dengan pihak ke-2 / juru parkir untuk melakukan penataan dan pengendalian parkir. 2. Telah dilaksanakan pembinaan kepada para juru parkir oleh Dinas	Peningkatan ketertiban lalu lintas dan perparkiran di lokasi lokasi strategis	Meningkatkan kerjasama penertiban bersama Satpol PP dan Satlantas Polres.
21	Melakukan penataan parkir dan pedagang kaki lima diseputaran kota kebumen sehingga tidak mengganggu lalu lintas atau pemakai jalan yang lainnya.	DISPERKIMHUB	Dishub telah melakukan koordinasi dengan Disperindag KUKM dan Satpol PP dalam rangka penataan dan penertiban pedagang kaki lima.	Untuk menertibkan supaya parkir tidak berada di badan jalan, serta aktivitas PKL agar sesuai dengan tempat yang	Meningkatkan koordinasi dan pengawasan secara intens dengan perangkat daerah terkait.

NO	REKOMENDASI DPRD	OPD PENANGGUNG JAWAB	TINDAK LANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN	SOLUSI
			Adapun untuk penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan merupakan kewenangan Dinas Perkimhub. Peran Dinas Perkimhub terbatas pada aspek pengaturan lalu lintas dan manajemen parkir guna menjaga kelancaran, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas.	telah ditentukan oleh Disperindag KUKM.	
22	Dinas PMD untuk bisa melakukan fasilitasi permohonan bantuan keuangan untuk desa yang akan diusulkan ke Provinsi Jawa Tengah, karena proses pengajuan memerlukan persetujuan Dinas PMD. Pelayanan proses persetujuan untuk lebih cepat dan tidak berbelit-belit.	Dinas PMD	Dinas PMD kabupaten melaksanakan fasilitasi penyaluran dana bantuan sesuai dengan SK Gubernur tentang penerima bantuan keuangan serta proses penyaluran melalui aplikasi SIBAD milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bukan dalam proses pengajuan proposal. Pengajuan proposal dilaksanakan oleh desa.	Lokasi yang ada pada SK Gubernur terkait bantuan sarana dan prasarana perdesaan tidak sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan	Sesuai penjelasan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 bahwa Usulan bantuan keuangan sarana dan prasarana diinput melalui aplikasi perencanaan yaitu sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (Sistem Informasi Perencaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah) dengan melampirkan proposal. Tata cara pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa dapat diberikan berdasarkan usulan/permintaan desa (buttom-up) dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah (top down).
23	Bagian pengadaan barang dan jasa dalam LKPJ capaiannya sudah 100% tetapi jika melihat skor indeks tatakelola pengadaan masih diangka 84,35. Pemanfaatan system pengadaan juga masih perlu ditingkatkan.	Sekretariat (Bagian PBJ)	Menambah jumlah personil JF PBJ sesuai dengan rekomendasi KEMENPAN RB Jumlah Ideal 31, saat 2024 sejumlah 19, untuk tahun 2025 ada penambahan sebanyak 5 orang sehingga jumlahnya menjadi 24 orang, kondisi saat ini total 23 orang karena 1 orang pegawai diangkat struktural.	Jumlah personil JF PBJ belum sesuai atau kurang dari rekomendasi KEMENPAN RB	Mengajukan penambahan personil JF PBJ dari CPNS baru atau membuka dari alih jabatan lain.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tugas Pembantuan dilaksanakan agar daerah dapat ikut serta membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangannya di daerah. Tugas Pembantuan dilakukan antara lain ketika terdapat kewenangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya berada atau berlokasi di daerah. Adapun capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan urusan pemerintahan sebagai berikut :

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya

Tabel IV.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintah dibawahnya

NO	PROGRAM. KEGIATAN. DAN RINCIAN KEGIATAN	DESA	SKPD PEMBERI TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KETERANGAN
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepala Pemerintahan Desa	449 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	13.722.270.550	13.722.270.550	100,0099,58	100	100	DINAS PMD
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	449 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	3.237.573.450	2.884.245.000	89,0999,55	100	100	DINAS PMD
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD)	449 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	189.213.559.000	184.166.428.000	97,3399,98	100	100	DINAS PMD
4	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten Kepada Desa (Dana Desa)	449 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	434.223.572.000	429.531.612.612	98,9299,62	100	100	DINAS PMD
5	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa	163 Desa	BPKPD SELAKU PPKD	37.266.000.000	24.726.000.000	66,3593,95	93.95	93,95	DINAS PMD

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. 2025

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat atasnya

Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak menerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.

Tabel IV.2 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2025

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGITAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. 2025

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya pada Tahun 2025 secara umum dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan tidak mengalami permasalahan maupun kendala yang signifikan, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sementara itu, untuk Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya, pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak menerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, tidak terdapat pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan yang berkaitan dengan Tugas Pembantuan yang bersumber dari pemerintah tingkat atas pada tahun tersebut.

BAB V
PENUTUP

Dalam bagian penutup ini memuat ringkasan dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024. LKPJ Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026 sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah.
2. Pada kondisi sosial demografi tahun 2025, Kabupaten Kebumen memiliki jumlah penduduk sebesar 1.453.417 jiwa dengan kepadatan penduduk 1,134.49 jiwa/km². Sex ratio sebesar 102,87, terdiri atas 736.988 jiwa laki-laki dan 716.429 jiwa perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.45%. Struktur penduduk masih didominasi usia produktif sebesar 68,10%, sehingga bonus demografi masih menjadi potensi strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
3. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan dengan persentase realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 102,17%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 102,03%, pendapatan transfer sebesar 102,20.
4. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja, dengan persentase realisasi belanja daerah mencapai 95,10%, dengan rincian belanja operasi 95,11%, belanja modal 94,92%, belanja tidak terduga sebesar 8,77% dan Belanja Transfer sebesar 96,65%.
5. Sedangkan Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan dengan rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 99,94%, Pengeluaran Pembiayaan Daerah 99% dan Pembiayaan Neto sebesar 100%.
6. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
   a) Pelayanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

1) Urusan Pendidikan, rata-rata capaian program 101,22% dan rata-rata kegiatan 101,70%.
2) Kesehatan, rata-rata program 103,12% dan rata-rata kegiatan 108,72%.
3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, rata-rata program 97,57% dan rata-rata kegiatan 106,94%.
4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, rata-rata program 93,76% dan rata-rata kegiatan 100%.
5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, rata-rata program 100% dan rata-rata kegiatan 100%.
6) Urusan Sosial, rata-rata program 109,24% dan rata-rata kegiatan 99,96%.

b) Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:
1) Urusan Tenaga Kerja, rata-rata program 126,91% dan kegiatan 122,73%.
2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, rata-rata program 141,42% dan kegiatan 100%.
3) Urusan Pangan, rata-rata program 99,76% dan kegiatan 102,51%.
4) Urusan Pertanahan, rata-rata program 100% dan kegiatan 100%.
5) Urusan Lingkungan Hidup, rata-rata program 103,23% dan kegiatan 105,29%.
6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, rata-rata program 100% dan kegiatan 100%.
7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, rata-rata program 104% dan kegiatan 100%.
8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, rata-rata program 124,82% dan kegiatan 100%.
9) Urusan Perhubungan, rata-rata program 98,12% dan kegiatan 100,91%.
10) Urusan Komunikasi dan Informatika, rata-rata program 117,93% dan kegiatan 104,54%.
11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, rata-rata program 133,80% dan kegiatan 100%.
12) Urusan Penanaman Modal, rata-rata program 115,02% dan kegiatan 96,30%.
13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga, rata-rata program 347,77% dan kegiatan 111,63%.
14) Urusan Statistik, rata-rata program 100% dan kegiatan 100%.
15) Urusan Persandian, rata-rata program 100% dan kegiatan 100%.
16) Urusan Kebudayaan, rata-rata program 176,83% dan kegiatan 138,48%.
17) Urusan Perpustakaan, rata-rata program 117,05% dan kegiatan 127,05%.

18) Urusan Kearsipan, rata-rata program 104,88% dan kegiatan 156,76%.

c) Urusan Pilihan:
   1) Urusan Kelautan dan Perikanan, rata-rata program 129,72% dan kegiatan 112,88%.
   2) Urusan Pariwisata, rata-rata program 97,96% dan kegiatan 111,42%.
   3) Urusan Pertanian, rata-rata program 71,08% dan kegiatan 93,62%.
   4) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, rata-rata program 100% dan kegiatan 100%.
   5) Urusan Perdagangan, rata-rata program 453,56% dan kegiatan 124,40%.
   6) Urusan Perindustrian, rata-rata program 120,48% dan kegiatan 100%.
   7) Urusan Transmigrasi, rata-rata capaian program 50% dan kegiatan 50%.

d) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang:
   1) Fungsi Penunjang Perencanaan, rata-rata program 103,92% dan kegiatan 112,78%.
   2) Fungsi Penunjang Kepegawaian, rata-rata program 94,40% dan kegiatan 102,52%.
   3) Fungsi Penunjang Keuangan, rata-rata program 100,34% dan kegiatan 103,85%.
   4) Fungsi Penunjang Pengawasan, rata-rata program 91,72% dan kegiatan 101,16%.

e) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan:
   1) Unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD, rata-rata program 100% dan kegiatan 99,50%.
   2) Unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah, rata-rata program 105,42% dan kegiatan 106,18%.

f) Unsur Pemerintahan Umum:
   1) Unsur pendukung urusan unsur pemerintahan umum Kesatuan Bangsa dan Politik, rata-rata program 269,53% dan kegiatan 100%.

7. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan. Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan yang tercapai atau melampaui target sebanyak 6 indikator, yaitu:
   a) Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia) 102,89%.
   b) Indeks Reformasi Birokrasi 101,95%.
   c) Indeks Pembangunan Manusia 100,95%.
   d) Pertumbuhan Ekonomi 106%.
   e) Indeks Kesalehan Sosial 100,78%.
   f) Indeks Kondusifitas Wilayah 100%.

Sedangkan terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan yang belum mencapai target 100% yaitu Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 94,59%.

8. Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran. Dari 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran yang tercapai atau melampaui target sebanyak 14 indikator, yaitu:
   a) Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 100,88%.
   b) Opini BPK dengan capaian 100%.
   c) Angka Harapan Hidup dengan capaian 100,45%.
   d) Cakupan Perlindungan Anak dengan capaian 100%.
   e) PDRB ADHK Sektor Sekunder dengan capaian 107,15%.
   f) Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK 519,43%.
   g) Tingkat Kemiskinan dengan capaian 102,30%.
   h) Tingkat Pengangguran Terbuka 100,60%.
   i) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian 101,28%.
   j) Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi dengan capaian 100%.
   k) Persentase Penegakan Perda dengan capaian 100%.
   l) Persentase Desa Tangguh Bencana dengan capaian 100%.
   m) Rata-rata Lama Sekolah dengan capaian 100%.
   n) Indeks SPBE dengan capaian 100%.

   Sedangkan terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran yang belum mencapai target 100% yaitu :
   a) Nilai SAKIP dengan capaian 93,14%.
   b) Harapan Lama Sekolah dengan capaian 96,83%.
   c) Indeks Pembangunan Gender dengan capaian 99,85%.
   d) PDRB ADHK Sektor Primer 87,32%.
   e) PDRB ADHK Sektor Tersier 90,51%.
   f) Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah dengan capaian 92,26%.
   g) Persentase Budaya yang Dilestarikan 71,98%

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi bersama dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan ridha-Nya kepada kita semua dalam memajukan Kabupaten Kebumen.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2025